



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR PENGAJIAN ISLAM

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

NAMA : MARLINDA IRWANTI

NIM : 06.3.00.1.07.01.0025

JUDUL DISERTASI : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR MASA 2004-2009

Telah dipertahankan dalam Sidang Terbuka / Ujian Promosi Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi pada hari Senin, 14 Maret 2011 dan dinyatakan LULUS.

PENGUJI DISERTASI:

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
(Ketua Sidang / Promotor)

(.....)

Prof. Dr. Ibnu Ahmad, M.Si
(Promotor)

(.....)

Prof. Dr. Komarudin Hidayat, MA
(Penguji)

(.....)

Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA
(Penguji)

(.....)

Prof. Dr. Bahtiar Effendy
(Penguji)

(.....)
M. (Prof. Dr. Ali Murtadhi, MA)

BAB I PENDAHULUAN

A. Negara Mayoritas Muslim, Demokratisasi dan Komunikasi Politik

Proses demokratisasi yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki beragam pengalaman. Beberapa negara mengalami proses demokratisasi dengan susah payah dan berhadapan dengan rezim militer, misalnya saja di Aljazair. Kemenangan Partai FIS atau Front Penyelamatan Islam pada pemilu tahun 1988 silam secara sepihak dianulir oleh rezim militer. Salah satu alasan pembubarhan dari rezim militer terkait penghapusan kemenangan FIS tersebut adalah FIS dianggap sebagai partai yang menyalurkan aspirasi gerakan fundamentalisme dan berideologi gerakan neofundamentalisme. Gerakan fundamentalisme dan neofundamentalisme diidentifikasi berakar dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir dan aliran Wahabi dari Saudi Arabia.¹ Akibatnya, Aljazair kembali pada penguasa militer dan kemudian FIS menjadi semacam gerakan bawah tanah.

Secara teoretis, kemenangan FIS di Aljazair sesungguhnya tidak terlepas dari upaya strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai tersebut secara massif. Strategi komunikasi politik tersebut, tidak hanya menguasai masyarakat menengah ke bawah dengan melakukan pendekatan pelayanan sosial dan penguatan isu solidaritas umat Islam internasional, yang memang sedang dilanda konflik pada waktu itu.² Kedua strategi ternyata mengena dan sukses sebagai amunisi komunikasi politik. Terlebih, beberapa aspek-aspek sosial seperti pengobatan gratis, konsultasi belajar, bantuan bagi masyarakat miskin, selama itu tidak pernah digubris dan disentuh oleh pemerintah berkuasa Aljazair.

Hal yang mirip juga terjadi di Pakistan. Di negara mayoritas muslim tersebut, jalan menuju demokrasi selalu dibarengi dengan pertumpahan darah. Hal itu ternyata tidak terlepas dari campur tangan rezim militer yang sering mengintervensi proses pemilu. Setidaknya ada lima pemilu Pakistan yang dianulir oleh rezim militer dari tahun 1988-1999.³ Tak pelak, proses demokratisasi di Pakistan menjadi sesuatu yang sulit diterapkan. Di satu sisi kelompok rezim militer selalu menginginkan tetap berpengaruh pada proses politik

¹ Meriem Verges, "The Struggle over Popular Culture," dalam Joel Beinin and Joe Stork, (eds), *Political Islam: essays from Middle East Report* (New York: IB Tauris, 1997), 298.

² Meriem Verges, "The Struggle over Popular Culture", dalam Joel Beinin and Joe Stork, (eds), *Political Islam: essays from Middle East Report*, 297.

³ Maya Chadda, *Building Democracy in South Asia: India, Nepal, Pakistan* (London: Lynne, 2000), 67.

dalam negeri Pakistan. Disisi lain, kekuatan militer Pakistan selalu mendapat dukungan luar negeri. Dukungan luar negeri ini sesungguhnya tidak lebih dari imbalan jasa luar negeri terhadap Pakistan telah menjadi bumper penyebaran Al-Qaida dari Afghanistan.⁴ Bahkan tanpa kematian Benazir Bhutto, partai politik yang menjadi oposisi rezim militer seolah mustahil dapat meningkatkan dukungan politik dan suara dari rakyat Pakistan. Perhatian internasional terkait kematian Bhutto, dalam insiden bom bunuh diri tersebut, nampaknya juga berperan penting terhadap meningkatnya dukungan dan suara partai oposisi dalam pemilu di Pakistan saat itu.

Hal senada juga terjadi di negeri jiran Indonesia, Malaysia. Di negeri mayoritas Muslim ini, partai Islam juga mulai menggeliat dengan lahirnya PAS atau Partai Islam se- Malaysia. Kemunculan PAS, seolah menjadi tonggak kelahiran partai oposisi di Malaysia. Partai yang berdiri pada tahun 1955 ini kemudian menjadi penggerak kelompok oposisi (Barisan Alternatif). Sebagai Barisan Alternatif, kelompok ini menjadi tandingan kuat bagi Barisan Nasional yang digerakan oleh UMNO, sebuah partai yang selalu memenangi pemilu di Malaysia.⁵ Di kemudian hari, PAS yang selalu menyuarakan ide tentang negara Islam, menjadi rujukan bagi penerapan syariat Islam di Aceh.⁶ Malaysia dan Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, memiliki tradisi demokrasi yang mirip. Yaitu sama-sama di dominasi oleh sebuah partai politik yang berkuasa dan memenangi pemilu dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain, kekuatan militer tidak ikut campur dalam kehidupan politik.⁷

Kehidupan demokrasi di beberapa negara muslim pada umumnya menghadapi hambatan. Hambatan utama datang dari rezim militer, sehingga negara muslim sempat dianggap kesulitan menerapkan demokrasi karena nilai-nilai islam ini tidak sesuai dengan nilai demokrasi.⁸ Meskipun hal itu kemudian dibuktikan oleh Indonesia bahwa anggapan itu adalah salah, negara mayoritas muslim dapat melaksanakan kehidupan bernegara yang demokratis.⁹

⁴ Pemerintah AS begitu mendukung posisi presiden Musharraf yang juga mengkampanyekan anti terorisme sehingga pada saat pemilu diperkirakan menang, tetapi pada saat itu juga terjadi insiden pembunuhan Benazir Bhutto yang menjadikan partai yang mengusung Benazir Bhutto sebagai calon presiden memenangkan pemilu.

⁵ Syed Ahmad Hussein, "Moslem Politics and the Discourse on Democracy," dalam Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik, *Democracy in Malaysia: Discourse and Practices* (Cornwall: Curzon, 2002), 74.

⁶ Tentang penerapan syariat Islam di Aceh lihat Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Indonesia* (Hawai: University of Hawai Press), 94-99.

⁷ Liew Chin Tong, "PAS Politics: Defining an Islamic State", dalam Edmund Terence Gomez, *Politics in Malaysia: The Malay Dimension* (Oxon: Routledge, 2007), 107-138.

⁸ Tesis ini dimunculkan oleh Samuel P. Huntington, *Third Wave Democratization: Democratization in the Late 20th Century* (London: University of Oklahoma Press, 1991), 5.

⁹ Saiful Muzani, *Religious Democrats: Democratic Culture And Muslim Political*

Dengan melihat perbandingan pengalaman dengan negara-negara lain tersebut, nampak bahwa Indonesia merupakan negara yang sejauh ini berhasil menjalankan proses demokratisasi dengan kekhasan komunikasi politiknya. Pada era reformasi ini, komunikasi politik di Indonesia mengalami keterbukaan yang berbeda dengan keadaan pada masa sebelumnya. Di masa lalu, negara membatasi kebebasan dalam berpendapat dan berserikat. Dan pada masa 12 tahun ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi melalui pelbagai saluran, tidak hanya melalui media massa tetapi juga demonstrasi di jalanan. Di sisi lain, kebebasan berserikat juga menjamin siapa saja bebas untuk berorganisasi dan berkumpul dengan pelbagai azas yang ada. Tak pelak, pada masa 12 tahun reformasi ini, begitu banyak organisasi massa yang didirikan berdasarkan basis kesukuan ataupun basis keagamaan.¹⁰ Dua kebebasan yang menjadi hak dasar tersebut menjadikan Indonesia memasuki era yang kebebasan informasi yang menciptakan iklim komunikasi politik yang lebih terbuka, dua arah dan tidak lagi yang terkekang seperti masa sebelumnya. Sehingga menciptakan masyarakat madani yang lebih mandiri dan tidak terkooptasi.

Terbukanya belenggu politik ke ranah kebebasan berpendapat dan berserikat, sebagai bagian penting hak politik, hak sipil dan penguatan institusi demokrasi di Indonesia, juga membawa dampak lahirnya pelbagai partai politik di Indonesia. Bak cendawan di musim hujan, kebebasan berpendapat dan berserikat tersebut disambut dengan terbentuknya ratusan partai politik dengan pelbagai azas. Para partai politik yang lahir, kini tidak lagi dibelenggu oleh azas tunggal Pancasila. Tak pelak, puluhan partai menjadi peserta pemilu dan bersaing merebut hati rakyat. Tercatat terdapat 48 partai pada Pemilu 1999, 24 partai pada Pemilu 2004 dan 34 partai pada Pemilu 2009.¹¹ Banyaknya peserta pemilu ini tentu saja mengubah konstelasi perpolitikan Indonesia. Kini masyarakat tidak lagi hanya pada tiga pilihan wajib partai, sebagaimana pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru, tetapi disodori pada banyaknya pilihan partai.

Kondisi yang berubah tersebut, tentu menjadi tantangan bagi peserta pemilu lama dalam meraih dukungan rakyat. Bahkan bagi dari partai politik peserta pemilu lama ini, semuanya menyempal dan membentuk partai-partai baru. Golkar misalnya, yang kemudian menjadi Partai Golkar, melahirkan sempalan bernama Partai Keadilan Persatuan. Demikian juga dengan Partai Persatuan Pembangunan, muncul partai sempalan bernama PPP Reformasi dan kemudian berubah lagi menjadi Partai Bintang Reformasi. Dan

Participation In Post-Suharto Indonesia, Disertasi Doktoral di Ohio State University, 2003.

¹⁰ Salah satu dari organisasi massa yang berdasarkan basis keagamaan adalah FPI, tentang FPI bisa dilihat dalam buku Alzastrow Ng, Gerakan Islam Simbolik: FPI Studi tentang Gerakan Radikal di Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2006), 44- 104.

¹¹ www.kpu.go.id

terakhir adalah Partai Demokrasi Indonesia yang eksistensinya kemudian tenggelam oleh sempalannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹² Tentu saja lahirnya banyak partai tersebut, didorong oleh perubahan pola komunikasi politik yang semula searah dari atas ke bawah mengikuti suara rezim dan berubah ke pola komunikasi politik yang sejajar antar pelaku komunikasi: elit kekuasaan, media dan masyarakat warga negara. Anehnya Partai-partai yang lahir ini memperlihatkan kembalinya peta kekuatan politik pada pemilu tahun 1955.¹³

Golkar adalah partai yang merasakan pengaruh perubahan di era reformasi tersebut. Partai semu ini sebelumnya merupakan partai yang mendapatkan hak-hak istimewa dari rezim Orde Baru. Karena, Golkar merupakan salah satu pilar dari penopang kekuasaan Orde Baru selain birokrasi dan ABRI. Sebagai partai penguasa, Golkar mendapatkan keistimewaan melalui keanggotaan yang otomatis dari kalangan birokrat ke dalam organisasi itu. Selain itu juga, Golkar yang selalu diketuai oleh perwira tinggi ABRI, secara otomatis mendapatkan pula dukungan dari keluarga besar ABRI. Pada masa reformasi, keistimewaan itu hilang, antara lain karena diterbitkan undang-undang yang melarang PNS sebagai anggota partai politik. Sebagai konsekuensi, mau tidak mau, Golkar kemudian menjadi partai politik dan mencantumkan kata "partai" di depan kata Golkar.¹⁴ Yang kedua adalah dihapusnya dwifungsi ABRI. Dimana dwifungsi ABRI memandatkan peran politik ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator tersebut kemudian dicabut. Bahkan ABRI kemudian juga diprofesionalkan dan namanya pun dirubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁵ Dengan dihilangkannya dua pendukung utama itu, tentu Golkar benar-benar menjadi sebuah partai politik yang baru. Mau tidak mau, Golkar harus meraih dukungan masyarakat tanpa boleh menggunakan sarana-sarana yang pernah digunakan pada masa lalu.

Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang pertama berusaha membenahi Golkar mulai dari paradigma kepartaiannya dengan menghapuskan Dewan Pembina yang begitu dominan. Penghapusan tersebut diharapkan mampu memperbaiki citra Golkar di mata publik. Lebih jauh, Akbar Tandjung juga sering menggunakan istilah Golkar Putih untuk menunjukkan kepada publik, citra Golkar yang baru.¹⁶ Golkar pun membuktikan dirinya

¹² Sementara PDI-P pun menyempalkam partai baru yakni Partai Demokrasi Pembaharuan yang diketuai oleh Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis.

¹³ Dituliskan oleh Ikrar Nusa Bakti sebagaimana dikutip oleh Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu 2009," dalam Jurnal Poelitika, vol. 5. No. 10 thn. 2009.

¹⁴ Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto era* (Oxon: Routledge, 2008), 56.

¹⁵ Lihat militer dalam masa transisi dalam Damiens Kingsbury, *Power Politics and The Indonesian Military* (London: Routledge, 2003), 36-66.

¹⁶ Greg Barton, *Gus Dur: an Authorized Biography of KH Abdurrahman Wahid*

sebagai partai yang ikut serta dalam agenda reformasi.¹⁷ Masa kepemimpinan Akbar Tandjung adalah masa yang paling sulit, karena masa itu merupakan masa turbulensi. Meskipun demikian, partai ini dapat bertahan berkat kelembagaan yang kokoh yang terbangun pada masa orde baru. Tidak heran, sekuat apapun turbulensi yang menghantam politik nasional pada waktu itu tetap tidak menggoyahkan partai ini.¹⁸ Di sisi lain, Akbar Tandjung, memang sangat berhasil menjaring aspirasi masyarakat dan strategi yang diterapkan di dalam partai ini begitu mendekati publik.¹⁹ Penggunaan strategi tersebut bagi Golkar bisa dibilang sangat tepat, karena Golkar memang berada di luar kekuasaan. Kejituan strategi tersebut pun nampak dan berdampak pada perolehan suara yang diperoleh Golkar. Pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung tersebut, Golkar mampu memperoleh suara sebanyak 22,44% dan menempati peringkat kedua pada pemilu 1999 setelah PDI-P yang memperoleh 33,8%. Bahkan pada Pemilu 2004 Golkar berhasil menempati posisi teratas dengan perolehan suara yakni 21,58%.²⁰

Tabel I.1 Perolehan Suara Partai Golkar²¹

Tahun	Perolehan suara	Peringkat
1999	22,44%	Kedua di bawah PDIP (33,8)
2004	21,58%	Pertama
2009	14,45%	Kedua di bawah Partai Demokrat 20,8%

Namun sayangnya, ketika Golkar di dalam kekuasaan justru partai ini mengalami penurunan. Pada masa kepemimpinan Jusuf Kalla (2004-2009), partai ini malah mengalami penurunan perolehan suara. Golkar hanya mampu meraup suara sebesar 14,4% atau peringkat ketiga setelah Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 20,8% dan PDI-P yang memperoleh suara sebesar 14,2%.

(Yogyakarta, LKiS), 33.

¹⁷ Seperti Partai Amanat Nasional yang didirikan Amien Rais bersama para tokoh kebangsaan lainnya; Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh kelompok Islam tradisional; Partai Bulan Bintang yang didirikan oleh kalangan Islam Modernis dan Partai Keadilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera) yang didirikan oleh alumni Gerakan Dakwah Kampus. Khusus Tentang Partai Keadilan baca Aay Muhammad Furkon, Partai Keadilan .(Jakarta: Teraju, 2004), 122.

¹⁸ Lihat Dirk Tomsa, Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto era, 77.

¹⁹ Tentang strategi partai Golkar lihat Rully Chairul Azwar, Politik Komunikasi Partai Golkar (Jakarta: Grasindo, 2008), 66-80.

²⁰ Dirk Tomsa, Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto era, 134-144.

²¹ Diolah dari pelbagai sumber.

Perolehan suara Partai Golkar yang terbilang kecil pada pemilu 2009 tersebut merupakan pukulan telak. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah pada saat Partai Golkar bersama dengan Partai Hanura memajukan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2009. Suara Partai Golkar justru mengalami penurunan suara, yakni hanya mendapatkan suara 11,4 persen. Padahal jika menggunakan nalar lurus, gabungan perolehan suara pemilu legislatif, setidaknya pasangan itu mendapatkan suara 20 persen, sebagaimana syarat minimal pencalonan presiden.

Kekalahan Partai Golkar dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2009, tak pelak menjadi bahasan yang cukup menarik bagi pelbagai kalangan. Bagaimana mungkin, partai yang secara kelembagaan memiliki lembaga yang kokoh ini, kenyataannya tidak sanggup untuk mengalahkan partai-partai lainnya. Terlebih jika dilihat dari dua pemilu sebelumnya, partai ini sempat mendapatkan perolehan suara yang signifikan, dan berhasil lolos dari terpaan tuntutan pembubaran yang kencang mendera. Dan ironisnya, partai Golkar justru malah kalah ketika menjadi bagian dari kekuasaan.

Kekalahan Partai Golkar sempat diramalkan oleh seorang Wakil Ketua Umum DPP partai Demokrat Ahmad Mubarak. Menurut Ahmad Mubarak, partai iGolkar hanya akan mendapatkan suara tidak lebih dari dua setengah persen. Kontan, pernyataan Ahmad Mubarak ini dianggap sebagai pernyataan yang memecah kemesraan antara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Bahkan kemesraan pasangan ini pun sempat diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2014.²² Perkiraan keberlanjutan hubungan ini sesungguhnya dibangun berdasar sifat unik pasangan politik ini dalam membina hubungan kerja. Jusuf Kalla, sang wakil presiden, tidak memosisikan diri sebagai pembantu yang pasif. Jusuf Kalla sebagai pembantu presiden, malah banyak mengisi kerja-kerja presiden di bidang ekonomi.²³ Meskipun demikian, Jusuf Kalla tidak pernah menjadikan diri sebagai wakil presiden yang kelak akan menyaingi Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana julukan yang pernah disematkan kepadanya sebagai *the real president*.²⁴

Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekalahan Partai Golkar menunjukkan kecenderungan dari masyarakat yang lebih melihat citra sosok kandidat daripada kinerja kandidat. Ini bisa dilihat dalam kinerja kepresidenan, dimana Partai Golkar senantiasa

²² Ungkapan ini diungkapkan oleh banyak kalangan mulai dari politisi hingga pengamat politik pasangan yang paling ideal yang akan bertahan hingga 2014 dan membawa Indonesia menjadi negara yang besar. lihat, *Majalah Tokoh Indonesia* edisi 39 (02) tahun 2008.

²³ Wawancara JK dengan *Majalah Tokoh Indonesia* edisi 39 (10) tahun 2008. lihat pula William Liddle, "Year One of Yudhoyono- Kalla Duumvirate", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41, No.3. 2005. 323-328.

²⁴ Lihat wawancara Bambang Harimurti dengan JK dalam *Majalah Berita Mingguan Tempo* 07 Februari 2005.

menjadikan partainya sebagai partai yang maju membela setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Beberapa kebijakan seperti konversi minyak tanah ke gas; sumbangan langsung tunai; hingga pada kesepakatan antara GAM dan RI di Helsinki di tahun 2005.²⁵ Sementara pasangannya lebih sibuk beretorika demi membentuk pencitraan yang baik dan memajukan kesantunan dalam berpolitik.

Para pengamat politik melihat Pemilu 2009 sebagai masa terjadinya perubahan konstelasi politik.²⁶ Hal tersebut, menurut mereka, ditandai dengan adanya kekuatan partai yang berbasis nasionalis religius, sebuah kategori baru yang menyatukan ide kebangsaan dan keagamaan. Fenomena ini tentu mengubah konstelasi politik dua pemilu sebelumnya yang merupakan siklus pengulangan sejarah politik pada tahun 1955. Dimana pada pemilu tersebut terdapat beberapa kekuatan politik nasionalis yang mewakili kalangan priyayi, komunis yang mewakili kalangan abangan, NU yang mewakili santri tradisional dan Masyumi yang mewakili santri modernis.

Ide nasionalis religius sesungguhnya sudah diusung oleh Golkar pada masa Orde Baru. Golkar pada masa Orde Baru mengakomodasi beberapa unsur nasionalis dan agama untuk menyaingi dukungan golongan nasionalis kepada PDI dan dukungan golongan santri kepada PPP. Golkar sendiri secara kesejarahan didirikan demi menyaingi kekuatan PKI yang begitu masif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat hingga tingkat paling bawah (selanjutnya sejarah tentang lahirnya Golkar dan Golkar di masa Orde Baru akan dibahas di bab III).²⁷ Pengakomodasian unsur nasionalis dan agama oleh Golkar ini kemudian ditiru oleh beberapa partai yang muncul kemudian. Sebut saja misalnya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Dari sekian partai yang paling mirip dengan Golkar adalah Partai Demokrat, terlihat dari struktur kepengurusannya yang dominan kedudukan Ketua Dewan Pembina. Kondisi tersebut seolah mengingatkan kita akan dominannya kedudukan ketua dewan pembina dari Golkar pada masa Soeharto.²⁸

²⁵ Aburizal Bakrie, dll, Mereka bicara Jusuf Kalla (Jakarta: National Press Club of Indonesia, 2010).

²⁶ Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Personalities, Parties, and Voters," *Journal of Democracy*, Vol 21. Number. 2 April 2010 (National Endowment for Democracy and The Jhon Hopkins University Press, 2010), 35-49. Lihat pula dalam Zaenal A Budyono, "Senjakala Politik Aliran dan Patron Klien" dalam *Seputar Indonesia*, edisi 15 Juli 2009.

²⁷ R William Liddle, *Pemilu-pemilu Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1992. juga lihat Daniel Dhakidae, "Partai Politik di Persimpangan Jalan," dalam *Prisma* Vol 28. Juni 2009. hlm 87-98.

²⁸ Yang membedakan adalah bahwa Partai Demokrat didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kendaraan politiknya untuk maju sebagai presiden, lihat www.demokrat.or.id. Sedangkan Golkar didirikan sebagai kendaraan politik militer untuk menghilangkan pengaruh partai komunis Indonesia lihat David Reeve, *Golkar, An Alternative Party System*, Newyork: Oxford University Press, 1985.

Anehnya, justru Partai Golkar di masa reformasi seolah melepaskan baju ke-orde-baru-annya. Tetapi ini nampaknya cukup lumrah, karena Golkar merasa perlu membersihkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu. Meski kemudian Golkar pada era Jusuf Kalla, lebih bernuansa bisnis daripada menjadikan politik sebagai arahan dari partainya.²⁹ Akbar Tandjung dalam bukunya *The Golkar Way* berpendapat bahwa arahan secara politik (bukan secara bisnis) membawa Golkar dapat bertahan dari iklim politik transisional.³⁰

Pada kenyataannya, pemilihan ideologi nasionalis dan religius lebih menguntungkan. Terbukti, berdasar temuan penelitian Lili Romli, kekuatan politik partai-partai Islam justru melemah.³¹ Meskipun secara statistik, penduduk muslim merupakan penduduk mayoritas Indonesia, ternyata tidak menjamin seluruh aspirasi politik masyarakat muslim Indonesia disalurkan ke partai politik Islam. Partai-partai Islam justru terbelah menjadi dua, yakni terbelah menjadi kelompok modernis dan tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku memilih masyarakat terhadap partai-partai politik Islam tersebut.

Jika dilihat dari perolehan suara partai-partai Islam, nampaknya masyarakat mulai meninggalkan partai-partai Islam. Kecenderungan seperti ini ternyata bisa dilihat pada kontinum yang lebih luas lagi, yakni jika dibandingkan dengan pemilu 1955, 1971, 1999 dan 2004.³² Pada Pemilu 1955 partai politik Islam mendapatkan dukungan besar dari masyarakat hingga mencapai 43,9%. Dukungan yang besar tersebut disalurkan masyarakat melalui enam partai Islam yakni Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI. Pada pemilu 1971, dukungan masyarakat kepada partai Islam kemudian menyusut menjadi 27,1% dan hanya tersalurkan melalui empat partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti.³³ Selanjutnya, pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999, partai-partai yang mengusung asas Islam hanya mendapatkan 17,8%. Dukungan yang semakin kecil itu pun tersebar pada 17 partai. Kondisi dukungan yang lebih baik ditunjukkan pada pemilu 2004. Pada pemilu tahun tersebut, dukungan masyarakat mengalami kenaikan hingga mencapai 21,1%

²⁹ Ungkapan saudagar sendiri pertama kali diungkapkan oleh Faisal Basri yang mengkritik kebijakan pemerintah yang selalu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keuntungan sesaat di tahun 2005.

³⁰ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2006), 222.

³¹ 31 Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu 2009," dalam *Jurnal Poelitik* vol 5 no. 10 tahun 2009, 583-598.

³² Pemilu 1977-1997 tidak bisa dianggap sebagai pemilu yang fair sehingga tidak bisa melihat perbandingan perolehan partai politik Islam, bdk Lili Romli, 2009.

³³ Masyumi sebagai partai yang pernah dibubarkan oleh rezim Soekarno tidak didirikan lagi karena Soeharto merasa trauma dengan banyaknya gerakan DI/TII pada masa Soekarno sehingga kemudian didirikan oleh Parmusi yang hanya mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh masyumi secara kultural belaka, lihat, MC Ricklef dalam *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2009.

dan hanya disalurkan melalui empat partai. Terkait perolehan dukungan suara terhadap partai-partai Islam, berikut kami sajikan tabel perolehan suara partai Islam.³⁴

Pemilu	Partai	Suara (%)
1955	Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI	43,9
1971	NU, Parmusi, PSII, Perti	27,1
1999	PPP, PBB, PK, PNU, PP, PPI Msyumi, PSII, PKU, KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII 1905, PMB, dan PID	17,8
2004	PPP, PKS, PBB dan PBR	21,1%

Menyurutnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam dikarenakan, dukungan tersebut diberikan kepada partai baru yang menggunakan asas nasionalis-religius, PKB dan asas pluralisme, PAN. Kedua partai itu sesungguhnya didirikan oleh tokoh bangsa yang berlatar belakang Muhammadiyah, Amien Rais yang mendirikan PAN dan Abdurrahman Wahid yang berlatar belakang NU, mendirikan PKB. Dukungan besar masyarakat kemudian lebih diberikan kepada partai-partai yang tidak berasaskan agama Islam Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya perolehan suara partai-partai berlandaskan kebangsaan seperti PDIP, Golkar dan Partai Demokrat ataupun yang berlandaskan kebangsaan religius seperti PKB dan PAN. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera yang berlandaskan Islam pun kemudian mencoba mengangkat isu pluralisme, meskipun hal itu tidak begitu mempengaruhi peningkatan suara PKS.³⁵ Surutnya dukungan masyarakat terhadap partai-partai politik Islam, bagi Saiful Mujani dan William R. Liddle, sebagai pudarnya politik aliran yang selama ini begitu diyakini oleh kalangan indonesianis.³⁶ Meskipun demikian, dari perolehan suara yang diperoleh itu, dapat dilihat bahwa masyarakat Jawa tidak lagi bisa dipotret secara simplifikatif trikotomi ala Herbert Feith. Dimana trikotomi Feith begitu saja mengacu pada kategorisasi lawa masyarakat Jawa Clifford Geertz: santri, abangan dan priyayi.³⁷

³⁴ Diambil dari Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu 2009," 583- 598.

³⁵ PKS hanya memperoleh peningkatan suara 0,54 persen atau 15 kursi dari pemilu 2004 (7,34%).

³⁶ Saiful Mujani dan R. William Liddle "Party, Personality, and Voters," dalam *Journal Of Democracy*, Vol. 21, Number 2 April 2010. hlm 35-49.

³⁷ Herbert Feith dan Lance Castle berpendapat bahwa masyarakat Indonesia dalam menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai- partai yang beraliran sosialis democrat, nasionalis, komunis, dan islam (yang dibagi dalam dua aliran yakni modernis dan tradisional), lihat Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta: LP3ES, 1988) . Tentang mengapa terjadinya pecahnya dua aliran islam tradisional dan modernis bisa lihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*

Meskipun secara dukungan politik aliran memudar, tetapi dalam kampanye, masih terdapat penggunaan isu-isu yang bersifat aliran. Misalnya saja pada kasus kampanye hitam untuk menjegal Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009. Isu-isu aliran tersebut adalah isu-isu SARA. Santer beredar isu, pada masa kampanye presiden tersebut, bahwa Herawati Boediono, istri calon wakil presiden pasangan SBY, Boediono tersebut beragama Katholik. Sementara pesaingnya, pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, meskipun mengusung simbol keislaman, seperti menampilkan foto pasangan yang mengenakan jilbab, malah mendapatkan dukungan paling kecil. Sementara pada pemilu 2004, isu SARA yang serupa pun pernah ditiupkan terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Isu yang beredar adalah Kristiani Herawati, istri dari Susilo Bambang Yudhoyono, seperti nama depan yang disandangnya, beragama Kristen. Tetapi dukungan isu itu ternyata tidak mempan. Terlebih Yenni Wahid, putri Abdurahman Wahid yang merupakan tokoh Islam tradisional, pada waktu itu langsung menjawab dan menukas bahwa "Kristiani" hanyalah sekedar nama saja. Begitu juga dengan isu istri Boediono yang beragama Katholik, langsung terbantahkan dengan pemberitaan di televisi tentang kegiatan Herawati Boediono yang mengikuti pengajian di sebuah masjid.

Alhasil, jika melihat pada perolehan suara dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (61%) tampak bahwa tesis tentang politik aliran memang mulai memudar. Para pendukung Susilo Bambang Yudhoyono ternyata berasal dari pelbagai kalangan. Mereka tidak hanya dari kalangan Islam tradisional, Islam modernis tetapi juga kalangan nasionalis.³⁸ Memang jika dilihat pada bahasa kampanye yang dimajukan oleh masing-masing presiden, maka akan tampak politik aliran itu sesungguhnya masih ada. Hal tersebut, sebagaimana dipaparkan di atas, bagaimana tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera melakukan *spinning*³⁹

Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1992), Daniel Dhakidae melihat ini sebagai sebuah era baru dari iklim perpolitikan negeri ini yang tidak mengedepankan absolutisme ideologi tetapi lebih mengedepankan media massa sebagai alat utama. Ini tampak dari persyaratan yang diajukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan syarat kepada publik bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi lagi pada masa 2009-2014 adalah orang yang tidak brepartai, teknokrat, memiliki moral politik yang baik, memiliki kecakapan yang tinggi dalam mengoordinasikan menteri-menteri kabinet, dan loyalitas sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, harus diterima oleh masyarakat luas, dan harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun para pemerintah berikutnya.

³⁸ Dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ini dilihat dari identifikasi partai kepada masyarakat yang memilih pasangan capres-cawapres pada tulisan dari Saiful Mujani dan R. William Liddle "Party, Personality, and Voters," dalam *Journal of Democracy*, Vol. 21, Number 2 April 2010, 35-49.

³⁹ *Spinning* adalah pengalihan isu atau pelokalisiran dari isu agar tidak menyentuh bagian isu sensitif yang dikuatirkan akan mempengaruhi opini publik. Lihat Darren G. Lilleker, *Key Concepts in Political Communication* (London: Sage Publication), 2006, 194-197.

dengan membuat berita tentang kegiatan pengajian yang dilakukan oleh istri dari Boediono. Spinning isu ini muncul pada saat publik mulai memercayai isu tersebut (information holds).

Terjadinya perubahan peta Pemilu 2009 juga tampak pada rendahnya tingkat kesetiaan masing-masing pemilih partai pada 2004. Survei yang dilakukan oleh LP3ES menyebutkan bahwa pemilih partai Islam tidak selalu memilih partai Islam, tetapi yang lainnya. Dengan adanya kategori nasional-religius yang dibangun oleh Partai Demokrat, telah menjadi alternatif bagi pemilih partai Islam maupun non-Islam untuk memilih partai tersebut. Terbukti partai ini memperoleh porsi paling besar kepindahan dari partai-partai lainnya. Hanya tiga partai yang memiliki kadar kesetiaan yang tinggi yakni partai PKS, PDIP dan Partai Demokrat. Tingkat kesetiaan paling rendah adalah PAN dengan angka hanya 3,3%. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat kesetiaan pemilih terhadap partai lihat tabel di bawah ini.

Tabel I.3. Kesetiaan Para Pemilih Terhadap Partai⁴⁰

Partai yang dipilih pada 2009	Partai yang dipilih pada 2004						
	P. Golkar	PDI-P	PKB	PPP	P. Demokrat	PKS	PAN
Golkar	35,8%	5,9%	3,7%	1,3%	4,2%	3,3%	1,6%
PDI-P	4,4,%	38,6%	4,9%	2,1%	4,4%	3,3%	1%
PKB	1,2%	1,3%	34,3%	3,4%	1,5%	0,8%	0%
PPP	1,9%	1,3%	2,9%	31,5%	1%	0,8%	1%
P. Demokrat	13,4%	8,7%	7,5%	11,9%	42%	9,1%	7,3%
PKS	3,7%	3,5%	3,5%	6%	3,5%	53,7%	39,1%
PAN	3,2%	2,4%	2%	2,6%	1,7%	3,3%	20,30%
P. Hanura	2%	3%	1,7%	2,6%	3,9%	0,8%	3,1%
P. Gerindra	3,1%	3%	2%	2,6%	2,7%	2,5%	2,1%
Lainnya	10,90%	9,6%	16,1%	10,2%	6,5%	6,6%	4,2%
Tidak memilih	0,3%	0,6%	0%	0,4%	0,4%	0,8%	0%
Menolak memberi informasi	20%	21,9%	21,3%	25,5%	28,10%	14,9%	20,30%

Konstelasi politik yang berubah tersebut tidak lepas dari iklim

⁴⁰ Diambil dari Daniel Dhakidae, "Partai Politik di Persimpangan Jalan," dalam Prisma Vol 28. Juni 2009, 87-98.

dari komunikasi politik reformasi yang berbeda daripada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kebijakan negara menjadikan media massa pada arah industrialisasi, setelah pada masa sebelumnya oleh Soekarno, media massa dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan revolusi yang belum selesai.⁴¹ Pada masa Orde Baru, bermunculan banyak media massa, terutama televisi yang menyediakan pelbagai informasi yang mendukung program pembangunan dari negara. Tetapi, itu tidak menjadikan arus informasi pada masa itu bebas begitu saja. Negara melalui Departemen Penerangan mengontrol setiap isi berita.⁴² Pada era reformasi, berkat Menteri Penerangan, Letnan Jenderal (purn) Yunus Yosfiah, pada masa Presiden Habibie⁴³ seluruh hambatan dalam mendirikan perusahaan penerbitan dipermudah. Hal ini kemudian menyebabkan pelbagai media massa tumbuh, mulai dari media massa yang dimiliki oleh partai politik hingga media massa yang berisi tentang pornografi. Puncaknya adalah masa Presiden Abdurrahman Wahid yang membubarkan Departemen Penerangan yang selama ini dianggap mengekang kebebasan berpendapat.⁴⁴

Iklim yang demikian bebas ini dalam politik pun mempengaruhi budaya komunikasi politik Indonesia. Semua pihak mendapatkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Mulai dari media massa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga rakyat kecil sekalipun. Semuanya tersedot dalam satu iklim yang disebut dengan reformasi. Beberapa partai politik waktu itu menerbitkan media massa sebagai saluran dari pesan-pesan politik kepada khalayak.⁴⁵ Ini kemudian menjadikan Partai Golkar, yang semula partai penguasa, harus rela berbagi dengan partai lainnya

⁴¹ Effendy Gazali, Dedy N Hidayat dan Victor Menayang, "Political Communication in Indonesia: Media Performance in Three Era," dalam *Political Communication in Asia*, 113.

⁴² Beberapa media massa dibredel oleh rezim orde baru sebagai bentuk kontrol negara atas kebebasan berpendapat seperti harian Indonesia raya, lihat Ignatius Haryanto, *Indonesia Raya dibredel*, Yogyakarta: LKIS, 2006. demikian juga ketika tempo dicabut hak terbitnya pada tahun 1994 karena memuat impor kapal selam eks Jerman Timur. Lihat pula Dedy N Hidayat, Victor Menayang, Effendy Gazali, "Political Communication in Indonesia in Three Era,"

⁴³ 43 BJ Habibie *Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2009), 159.

⁴⁴ Ironisnya, Gus Dur justru diperburuk citra publiknya oleh media- media massa yang telah dibebaskan olehnya. Beberapa media massa mencitrakan Gusdur dengan sangat negatif tetapi tidak ada satupun media massa yang dibredel meskipun telah melakukan penghinaan kepada simbol negara tersebut. Lihat pendapat Wimar Witoelar dalam http://gusdur.net/Berita/Detail/?id=473/hl=id/Wimar_Kalau_Orang_Benar_Pesannya_Tidak_Hilang. juga lihat Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 441-442.

⁴⁵ Antara lain PAN menerbitkan tabloid Matahari, PKB menerbitkan Duta Masyarakat, PBB menerbitkan Harian Abadi. Penerbitan media massa itu sebenarnya ingin mengulang kejayaan partai-partai tersebut pada masa orde lama, terutama partai-partai yang mengambil semangat partai reinkarnasi mereka.

untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat.⁴⁶ Media Massa ramai-ramai digunakan kalangan politisi untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Hanya saja, media massa nampaknya masih belum banyak mengungkapkan bagaimana hal-hal yang seharusnya diketahui oleh masyarakat seperti rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden.⁴⁷ Media massa masih melihat calon-calon presiden tersebut sebagai calon presiden yang seolah baru turun dari yang tidak memiliki rekam jejaknya. Padahal beberapa calon presiden tersebut merupakan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang patut disorot untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih. Penayangan rekam jejak muncul sebanyak 180 berita dari 19.133 berita pada media cetak dan 121 berita dari 9.247 berita. Selama ini rekam jejak dimaknai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bernuansa kampanye negatif (black campaign). Hingga pemberitaan rekam jejak pun disampaikan dengan kurang mendalam. Seluruh kampanye pemilu legislatif maupun presiden berada dalam satu tema yakni politik pencitraan. Sedikit sekali kandidat yang menampilkan rekam jejak ataupun langkah apa yang akan dilakukan dalam masa jabatan kepresidenan akan datang. Meski sesungguhnya, masing-masing kandidat adalah orang-orang lama yang seharusnya bisa dinilai melalui rekam jejaknya.

Kondisi tersebut tampak jelas dalam pertarungan dua petahana, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Masing-masing petahana (orang yang masih menjabat/ incumbent) mencitrakan diri sebagai penyebab keberhasilan beberapa program yang dilakukan selama masa kepresidenan 2004-2009. Keberhasilan yang dicitrakan misalnya adalah program BLT, harga BBM turun, terhentinya konflik Aceh, dan sebagainya. Petahana memang memiliki tujuh keunggulan, sehingga dapat mudah memenangkan pemilihan umum. Keunggulan tersebut adalah publik yang mengalami inersia politik. Artinya, publik akan kembali memilih kandidat yang sama, dalam pemilu presiden ini. Kedua, petahana karena sudah mengetahui medan dari politik selama masa sebelumnya memiliki kelebihan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan politik. Ketiga, parpol petahana biasanya lebih kokoh ketika partai lawannya terpecah karena harus memenangkan nominasi mereka. Keempat, presiden dapat mengontrol dan mengatur agenda politik dan ekonomi, karena memang presiden yang memutuskan. Kelima, presiden dapat berkampanye terlalu berlebihan. Keenam, massa dan media tidak menyukai kampanye negatif terutama terhadap petahana. Ketujuh

⁴⁶ Partai Golkar tetap mengandalkan Harian Suara Karya sebagai koran resmi partai ini.

⁴⁷ Ahmad Faisal, "Memberitakan Rekam Jejak Peserta Pemilu, Kewajiban Media Massa Dalam Pemilu Demokratis," Saptono, Media, Pemilu dan Politik : Kecenderungan media pemilu 2009. Jakarta: ISAI dan TIFA, 2010. 114-130.

petahana dapat dengan mudah mengklaim kesuksesannya.⁴⁸

Meskipun sebagai petahana, Jusuf Kalla dalam beberapa hal tidak diposisikan sebagai lawan yang setara oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. Ini dapat dilihat dari bagaimana media meliput masing-masing pasangan presiden tersebut. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono mendapatkan peliputan paling banyak dari media cetak, yakni sebanyak 669 berita. Sedang, pasangan Jusuf Kalla – Wiranto hanya diliput sebanyak 463 berita,. Dan Megawati Soekarno Putri – Prabowo Subianto diliput sebanyak sebanyak 431 berita.⁴⁹ Artinya Susilo Bambang Yudhoyono merupakan calon presiden yang kuat pada waktu itu. Terlebih jika melihat jumlah prosentase suara pemilih partai demokrat yang mencapai 21,7% ataupun kursi yang diperoleh di legislatif sebanyak 26,79%. sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hanya 18, 96% suara pemilih atau 22,32% peroleh kursi sedangkan pasangan Megawati- Prabowo sebesar 18,49% untuk suara pemilih atau 21,6% jumlah perolehan kursi di legislatif.⁵⁰ Belum lagi calon Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kelebihan didukung oleh beberapa partai lainnya seperti partai-partai Islam ataupun yang berbasis massa Islam. Dalam beberapa kali survei Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki hasil survei yang paling tinggi di antara calon presiden lainnya, bahkan jika dipasangkan dengan tokoh siapapun. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2009 paralel dengan tren pilihan pada partai politik yang dilihat oleh LSI.⁵¹ Dalam pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dipilih oleh masyarakat mulai dari kalangan perkotaan maupun pedesaan. Karakter masyarakat yang memilih Susilo Bambang Yudhoyono hampir mirip dengan karakter pendukung dari Megawati, yakni berasal dari kalangan pedesaan pula.⁵²

Pada pemilu 2009, nampaknya Jusuf Kalla tidak berhasil mengambil dukungan layaknya yang diperolehnya dari pemilu tahun 2004. Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto justru mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu presiden. Padahal di atas kertas, pasangan ini seharusnya mendapatkan dukungan sebanyak 18,96%, namun ternyata hanya mendapatkan 11,8%. Phillip J. Vermonte melihat kenyataan tersebut disebabkan oleh pernyataan tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung

⁴⁸ 48 Phillip J Vermonte, "the Tale of Two Incumbent in the 2009 Presidential Election," dalam THE INDONESIA QUARTERLY, Vol. 37, No. 3, 2009, 306.

⁴⁹ Ahmad Faisol, "Bab I, Media dan Pemilu," dalam Media, Pemilu dan Politik: Kecenderungan Media dalam Politik 2009 (Jakarta:ISAI, 2010), 2.

⁵⁰ Phillip J Vermonte, "The Tale of Two Incumbent in the 2009 Presidential Election," dalam THE INDONESIA QUARTERLY, Vol. 37, No. 3, 2009, 307.

⁵¹ www.lsi.or.id.

⁵² 52 R. William Liddle dan Saiful Mujani, "Indonesia: The Rise of Susilo Bambang Yoedhoyono," Asian Survey, Vol. XLV, no.1, January/February, Bimonthly Review Of Contemporary Asian Affairs, University of California Press, 2005. 119-128.

mementahkan setiap klaim Jusuf Kalla atas keberhasilan program pemerintah 2004-2009. Bentuk pementahan klaim Jusuf Kalla adalah dengan mengatakan apa-apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla ada atas perintah Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak heran, masyarakat yang semula bersimpatik kepada Jusuf Kalla beralih kembali mendukung Susilo Bambang Yudhoyono.⁵³ Artinya, secara komunikasi politik, Partai Golkar gagal mengusung sosok Jusuf Kalla sebagai calon presiden.

B. Golkar dan Kegagalan Komunikasi Politik

Kekalahan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan presiden 2009, menunjukkan adanya kegagalan komunikasi politik dari Partai Golkar. Meskipun partai ini merupakan partai yang memiliki insititusi partai politik yang tangguh, sebagaimana menurut Dirk Tomsa, tetapi dalam meraih simpati publik partai ini sepertinya tidak piawai, meskipun ketua umum partainya selalu muncul di media massa. Kegagalan ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dari Partai Golkar sehingga tidak mendapatkan dukungan publik dalam pemilu 2009. Meskipun dalam belanja iklan ataupun banyak berita berkaitan dengan Jusuf Kalla (sebagai capres dari Partai Golkar) cukup banyak bahkan disebutkan AC Nielsen bahwa iklan yang paling efektif adalah iklan dari Jusuf Kalla. Tetapi, sebagai sebuah partai politik nampaknya partai ini telah gagal dalam melakukan komunikasi politik, baik yang bertujuan untuk menjaring dukungan suara dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu presiden.

Dari berbagai paparan diatas, kajian dalam buku ini hendak melihat beberapa hal terkait kegagalan kinerja komunikasi politik Partai Golkar. Pertama, pada level organisasi kepartaian, bagaimana komunikasi politik sebuah partai yang menjadi bagian dari pemerintah menjadi rival dari sekutunya di kemudian hari. Kedua pada level kelompok melihat permasalahan hubungan antar elit Partai Golkar yang mempengaruhi kinerja komunikasi politik yakni pada arah horizontal di lingkup DPP dan arah vertikal di lingkup DPP dan DPD dan Sayap dan Kino. Ketiga pada individu pemimpin partai politik, yakni bagaimana kepemimpinan pemimpin partai politik yang menduduki jabatan publik (wakil presiden) melaksanakan strategi komunikasi politik yang diliputi dengan konflik kepentingannya sebagai seorang ketua umum partai politik yang mengemban tugas mencapai tujuan partai politik. Di sisi lain sebagai seorang wakil presiden yang mengemban kepentingan negara. Walhasil, pertanyaan besar dalam kajian komunikasi politik di buku ini adalah mengapa partai Golkar gagal dalam meraih suara mayoritas pada Pemilu 2009.

⁵³ Phillip J Vermonte, THE INDONESIA QUARTERLY, Vol. 37, No. 3, 2009, 307.

Secara umum, tujuan kajian komunikasi politik di buku ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Golkar dalam Pemilu 2009. Pengungkapan elemen-elemen dari komunikasi politik Golkar tersebut mencakup elemen komunikator, elemen pesan, elemen saluran, elemen komunikan dan elemen efeknya. Pada elemen komunikator akan diungkap siapa komunikator dalam Partai Golkar yang utama? Pengungkapan ini tentu pertama akan menyorot pola komunikasi politik pemimpin partai dan para elit partai Golkar yang memiliki peran dalam Pemilu 2009. Bagaimana posisinya mampu mempengaruhi pada dan bagaimana pesan yang disampaikan dari masing-masing komunikator?

Penjelajahan elemen pesan akan berkaitan dengan apa pesan yang disampaikan kepada komunikan (khalayak), sehingga menyebabkan partai Golkar mendapatkan hasil akhir sedemikian rupa. Pada elemen pesan juga akan dikaitkan dengan aspek apa dari komunikator, sehingga antar komunikator memiliki pesan yang berbeda yang disampaikan pada komunikan. Elemen saluran melihat pada saluran apa pesan itu disampaikan, apakah melalui saluran interpersonal, melalui media ataukah melalui satu forum. Elemen saluran berdekatan dengan elemen pesan.

Elemen komunikan melihat pada pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Mereka bisa berada dalam satu lingkup partai yang sama ataupun lingkup partai yang berbeda. Sedangkan untuk melihat pesan yang disampaikan dilihat pada elemen efek. Sehingga kedua elemen tersebut berdekatan. Efek yang paling akhir pada elemen efek adalah dukungan akhir pada Partai Golkar dan Jusuf Kalla.

Dari kelima elemen tersebut penelitian ini ingin melihat konflik kepentingan yang terjadi pada kepemimpinan Partai Golkar. Perselisihan kepentingan yang tidak bisa dikelola oleh para elit Partai Golkar menyebabkan pengabaian pencapaian tujuan partai politik yakni menjadi pemenang pemilu. Kegagalan pengelolaan perselisihan kepentingan ini tampak pada pencitraan partai di mata publik.

C. Kajian tentang Partai Golkar

Dalam dua dasawarsa terakhir, telah lahir kajian menarik tentang partai Golkar. Kajian tentang Golkar ini ternyata hanya menarik perhatian bagi kalangan Indonesianis asing dan sedikit sekali menarik minat kalangan akademisi Indonesia. Pengkajiannya pun beragam. Dari kajian sejarah hingga kajian yang menengahkan Golkar sebagai sistem partai alternatif. Berbagai kajian akademisi luar negeri tersebut tentu sangat memperkaya khasanah intelektual dan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Namun sayang, dari berbagai kajian yang sudah ada, tidak ada satupun kajian yang

secara khusus membahas komunikasi politik partai berlambang beringin ini. Tak pelak, kajian komunikasi politik tentang Partai Golkar merupakan hal yang sangat baru, terutama dalam konteks era reformasi ini.

Sedikitnya minat akademisi Indonesia mengkaji Golkar dapat dimaklumi. Mengingat partai ini merupakan pengalihan bentuk dari Golkar sebagai partai penguasa dan bahkan dianggap oleh kelompok prodemokrasi bertanggung jawab pada krisis demokrasi di Indonesia. Tak pelak, kajian tentang Golkar pun menjadi kajian yang agak "tabu" dilakukan oleh para peneliti ataupun mahasiswa. Meskipun demikian pada era reformasi ini telah lahir beberapa kajian tentang Partai Golkar dari kalangan akademisi Indonesia, baik berupa tesis ataupun disertasi. Beberapa kajian yang dilakukan adalah kajian politik dan ilmu komunikasi politik atau Ilmu Komunikasi. Sedangkan kajian tesis dilakukan di Universitas Indonesia, dalam tesis Dedi Irawadi (2001) membahas tentang dampak reformasi pada konflik internal Partai Golkar. Irawadi memaparkan tentang isu-isu yang menjadi konflik antara lain konflik kedaerahan Iramasuka Nusantara (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara) yang mengukung BJ Habibie dan non-Iramasuka Nusantara yang mengukung Akbar Tandjung. Konflik itu kemudian bermuara pada konflik antara kelompok yang menginginkan perubahan dan kelompok yang dianggap sebagai status quo. Akibat dari konflik itu adalah laporan pertanggung jawaban BJ Habibie ditolak dalam sidang umum MPR 1999 yang berkelanjutan pada pengunduran BJ Habibie dari pencalonannya sebagai presiden untuk periode selanjutnya.

Pengkajian tentang Golkar lebih dalam dilakukan oleh Akbar Tandjung dalam studi disertasinya di Universitas Gadjah Mada yang kemudian diterbitkan (2007). Kajian Akbar Tandjung melihat cara bertahan Partai Golkar dalam kondisi transisional dengan cara mengubah paradigma dari sebuah partai yang dimiliki penguasa menjadi partai yang terbuka. Dalam kajian ini, Akbar Tandjung membahas melalui kajian attitudinal dan struktur organisasi partai itu. Kajian yang dilakukan oleh akbar tandjung menjelaskan bahwa Partai Golkar bisa bertahan melalui sebuah paradigma baru yang menghilangkan karakter militeristik dan feodalisme tetapi tetap meneruskan nilai-nilai lamanya sebagai partai yang menjunjung Pancasila dan UUD 1945 sehingga tetap mendapatkan dukungan dari para pemilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Dari sisi disiplin ilmu, buku ini dikaji dari perspektif ilmu politik, bukan komunikasi politik, sejauh yang penulis ketahui belum ada satu pun kajian komunikasi politik tentang partai politik Golkar.

Meskipun demikian masih terdapat kajian komunikasi tentang Golkar setingkat (lagi-lagi) tesis oleh Sufardi Nurzain (2006) yakni tentang analisa framing atas pemberitaan kompetisi Akbar Tandjung dan H.M. Jusuf Kalla dalam Munas VII di Bali pada tiga koran

nasional (Suara Karya, Media Indonesia, Kompas). Kajian tesis ini melihat bagaimana masing-masing media massa dalam memberitakan selain melakukan konstruksi realitas tentang munas itu, juga melakukan pemihakan kepada masing-masing calon ketua umum tersebut yang dipengaruhi oleh keberadaan para pemodal, subjektivitas jurnalis, tokoh-tokoh yang dominan, dan kepentingan besar media tersebut.

Terdapat beberapa buku yang ditulis yang berkaitan erat dengan Partai Golkar yakni buku yang diterbitkan oleh BJ Habibie, mantan Ketua Dewan Pembina Golkar 1999 yang berisi tentang bagaimana pengalamannya sebagai seorang presiden yang juga manusia biasa menghadapi situasi yang berubah pada era reformasi. Tekanan yang dihadapi tidak hanya dari kalangan rakyat biasa belaka tetapi juga dari orang-orang yang dulu merupakan orang-orang terdekatnya.

Rully Chairul Azwar (2009) melakukan kajian tentang Partai Golkar melihat dalam time frame dari masa Partai Golkar masa Harmoko hingga Partai Golkar hingga masa Jusuf Kalla. Dalam kajian ini Azwar melihat posisi Partai Golkar terhadap negara dalam politik komunikasi yakni bagaimana sebuah partai politik menjadi saluran bagi publik untuk berkomunikasi dengan kekuasaan. Pada masa Harmoko Golkar berada di dalam pemerintahan penyelenggara negara sehingga Partai Golkar memanfaatkan seluruh fasilitas kemudahan yang dimiliki oleh negara; sedangkan pada masa Akbar Tandjung, posisi ini diambil oleh Golkar sebagai sebuah kebutuhan dari citra Golkar sebagai public enemy. Sehingga, Golkar mengambil posisi pengimbang dari penyelenggara kekuasaan. Sedangkan pada masa Jusuf Kalla, Golkar berada pada posisi sulit karena tidak leluasa dalam berhadapan dengan kekuasaan. Buku yang satu subjek dengan Rully adalah buku dari Aulia Aman Rachman (2006) yang melihat bagaimana pencitraan Partai Golkar pada menjelang Pemilu 2004. Buku ini melihat bagaimana khalayak melihat Partai Golkar sebagai peserta pemilu. Dalam buku ini Golkar masih dilihat sebagai partai yang identik dengan Orde Baru yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan bangsa ini.

Makrum Khalil melihat pada dinamika politik Islam pada masa Orde Baru tidak lepas dari kiprah Golkar sebagai partai yang tidak mengusung ideologi Islam. Kajian Makrum Khalil melihat dari lahirnya beberapa aturan perundang-undangan justru melalui dukungan Golkar sebagai mayoritas dalam legislatif. Dukungan Golkar kepada isu-isu Islam dimulai sejak berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di awal 90-an, sehingga beberapa aturan-aturan perundangan justru banyak dinafasi oleh nilai-nilai keislaman.

Dirk Tomsa melihat pada level kekuatan institusi dari partai politik yang partai mengakar pada partai Golkar telah menjadikan partai ini dapat bertahan pada transisi demokrasi sehingga partai ini

dapat melewati pelbagai rintangan termasuk di dalamnya memenangkan pemilu 2004. Pada level institusionalisasi partai adalah bagaimana partai ini dapat meraih kemenangannya melalui pencitraan masa lalu partai politik ini seperti lambang partai: beringin, dan warna partai: kuning.

Dari paparan di atas belum ada kajian ilmiah tentang Partai Golkar dalam era reformasi berkaitan dengan iklim kebebasan informasi di tingkat disertasi. Fokus kajian ini melihat bagaimana kinerja Partai Golkar sebagai partai yang memiliki rekam jejak yang paling panjang pada masa Jusuf Kalla, ketika partai ini telah melewati masa sulit dan menjadi partai yang dominan dalam pemerintahan, justru, gagal meraih simpati dari publik pada saat Pemilu 2009.

Kajian di buku ini diharapkan berhasil melihat politik dengan kacamata komunikasi politik, bukan dari sosiologi politik ataupun antropologi politik. Selama ini kajian komunikasi politik selalu yang dilihat bagaimana sebuah partai politik berhadapan dengan negara ataupun kekuasaan. Kajian di buku ini hendak melihat bagaimana sebuah partai politik sesungguhnya berada di tengah-tengah antara kekuasaan dan masyarakat yang kemudian kelak dijadikan konstituennya. Kajian ini, terutama, melihat bagaimana sebuah partai politik bekas partai penguasa yang berhasil bertahan dari kondisi turbulensi transisi politik, sebagai partai yang merupakan supporting party menjadi ruling party. Secara praktis, kajian di buku ini diharapkan mampu menjadi otokritik terhadap kinerja Partai Golkar selama masa 2004- 2009.

Kajian yang digunakan di buku ini bersifat penelitian kualitatif. Dalam kajian ini, penelitian menoba melihat fenomena sebagai sebuah realitas sosial dengan tujuan mencari jawaban mengapa hal tersebut terjadi. Tujuannya adalah untuk memahami⁵⁴ (verstehen) dari terjadinya peristiwa tersebut bukan sekedar mencari penyebabnya. Inilah yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif yang tujuannya melihat bagaimana terjadinya. Hal ini karena data yang diperoleh melalui posisi pandang dari sudut pandang orang dalam melalui sikap, perilaku, sistem nilai, perhatian, motivasi, aspirasi, kultur dan gaya hidup.

Dalam kajian ini, kami menngunkan wawancara mendalam untuk menggali informasi berkaitan dengan peristiwa yang melatarbelakangi kemunculan pesan politik dari Partai Golkar. Wawancara juga dilakukan untuk memperdetail setting politik dari terjadinya komunikasi politik yang dilakukan oleh Jusuf Kalla ataupun Partai Golkar. Wawancara mendalam dilakukan untuk melihat secara dekat latar belakang responden, orientasi utama mereka dan cara mereka memproses informasi terutama sekali dalam melihat proses

⁵⁴ Norman K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 45.

psikologis dari proses informasi tersebut.⁵⁵

Pilihan wawancara adalah wawancara mendalam, dalam wawancara mendalam pihak yang diwawancarai diberi kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar pertanyaan. Dalam wawancara ini informasi yang diharapkan keluar dari informan adalah informasi yang lengkap atau terjabarkan. Dalam wawancara mendalam pihak peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti, dalam wawancara ini pihak yang diwawancarai mengemukakan gagasan dan perasaannya dalam kondisi yang bebas dan nyaman sehingga pertanyaan yang digunakan dalam wawancara bukanlah pertanyaan yang terstruktur tetapi pertanyaan yang melingkupi seluruh dari pertanyaan penelitian. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa yang akrab dan informal.⁵⁶

Para informan ataupun narasumber yang diwawancarai adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam terjadinya komunikasi politik Partai Golkar di antara mereka adalah Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada waktu itu (2004-2009) bersama dengan Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Penasehatnya; Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada periode sebelumnya (1999-2004); Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum yang melaksanakan program Partai Golkar sehari-hari; Soemarsono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang melaksanakan program teknis keseharian; Fahmi Idris sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu Presiden; Syamsul Mu'arif sebagai Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan dan juga Andi Mattalata dan Priyo Budi Santosa sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen. Narasumber tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam validitas data yang diperkirakan diperoleh pada waktu itu.

Untuk memperkuat data-data temuan, buku ini juga menggunakan kajian pustaka. Sebagai metode, kajian pustaka menjadi model pengumpulan data dengan mengais/mengumpulkan segala macam data-data yang bersifat pemberitaan Partai Golkar pada masa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pidato-pidato yang dilakukan oleh Jusuf Kalla. Selain pidato juga dikumpulkan berita-berita berkaitan dengan peristiwa yang melatar belakangi kemunculan dari ungkapan yang keluar dari pidato tersebut. Selain pidato juga berita-berita yang ada

⁵⁵ Doris A Graber, "Methodological Development Research," dalam Lynda Lee Kaid, *Handbook Of Political Communication Research* (New Jersey : Lawrence Elbaum Associate), hal. 52.

⁵⁶ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial* (Bandung : Rosdakarya, 2004), 195.

di media massa baik cetak maupun non cetak, dengan adanya program digitalisasi media massa cukup berita media dapat dikumpulkan dalam bentuk elektronik. Pengumpulan dokumen atau kepustakaan dalam penelitian ini untuk mendukung keterangan yang diperoleh dari wawancara mendalam.⁵⁷

Dalam metode pengumpulan data seperti ini, komunikasi politik dilihat pada tiap-tiap peristiwa politik yang melibatkan aktor-aktor politik. Sehingga dengan demikian dapat dipotret proses dari komunikasi politik. Partai Politik dilihat melalui para politisi yang menjadi bagian dari partai politik tersebut baik dalam parlemen (legislatif) ataupun dalam eksekutif. Jika dalam eksekutif dilihat apakah perannya dalam legislasi sedangkan dalam eksekutif seperti apakah perannya dalam pembuatan kebijakan.

Lebih jauh, kajian buku ini juga menggunakan metode analisa yang digunakan adalah dengan merunut pelbagai peristiwa yang terjadi dimana politisi Partai Golkar (baik di legislatif maupun di eksekutif) sebagai komunikator terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam metode ini dianalisa isu yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana Partai Golkar melakukan pemosisian dan mengolah isu tersebut. Selain itu juga dilihat efek yang dihasilkan dalam isu tersebut.

Dalam metode ini dianalisa bagaimanakah pesan-pesan dari partai politik itu muncul sehingga memberikan efek bagi khalayak. Pesan-pesan ini dilihat dalam setiap pernyataan yang disampaikan dalam pelbagai saluran komunikasi seperti tanggapan, komentar, pembelaan, pidato ataupun sikap yang disampaikan berkaitan dengan peristiwa politik sehingga tampaklah message dalam prose komunikasi politik tersebut.

Pesan politik ini bisa dilihat juga sebagai sebuah retorika yakni, satu keterampilan purba yang sudah lazim dimiliki oleh politisi dalam berbicara di muka umum (public speaking) hanya saja retorika adalah perangkat yang lazim dilakukan oleh politisi dalam melakukan komunikasi politik. Retorika dapat dilacak hingga masa Aristoteles seorang yang menulis risalah tentang retorika.⁵⁸ Sedangkan retorika secara praktik adalah keterampilan milik seorang senator unggulan masa Yunani kuno yakni Cicero. Seorang senator yang memihak kepada kepentingan warga Kota Athena pada waktu itu. Maka retorika yang dapat kita lihat adalah pada saat politisi partai politik memberikan pernyataan, pidato ataupun sikap didepan publik berkaitan dengan sikapnya sebagai bagian dari partai politik ataupun penyelenggara pemerintah (jika sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan). Peristiwa, pesan ataupun efek yang dihasilkan

⁵⁷ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial* (Bandung : Rosdakarya, 2004), 195.

⁵⁸ Arthur Asa Berger, *Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approach* (California : Sage Publication, 2000), 53.

dengan melihat isi dari pemberitaan media. Fokus isu yang hendak dianalisa adalah fokus isu yang berkaitan dengan kemaslahatan publik yang menjadi perhatian Partai Golkar baik di parlemen, maupun di eksekutif.

D. Susunan Bab

Bab satu memaparkan pendahuluan berisi tentang latar belakang yang memaparkan setting politik Indonesia terakhir yang memaparkan pudarnya politik aliran dalam peta politik Indonesia dan pertarungan komunikasi politik para calon presiden. Bab satu juga memaparkan tentang identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kesimpulan besar, metodologi penelitian yang digunakan.

Bab dua memaparkan tentang tinjauan teoritis komunikasi politik yang memaparkan tentang definisi komunikasi politik, komponen-komponen komunikasi politik, partai politik, perselisihan kepentingan dan pencitraan.

Bab tiga memaparkan tentang perjalanan partai dari masa orde baru (sebelum jadi partai) dengan memaparkan sekilas sejarah Golkar mulai dari akar semangat Golkar dan pengalaman Golkar dalam pemilu-pemilu dari tahun 1971 hingga 1997 pada masa Orde Baru. Pada masa reformasi dipaparkan peralihan komunikasi politik dari tipe di masa orde baru kepada tipe komunikasi politik pada iklim yang lebih terbuka. Dalam bab ini dipaparkan bagaimana peran akbar tandjung sebagai orang yang berperan besar dalam menyelamatkan partai golkar dari tekanan publik yang terjangkiti euphoria keterbukaan. Pemaparan dalam bab ini memaparkan secara kesejarahannya Golkar.

Bab empat memaparkan tentang bagaimana komunikasi politik Partai Golkar pada masa Jusuf Kalla yang terlihat pada program-program partainya. Pada bab ini melihat bagaimana kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan programnya, kesenjangan itu memperlihatkan betapa kinerja organisasi disebabkan konsentrasi komunikasi politik disebabkan oleh perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini tampak pada bagaimana partai ini tidak bisa mengharmoniskan hubungan antar elit dalam partai politik tersebut. selain itu bab ini juga memaparkan tentang memapar tentang pencitraan yang dibuat oleh Partai Golkar begitu buruk disebabkan adanya perselisihan kepentingan perselisihan.

Bab lima melihat bagaimana kepemimpinan dalam partai golkar mempengaruhi efek komunikasi politik melalui bagaimana perbandingan citra Partai Golkar dengan partai lainnya, ini untuk melihat bagaimana pengaruh efek dari karakter berkomunikasi Partai Golkar ternyata mempengaruhi pencitraan dari partai lain. Efek ini yang kemudian mempengaruhi hubungan antar elit yang memburuk.

Bab enam memaparkan tentang kesimpulan dengan melihat level yang paling berpengaruh dalam komunikasi yang mempengaruhi kegagalan komunikasi politik Partai Golkar. Pada bab ini pun dibahas tentang faktor apakah yang menjadi penyebab kegagalan pada level tersebut.

BAB II

Komunikasi Politik: Teori dan Praktik

A. Apa itu Komunikasi Politik?

Komunikasi politik di dalam kajian akademis memiliki beberapa pengertian dan konsep. Jarvis dan Soo-Hye, misalnya, melihat komunikasi politik sebagai pertukaran pesan yang disampaikan oleh petinggi negara, media dan masyarakat warga.⁵⁹ Sementara Brian McNair melihat komunikasi politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh politikus dan pelaku politik demi tujuan tertentu. Menurutnya, komunikasi politik ini dialamatkan kepada para pelaku politik oleh kalangan non-politisi seperti pemilih dan kolumnis yang sering menulis di surat kabar. Komunikasi tentang pelaku politik dan tindakan mereka, sebagaimana yang termuat dalam laporan berita, editorial dan bentuk diskusi politik dalam media.⁶⁰

Sementara Rush dan Althoff melihat komunikasi politik sebagai satu rangkaian dalam sosiologi politik. Komunikasi politik adalah proses diteruskannya informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem politik.⁶¹ Lasswell melihat komunikasi politik sebagai kegiatan dari seseorang (komunikator) yang mengatakan sesuatu (pesan) melalui (saluran) media kepada orang lain (komunikasi) dan yang berakibat (efek).⁶² Chaffee melihat komunikasi politik sebagai peran komunikasi dalam proses politik.⁶³ Sementara pengertian komunikasi politik menurut Nimmo, adalah kegiatan komunikasi yang dianggap mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.⁶⁴

Komunikasi politik sebagai kegiatan manusia dapat dilacak

⁵⁹ 1Sharon E Jarvis dan Soo-Hye Han, "Political Communication" dalam H. Dan O'Haire and William F. Eadi 21st Century of Communication Handbook (California: Sage Reference Publication, 2009), 794.

⁶⁰ Brian McNair, Introduction to Political Communication, 3rd edition (London: Routledge, 2003), 4.

⁶¹ Michael Rush and Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Drs. Kartini Kartono, terj.), Jakarta: CV Rajawali : 1983, h. 23.

⁶² Everett M. Rogers, "Theoretical Diversity in Political Communication" dalam Lynda Lee Kaid, Handbook of Political Communication Research (Mahwah: LEA Publication, 2004) ,5.

⁶³ Chaffee 1975, hlm 15.

⁶⁴ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, cet.keenam (Bandung: RosdaKarya, 2005), 9 terjemahan dari Dan D Nlmmo, Political Communication and Public Opinion in America, (Newyork: Goodyear Publishing, 1984).

keberadaannya sejak masa Yunani Kuno. Salah satu tokoh komunikasi politik masa itu adalah Aristoteles tentang Retorika.⁶⁵ Karya ini berisi tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain (persuasi) demi kepentingan politik. Retorika melihat bagaimana kekuasaan dibicarakan dalam panggung politik. Ini sejalan dengan pendapat Dan Nimmo yang melihat komunikasi politik bermula dari pembicaraan politik, atau disebutkan oleh Dan Nimmo bahwa politik adalah pembicaraan politik.⁶⁶

Komunikasi politik berlangsung ketika sebuah kekuasaan menjadi sesuatu yang menonjol (salient), baik tentang bagaimana kekuasaan dicapai, diperebutkan, dijalankan atau pun dibagi dalam sebuah institusi modern yang bernama negara. Jarves dan Han memaparkan asumsi dari komunikasi politik. Pertama, prosesnya yang dinamik, ini tidak secara otomatis. Hal yang paling baik dari politik adalah para politisi, media atau warga negara dapat mengontrol hanya sebagai pesan kekuatan politik lainnya. (termasuk kandidat dari pihak yang berseberangan, partai politik yang lainnya, dan kepentingan iklan). Media atau warga negara akan mempertanyakan dan menentang setiap pernyataan. Para psikolog politik memberi catatan, seseorang akan mengerti pesan politik melalui jalan yang rumit, seringkali memproses data yang masuk melalui stereotip personal yang bersifat reaksi personal kepada si pembicara, dan respon emosional kepada isi pesan. Jadi ketika para pemimpin politik dan media memiliki sumber untuk memulai percakapan politik, kekuatan-kekuatan lainnya juga membentuk lingkup dan arahan diskusi politik.

Kedua, komunikasi politik terikat pada kekuasaan. Beberapa sarjana komunikasi politik mempelajari kampanye, pemerintahan, dan kebijakan publik. Elite politik membicarakan rencana untuk mengalokasikan sumber. Percakapan antara elit politik, media dan warga negara, untuk alasan ini, memberi ciri negosiasi yang terjadi pada saat itu untuk mengontrol agenda politik.

Ketiga, komunikasi politik selalu dipandu oleh perhatian yang bersifat normatif. Perhatian normatif ini memandu pertukaran informasi antara elite politik, media dan warga negara yang memberikan sumbangan terbaik pada pemerintahan yang efektif dan baik. Keempat, komunikasi politik terjadi dalam konteks. Seluruh pesan dan pesan dipengaruhi oleh norma dan budaya dalam sebuah sistem, struktur hukum dan ekonomi di satu tempat dan saluran atau medium yang padanya entitas-entitas itu

⁶⁵ Aristoteles, *Rhetoric*, terj. W. Rhys Roberts, dalam Jonathan Barnes (eds), *Complete Works of Aristoteles* (Princeton: Princeton University Press, 1991).

⁶⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, 8.

dikomunikasikan.

Kelima, komunikasi politik lebih dekat dengan warga negara daripada aktivitas politik. Artinya, apa yang diungkapkan oleh para politisi akan sangat diperhatikan oleh masyarakat awam, warga negara. Bahasa politik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana diperkenalkan oleh pemahaman politik, membingkai kemungkinan politis dan mencegah isu-isu tertentu atau kebijakan yang rentan untuk diperdebatkan.⁶⁷

Selain asumsi, Jarves dan Han melihat komunikasi politik sebagai kegiatan yang dapat mempertahankan sistem demokrasi. Komunikasi politik melihat warga negara bukan sekadar sesuatu yang mati, tetapi juga sebagai organisme yang hidup. Komunikasi politik menghubungkan antara pemimpin dengan publik. Pemimpin selalu menyampaikan pesannya kepada publik untuk memperoleh dukungan untuk setiap kebijakan ataupun keputusan yang dia ambil. Sebaliknya, publik pun memberikan tuntutan mereka kepada pemimpin. Pemimpin dalam konteks politik demokrasi berada dalam sebuah kelembagaan partai politik. Pemimpin dapat menyampaikan pesan tersebut sebagai perwakilan partai politik, yang membawa visi dan misi partai politik, ataupun menyampaikan pesan politik sebagai pemimpin yang memimpin anggota masyarakat.

1. Aktor Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik terdapat tiga aktor yang berperan menonjol.. Pertama, komunitas politik yang terdiri dari organisasi politik seperti politisi dan partai politik; organisasi sosial kemasyarakatan; dan penyelenggara negara. Kedua, media massa. Ketiga, anggota masyarakat.⁶⁸ Komunitas politik secara mutlak adalah aktor komunikasi politik yang paling utama. Awalnya, komunitas politik adalah penyelenggara negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain penyelenggara negara, terdapat partai politik yang menjadi saluran dari setiap aspirasi dari anggota masyarakat. Namun, pada akhir abad 20-an dan awal abad 21, Brian McNair menambahkan satu aktor komunikasi politik, yakni organisasi penekan. Ini berkaitan dengan adanya isu terorisme yang menjadi ancaman bagi banyak warga dunia.⁶⁹ Komunikasi politik antara satu dengan yang lainnya sering terjadi dalam komunitas politik ini, seperti antara politisi dari partai politik

⁶⁷ Sharon E Jarvis dan Soo-Hye Han, "Political Communication" dalam H. Dan O'Haire and William F. Eadi 21st Century of Communication Handbook (California: Sage Reference Publication, 2009), 794-795.

⁶⁸ McNair, Introduction to Political Communication, 3rd edition , 9.

⁶⁹ Brian McNair, Introduction to Political Communication , 9.

dengan tokoh masyarakat dari organisasi sosial kemasyarakatan. Ada pula sebuah pesan yang disampaikan oleh penyelenggara negara kepada publik, namun sesungguhnya pesan itu ditujukan kepada anggota parlemen.

Penyelenggara negara memiliki kepentingan dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, agar masyarakat luas mendukung keputusan ataupun kebijakan yang diambilnya. Komunikasi politik bisa disampaikan melalui program sosialisasi, atau pun penjelasan mengenai satu keputusan dari penyelenggara negara mengenai kebijakan yang sekiranya akan mendatangkan keberatan dari warga negara. Komunikasi politik digunakan untuk mengurangi kadar kontroversi dari kebijakan tersebut. Apalagi, jika penyelenggara negara ini berasal dari unsur partai politik, komunikasi politik amat dibutuhkan untuk mengurangi dampak benturan opini publik yang negatif, yang berpotensi menghantam legitimasi kekuasaan penyelenggara negara tersebut.⁷⁰

Partai politik melakukan komunikasi politik dengan tujuan memperoleh dukungan dari masyarakat, untuk memperoleh kursi kenegaraan baik dalam legislatif maupun dalam eksekutif. Dalam penyelenggaraan negara, partai politik yang tidak menduduki jabatan eksekutif mengambil tempat sebagai oposisi yang selalu mengkritisi setiap kebijakan dari penyelenggara negara. Sementara, partai politik yang menjadi pendukung dari penyelenggaraan Negara akan selalu memberi dukungan dalih dalam setiap kontroversi kebijakan negara.⁷¹

Kebijakan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara tidak selalu menjadi perhatian dari partai politik. Organisasi publik sering memberikan perhatian pada setiap kebijakan publik. Organisasi publik memberikan dukungan atau penentangan bagi kebijakan tersebut, untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka biasanya mewakili publik untuk menyuarakan aspirasi atau pun pesan dari kelompok tertentu. Melalui komunikasi politik, partai politik harus mempertimbangkan setiap pesan politik kepada masyarakat warga, untuk mendapatkan dukungan dan mencapai jabatan publik dalam lembaga negara. Dari sini tampak, betapa komunikasi dapat mempengaruhi agenda politik.⁷²

⁷⁰ Brian McNair, *Introduction to Political Communication*, 13.

⁷¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, 45.

⁷² Brian McNair, *Introduction to Political Communication*, 15.

Dalam menyampaikan pesan politik, komunikator menggunakan media massa. Media massa dapat mempengaruhi pikiran publik, sehingga sebuah isu menjadi menonjol dan dianggap penting oleh publik. Media dapat dilihat sebagai sistem parapolitik atau politik samping. Apa yang terjadi pada media hampir merupakan gambaran dari sistem politik yang sedang berlangsung. Jika mengacu pada komunikasi politik klasik, media memang merupakan saluran dari penyampaian pesan politik kepada komunikator. Namun sesungguhnya media memiliki kinerja tersendiri dalam proses komunikasi politik tersebut. Media dan politisi saling berinteraksi, bernegosiasi mencapai tujuan, melewati prosedur (dalam kaitannya dengan pemilu), bahkan mengontrol agenda publik (dalam kaitannya penguatan demokrasi ataupun dalam pengusungan kepentingan umum).⁷³

Media dalam hal ini bisa digunakan sebagai sumber dan pengarah untuk menganalisis komunikasi politik dalam beberapa konteks. Bahkan dalam konteks proses demokratisasi yang baru, media memiliki kecocokan dengan kajian komunikasi politik. Asumsi dasarnya, sistem pendekatan teoritis yang memiliki beberapa perubahan dalam satu komponen sistem, menyebabkan perubahan perilaku dan orientasi aktor lainnya dan dapat mencoba mengadaptasi kondisi baru dengan mendefinisikan ulang strategi komunikasi. Sebagai tambahan, sistem komunikasi politik merespon perubahan dalam lingkup tempat berlangsungnya komunikasi politik yang lebih luas, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik, hambatan krisis internasional, ataupun kemunculan teknologi komunikasi yang baru seperti internet.⁷⁴

Media massa berperan sebagai tautan utama antara pemerintah, partai politik, kandidat, dan sebagainya. Media juga berperan sebagai tautan utama dengan para pemilih, untuk memberikan kesempatan komunikasi langsung kepada warga negara dan perwakilan mereka yang secara ekstrim dibatasi skala jangkauan audiens dan rentangan cakupan isu. Bagaimanapun juga media bukan sekadar saluran untuk menyampaikan pesan politik dari politisi kepada para pemilih. Mereka juga partisipan aktif dalam menciptakan pesan politik, kendati seringkali media bukanlah yang mengawali pesan

⁷³ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", dalam Katrin Voltmer, *Mass Media and Political Communication in New Democracies* (Newyork: Routledge, 2006), 6

⁷⁴ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 3.

tersebut. Namun media dapat memberikan dampak yang signifikan pada apa yang dikomunikasikan dalam public-sphere, dan apa yang dihilangkan, melalui setting agenda debat publik. Terjadi negosiasi antara media dan politisi berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, terutama berkaitan dengan agenda publik.

Hal yang cukup penting adalah bagaimana perkara politik ditampilkan dalam media. Melalui dramatisasi, personalisasi dan visualisasi yang dapat menarik pandangan mata, yang merupakan contoh yang baik menurut jurnalis, sehingga bisa menjadi cerita yang baik.⁷⁵ Jurnalis suka melihat pro-kontra dalam konflik politik. Jurnalis menganggapnya sebagai ritual strategis yang digunakan untuk melindungi mereka dari setiap tuduhan pendistorsian kebenaran. Keseluruhan paket aturan jurnalis-kerutinan dalam mengumpulkan informasi, kriteria seleksi dan gaya penyuguhan berita—sering dimaknai sebagai logika media. Secara signifikan ini berbeda dari moda komunikasi publik lainnya, seperti contoh, gaya persuasif yang terbuka dari logika partai, terutama dalam kampanye pemilihan umum.

Media massa sering menjadi wahana para politisi dalam membina hubungan dengan khalayak.⁷⁶ Media massa menyediakan informasi-informasi keseharian yang mudah dikonsumsi. Publik membutuhkan informasi-informasi yang sesuai dengan nilai-nilai apa yang mereka miliki. Nilai pribadi dan nilai sosial sering menjadi sebuah pertimbangan dari setiap perilaku politik dari para politisi, meskipun kemudian antara politik dan hiburan menjadi samar. Publik menyeleksi informasi-informasi yang disukainya pada pendekatan uses and gratification. Sementara pada pendekatan agenda publik-agenda media, politisi menggunakannya untuk menarik perhatian publik terhadap isu yang menarik simpati. Logika media menghubungkan antara keduanya, sehingga media massa menjadi pertemuan antara politisi dan publik.⁷⁷

Pemberitaan media bergantung pada iklim demokrasi yang sedang berlangsung. Dalam iklim konsolidasi demokrasi yang baik, kinerja perwakilan elite yang berorientasi demokratis

⁷⁵ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 8.

⁷⁶ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 9.

⁷⁷ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 4.

bertindak dalam nilai-nilai kepentingan demokratis dan integrasi nasional. Media berada di tengah-tengah kepentingan publik dan nasional. Media juga bermain untuk memenangkan hati publik, sehingga dapat mengarahkan pada pandangan politik tertentu. Dalam kondisi politik yang tertekan, media yang paling berperan adalah media baru (internet).⁷⁸

Posisi partai politik dalam iklim konsolidasi politik sangat tergantung pada media. Media bahkan menjadi perluasan dari kinerja organisasi kepartaian. Media menjadi faktor penyebab menurunnya identifikasi partai (party identification), sehingga menyebabkan kelenturan (volatility) electorate publik. Ini bersamaan dengan menurunnya tingkat keikutsertaan (turnout), dan meningkatnya angka pemilih mengambang (floating voters). Partai-partai kehilangan massanya karena kinerja komunikasi tradisional menurun. Proses yang bekerja dalam komunikasi politik adalah amerikanisasi dalam kampanye politik, yakni menyampaikan pesan politik dengan menggunakan manipulasi media dalam pengemasan pesan politik. Caranya menggunakan peniruan logika media (adalah strategi dari media dalam memelihara hubungan dengan audiens). Kampanye politik dilakukan dengan menciptakan citra yang baik bagi pelaku politik, sehingga mendapatkan persepsi yang baik dari publik.

Pelaku politik yang memiliki hubungan cukup baik dengan media akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenangkan pemilihan. Partai politik yang sebelumnya didukung atau milik penguasa pada era post- transisi sering kehilangan dukungan dari masyarakatnya, sehingga tersapu dalam lanskap perpolitikannya. Biasanya partai yang menggunakan media massa adalah partai yang tidak memiliki akses untuk mengkonsolidasi secara langsung dukungan dari masyarakat.⁷⁹

Warga negara sendiri sering dilihat memiliki peran yang kecil dalam sistem komunikasi politik. Ini tentu berbeda dengan media dan politisi. Suara masyarakat jarang terdengar dalam publik, kecuali mereka berhasil mengorganisasi diri demi tindakan kolektif yang efektif atau pun dalam unjuk rasa. Kendati demikian publik bukanlah formasi yang tidak penting dalam komunikasi politik. Sebaliknya; menggerakkan dukungan massa sering dijadikan sebagai tujuan dari aktivitas media dan

⁷⁸ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 8-9.

⁷⁹ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 13.

aktor politik. Preferensi warga dapat membentuk cara bagaimana sebuah pesan politik disampaikan dalam public-sphere. Publik lebih mudah dalam menerima tujuan akhir dalam proses komunikasi politik daripada membentuk isu dan membentuk pesan politik. Maka dalam proses komunikasi, hubungan yang terjadi terbagi menjadi dua, yakni hubungan vertikal dan hubungan horisontal. Hubungan horisontal terjadi antara media massa dan para pelaku politik, sedangkan hubungan vertikal adalah antara pelaku partai politik dan warga negara.⁸⁰ Peran antara pelaku politik (politisi) maupun media massa menjadi hal yang diperdebatkan berkaitan dengan siapakah yang paling menentukan dalam komunikasi politik.

2. Komponen-Komponen Komunikasi Politik

Jika melihat secara komponen maka komponennya terdapat lima komponen yakni: Komunikator, Pesan, Saluran, Komunikan (khalayak), dan Efek.

a. Komunikator

Komunikator adalah komponen pertama dalam komunikasi politik. Setiap pesan dalam komunikasi politik selalu diasumsikan harus memiliki komunikator yang menyampaikan pesan. Ini berarti setiap pesan dalam komunikasi politik selalu value-laden atau bermuatan nilai. Komunikator berada dalam satu setting politik yang mewarnai nilai cara berkomunikasi komunikator tersebut. Dan Nimmo membagi para komunikator itu dalam tiga, yakni para politisi dalam partai politik atau pun lembaga perwakilan, para penyelenggara negara yang terdapat dalam lembaga eksekutif atau pun lembaga yudikatif. Selain itu juga terdapat pula kalangan komunikator profesional, seperti para jurnalis yang terkadang memberikan opini ataupun timbangan pendapat. Menurut Brian McNair, komunikator adalah mereka yang berkepentingan dengan isu publik atau pun pencetus isu yang menjadi perhatian publik, yakni penyelenggara negara, politisi, petinggi organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun organisasi penekan. Perbedaan McNair dengan Dan Nimmo adalah pada asumsi dari konstelasi komunikasi politik awal abad 21 berkembang sedemikian rupa, terutama berkaitan dengan bermunculannya isu terorisme yang kini menjadi hantu bagi masyarakat

⁸⁰ Katrin Voltmer, "The Mass Media And The Dynamics Of Political Communication In Process Democratization: An Introduction", 14.

dunia.⁸¹

Para politisi yang dimaksudkan oleh Dan Nimmo adalah mereka yang memiliki jabatan struktural dalam organisasi partai politik, seperti ketua umum partai. Ada dua perangkat yang menentukan karakter kepemimpinan seseorang, yakni tugas dan emosi. Tugas adalah pertimbangan sosok yang melakukan peran dalam menetapkan dan bekerja untuk mencapai prestasi atau tujuan kelompok, mengorganisasi agar pekerjaan dapat diselesaikan, dan menetapkan standar prestasi bagi anggotanya. Kegiatan inilah yang kemudian berorientasi pada tugas. Sementara ada pula perangkat lain yang menjadikan kegiatan berorientasikan pada orang, sosial, dan emosi yang merupakan perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan pengikutnya. Dua perangkat ini yang kemudian akan menentukan pola komunikasi dan pola penyelesaian masalah dalam organisasi dan dalam mengorganisasikan pekerjaannya.⁸²

Pemimpin juga harus memenuhi perkiraan pengikutnya mengenai standar perilaku yang harus dilakukan. Pemimpin tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Hal ini dikarenakan pemimpin itu berada pada struktur sosial ataupun kelompok organisasi. Pemimpin jenis ini adalah tokoh ternama yang memiliki reputasi kepribadian ataupun prestasi lainnya, sehingga orang menganggap dia sebagai pemimpin. Pemimpin inilah yang sering disebut dengan pemimpin simbolik. Dia bekerja sebelum, tanpa dan dapat dihalangi oleh organisasi (beyond organisation). Pemimpin seperti ini biasanya hadir karena berani dan berhasil memanfaatkan unsur dramatik kepemimpinan simbolik, dengan menggunakan peringkat emosi pada saat kebutuhan akan sosok kepemimpinannya.⁸³

Berdasarkan hubungan antara pengikut dan pemimpin, pemimpin biasanya menempa hubungan dengan pengikutnya melalui kepuasan material, sosial dan emosional yang diturunkan dari keikutsertaan politik. Pemimpin juga harus berhasil memuaskan ekspektasi pengikutnya. Ini bisa dapat diukur melalui survey atau polling yang melihat citra pemimpin bagi kalangan

⁸¹ Brian Mc Nair, Introduction of Political Communication,, 9-10.

⁸² Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 38.

⁸³ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 40.

pengikutnya. Biasanya pemimpin yang gagal meraih ekspektasi kepuasan pengikutnya bisa dapat dilacak melalui karakteristik sosial dari pemimpin tersebut, seperti status sosial ekonomi yang berada di lapisan teratas dari masyarakat. Bisa juga pemimpin itu mengutamakan profesionalisme kepemimpinannya dalam organisasi, sehingga lebih mementingkan nilai-nilai profesionalisme daripada memenuhi ekspektasi publiknya, atau adanya motif untuk melakukan perubahan kondisi para pengikutnya.⁸⁴

b. Pesan

Pembicaraan politik terkadang dilakukan dengan tujuan untuk merundingkan penyelesaian perselisihan yang dapat diterima: negosiasi politik. Tujuan untuk mencapai persetujuan yang bisa diterima, sehingga menciptakan pengharapan bersama mengenai bagaimana pihak-pihak akan bertindak satu dengan yang lainnya.⁸⁵ Dalam pembicaraan ini kekuasaan dibagi antara pihak-pihak melalui janji ataupun ancaman, dorongan dan peringatan yang sering digunakan sebagai alatnya.

Melalui pembicaraan inilah, para komunikator menyampaikan pesannya sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Politik adalah pembicaraan ini karena kekuasaan, pengaruh, otoritas disampaikan di dalamnya, bahkan terjadinya konflik dan tercapainya konsensus pun ada di dalamnya.⁸⁶

Sifat pembicaraan politik mengandung unsur bahasa yang khas, sehingga menciptakan makna baru bagi kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata politik melampaui ungkapan yang dikatakan ataupun dituliskan. Ini dikarenakan setiap kata-kata dalam setting politik selalu dimaknai secara simbolik, sehingga pembicaraan politik adalah kegiatan simbolik. (contoh kasus demonstrasi yang mengkritik SBY dengan membawa kerbau).⁸⁷

Pembicaraan politik terdiri dari unsur-unsur lambang dan interpretasi. Hubungan ini bisa digambarkan dalam

⁸⁴ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 42.

⁸⁵ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 74.

⁸⁶ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 79-83.

⁸⁷ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 84-93.

bentuk hubungan segitiga. Pemaknaan dalam pembicaraan politik tidak pernah menggunakan makna-makna denotatif atau makna pertama, sebagaimana dalam percakapan sehari-hari. Namun lebih bermakna konotatif atau makna kedua. Ini sangat dipengaruhi pada hubungan antar-komunikator politik dalam setting politik tersebut. Hubungan yang mesra akan memunculkan simbol-simbol yang dipergunakan oleh komunikatornya yang menyejukkan hubungan antara keduanya, sedangkan hubungan yang hangat akan memunculkan penggunaan simbol-simbol yang membuat hubungan pun semakin panas. Maka dapat dilihat, betapa pemaknaan kata-kata dalam pembicaraan politik sangat tergantung pada hubungan antara satu komunikator dengan yang lainnya, berdasarkan kepentingan dan pengambilan peran bersama.⁸⁸

Akhirnya, setiap komunikator menyampaikan pesannya dalam permainan kata yang dengan memperhatikan medan pemaknaan bagi lawan ataupun sekutunya. Dengan begitu pesan yang hendak disampaikan sampai pada komunikator. Dalam penyampaian pesan, komunikator menyampaikannya melalui peran sintaktika dan pragmatika, yang artinya setiap kata disampaikan pada susunan kalimat tertentu, pada tekanan nada tertentu, dalam situasi tertentu, sehingga menampakkan pesan yang maknanya tertangkap oleh komunikator lawan. Penggunaan pragmatik juga berakibat pada penggalangan massa. Jika pada hubungan antara komunikator politik itu terdapat keseimbangan, ancaman berikutnya adalah pesan yang akan melahirkan dukungan dari massa. Pembicaraan seperti ini bisa dilakukan secara ancaman atau provokasi. Pesan juga disampaikan melalui persuasi politik seperti propaganda, periklanan dan retorika. Tujuan persuasi adalah mengantisipasi terjadinya konflik, mengagregasi dukungan ataupun pembelaan diri.⁸⁹

c. Saluran

Saluran adalah sebuah jalan pesan itu disampaikan, in which channel, pesan tersebut disampaikan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan pesannya yang berkaitan dengan

⁸⁸ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 113.

⁸⁹ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, 123.

kepentingannya, yakni dalam saluran massa, interpersonal dan organisasi.

Saluran massa disampaikan dalam setiap ritual sosial maupun politik, Ritual berarti kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti perayaan hari besar keagamaan, secara interpersonal hubungan satu komunikator dengan yang lainnya, baik dalam setting partai politik ataupun dalam setting politik nasional. Sementara organisasi berada pada lingkup komunikasi organisasi, tentang bagaimana sebuah organisasi menerjemahkan visi untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah mengagregasi dan mengumpulkan kebutuhan dan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh anggota dan pendukungnya. Selain itu, menyosialisasikan dan mendidik pemilih dan warga negara dalam pemfungsian sistem politik dan pemilihan umum, dan menggerakkan nilai- nilai politik yang umum. Ia juga mengimbangi tuntutan yang berlawanan dan mengonversikan menjadi kebijakan yang baik untuk semua; mengaktifkan dan menggerakkan warga negara ke dalam keikutsertaan pilihan politik, dan mengubah bentuk pendapat mereka ke dalam pilihan kebijakan yang layak. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah menyalurkan opini publik dari masyarakat untuk pemerintah, dan merekrut dan melatih sosok yang akan dicalonkan ke dalam partai politik.⁹⁰

d. Khalayak

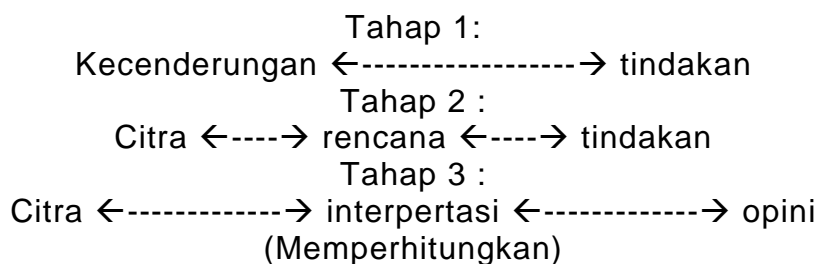
Mengukur efektivitas dalam komunikasi politik adalah dengan melihat opini publik. Secara mendasar opini adalah pemaknaan seseorang terhadap sebuah objek.⁹¹ Opini publik adalah pemaknaan publik atas pesan politik yang disampaikan oleh komunikator. Objek ini bisa berupa manusia, tempat, peristiwa, gagasan atau kata-kata. Opini publik tersebut berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam melakukan sesuatu pada situasi tertentu. Kecenderungan ini dibentuk melalui pemaknaan terus-menerus terhadap objek dalam kegiatan komunikasi memberi dan diberi. Kaitannya dengan komunikasi politik, opini publik dapat membantu dalam membaca kecenderungan tindakan publik berkaitan dengan kepentingan politik publik tersebut. publik kepemimpinan (politikus dan komunikator profesional), publik atentif,

⁹⁰ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, 166.

⁹¹ Walter Lipman, *Opini Publik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 3-29.

publik umum (yang berminat dan yang tidak acuh).⁹²

Khalayak juga memiliki kapasitas imaging berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kapasitas imaging adalah kemampuan yang dimiliki dalam menilai objek pesan dalam situasi tertentu, dengan pertimbangan baik ataupun buruk. Kapasitas ini berkaitan dengan aktivitas kognisi, karena objek yang disampaikan adalah sesuatu yang sebelumnya sudah dipelajari, kemudian dipertimbangkan melalui nilai baik dan buruk, sehingga ada keputusan untuk menerima ataupun menolaknya. Imaging secara sederhana dibahasakan sebagai membayangkan apa yang kira-kira ada di depannya untuk kemudian diterima ataupun ditolak. Dan Nimmo menggambarkan dalam bentuk hubungan sebagai berikut :⁹³



Citra, opini dan tindakan merupakan kapasitas publik yang memandunya dalam melakukan tindakan, terutama dalam tiga hal. Pertama, dalam memahami peristiwa politik tertentu; kedua menjadi dasar dalam menentukan benar atau salahnya objek politik; dan ketiga, menjadi dasar untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain.

Sementara interpretasi adalah kapasitas untuk memperhitungkan segala sesuatu, menyusunnya, dan menanggapi yang paling menonjol. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memperhitungkan tersebut, antara lain keadaan internal dari individu yang bersifat psikologis, karakteristik demografi, karakteristik sosial, preferensi partisan. Pertimbangan resmi atau formal kelembangaan, sumber komunikasi (komunikator), objek politik (tema yang disampaikan dalam pesan oleh komunikator), dan setting politik yang menjadi latar belakang adanya pembicaraan

⁹² Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (Bandung: Rosdakarya, 2000), 4-25.

⁹³ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, 3-20.

mengenai objek politik tersebut.⁹⁴

Opini publik⁹⁵ dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai pengharapan. Kepercayaan berkaitan dengan aspek kognitif dari citra dan interpretasi, yang di dalamnya terkandung kredulitas (sebuah keadaan yang menyebabkan seseorang mudah percaya). Sumber kepercayaan ini bisa berasal dari kepercayaan primitif ataupun dari kepercayaan tingkat tinggi. Kepercayaan primitif adalah sesuatu yang kita percaya karena penerimaan panca indera kita. Selain itu juga terdapat kepercayaan primitif berikutnya sesuatu yang dipercayai karena adanya otoritas eksternal yang menetapkan pandangan kita. Contohnya adalah ajaran dari orang tua kita.

Kepercayaan tinggi adalah sesuatu yang dipercayai setelah melakukan pertimbangan rasional. Biasanya kapasitas ini dimiliki pada saat seseorang menjadi dewasa. Sementara nilai adalah adalah preferensi yang dimiliki orang pada tujuan tertentu atau cara tertentu dalam meakukan sesuatu. Preferensi ini sangat erat asosiasinya dengan isi afektif, atau perasaan, citra personal yang membantu orang dalam menilai diri sendiri dan lingkungannya. Seperti kepercayaan, nilai bervariasi dalam hal arahnya (suka lawan benci), intensitas (kuat, sedang, lemah) dan pentingnya nilai tersebut bagi seseorang. Pengharapan adalah perkiraan sesuatu yang disadari atau tidak tentang sebuah tindakan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengharapan ini berkaitan dengan aspek konatif, atau kecenderungan dari citra personal dan diproses secara interpretatif lihat tabel Dan Nimmo di atas.

e. Efek

Dari komunikasi politik ini, akibat adalah apa yang diharapkan oleh seorang komunikator. Dalam komunikasi politik, efek bisa dilihat dari seberapa banyak dukungan yang diberikan dalam pemilihan umum. Ini menunjukkan seberapa efektif sebuah tindakan komunikasi dilakukan oleh politisi ataupun partai politik dalam menyampaikan pesannya kepada publik. Tentu saja sesungguhnya telah dijelaskan dalam bagian-bagian di atas, bahwa

⁹⁴ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, 3-15.

⁹⁵ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, 16-30.

konsekuensi ini dapat dilihat dalam opini publik. Opini publik hanyalah alat pengukurnya belaka, sedangkan sesungguhnya yang dilihat adalah psikososial dari publik tersebut, seperti kepribadian yang merupakan konfigurasi yang relatif terorganisir dari pola khas antara kepercayaan, nilai dan pengharapan.⁹⁶

Selain itu juga pesan yang disampaikan berkaitan dengan norma sosial dan nilai yang dipegang oleh individu pada publik tersebut. Terjadi pertemuan dimensi sosial dan dimensi pribadi pada titik ini. Dimensi sosial terdapat pada norma sosial yang menjadi latar belakang dari individu yang menerima pesan dari komunikator, sementara pada dimensi nilai adalah preferensi yang dimiliki oleh individu pada pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dalam hal ini, sampai tidaknya satu pesan tergantung pada kebutuhan dari publik yang membutuhkan pesan tersebut, yang kemudian dipengaruhi oleh partisipasi.⁹⁷

Partisipasi ini dilihat melalui tingkatan yakni pada niatannya, intensitasnya dan juga posisi fungsinya. Secara niatan, partisipasi bisa dilihat sebagai partisipasi yang mendukung atau menuntut artinya keikutsertaan. Ini disebabkan adanya satu kebutuhan yang menentukan masa depannya. Dari sisi intensitas, partisipasi bisa dilakukan secara terus-menerus ataupun terputus-putus, dan pada posisi fungsinya sehingga keikutsertaannya memang diniscayakan pada posisi fungsi dalam politiknya, seperti posisi fungsinya sebagai pengurus partai atautkah posisi fungsinya sebagai orang yang dicopot jabatannya. Partisipasi pun dilihat melalui intensinya, apakah karena memang diniatkan untuk ikut serta, atautkah hanya karena ketidaksengajaan belaka. Motif partisipasi juga dinilai melalui pilihan tindakannya, apakah dilakukan dengan tindakan rasional atautkah melalui tindakan emosional.

Gaya berpartisipasi bisa dilakukan dengan menggunakan gaya langsung atau perwakilan; kentara atau tidak kentara; individual atau kolektif; sistematis atau acak, dan terbuka atau tersembunyi. Terakhi adalah persepsi dan pemaknaan. Ini berkaitan dengan efek yang paling kuat, karena merupakan penyaring pertama kali dari masuknya pesan kepada pikiran awam publik. Setiap

⁹⁶ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, 199.

⁹⁷ Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, 231.

publik memiliki pikiran awam yang bekerja dalam bentuk pemaknaan yang dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai dari masing individu. Setiap yang disampaikan tidak bisa serta-merta langsung diterima, sebagaimana yang dimaksudkan oleh sang pengirim pesan.⁹⁸

B. Partai Politik

Partai politik merupakan institusi politik untuk mengagregasi kepentingan sosial dan mewakili kepentingan itu dalam arena politik, melalui kontribusi artikulasi kepentingan yang dipertarungkan dan permasalahan sosial di bawah struktur budaya dan sosial. Partai politik memiliki kekuatan untuk membela beragam kepentingan, dan bertujuan menggabungkan tuntutan dalam satu paket. Partai politik dapat dilihat sebagai organisasi, sebagai bagian dari pemerintahan dan sebagai peserta pemilu.⁹⁹

Partai politik merupakan sekelompok individu yang memiliki pikiran yang serupa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan berusaha mendapatkan kedudukan politik demi mengimplementasikan tujuan mereka. Tujuan kelompok ini biasanya ditentukan oleh sistem kepercayaan umum dan ditujukan pada implementasi kebijakan. Mereka utamanya dapat memfokuskan pada penempatan kedudukan dalam institusi pemerintahan.¹⁰⁰

Partai politik menjadi organisasi utama yang memiliki hubungan langsung dengan warga negara. Mereka mengontrol akses ke dalam posisi kepemimpinan politik. Weber menyebutkan, partai politik merupakan organisasi sukarela yang mencapai tujuan mengatur kekuasaan. Sementara Maurice Duverger melihat partai politik sebagai agen yang digunakan untuk mengagregasi dan mengimplementasi kepentingan pemilih.¹⁰¹ Definisi partai politik berkaitan dengan pemilih dan perilaku pemilih.¹⁰²

Partai politik menyatukan orang-orang dengan memiliki kemiripan ataupun perbedaan latar belakang sosial ekonomi, afiliasi keagamaan, preferensi, dan nilai-nilai. Seluruh masyarakat teragregasi dari individu dengan keragaman kepentingan. Secara umum keragaman itu berasal dari sistem partai yang terfragmentasi.

⁹⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 240.

⁹⁹ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", dalam Lynda Lee Kaid and C.B Holtz, *Encyclopaedia of Political Communication* (London: Sage Publication, 2008), 604.

¹⁰⁰ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 605.

¹⁰¹ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 605.

¹⁰² Steven Foster, *Political Communication*, (Edinburgh: Edinburgh University, 2010), 4.

Partai mewakili dan dipengaruhi oleh kontradiksi yang terus berkembang di dalam masyarakat.¹⁰³

Perkembangan partai politik sejajar dengan pertumbuhan parlemen dan meluasnya kebebasan. Mereka merupakan konsekuensi dari pertumbuhan panggilan public untuk ikut serta andil dalam proses pengambilan keputusan politik. Mulanya perwakilan partai berasal dari putusnya jaringan elit sosial yang mendasarkan hubungan mereka dengan pemilih pada kontak dan komunikasi. Proses yang terus berkelanjutan dari demokratisasi dan industrialisasi membatasi efektivitas metode ini. Dengan meluasnya kebebasan dan partisipasi rakyat yang lebih luas dalam proses politik, partai-partai ini digantikan dengan organisasi baru yang memiliki tujuan pada banyak hal, untuk mengamankan pemimpin mereka sehingga membutuhkan dukungan massa untuk mendapatkan jabatan publik. Perluasan kebebasan mengarah kepada pertumbuhan partai massa yang utama yang didukung oleh organisasi menengah.¹⁰⁴

Para pemilih dan aktivis partai pada banyak cara terikat dengan partai-partai dan terjebak dalam subkultur. Jaringan dan superioritas organisasi sosial memungkinkan terjadinya perlombaan pemilihan pada skala lintas regional, memperkuat mereka dalam proses pengambilan keputusan politik dan menawarkan peluang ekonomi dalam rekrutmen pemilih. Di luar dari bertumbuhnya partai massa, juga bertumbuh para politisi profesional, yang memungkinkan para individu untuk mengonsentrasikan perhatian mereka pada keseluruhan aspek dan kehidupan politik. Kendati akibatnya, mereka kemudian bergantung pada kehidupan aktivisme politik.¹⁰⁵

Partai politik berhadapan dengan massa dalam kepercayaan ataupun ketidakpercayaan yang sinis terhadap partai politik tersebut. Definisi partai politik berkaitan dengan pemilih dan perilaku pemilih.¹⁰⁶

Partai memiliki fungsi bergantung pada sistem politik; partai pada demokrasi liberal memiliki keuntungan yang berbeda dari pada sistem totaliter ataupun otoriter. Fungsi partai sering bisa dilihat pada sistem politik yang liberal, termasuk perekrutan elit dan evaluasi, formulasi tujuan dan program politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi antara elit dan warga negara,

¹⁰³ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 604.

¹⁰⁴ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 605.

¹⁰⁵ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 605.

¹⁰⁶ Steven Foster, *Political Communication*, (Edinburgh: Edinburgh University, 2010), 7.

koordinasi personel dan fungsi kebijakan dalam pemerintah, sebagaimana kontrol atas integrasi sistem. Jika seseorang memilih stabilitas sistem politik sebagai titik rujukan bagi penentuan fungsi partai, maka sumbangan yang diberikan partai adalah pengamanaan prinsip dasar dan institusi tatanan politik dalam penyediaan massa, yang memiliki ikatan emosi dengan sistem. Kompetisi partai menyumbangkan stabilitas dengan meregulasi dan memoderasi konflik kekuatan politik melalui pilihan pemerintahan.¹⁰⁷

Partai politik membangun struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Pertumbuhan partai dan perkembangan aparatus organisasi membawa transformasi. Penjagaan aparatus menjadikan tujuan partai, dan tujuan pembentukan aparatus partai berdasarkan pada latar belakang pembentukan partai tersebut. Ini memunculkan kepemimpinan partai yang terpisah dengan anggota partai. Pendelegasian dan pemusatan kekuasaan berakibat pada penurunan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan internal partai, dan pada sisi lain juga menumbuhkan otonomi tindakan pada kepemimpinan. Sang pemimpin menguasai organisasi partai untuk membawa partai agar mencapai tujuannya.¹⁰⁸

Selanjutnya, organisasi partai politik tidak hanya terdiri pada pemimpin dan anggota. Bermunculanlah kelompok kepentingan, komposisi keanggotaan, pemilihan, pemilihan pemimpin partai, proses pengambilan keputusan dan sikap anggota partai. Kajian ini memperlihatkan bahwa konstruksi oligarki datang dari pembagian kerja dalam partai yang kompleks, posisi pemimpin partai dalam stratifikasi sosial dan kepentingan partisipasi anggota. Ini memunculkan demokrasi partai internal yang didukung oleh struktur yang terdesentralisasi, birokrasi yang lemah, kesempatan anggota untuk membangun dan mencapai kompetensi politik, dan melalui institusionalisasi perlindungan dari oposisi internal. Terbentuknya lingkaran kepemimpinan dibentuk oleh partisipasi anggota yang lemah dalam proses pembentukan keputusan dalam partai.¹⁰⁹

Maka partai politik adalah ditujukan untuk memediasi warga dengan Negara. Partai bekerja menggerakkan elit politik demi insitusi Negara sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pemilih. Elit politik merupakan sekelompok orang yang memiliki kewenangan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.¹¹⁰ Dalam hal partai politik maka elit yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dalam

¹⁰⁷ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 605.

¹⁰⁸ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 606.

¹⁰⁹ Jürgen R. Winkler and Jürgen W. Falter, "Political Parties", 608.

¹¹⁰ Anton Steen, *Political Elites and New Russian* (London: Routledge, 2003), 17.

menentukan arah partai politik dan menentukan proses pengambilan keputusan dalam partai politik.¹¹¹ Elit politik ini merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam sebuah organisasi besar yang membutuhkan pemimpin dan orang-orang yang berpengalaman dalam menentukan keputusan politik secara efisien. Higley dan Burton mendefinisikan elit politik ini sebagai orang mampu karena posisi strategis dalam organisasi dan pergerakannya sehingga dapat mempengaruhi hasil politik secara reguler dan substansial.

Kapasitasnya dalam menentukan kebijakan dan keputusan politik membuat elit menjadi beragam. Sebagaimana disebutkan Mosca, dalam partai politik akan terdapat elite politik yang beragam karena memiliki kepentingan yang beragam. Hal ini karena elite politik membentuk konfigurasi yang didasarkan pada dukungan massa.¹¹² Maka banyak kalangan kemudian melihat bahwa elite politik merupakan konglomerasi para pelaku politik dalam masyarakat.

Karakter masyarakat yang beragam membentuk karakter elit politik yang beragam pula. Pada masyarakat yang feodal, misalnya, status elitnya terdapat pada warisan dan kekuatan militer. Sementara, pada masyarakat birokratik, status elitnya terdapat pada banyaknya kekayaan yang dimiliki. Variasi dari elit politik bisa dilihat melalui dua hal, yakni integrasi struktural dan konsensus nilai. Integrasi struktural melibatkan keterbukaan formal dan jaringan komunikasi informal, dan pengaruh atas faksi dan orang-orang dalam elit. Konsensus nilai berkaitan dengan kesepakatan relatif antar orang-orang dan faksi tentang norma perilaku politik, dan kebernilaian institusi pemerintahan yang ada.

Higley dan Burton menilai, dari karakter integrasinya, ada dua karakter elit politik, yakni yang berserikat (united) dan yang terpecah (disunited). Kedua karakter ini dapat dilihat pada bagaimana jaringan interaksi yang dibangun dalam elit tersebut.¹¹³ Dalam konteks komunikasi politik, jaringan interaksi ini dibangun pada hubungan antar-elite yang ada di dalamnya. Jaringan interaksi dibangun pada medan yang beragam berdasarkan hubungan antara lembaga Negara yang dilakukan oleh elite partai yang tersebar dalam lembaga-lembaga negara, interaksi dalam internal partai, hingga interaksi individu yang diwarnai dengan latar belakang kultur individu. Saat membangun interaksi antar- elite inilah, tercipta

¹¹¹ John Higley dan Michael Burton, *Elite Foundation of Liberal Democracy* (Lanham: Rowan Littlefield Publisher, 2006), 5.

¹¹² John Higley dan Michael Burton, *Elite Foundation of Liberal Democracy*, 6.

¹¹³ John Higley dan Michael Burton, *Elite Foundation of Liberal Democracy*, 10.

konflik berkaitan dengan isu, kesalahpahaman, kepentingan dan sebagainya. Demi kepentingan penulisan ini, penulis akan menekankan pada adanya perselisihan kepentingan.

Perselisihan kepentingan adalah ketika seseorang berada dalam satu posisi yang memiliki hubungan tertentu dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan keputusannya.¹¹⁴ Perselisihan terjadi pada empat hal yakni ikatan hubungan, penilaian (judgement), kepentingan dan perlakuan yang sepatutnya (proper exercise).

Ikatan hubungan (relationship) adalah ikatan hubungan satu orang dengan lainnya dalam kepentingan tertentu. Dalam politik, hubungan ini tampak pada satu anggota partai politik tertentu yang berasal dari partai lainnya. Sedangkan penilaian (judgement) adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat lebih dari seorang juru tulis yang mendapatkan informasi dari bukunya. Dalam hal ini, penilaian adalah keputusan yang diambil bukan keputusan rutin. Penilaian berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan dan wawasan dalam keadaan yang tidak menentu.

Berikutnya adalah kepentingan (interest) yakni situasi yang berkaitan dengan pengaruh, loyalitas, perhatian dan emosi yang mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi kurang baik. Terakhir, tindakan yang sepatutnya (proper exercise), merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan apa yang diharapkan oleh orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan dibutuhkan akan melakukan tindakan sesuai dengan latar belakangnya. Seperti seorang pekerja medis yang menghadapi orang yang sekarat akan langsung menolong sesuai dengan kemampuannya dan membawanya ke rumah sakit. Hal ini berbeda dengan seorang insinyur yang akan langsung menelpon ke rumah sakit (karena dirinya tidak memiliki kemampuan itu).

Perselisihan kepentingan menjadi masalah, karena saat tidak sadar terjadi perselisihan kepentingan pada dirinya, dia keliru saat mengambil keputusan. Kedua perselisihan kepentingan dapat terjadi jika seseorang mengerti terjadi perselisihan kepentingan pada dirinya, dan dia tahu bahwa pada orang lain tidak terjadi, sehingga dia bisa mengelabui orang lain dalam pengambilan keputusan. Hal ketiga seseorang menjadi abai pada satu hal karena memperhatikan hal lainnya.¹¹⁵

¹¹⁴ Michael Davis, "Introduction" dalam Michael Davis dan Andrew Stark, *Conflict Interest and Professions* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 8.

¹¹⁵ Michael Davis, "Introduction" dalam Michael Davis dan Andrew Stark, 10.

Dalam partai politik, perselisihan kepentingan muncul ketika bagian dari partai melaksanakan tugas yang berselisih dengan kepentingan terbaiknya. Kondisi ini terjadi biasanya jika bagian dari institusi itu ada kaitannya dengan institusi dari luar partai.¹¹⁶ Kaitan dengan insitusi lain terkadang memiliki nilai keunggulan (advantage) dalam penyelesaian permasalahan partai. Namun di sisi lain ini pun akan menimbulkan perselisihan, jika berbenturan dengan kepentingan antara partai dan institusi di luar. Efektivitas kepemimpinan partai dalam mengambil keputusan sering terganggu dengan adanya perselisihan kepentingan, karena bagian terpenting dalam institusi kepemimpinan partai berhubungan dengan partai lainnya.

Dalam konteks ini, konflik kepentingan bisa terjadi pada pemimpin partai yang memiliki hubungan dengan pemimpin partai lainnya, terutama jika memiliki hubungan yang sedemikian erat sehingga terjadi perselisihan kepemimpinan dalam elit politik.

C. Komunikasi Interpersonal Antar Elit dalam Partai

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling sering dilakukan oleh manusia. pada komunikasi interpersonal individu dapat belajar, saling mengerti dan memahami dunia luar, saling melakukan hubungan, bermain, saling menolong dan memengaruhi.¹¹⁷ Bahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Charles Berger, melalui komunikasi interpersonal manusia dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi pada dunia sosialnya.¹¹⁸

¹¹⁶ Marcus O. Durham, et.al. Leadership and Succes in Organization, Culture and Ethics (Dream Point Publisher, 2006), 4.

¹¹⁷ Joseph Devito, The Interpersonal Communication Book, 11th Edition (Newyork: Pearson, 2007), 7.

¹¹⁸ Lihat lema interpersonal communication dalam Jorge Reiga Schement (eds), Encyclopedia of Communication and Information (Newyork: Macmillan, 2002), h.472-477. Mengenai perbandingan level-level komunikasi Andi Faisal Bakti membandingkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif dibandingkan level komunikasi lainnya yakni level intrapersonal, level interpersonal, level interorganisasional, level enterprise/environmental Bakti mengadopsi level-level komunikasi Lee Thayer, Communication and Communication Systems: in Organisation, Management, and interpersonal relation (Illinois: Richard D Irwin, 1968) 27. Bakti melihat efektivitas komunikasi interpersonal pada bagaimana penerimaan masyarakat muslim Sulawesi Selatan kepada program pembangunan global. Bakti melihat bahwa penerimaan masyarakat muslim Sulawesi selatan sangat bergantung pada peran-peran tokoh masyarakat setempat seperti ulama, dokter yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari pada diseminasi informasi melalui media ataupun organisasi. Lihat Andi Faisal Bakti, Communication and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development (Jakarta-Leiden:INIS, 2004). Tentang pentingnya komunikasi interpersonal juga diungkapkan juga dalam buku Joseph Devito, The Interpersonal Communication Book, 11th Edition (Newyork: Pearson, 2007).

Komunikasi interpersonal yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi interpersonal yang terjadi dalam elit politik, dalam hal ini adalah elit politik partai Golkar. Perlunya melihat komunikasi interpersonal pada elit politik partai untuk melihat pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, dan kesolidan kinerja komunikasi politik yang berdampak pada efek yang hasil dukungan rakyat kepada partai ini.

Hubungan komunikasi interpersonal selalu terjadi pada hubungan dua orang (dyadic), meskipun bukan tidak mungkin terjadi pula hubungan antara tiga orang ataupun lebih (tryadic atau dalam grup). Namun seringkali hubungan ini dibangun melalui multi-dyadic seperti A—B; B—C; A— C ; dan seterusnya.¹¹⁹

Komunikasi interpersonal adalah pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua pribadi atau lebih. Dua pribadi ini berada dalam satu ikatan saling terhubung (relationship) yang memiliki tingkatan keintiman yang beragam, mulai dari hubungan yang dimulai dari hubungan perkenalan (acquaintance), pertemanan (friendship), hingga hubungan yang sangat dekat (spouse). Masing-masing hubungan memiliki kualitas kedalaman dan keluasan hubungan yang berbeda. Semakin dekat hubungan semakin dalam dan luas penetrasi sosialnya. Dengan kata lain banyak hal yang kemudian dibagi antar individu yang berkomunikasi.¹²⁰

Komunikasi interpersonal, menurut Mark Knapp, terbangun melalui beberapa tahap: tahap perkenalan (initiating); tahap penajagan (experimenting); tahap pengakraban hubungan (intensifying); tahap pengikatan (bonding); tahap pembedaan (differentiating); tahap memutar (circumscribing); tahap pemandekan (stagnating); dan tahap penghindaran (avoding); serta tahap pemutusan. (terminating). Tahapan yang digambarkan di atas merupakan pertumbuhan hubungan antara satu dengan lainnya.¹²¹

Secara umum tahapan hubungan interpersonal dibangun dalam tahapan-tahapan di bawah ini:

Kontak (contact): Pertumbuhan hubungan interpersonal dibangun melalui kontak dengan adanya kontak pertama adalah dimulai dengan adanya kontak perseptual – mendengar, melihat, membaca pesan, membaui (jika mungkin)-kemudian pada kontak

¹¹⁹ Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 11th Edition (Newyork: Pearson, 2007), 5.

¹²⁰ Devito, *Human Communication: The Basic Course*, 5th edition (NewYork: HarperCollins Publisher, 1991), 205.

¹²¹ Devito, *The Interpersonal Communication Book*, 226.

berikutnya adalah kontak interaksional. Kontak disini sifatnya superfisial dan impersonal. Ini merupakan tahapan saling bertukar informasi dasar untuk memulai keterlibatan antar temannya.¹²²

Keterlibatan (involvement). Keterlibatan (involvement) merupakan rasa mutualitas yang mulai terbangun. Pada tahap ini mulailah saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Beberapa cara yang dilakukan yakni: Directness (bertanya langsung); indirect suggestion (memulai hal-hal yang dapat meningkatkan keakraban dengan candaan, cerita dan sebagainya); public presentation (memperkenalkan orang lain di depan umum sebagai orang terdekat dan melihat responnya); separation (mencoba memisahkan diri dengan rekan kita untuk mengetahui seperti apakah respons, biasanya yang diharapkan rekan kita memanggil kita untuk mempertegas relationship); third party (menanyakan kepada teman kita tentang pendapatnya tentang rekan kita ataupun tentang niatannya).

Kedekatan (Intimacy Stage). Tahapan ini untuk melihat bagaimana kita berkomitmen dengan teman kita, bahwa kita berada dalam hubungan yang dekat baik sebagai teman, sebagai pacar, ataupun sebagai rekanan kita dalam perdagangan, ataupun politik. Dalam tahapan ini juga, kita mulai terlibat dengan jaringan sosial yang diikuti oleh anggota yang memiliki latar belakang kita. Fase ini terbagi dua yakni komitmen interpersonal yakni fase di mana dua orang berkomitmen satu dengan lainnya melalui cara yang khusus.

Fase berikutnya adalah ada social bonding (ikatan sosial). Komitmen diumumkan kepada publik. Pada hubungan suami istri terdapat beberapa kekuatiran (anxiety) yakni security anxiety artinya ketakutan dari salah satu pasangan akan ketidaksetiaannya pasangannya. Yang lainnya adalah fulfillment anxiety, yakni keprihatinan karena kita tidak mampu melakukan hubungan yang lebih dekat, hangat ataupun spesial, ataupun hubungan yang sejajar. Ada juga excitement anxiety, yakni kekuatiran kita akan terjebak pada kebosanan dan hilangnya kebebasan kita. Dalam intimacy terkadang orang merasa takut akan konsekuensinya yang tidak nyaman, karena takut dibatasi kebebasannya. Ada orang yang melihat keakraban akan membawa kepada risiko yang tinggi, meskipun ada juga yang melihatnya tidak akan mendatangkan resiko berat.

Intimacy juga akan meningkatkan social penetration (penetrasi sosial), yakni setiap kedekatan dapat dilihat melalui kedalaman dan

¹²² Devito, The Interpersonal Communication Book, 219.

keluasan topik yang dibicarakan, terutama tentang topik yang berkaitan dengan kedalaman atau derajat personalness (hal-hal yang dianggap pribadi). Artinya, antara dua orang yang saling berhubungan terdapat hal-hal yang disepakati bersama, yang kemudian masuk dalam pribadi dari masing-masing orang tersebut. Masing-masing orang mempraktikkan attitude similarity, artinya telah semakin banyak yang harus menjadi kesepakatan sikap dalam hal-hal tertentu dengan kedalaman tertentu pula.¹²³

Pelemahan Hubungan (Deterioration). Tahapan pelemahan ikatan antara rekanan dalam hubungan interpersonal. Ini dimulai biasanya melalui intrapersonal dissatisfaction, yang merupakan ketidakpuasan kepada rekanan dan memperkirakan di masa datang akan hubungan yang negatif. Dengan begitu salah satu rekanan akan menarik diri dengan mengurangi interaksinya, waktu yang diluangkan akan semakin sedikit. Pada tahap berikutnya memasuki fase depenetrasi, yakni berkurangnya kedalaman dan keluasan tema-tema ataupun topik yang disepakati (kebalikan dari penetrasi sosial), proses ini juga disebut dengan hipotesis reversal, meskipun terkadang proses ini tidak terjadi alias langsung terpisahnya hubungan ini.¹²⁴

Perbaikan hubungan (Repair). Tahapan ini tidak selalu terjadi, meskipun terkadang orang yang melakukan relationship melakukan jeda hubungan dan melakukan kembali perbaikan hubungan dengan rekanannya. Pada tahapan perbaikan (repair) yang dilakukan pertama kali adalah intrapersonal repair, yakni perbaikan yang dilakukan secara pribadi seperti perbaikan perilaku ataupun ekspektasi terhadap rekanan kita. Kedua adalah perbaikan interpersonal, yakni dengan mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada diri dan memperbarui kesepakatannya baru.¹²⁵

Bubaranya hubungan (Dissolution). Ikatan antar individual yang rusak biasanya dimulai dengan interpersonal separation (pemisahan interpersonal), yakni pemisahan satu dengan yang lainnya kemudian adalah pemisahan sosial atau publik (public or social separation).¹²⁶

Hubungan interpersonal ini bisa terjadi pada tiga karakter keintiman, yakni pada karakter hubungan pertemanan; hubungan persahabatan hingga hubungan yang lebih dekat lagi. Semakin dekat hubungan, maka akan memperluas dan memperdalam

¹²³ Devito, The Interpersonal Communication Book, 220

¹²⁴ Devito, The Interpersonal Communication Book, 221

¹²⁵ Devito, The Interpersonal Communication Book, 223

¹²⁶ Devito, The Interpersonal Communication Book, 224.

penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah hal-hal yang dibagi bersama dalam hubungan tersebut.¹²⁷ Dalam konteks politik, hubungan yang paling sering tampak adalah hubungan pertemanan, meskipun dimungkinkan terjadinya hubungan yang lebih mendalam hingga ke dalam hubungan pernikahan.

Tahapan-tahapan yang terjadi di atas dapat pula dilihat pada hubungan antar-elite politik. Elite politik memiliki hubungan antar satu dengan lainnya demi mencapai satu keputusan politik. Perselisihan dalam elite politik sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal antar-elite politik. Hubungan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana elite politik itu kemudian menentukan keputusan partai politik.

Dalam konteks ini terkadang terjadi perselisihan, yang kemudian berakhir pada kesepakatan bersama. Dalam konteks komunikasi interpersonal, perselisihan (conflict) tidak dapat dihindari. Konflik merupakan sisi lain dari hubungan interpersonal. Beberapa penyebab terjadinya konflik biasanya pergesekan kepentingan ataupun perselisihan dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan.¹²⁸ Meskipun demikian konflik memiliki efek yang positif untuk menyatukan kekuatan internal dalam kelompok tersebut. Di sisi lain efek negatifnya dapat menimbulkan hubungan yang renggang antara satu dengan lainnya.¹²⁹

Partai politik dapat dilihat sebagai sebuah organisasi politik yang menjadi agregasi kepentingan kelompok dengan ideologi tertentu. Tetapi dalam disertasi ini, partai politik juga dilihat pada aspek elite politik yang hubungan antar-elitennya dapat mempengaruhi keputusan politik. Dalam konteks komunikasi politik, elite politik banyak mempengaruhi proses komunikasi politik partai dalam pelbagai hal, seperti identifikasi partai yang sangat dipengaruhi oleh kekompakan elite partai politik tertentu,¹³⁰ arah kebijakan partai politik¹³¹ yang juga mempengaruhi kebijakan negara. Terjadinya proses demokratisasi pada satu negara sangat dipengaruhi oleh respon elit politik (yang menduduki jabatan politik ataupun dalam partai) pada proses demokratisasi.¹³²

D. Kepemimpinan dalam Komunikasi Politik

¹²⁷ Devito, *Human Communication The Basic Course*, 204-206.

¹²⁸ Devito, *Human Communication The Basic Course*, 204-206.

¹²⁹ Devito, *Human Communication The Basic Course*, 287.

¹³⁰ Herald Schoen, "Party Identification," 535.

¹³¹ Kaylene Barbe, "Mediated Political Realities", 446.

¹³² Katrine Voltmer, "Role of Media in Democratization", 177.

Untuk menganalisis partai politik, disertasi ini menggunakan konsep tentang kepemimpinan. Relevansi dalam disertasi ini terdapat pada peran kepemimpinan ditengah-tengah kelompok kepemimpinan, yang bisa disebut dengan kelompok elite yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Artinya, terdapat dua hal yang mengarahkan perjalanan partai politik. Pertama, elite dalam partai politik yang mempengaruhi kebijakan partai politik. Kedua, kepemimpinan yang dapat mengendalikan kelompok elite dalam partai politik maupun seluruh organisasi.¹³³

Kepemimpinan adalah tema yang menjadi perhatian dari para filsuf kuno, Konfusius, mungkin, yang paling tua membahas tentang kepemimpinan. Ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya sebuah negara dikendalikan oleh seorang pemimpin. Dalam komunikasi politik, kepemimpinan menjadi perhatian untuk melihat bagaimana seorang pemimpin meraih dukungan dari massa, melalui kontrol atas pesan dan kemampuan untuk mencapai penyebaran massa.¹³⁴

Banyak definisi yang menjelaskan apa itu kepemimpinan, seperti kepemimpinan menjelaskan pada fungsinya yang mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Ada juga definisi yang menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain demi memenuhi fungsi-fungsi kelompok.¹³⁵ Dan Nimmo melihat kepemimpinan sebagai hubungan di antara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu atau lebih orang (pemimpin) mempengaruhi yang lainnya dalam setting tertentu.¹³⁶ Sementara Lord dan Smith melihat kepemimpinan sebagai persepsi sosial yang berasal dari teori psikologi sosial kognitif yang menghasilkan peningkatan pengaruh pada orang yang dianggap pemimpin.¹³⁷

Kemunculan pemimpin dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan situasional sebagai pendekatan yang cukup populer untuk melihat kemunculan kepemimpinan.

¹³³ Frederick Williams, *New Communication*, 2nd edition, (California: Wadsworth Publishing, 1989), 171-2.

¹³⁴ Lynda Lee Kaid, "Political Advertising", dalam Lynda Lee Kaid (eds), *Handbook of Political Communication* (New Jersey: LEA Publisher, 2004), 183.

¹³⁵ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 38.

¹³⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 40.

¹³⁷ "...social perception, grounded in social-cognitive psychological theory that produces an influence increment for the perceived leader" dalam Robert G. Lord, Douglas J. Brown dan Jennifer L Harvey. System, "Constraint on Leadership Perception, Behavior, Influence; An Example of Connectionist level Processes", dalam Michael A. Hogg dan R. Scott Tindale, *Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes*, (New York: Blackwell, 2001), 382.

Pendekatan ini melihat kualitas pemimpin melalui situasi yang dihadapi oleh pemimpin tersebut. Pada situasi yang genting, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan, sehingga pada saat damai seorang pemimpin akan terpilih. Pendekatan lainnya adalah pendekatan interaksional yang melihat masing-masing pemimpin yang memiliki cara tersendiri pada situasi tertentu, sehingga menciptakan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Pada pendekatan ini pemimpin dilihat sebagai yang memiliki kualitas yang dikagumi oleh pengikutnya. Kekaguman hadir dari karisma yang dimilikinya.¹³⁸

Satu komponen penting dalam komunikasi politik adalah komunikator. Dalam konteks partai politik maka komunikator yang paling utama adalah pemimpin partai politik. Para pemimpin politik ini yang memegang peran dalam komunikasi politik partai politik. Kemunculan para pemimpin politik ini bermacam-macam. Pemimpin yang muncul karena tugas, biasa berwibawa dalam lingkup institusi. Di luar institusi tersebut, ia tidak memberikan pengaruh kepemimpinannya. Lainnya, adalah pemimpin simbolik yang memiliki pengaruh di luar organisasi tersebut.¹³⁹ Hal yang membedakan antara keduanya adalah kemampuannya dalam mempersuasi orang lain. Pemimpin organisasi melakukan pendekatan karena pemimpin tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh aturan organisasi. Pemimpin simbolik memiliki pengaruh kepada orang lain meskipun secara organisasional tidak memiliki jabatan apapun.

Struktur dan aturan organisasi juga akan memberikan dampak pada seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Struktur dan aturan organisasi yang baik akan memberikan kewenangan kepemimpinan organisasi bagi seorang yang menduduki jabatan tertentu. Komunikasi yang terorganisasi akan memberikan peluang kepemimpinan yang berkesinambungan.¹⁴⁰ Hal lain yang menjadikan pemimpin memiliki pengaruh kepada pengikutnya adalah kepercayaan dari masyarakat (massa). Inilah yang menjadi modal bagi pemimpin simbolik yang disebutkan di atas. Pemimpin simbolik memiliki modal tersebut melalui dedikasinya kepada massa. Sebagaimana dikatakan Newman dan Perloff, pemimpin adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (trustworthiness) dan memiliki pengalaman keahlian (expertise) yang terkadang disebut dengan kompetensi.¹⁴¹ Kedua aspek ini

¹³⁸ Bernhard Wessels, "Political Leadership", dalam Lynda Lee Kaid and C.B Holtz, *Encyclopaedia of Political Communication* (London: Sage Publication, 2008), 602.

¹³⁹ Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 46.

¹⁴⁰ Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 47.

¹⁴¹ Bruce L. Newman dan Richard M. Perloff, "Political Marketing: Theory, Research and

sering menjadikan seorang pemimpin mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan dari massa.

Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan memungkinkan terjadinya hubungan dengan para pengikut yang cukup dekat. Dengan begitu, memungkinkan apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh para pengikutnya. Seringnya, pemimpin membutuhkan informasi berkaitan dengan masyarakatnya. Kebutuhan penjangkaran informasi itu dilakukan melalui penjangkaran opini publik terutama berkaitan dengan isu ataupun tema yang dapat mempengaruhi masa jabatan publik yang dipegangnya. Kemampuan ini dimiliki oleh pemimpin simbolik¹⁴² Begitu pentingnya karakter pemimpin simbolik sehingga menjadikan seluruh pemimpin organisasi untuk memiliki karakter pemimpin simbolik. Pemimpin simbolik memiliki kekuatan sebagai pembentuk dan penopang dari tatanan sosial.¹⁴³

Kepemimpinan ini bisa berlangsung berkat adanya hubungan pemimpin dan pengikut. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi.¹⁴⁴ Selain yang sudah dijelaskan di atas tentang pemimpin simbolik dan pemimpin yang bersifat organisasional. Pemimpin selalu dianggap memiliki keunggulan daripada yang lainnya (*primus inter pares*). Keunggulan yang dimiliki oleh pemimpin ini disebabkan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemimpin. Bersamaan dengan tanggung jawab tersebut, pemimpin mendapatkan beberapa kemudahan, fasilitas ataupun keuntungan. Pemimpin mendapatkan kesempatan- kesempatan yang tidak diperoleh orang yang bukan pemimpin.

Dengan fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh pemimpin tersebut, maka banyak orang berusaha untuk menjadi pemimpin. Bagi yang sudah menduduki jabatan kepemimpinan, mereka mencoba untuk mempertahankannya. Untuk menjadi pemimpin maka seseorang akan menjadikan dirinya sebagai orang yang terkenal dengan membuat dirinya dikenal, dan bagi pemimpin akan mempertahankannya dengan menjadikan popularitas kebijakannya sebagai senjata yang paling utama. Nimmo menjelaskan tentang peran pencitraan sebagai sesuatu yang menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin.¹⁴⁵ Newman dan Perloff melihat dalam

Application,” dalam Lynda Lee Kaid (eds), *Handbook of Political Communication* (New Jersey: LEA Publisher, 2004), 27. Lihat juga dalam Wojciech Owalina, Andrej Falkowski, and Bruce L Newman, “Political Management and Marketing,” dalam Dennis W. Johnson, *Handbook of Political Management* (New York: Routledge, 2009), hlm. 70.

¹⁴² Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 47.

¹⁴³ Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 50.

¹⁴⁴ Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 51.

¹⁴⁵ Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, 51.

kepemimpinan ini terjadi proses pertukaran (exchange process) seorang pemimpin akan menawarkan kebijakan yang dia tawarkan kepada masyarakat sehingga dapat menaikkan popularitas pemimpin tersebut dalam jajak pendapat.¹⁴⁶ Seorang pemimpin yang tidak memperhatikan citra dalam proses pertukaran dengan pengikutnya akan menderita kerugian berkaitan dengan dukungan pada pemilu.

Para pemimpin politik begitu memperhatikan setiap hubungannya dengan khalayak, sehingga dapat menarik simpati dari mereka. Begitu banyak cara untuk merangkul pelbagai pihak, seperti kemunculan di media massa dengan frekuensi yang tinggi sering digunakan untuk mencapai popularitas di media massa. Ini sering dilihat sebagai bentuk simbiosis antara politisi dan media.¹⁴⁷ Pada titik ini pemimpin harus mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga begitu memperhatikan apa yang dikatakan media. Dalam hal ini kepemimpinan sering dilihat sebagai yang paling mengikuti rakyat, sebagaimana pepatah arab yang mengatakan Al-imam-u Khadim-u 'l-ummah demi mencapai pemimpin yang kharismatik.

Pada tingkat organisasi seorang pemimpin haruslah memiliki kapasitas dalam memimpin organisasi dengan baik, kapabilitas strategis dalam menggerakkan organisasi. Kemampuan lainnya yang patut diperhatikan adalah kemampuannya dalam mempersuasi kelompok lingkaran dalam partai politiknya, sehingga dapat menjadikan satu suara dalam menggerakkan organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka pemimpin politik harus menguasai setiap level dalam komunikasinya yakni komunikasi individual, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa.¹⁴⁸

Kemampuan pemimpin berada dalam konteks komunikasi individual, yakni pada bagaimana pemimpin tersebut dapat memanfaatkan komponen-komponen kedekatan antar elit. Kedekatan ini bisa dilihat dari bagaimana pemimpin menciptakan kedekatan dengan individu lain dalam lingkaran elite. Kedekatan terjadi karena adanya ketertarikan perhatian yang sesuai dengan nilai-nilai sosial pada latar belakang individu. Tujuan dari

¹⁴⁶ Bruce L. Newman dan Richard M. Perloff, "Political Marketing: Theory, Research and Application," 19.

¹⁴⁷ Bernhard Wessels, "Political Leadership", dalam Lynda Lee Kaid and C.B Holtz, *Encyclopaedia of Political Communication* (London: Sage Publication, 2008), 602.

¹⁴⁸ Bernhard Wessels, "Political Leadership", dalam Lynda Lee Kaid and C.B Holtz, *Encyclopaedia of Political Communication* (London: Sage Publication, 2008), 601.

komunikasi individual ini menciptakan kepercayaan bersama.¹⁴⁹

Kemampuan pemimpin pada level berikutnya adalah level kelompok yakni komunikasi yang terjadi pada lebih dari dua orang. Pada komunikasi ini sangat oleh tipikal kepemimpinan. Di mana pemimpin yang kuat akan mempengaruhi iklim komunikasi yang seragam, begitu juga sebaliknya kepemimpinan yang lepas tangan begitu saja akan menjadikan iklim komunikasi dalam kelompok tersebut serabutan.¹⁵⁰ Pemimpin partai politik harus berada di antara pengembangan pola yang seimbang sehingga memungkinkan efektivitas kepemimpinan dalam elit partai politik.

Komunikasi organisasi melihat bagaimana pemimpin melakukan kepemimpinan pada organisasi. Kepemimpinan ini tampak pada bagaimana pemimpin menerjemahkan visi ataupun cita-cita ke dalam program yang direncanakan dan program yang dilaksanakan. Pada komunikasi organisasi akan tampak bagaimana fungsi hierarki organisasi dapat berjalan. Komunikasi ini mengalir pada struktur yang ketat, meskipun terkadang dilakukan dalam komunikasi yang longgar.¹⁵¹

Komunikasi publik biasa disebut dengan komunikasi media massa. Pada konteks ini memiliki audiensi yang begitu luas. Komunikasi ini dilihat sebagai proses publik dalam komunikasi, karena berlatar belakang pada masyarakat itu sendiri dengan peran yang dimaikna oleh organisasi komunikasi itu sendiri. Publik dilihat sebagai sasaran yang memiliki kebutuhan dan selera dalam konsumsi informasi yang diperlukan.¹⁵² Pada komunikasi level ini bersamaan dengan komponen efek pada komunikasi politik.

¹⁴⁹ Frederick William, *New Communication*, 2nd edition, 147-156.

¹⁵⁰ Frederick William, *New Communication*, 2nd edition, (California, Wadsworth Publishing, 1989), 169.

¹⁵¹ Frederick William, *New Communication*, 2nd edition, (California, Wadsworth Publishing, 1989), 185-188.

¹⁵² Frederick William, *New Communication*, 2nd edition, (California, Wadsworth Publishing, 1989), 200.

KERANGKA PEMIKIRAN



Bagan di atas menjelaskan bahwa dalam komunikasi politik proses yang terjadi ketika komunikator dalam menyampaikan pesannya berada pada level-level yakni Individu, Kelompok, Organisasi dan Massa. Pada level individu akan dilihat dan tampak bagaimana kapabilitas dari pemimpin politik tersebut. pada level kelompok bagaimana elit politik menyampaikan pesan-pesannya. Sementara pada organisasi bagaimana bagaimana partai politik menyelenggarakan programnya. Sedangkan pada level massa melihat pada pesan-pesan yang disampaikan lewat pembicaraan politik yang mewakili Partai Golkar.

BAB III

GOLKAR: SEJARAH PERJALANAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Golkar Masa Orde Baru

1. Awal Mula Golkar: Sistem Partai Alternatif

Pada masa demokrasi liberal partai-partai yang ada di Indonesia dianggap tidak memiliki kontribusi perbaikan nasib secara kebutuhan mendasar bagi rakyat. Sehingga, Presiden Soekarno menghentikan demokrasi yang dianggap Herbert Feith sebagai demokrasi yang konstitusional.¹⁵³ Pada tahun 1957 adalah masa Soekarno menyebutkan konsep tentang golongan fungsional. Yakni konsep yang menyebutkan bahwa Indonesia harus dibangun oleh golongan fungsional yang berkonsentrasi pada program pembangunan bukannya pada politik. Konsep ini pada mulanya adalah konsep yang tidak jelas karena dianggap tidak ada dalam khasanah keilmuan politik, meskipun demikian sesungguhnya kebutuhan akan adanya golongan fungsional ini sudah muncul mengingat betapa melelahkannya kehidupan politik dengan bergonta-gantinya kabinet pada masa Orde Lama. Golongan fungsional sendiri sempat dipraktikkan oleh kabinet zaken yang dipimpin oleh Ir. Juanda Kartawinata.¹⁵⁴ Hanya saja kekuatan PKI yang dominan waktu itu lebih besar mendapatkan perhatian dari masyarakat politik Indonesia, apalagi setelah dekrit presiden 1959 yang mengalihkan demokrasi liberal kepada demokrasi terpimpin. Meskipun demikian, kekuatan dari golongan fungsional, atau golongan karya, mulai menemukan dan mengumpulkan kekuatannya.

Pada masa demokrasi terpimpin, komunikasi politik Indonesia berada pada propaganda Soekarno dengan gagasannya nasionalisme, agama dan komunisme dengan jargon-jargon "revolusi belum selesai", "perlawanan terhadap nekolim," "identitas keindonesiaan". Soekarno sering sekali menggunakan bahasa-bahasa yang metaforikal.¹⁵⁵ Propaganda

¹⁵³ Pada masa itu, justru merupakan demokrasi yang sebenarnya dan kesetaraan di mata hukum. Pada masa itu, Jaksa Agung Suprpto menangkap seorang menteri tanpa ada rasa takut kepada presiden soekarno, karena presiden soekarno waktu itu hanya sebagai lambang negara saja. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1962).

¹⁵⁴ Reeve, *Golkar of Indonesia: an Alternative to the Party System*, 39-41.

¹⁵⁵ Emanuel Subangun, *Negara dan Anarkhi*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), 24.

Soekarno ini memunculkan tiga kekuatan utama dalam politik demokrasi terpimpin yakni PNI yang merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno, PKI partai yang memiliki jaringan komunisme internasional yang digunakan oleh Soekarno untuk melawan kekuatan blok barat, dan Nahdlatul Ulama, Partai muslim tradisional yang memihak Soekarno dengan pertimbangan kemaslahatan umat.¹⁵⁶ Ketiga kekuatan inilah yang kemudian menjadi Nasakom dan dijadikan modal bagi Soekarno dalam propagandanya. Perpindahan kepada demokrasi pemimpin tidak menjadikan lebih baik. Politik tetap dijadikan Soekarno sebagai panglima dalam pemerintahannya, sementara korupsi ditengarai mulai merebak dan pemerintahan pun mulai menjadi tidak efektif. Golongan karya melihat hal itu memilih untuk menjadi oposisi, hanya saja tidak sefrontal PSI ataupun Masyumi. Meskipun sempat dijadikan pasangan dari Nasakom dengan dimunculkannya jargon "Nasakom plus Golkar"¹⁵⁷ Maka, Golongan Karya tetap bisa duduk di parlemen melalui organisasi BPPK (Badan Pengembang Potensi Karya) melalui beberapa jalur seperti jalur materil, spirituil dan religius. Maka nampak jelas bahwa BPPK sebagai cikal bakal Golkar sudah melingkupi aspek-aspek yang ada pada nasakom itu sendiri.

Golkar sendiri dibentuk sebagai sebuah sistem alternatif kepartaian yang dibentuk oleh beberapa perwira menengah dan tinggi dari TNI AD untuk mengimbangi kekuatan dari partai politik yang ada pada waktu itu. organisasi semi politik ini berisi dari kalangan fungsionalis yang merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden Soekarno yang mengedepankan politik dalam pemerintahannya.

Golkar didirikan dalam sebuah visi tentang adanya kerja nyata dalam praktik bernegara, daripada praktik bernegara masa demokrasi liberal yang dipenuhi dengan pertikaian dan gonta-gonta pemerintahan. Demokrasi Liberal dengan Sistem multi partainya menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya program-program yang dijalankan Kabinet Koalisi era Sukarno. Karena setiap program yang dibuat Kabinet Koalisi merupakan hasil kompromi yang terpaksa akibat tidak adanya suara

¹⁵⁶ Tentang NU yang memihak pada Soekarno lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama NU 1952-1965*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 45-130.

¹⁵⁷ Dalam hal ini golongan karya belum dilihat sebagai organisasi politik tetapi sebagai sekelompok para fungsionalis sebagai kelanjutan dari zaken-nya Juanda tetapi tetap diketuai dengan para perwira menengah TNI AD yang duduk di parlemen nama BPPK (Badan Pengembang Potensi Karya) yang memiliki sikap politik yang berseberangan dengan PKI. Lihat Reeve, 1985, 180.

mayoritas partai di dalam parlemen. Sehingga dalam menjalankan programnya Kabinet Koalisi selalu mengalami kesukaran dan tidak jarang terkadang mengalami pertengkar. Dalam catatan sejarahnya Kabinet Koalisi Multi Partai era Sukarno rata-rata kurang dari satu tahun. Puncaknya adalah kegagalan Konstituante dalam menetapkan Dasar Negara pada tahun 1959. Ada partai-partai yang gigih mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; tetapi ada pula partai-partai politik yang menghendaki dan memperjuangkan ideologi lain yang akan dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia.¹⁵⁸

Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, diwarnai dengan retorika dan propaganda tentang revolusi dengan mengabaikan kerja dari pemerintahan yang mewujudkan tujuan dari berdirinya negara ini yakni menyejahterakan kehidupan bangsa. Masa itu dimulai dari Peristiwa Konstituante yang menuai banyak kritik dan terpaksa harus diambilalih oleh Presiden dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 jelas menjadi buktinya. Alasan lain dari didirikannya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) lahir tanggal 20 Oktober 1964, karena rongrongan PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik yang semakin meningkat.¹⁵⁹

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, di kemudian hari, pemerintahan Soeharto mendayagunakan ABRI guna mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-undang. Akhirnya ABRI khususnya Angkatan Darat sebagai stabilisator sekaligus dinamisator mencoba untuk mendekati dan mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi pada partai politik atau golongan Fungsional, untuk bersama-sama memulihkan keamanan khususnya yang berlatar belakang politik. Sebagai langkah awal dan guna melindungi Golongan Fungsional, dilahirkanlah beberapa Badan Kerja sama (BKS). Wadah kerja sama ini adalah:

1. Badan Kerja Sama Buruh Militer
2. Badan Kerja Sama Tani Militer
3. Badan Kerja Sama Pemuda Militer
4. Badan Kerja Sama Wanita Militer
5. Badan Kerja Sama Ulama Militer
6. Dan Kekuatan Sosial Masyarakat lainnya yang berada di luar BKS tersebut.

Selain itu, ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat, yang

¹⁵⁸ Sofyan Lubis, 30 Tahun Golkar, (Jakarta: DPP Golkar, 1994), 94

¹⁵⁹ Lubis, 30 Tahun Golkar, 95.

saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI-AD Achmad Yani, pada tahun 1960, memanfaatkan salah satu organisasi kemasyarakatan yang telah ada, yang dipimpin oleh seorang perwira pejuang dari TNI Angkatan Darat, Mas Isman, yaitu KOSGORO, serta mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipimpin oleh perwira pejuang TNI Angkatan Darat lainnya, seperti MKGR yang dipimpin oleh RH Sugandhi, dan SOKSI yang dipimpin oleh Suhardiman.¹⁶⁰

Untuk memperkuat dan melanggengkan Golongan Fungsional yang sudah dibentuk tersebut, Golkar memformalkan kehadirannya di dalam masyarakat. Setelah diformalkan, pemerintah menggulirkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959, untuk mengangkat 200 orang wakil-wakil Golongan Karya di MPRS. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1964, diakuilah wakil-wakil Golongan Karya di Front Nasional.

Pengakuan tersebut merupakan suatu momentum dibentuknya wadah kebersamaan di antara Golongan Karya. Wadah yang dilahirkan 20 Oktober 1964 disingkat dengan SEKBER GOLKAR, juga sebagai strategi agar tidak mudah diserang dan dilecehkan oleh partai-partai politik yang ada. Kejenuhan terhadap partai politik inilah yang kemudian Golkar pada masa Orde Baru membentuk sistem partai yang alternatif dengan menyebutkan dirinya sebagai organisasi politik tanpa politisi.¹⁶¹

Kemudian, pada bulan Oktober 1964 dibentuklah sebuah panitia yang terdiri dari sembilan orang (disebut Panitia Sembilan), dari unsur Gerakan Tentara Pelajar, Kelompok cendekiawan, dan tentara, dengan tugas menyusun Rancangan Piagam Pernyataan Dasar Karyawan dan mempersiapkan Rancangan Anggaran Dasar, (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sekber Golkar. Kesembilan orang tersebut adalah: Brigjen TNI. Djuhartono, Imam Pratiknjo, JK. Tumakaka, Pandu Kartawiguna, Kol. Amino Gondo Hutomo, Soetomo Honggowongso, Zarkasi Effendi, Anwar Rashid, dan Dominggus Nanlohy yang kemudian digantikan oleh Mayjen Soeprapto Sokowati.

Kemudian pada hari berikutnya mereka mengadakan rapat pleno, tanggal 20 Oktober 1964 yang dihadiri oleh 97 wakil

¹⁶⁰ Lubis, 30 Tahun Golkar, 96

¹⁶¹ RE Elson, Soeharto: A Political Biography (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 186.

organisasi Golongan Fungsional. Rapat pleno selain mengesahkan pembentukan Sekber Golkar, juga berhasil mengesahkan Rancangan AD/ART yang disusun oleh Panitia Sembilan menjadi AD/ART Sekber Golkar. Tujuan dari Sekber Golkar dalam kancah politik nasional adalah ingin mengembalikan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen – yang mendapat penolakan keras dari PKI.

2. Strategi Golkar Di Awal Orde Baru

Pada mulanya pemilu pada masa Orde Baru akan dilaksanakan pada tahun 1968 sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRS tetapi kemudian diundur menjadi 1971. Pengunduran pemilu ini merupakan tonggak dari berdirinya Orde Baru yang bertujuan untuk meredam kekuatan-kekuatan politik yang pernah ada pada masa Orde Lama yang instabil. Apalagi pada waktu itu merupakan beberapa peraturan belum disesuaikan dengan struktur politik baru yang diharapkan seperti RUU pemilu, RUU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU tentang Partai Politik, Organisasi Massa dan Golkar. Dengan penundaan ratifikasi RUU tersebut secara otomatis pemilu tidak bisa dilakukan pada tahun tersebut (1968).

Penundaan tersebut, menurut beberapa pengamat berkaitan dengan pertama, kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan tampilnya partai politik sebagai pemanang, jika pemilu diadakan pada saat itu. Pemerintah Orde Baru yang didominasi oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap partai politik, yaitu sebagai “pesaing dalam memperoleh kekuasaan dan penggerak keresahan rakyat”. Kedua, pemerintah juga merasa khawatir terhadap kemungkinan tampilnya kembali kekuatan lama pada masa orde lama, jika partai ini memenangkan pemilu. Ketiga, pemerintah merasa belum yakin bahwa Sekber Golkar dapat memenangkan pemilu.¹⁶²

Karena itu, pada Maret 1968, ketika mengadakan sidang untuk menetapkan Soeharto sebagai Presiden, MPRS juga menetapkan melalui Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968, bahwa pemilu diselenggarakan paling lambat tanggal 5 Juli 1971. Untuk melaksanakan ketetapan ini, pemerintah bersama DPR kemudian mengundang UU Nomor 15 Tahun 1968 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

¹⁶² Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009. 107

Usaha lainnya dalam memenangkan dan meraih suara mayoritas Sekber Golkar adalah dengan menciptakan organisasi pemilihan umumnya sendiri, tanpa mengandalakan salah satu atau beberapa partai politik yang ada untuk memperoleh dukungan massa dalam masyarakat dan mayoritas DPR¹⁶³, yang diberi nama Bappilu (Badan Pengendali Pemilihan Umum). organisasi ini sejajar dengan Sekber Golkar, dalam arti ia memiliki pengurus pusatnya di tingkat nasional, sekaligus sub-sub komitennya di tingkat propinsi dan kabupaten. Orang yang diberi tugas untuk mengurus organisasi ini ditingkat pusat adalah Ali Moertopo¹⁶⁴, seorang asisten pribadi Presiden yang besar pengaruhnya.

Upaya selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6/1970 yang menegaskan bahwa:

“kelompok-kelompok tertentu di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) tidak diperbolehkan menjadi anggota-anggota partai politik: anggota ABRI, semua PNS yang bekerja pada Departemen Pertahanan, hakim dan penuntut umum, pejabat-pejabat khusus seperti Gubernur Bank Indonesia, dan para pemegang jabatan penting lain yang ditetapkan oleh Presiden”.¹⁶⁵

Peraturan-peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan untuk melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, dan menuntut monoloyalitas¹⁶⁶ mereka dengan hanya memberikan dukungan kepada Golkar. Ini menurut William Liddle dalam (Pemilu-pemilu Orde Baru, 1994) menjadi kunci kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 dengan memonopoli efektif hirarki birokrasi sipil dan militer.

Penggunaan istilah Orde Baru sebagai bentuk harapan pada tatanan masyarakat baru yang diharapkan oleh masyarakat lebih baik dari tatanan lama, Orde Lama, di masa Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, Jenderal Soeharto menjadi ketua presidium dari pemerintahan Soeharto bersama timnya yang terdiri dari kelompok teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro yang merancang konsep penataan

¹⁶³ Liddle, R. William, Pemilu-Pemilu Orde Baru; Pasang Surut Kekuasaan Politik, LP3ES: Jakarta, 1994, 36-37

¹⁶⁴ Kholil, Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru, 109- 110

¹⁶⁵ Kholil, Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru, 111

¹⁶⁶ Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar (Golongan Karya).

pembangunan dan penataannya yang liberal.¹⁶⁷ Golkar sendiri belum lagi digunakan sebagai partai oleh Soeharto sebagai yang dijadikan alat penggalangan dukungan suara rakyat.¹⁶⁸ Golkar merupakan peserta pemilu yang juga mendapatkan dukungan dari eksponen "66" yang anti Orde Lama, beberapa tokoh seperti Mochtar Lubis, Rahman Tolleng dan tokoh-tokoh lainnya. Dukungan Mochtar Lubis dan Rahman Tolleng dilihat sebagai bentuk keberhasilan Sekber Golkar memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan yang tampak kritis terhadap pemerintah. Kedua tokoh tersebut bahkan mengecam bagi mantan aktivis 66 yang hanya diam jadi penonton saja karena menunggu akan bukti ucapan dari Sekber Golkar.¹⁶⁹

Sekber Golkar di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Djuhartono yang kemudian Mayor Jenderal S. Sukowati mengatakan kepada masyarakat akan mempelopori pembaruan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan sebagai upaya pengisian cita-cita kemerdekaan.¹⁷⁰ Janji tersebut harus dibuktikan, terlebih lagi pada waktu itu adanya satu ormas yang sebelumnya tergabung dalam Sekber Golkar yang justru menyempal menjadi partai yakni Parmusi. Partai tersebut pada mulanya merupakan partai yang mengusung semangat Masyumi tetapi kemudian partai tersebut oleh para tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir untuk netral dalam politik.¹⁷¹

Peristiwa menyempalnya Parmusi dari Sekber Golkar segera ditanggapi oleh Golkar segera mengadakan konsolidasi komunikasi politik. Sekber Golkar memang juga terdapat beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang bergabung di dalamnya di antaranya Muhammadiyah, (2) Al- Jami'ah al Washliyah, (3) Gasbindo, (4) Nahdhatul Wathan, (5) Nahdhatul Anwar, (6) SNII, (7) KBIM, (8) Persatuan Umat Islam (PUI), (9) PORBISI, (10) HSBI, (1) PITI, (12) Wanita Islam, dan (13) Al-Irsyad. Menanggapi peristiwa tersebut Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar, Berdasarkan mandat tersebut, maka melalui Keputusan Nomor: KEP-507/SEKBER GOLKAR/1969, tanggal 9

¹⁶⁷ Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992,(Jakarta: KPG, 2008), 40-45. Terkadang oleh kalangan yang tidak setuju dengan gagasan mereka, kelompok ini disebut dengan Mafia Berkeley.

¹⁶⁸ Elson, Soeharto: A Political Biography, 186.

¹⁶⁹ "Mochtar dan Golkar", Majalah Tempo edisi 10 April 1971.

¹⁷⁰ Lubis, 30 Tahun Golkar, 91.

¹⁷¹ Elson, Soeharto: A Political Biography, 188.

Oktober 1969, dibentuk tujuh kelompok induk Organisasi (KINO), yaitu: (1) KINO KOSGORO (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), (2) KINO SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), Kino MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), (4) KINO Profesi, (5) KINO Ormas Hankam, (6) KINO GAKARI (Gabungan Kerakyatan Republik Indonesia), dan (7) KINO Gerakan Pembangunan.¹⁷² Pembentukan KINO¹⁷³-KINO tersebut menjadikan saluran dalam penyampaian pesan dalam komunikasi politik menjadi tersegmentasi dengan jelas. Pada masa awal inilah Golkar dijadikan Orde Baru sebagai partai semu yang digunakan untuk menjalankan strategi komunikasi politiknya.

Dalam menjalankan strategi komunikasi politiknya sasaran utama khalayak untuk disampaikan pesannya adalah Dalam rangka memurnikan pengertian golongan fungsional dan penataan kehidupan politik yang akan dilaksanakan Sekber Golkar, maka dilakukan pemurnian keanggotaan Golongan fungsional di MPRS dan DPR-GR (Gotong Royong). Setelah berhasil memurnikan Golongan Fungsional, Sekber Golkar melakukan pemantapan organisasi dan melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Dengan terbentuknya kepengurusan Sekber Golkar di Dati I dan II, maka Sekber Golkar siap untuk mengikuti pemilu 1971.¹⁷⁴

Strategi kemenangan pemilu tahun 1971, demi meraih suara maksimal pada pemilu pertamanya 1971, para tokoh Sekber, pada tanggal 31 Desember 1969 melakukan konsultasi dengan Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina. Dalam Konsultasi tersebut Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa Sekber Golkar diharapkan dapat menjadi pilar Orde Baru guna membangun di segala bidang, harus dapat menunjukkan keutuhan tekad, kesatuan gerak, dan tanggap atas kewajibannya. Pengarahan Ketua Dewan Pembina tersebut kemudian dimusyawarahkan oleh ketujuh kino untuk diambil keputusan bersama dengan “menyatakan mufakat untuk ikut dalam Pemilihan Umum 1971 dengan satu tanda gambar, Golongan karya (Golkar). Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka usaha-usaha memenangkan pemilu 1971 dapat dilakukan lebih koordinatif dan terarah. Menurut perhitungan pada waktu itu, apabila Sekber Golkar dapat meraih 35% dari kursi yang diperebutkan, maka sudah cukup memadai untuk

¹⁷² Lubis, 30 Tahun Golkar, 97

¹⁷³ Vatiokiotis, Indonesia Under Soeharto, 53

¹⁷⁴ Lubis, 30 Tahun Golkar, 99.

menjamin kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena menurut Undang- Undang seperti anggota MPR adalah Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya non-ABRI yang diangkat.¹⁷⁵

Sedangkan pada tingkat grassroot, maka dirancanglah sebuah strategi pemenangan pemilu yang dirancang oleh Ali Moertopo. Yakni dengan meraih dukungan dari pelbagai kalangan agama seperti kalangan Islam ataupun Konghucu, sebagai bagian dari kekuatan-kekuatan bangsa yang cukup diperhitungkan. Pendekatan yang dilakukan Ali Moertopo dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal. Pada kalangan Islam dibentuklah GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). GUPPI merupakan sebuah upaya dari Ali Moertopo untuk meraih suara dari kantong- kantong pendukung NU di Jawa Tengah. Golkar melakukan pendekatan kepada masyarakat Islam melalui pendekatan kepada para tokoh kelompok-kelompok Islam. Pada beberapa kelompok dijanjikan pemberian ongkos naik haji bagi para pemuka agama Islam yang mendukung Partai Golkar.¹⁷⁶ sedangkan pada beberapa kalangan aliran lainnya seperti konghucu dilakukan pendekatan agar mereka mendukung Golkar.¹⁷⁷ Pada level media Ali Moertopo mendomestikasi Persatuan Wartawan Indonesia dengan mendukung ketua umum PWI. Selain itu juga Golkar menerbitkan surat kabar yakni Berita Yudha dan Suara Karya. Jika melihat pada kata dari media massa tersebut Berita Yudha adalah surat kabar dari unsur militerinya, sedangkan Suara Karya dari dan untuk kalangan birokrat.¹⁷⁸

Pada tahun 1970-an, Ali Moertopo melarang personel ABRI dan pegawai negeri di lingkungan Departemen Pertahanan untuk tidak aktif dalam kepartaian. Larangan itu diterbitkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 yang melarang pengurus Golkar di tingkat untuk ikut serta dan aktif dalam partai lainnya. Larangan yang diberikan oleh Ali Moertopo ini merupakan satu upaya untuk mengadakan deparpolisasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah keberpihakan ABRI kepada partai politik tertentu sehingga menghindarkan keberpihakan ABRI kepada partai sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde

¹⁷⁵ Lubis, 30 Tahun Golkar, 99.

¹⁷⁶ Bahkan, Golkar mengajak tiga orang kiai untuk berkeliling eropa sebagai cara membujuk para kiai tersebut. Bagi umat Islam Golkar mengatakan telah selesai membangun mesjid-mesjid sehingga dapat membujuk dukungan suara umat Islam. Elson, Soeharto: Biografi Politik, 188.

¹⁷⁷ "Dari Cukhong ke Pohon Beringin", Majalah Tempo, 10 April 1971.

¹⁷⁸ Elson, Soeharto: Biografi Politik, 186.

Lama. Sedangkan pada para pendukung partai lainnya, antara lain kepada massa PNI, cara yang dilakukan adalah dengan cara meminta kepada para petinggi lokal (tingkat desa) untuk memenangkan Golkar dengan menjamin kedudukannya. Pada tingkat distrik (kabupaten) dan subdistrik (kewedanaan) Sekber Golkar mendapatkan dukungan penuh bagi para priyayi yang menduduki jabatan tersebut. Pada tiap-tiap tempat di Jawa Tengah Sekber Golkar melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai dengan kekuatan politik yang ada pada daerah tersebut pada masa Orde Lama.¹⁷⁹

Hal yang perlu diperhatikan adalah sosok dari Ali Moertopo ini merupakan seorang tentara pendukung PNI yang awalnya tidak melihat Sekber Golkar sebagai partai yang menarik untuk diikuti tetapi kemudian digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. pada masa itu juga Sekber Golkar menarik dukungan dari mantan anggota PKI terutama yang berada di desa-desa. Sebagai hasilnya Golkar mendapatkan langsung dukungan 62% dari dukungan masyarakat. sebuah perolehan suara yang mengejutkan sama sekali, mengingat dukungan suara sedemikian besar tidak diperoleh oleh satu partai pun pada pemilu 1955.¹⁸⁰

Setelah Sekber Golkar mendapatkan kepercayaan melalui pemilu 1971, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1971 menyelenggarakan musyawarah Sekber Golkar di Jakarta. Dalam musyawarah nasional tersebut, salah satu yang menjadi perhatian serius adalah terkait dengan perubahan bentuk organisasi dari bentuk federasi menjadi bentuk kesatuan.

Musyawarah yang berlangsung satu hari tersebut menyepakati lima keputusan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Ketua Umum Sekber Golkar Nomor : KEP/101/VII/GOLKAR1971, tanggal 17 Agustus 1971.¹⁸¹

Keputusan tersebut berisikan sebagai berikut:

1. Nama SEKBER GOLKAR diganti menjadi GOLKAR (Golongan Karya).
2. Struktur organisasi terdiri dari Pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II.
3. Istilah KINO tidak dipergunakan lagi
4. Ormas-ormas yang terhimpun pada KINO diserahkan pembinaannya dan pengendalian politiknya kepada GOLKAR, karena KINO tidak lagi menjadi badan-badan

¹⁷⁹ "Sebuah Peta Daerah Pemilu", Majalah Tempo, 12 Juni 1971.

¹⁸⁰ Elson, Soeharto: A Political Biography, 188.

¹⁸¹ Lubis, 30 Tahun Golkar, h.105.

- pelaksana perjuangan politik.
5. Peleburan diri harus selesai secara teknis menjelang MUNAS I GOLKAR, yang direncanakan berlangsung pada tahun 1973.¹⁸²

Dengan adanya peleburan KINO-KINO tersebut, berarti GOLKAR menjadi organisasi yang bersifat kesatuan, tetapi keanggotannya masih tetap organisasi, bukan perorangan. Sebelumnya pada bulan Maret 1971 diadakannya Rapat Kerja (Raker) yang beracaranya penetapan program-program intern organisasi, serta penetapan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi Sidang Umum MPR tahun 1973. Langkah-langkah strategi yang diambil GOLKAR dalam menghadapi Sidang Umum MPR 1973, adalah sebagai berikut: (1) Bidang Ideologi; memperkuat Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. (2) Bidang Politik; dengan Memantapkan kehidupan Demokrasi Pancasila, Mengembalikan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara sesuai dengan UUD'45, Mendorong pembaruan struktur politik dengan menyederhanakan kepartaian dan kekuatan sosial politik, Mengubah pola orientasi ideologi menjadi orientasi program berdasarkan fungsionalisasi dan profesionalisasi, Membebaskan rakyat banyak dari belenggu arus politik praktis, dengan menggairahkan mereka dalam pembangunan ekonomi, dan Turut menyempurnakan terus Aparatur Negara untuk mencapai pemerintahan yang kuat dan bersih. (3) Bidang Ekonomi; Meninggalkan pola etatisme, membuang slogan-slogan dan menggantikannya dengan perbaikan ekonomi dan pembangunan yang nyata, Membuka pintu bagi modal asing yang bersifat melengkapi, guna menumbuhkan kekuatan ekonomi, Mengadakan kerja sama ekonomi dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan, dan Mendorong usaha-usaha swasta, terutama ekonomi lemah, untuk berkembang. (4) Bidang Kemasyarakatan; dengan Menghapuskan fanatisme golongan, ideologi, agama dan kebangsaan yang chauvinistis, serta mengusahakan hidup rukun antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. dan (5) Bidang Hankamnas; yakni Mengukuhkan dwifungsi ABRI dalam mengemban tugasnya sebagai stabilisator dan dinamisator.¹⁸³

Setelah strateginya mendapatkan legitimasi dalam Sidang Umum MPR 1973, Golkar mulai melebarkan sayapnya untuk membidani dalam pembentukan organisasi yang berorientasi pada program kerja dan karya nyata yang sudah didengungkan

¹⁸² Lubis, 30 Tahun Golkar, 105.

¹⁸³ Lubis, 30 Tahun Golkar, 106-107.

dalam langkah-langkah strateginya. Di antara organisasi yang dibentuknya adalah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berubah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Selain itu, PGRI dan KOWANI.¹⁸⁴

Paska kemenangan pemilu 1971 maka Golkar menjadi organisasi peserta pemilu yang kemudian menentukan arah komunikasi politik Orde Baru pada waktu itu sehingga dapat melanggengkan organisasi ini sebagai partainya penguasa (ruler's party). Beberapa intelektual menyebutnya dengan masa otoriter birokratik, karena penguasa pada masa itu, Soeharto bersifat otoriter tetapi menopangkan kekuasaannya pada birokrasi yang kokoh, sehingga kekuasaannya bertahan hingga beberapa dekade.¹⁸⁵ Jangka waktu kekuasaan yang lama juga ditopang oleh komunikasi politik yang bersifat topdown.¹⁸⁶ Meskipun, sesungguhnya dalam internal Orde Baru sendiri terdapat dinamika tersendiri yang tidak monolitik sehingga di dalam Orde Baru terdapat beberapa kelompok yang berada di sekitar Soeharto sebagai figur sentral.¹⁸⁷ Sehingga ini juga ikut pula mewarnai komunikasi politik Orde Baru terutama dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Komunikasi politik Orde Baru yang searah sesungguhnya bisa dipahami mengingat situasi Orde Baru tidak disertai dengan kemelimpahan informasi sebagaimana pada masa sekarang. Meskipun begitu banyak terdapat media massa akan tetapi sifat dan formatnya masih tidak berbeda dengan media massa pada masa Orde Lama.¹⁸⁸

Tetapi, memang pada perkembangan selanjutnya, Soeharto menggunakan aparatus birokrasinya untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui pelbagai pengemasannya. Pada masa Orde Baru dapat dilihat bagaimana komunikasi politik digunakan dalam melakukan hubungan dengan pelbagai unsur bangsa ini antara lain dengan kalangan militer, birokrat dan Islam. dua yang pertama

¹⁸⁴ Lubis, 30 Tahun Golkar, h.105.

¹⁸⁵ Lihat Muhammad AS Hikam, Islam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta: LP3ES, 2000).

¹⁸⁶ Lihat, Dedy N Hidayat, Victor Menayang and Effendy Gazali, "Political Communication of Indonesia in Three Era", dalam Political Communication in Asia, (London: Routledge, 2008).

¹⁸⁷ Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992, (Jakarta: Freedom Institute dan KPG, 2008), 28.

¹⁸⁸ Lucien W. Pye and Karl D Jackson, Political Communication in New Order, (Newyork: Princeton University Press, 1984), 33-45.

merupakan dua dari tiga penopang kekuasaan Orde Baru.¹⁸⁹ Sedangkan yang terakhir merupakan salah satu bagian yang didekati oleh Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertimbangan lainnya lagi adalah Soeharto melihat adanya kebutuhan stabilitas yang diperlukan dalam melakukan pembangunan nasional dengan baik tanpa gangguan. Traumatika terhadap sistem Demokrasi Liberal dengan sistem multi partai ala Soekarno. Hal ini karesna situasi politik yang tidak stabil dan tidak menentu, menjadi pemicu bagi Orde Baru dan Soeharto yang sekaligus sebagai Dewan Pembina Sekber Golkar pada waktu itu untuk berusaha memenangkan Golkar dalam setiap pemilu agar memperoleh legitimasi politik guna menciptakan sistem politik baru yang dapat mewujudkan stabilitas nasional, sehingga memperlancar pembangunan ekonomi. Hal itulah sudah menjadi pertimbangan Soeharto sejak awal, sehingga pemerintahan Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai panglima, bukan politik.¹⁹⁰

Sebagian besar orang juga setuju bahwa peranan ABRI dan birokrasi sangat instrumental dalam kemenangan Golkar. Ali Moertopo juga mengakui hal ini.¹⁹¹

“Beberapa kalangan berpandangan bahwa kemenangan Golkar terjadi karena beberapa faktor berikut: tersedianya dana, dukungan pejabat terutama dari ABRI, pembentukan Korpri di dalam berbagai kementerian, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan, dan juga karena berbagai macam intimidasi. Semua ini tentu saja memberikan sumbangan pada kemenangan Golongan Karya...¹⁹²

Selanjutnya untuk menjamin kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu-pemilu selanjutnya, pemerintah memperbaiki struktur organisasi Sekber Golkar agar lebih efektif, juga menekankan perhatian pada komposisi DPR dan MPR hasil pemilu 1971. DPR, yang merupakan sebuah badan legislatif, mempunyai 460 anggota, 100 di antaranya adalah anggota-anggota yang diangkat. Dari jumlah ini, 75 disediakan untuk militer karena Undang-Undang yang ada tidak membolehkannya untuk ikut serta dalam pemilu.¹⁹³

Kunci kemenangan Sekber Golkar tidak hanya melalui dukungan penuh ABRI dan monoloyalitasnya pada partai

¹⁸⁹ Lihat dalam Leo Suryadinata, *Golkar, Militer dan Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1992).

¹⁹⁰ Elson, *Soeharto: Biografi Politik*, 190.

¹⁹¹ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 115

¹⁹² Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), 82-83.

¹⁹³ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 115

pemerintah, tetapi dalam mengoperasionalkan berbagai kegiatan kepartaian, Sekber Golkar disinyalir menggunakan dana-dana atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah keterlibatan Pertamina sebagai salah satu sumber terpenting finansial Golkar. Selain dari Pertamina, sumber keuangan lain Golkar yang berasal dari para cukong. Selama masa pemilu, para pengusaha Cina diundang untuk memberikan sumbangan dana kepada Golkar. Makan malam untuk pengumpulan dana sering diselenggarakan, dan banyak cukong hadir dalam acara-cara tersebut. Salah seorang peserta bahkan menyebut jenis kelompok ini sebagai Golkong (Golongan Cukong).¹⁹⁴

Dalam menjalankan strategi komunikasi politiknya, Golkar dalam perkembangan mendirikan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) yang menjadi sumber utama keuangan Golkar. Yayasan Dakab diketuai oleh Soeharto yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar. Yayasan ini mengumpulkan uang dari berbagai sumber, antara lain BUMN dan para pengusaha. Yayasan Dakab bukanlah pemilik dana-dana tersebut, namun sesungguhnya hanyalah merupakan collector dana yang dimaksudkan bagi kepentingan Golkar. Salah satu tujuan berdirinya Yayasan Dakab pada Juli 1985 adalah untuk membantu dan mendukung langsung atau tidak langsung perjuangan Golkar.¹⁹⁵

Selain dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, Yayasan Dakab juga mengumpulkan uang dari sumber-sumber lainnya, antara lain para pengusaha simpatisan Golkar, pemotongan setiap tahun pendapatan pegawai negeri sipil: untuk golongan I sebesar Rp. 5000, Golongan II Rp. 8000, golongan III Rp. 12.000, dan golongan IV Rp. 30.000. Jumlah uang akan terus meningkat seiring dengan terus membesarnya jumlah pegawai negeri. Juga sumbangan wajib tahunan anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR sebesar Rp. 750.000, FKP DPRD I Rp. 600.000, dan FKP DPRD II Rp. 300.000.¹⁹⁶ dengan mengumpulkan dana dari para pegawai negeri ini memunculkan rasa kepemilikan dari birokrat kepada partai pemerintah tersebut. Rasa kepemilikan ini didukung dengan karakter sosiokultural masyarakat Indonesia yang melihat birokrat sebagai priayi baru yang dihormati dalam masyarakat yang

¹⁹⁴ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 1

¹⁹⁵ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2007), 171-172

¹⁹⁶ Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 173

kemudian menjadi penggerak dan menjadikan kinerja komunikasi politik Golkar efektif pada masa Orde Baru di kemudian hari.

Di sisi lain sumber dana inilah yang menyebabkan Golkar dapat melancarkan setiap komunikasi politiknya kepada masyarakat pada waktu itu. Sumbangan wajib dari para anggota ini menunjukkan monoloyalitas dari anggota Golkar. Beberapa indonesianist melihat hal ini sebagai sebuah upaya yang koersif dan represif. Seperti pendapat Ricklef yang melihat cara-cara yang dilakukan oleh Golkar yang mengharuskan monoloyalitas kepada Golkar sebagai partai pemerintah. Pola-pola koersif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenangkan Golkar sebagai “partai pemerintah” dalam pemilu-pemilu selanjutnya terus diupayakan demi menjaga perolehan suara sebagai landasan legitimasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Upaya-upaya tersebut tidak lepas dari campur tangan ABRI dalam melakukan berbagai konsolidasi hingga ke desa-desa dan sistem monoloyalitas PNS yang tidak diperkenankan memilih partai lain selain Golkar. Akibat dukungan penuh dari dua instansi besar yakni ABRI dan PNS yang tergabung dalam Korpi, Golkar praktis tidak bisa mengurus dirinya sendiri alias tidak mandiri. Ketidakmandirian partai Golkar diperburuk oleh keberadaan Dewan Pembina dalam struktur kepemimpinan yang notabene dipimpin langsung oleh Soeharto sebagai yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah kebijakan partai Golkar. Dengan sendirinya Golkar menjadi partai semu yang menjadi partainya pemerintah.

3. Peran Militer dalam Komunikasi Politik Golkar

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa, berdirinya Golkar justru oleh para petinggi militer yang resah dengan kondisi perpolitikan orde lama. Munculnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 menandai kebangkitan koalisi militer, terutama Angkatan Darat sebagai penguasa baru dengan menjungkalkan Soekarno sebagai pemimpin kharismatik era kemerdekaan, partai-partai politik yang dulunya memiliki pengaruh besar, seperti Masyumi dan NU serta Pembumihangusan Partai Komunis yang begitu perkasa pada saat itu¹⁹⁷ – yang kebetulan sebagai musuh abadi ABRI.

Keterlibatan militer bermula dengan didukung oleh pembentukan opini akan lemahnya politisi sipil, terjadinya pertarungan antara elite sipil yang mengancam integrasi

¹⁹⁷ Hefner, Robert. W, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 113.

bangsa, kekacauan ekonomi. Menjaga stabilitas politik dari gangguan keamanan tentulah merupakan alasan dan motif terpenting keterlibatan militer dalam politik.¹⁹⁸ Bagi Ali Moertopo, keadaan tersebut yang memaksa tentara untuk menjadi dominan dalam politik Indonesia didasari atas kegagalan atau belum berhasilnya golongan sipil mengatasi paham golongan, mengatasi kepentingan, dan berpikir “program oriented”. Dengan posisi yang demikian, “menyerahkan kedudukan yang sekarang ini ditempati ABRI kepada golongan sipil pada waktu ini akan berarti mempertaruhkan eksistensi negara ini sendiri, dan bisa menggagalkan proses normalisasi yang sekarang sedang berjalan”.¹⁹⁹ Ali Moertopo menambahkan bahwa dominasi tersebut terpaksa, karena sipil belum siap. Keyakinan ini menjadi konstruksi realitas di kalangan masyarakat bahwa peran dari militer merupakan sebuah kebutuhan dalam politik Indonesia, sehingga peran militer dalam komunikasi politik menjadi begitu dominan.

Angkatan Bersenjata (ABRI) adalah satu-satunya institusi nasional yang memiliki fungsi ganda, yakni keamanan dan politik. Ini diperoleh dari asal-mula pendiriannya sebagai “tentara rakyat” yang dilahirkan dalam revolusi dan diikuti oleh penciptaan doktrin-doktrin “Jalan Tengah” pada tahun 1950-an dan dwifungsi pada tahun 1960-an. Lebih jauh, ABRI melihat dirinya sebagai pembela utama negara Pancasila : suatu negara kesatuan yang nonkomunis, nonteologis. Peran ABRI sebagai Pembela Pancasila itu dicantumkan dalam Sapta Marga, yaitu sumpah prajurit yang sudah menjadi keramat.²⁰⁰

ABRI memandang Pancasila sebagai ideologi “integralistik”, yang berarti tidak relevan membedakan antara angkatan bersenjata dengan rakyat sipil. ABRI tidak mengakui adanya perbedaan antara domain militer dengan domain sipil dalam kehidupan nasional. Jadi peran sosiopolitik ABRI berasal dari konseptualisasi Pancasila sebagai ideologi “integralistik”.²⁰¹

Integralisme memandang negara dan masyarakat sebagai suatu totalitas organik yang menekankan kepada kewajiban-kewajiban sosial. Ide ini digulirkan oleh Prof. Soepomo pada

¹⁹⁸ Hamdi, et.al), Kajian Pemilu 1999, 93.

¹⁹⁹ Salim Said, Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, (Jakarta : Aksara Karunia, 2002), h.113.

²⁰⁰ Douglas E. Ramage, Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi, (Mata Bangsa: Yogyakarta: 2002), 225.

²⁰¹ Ramage, Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi, 229.

perdebatan-perdebatan tahun 1945 persiapan Kemerdekaan. Menurut Abdul Kadir Besar integralisme mensyaratkan agar kelompok-kelompok “mayoritas” memiliki “kepekaan tinggi” terhadap minoritas-minoritas agama dan etnik, karena yang lemah dan kecil secara otomatis memperoleh perlindungan dan perhatian dari negara secara “kekeluargaan. Yang ditekankan adalah kewajiban pemerintah terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok, bukannya hak-hak individu.”²⁰²

Peran politik dominan itulah yang dikonsolidasikan oleh tentara lewat Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada bulan Agustus 1966, yang hasilnya memutuskan kaum militer Indonesia untuk makin memperteguh posisi mereka sebagai kekuatan politik. Seminar para perwira di Bandung itu juga menghasilkan sekumpulan gagasan yang disusun dalam sebuah buku yang diberi judul Sumbangan Fikiran TNI-AD Kepada Kabinet Ampera, yang terbagi dalam tiga bagian, yakni “Landasan Idiil Bagi Perjuangan Angkatan Darat”, Garis-garis Besar Kebidjaksanaan dan Rentjana Pelaksanaan stabilisasi Politik”, dan “Garis-garis Besar Kebidjaksanaan dan Rentjana Pelaksanaan Stabilisasi Ekonomi”.²⁰³

Dwifungsi ABRI tersebut merupakan sumber dari Demokrasi Pancasila yang di dalamnya terdapat tiga kelompok politik, yakni Golongan Karya ABRI, Golongan Karya Non-ABRI, dan Partai Politik serta organisasi massa. Anggota Golongan karya ABRI adalah:

“selected number” dari tubuh ABRI dan yang berstatus sipil. Golongan ini membawa fungsi ABRI sebagai alat revolusi. Fungsi dijalankan tidak berdasarkan hak-hak istimewa, melainkan bertumpu pada keunggulan kualitas tenaga-tenaga ABRI dalam masyarakat Indonesia.²⁰⁴

Golongan kedua adalah golongan karya non-ABRI. Golongan ini tidak memiliki ideologi sendiri. Oleh karena itu ABRI yang menganut ideologi Pancasila merasa berkewajiban menjadi pembina mereka. Kelompok kedua ini yang menjadi bagian terpenting dalam kemunculan Sekber Golkar yang dibidani oleh militer terutama Angkatan Darat. Untuk kelompok ketiga adalah partai-partai politik dan berbagai organisasi

²⁰² Ramage, Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi, 239.

²⁰³ Said, Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, 69-70

²⁰⁴ Said, Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, 83.

massa dengan beragam ideologi.²⁰⁵

Usai militer mengkonsolidasi kekuatannya, ABRI mulai mempersiapkan UU Pemilu yang sesuai dengan kepentingan politik kelas dan korporasinya, memperkuat kepemimpinan militer, meletakkan partai-partai politik di bawah kontrol militer dan mempersiapkan dan mempersiapkan dukungan penuh bagi Golkar sebagai alat politik militer untuk memenangkan pemilu.

ABRI menjadi pendukung utama Golkar dan menempatkan anggotanya di Golkar. Di Golkar, terdapat unsur militer dalam bentuk jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Unsur militer dalam Golkar itu tidak hanya ABRI aktif, tetapi juga para purnawirawan dan Keluarga Besar ABRI (KBA) secara keseluruhan. Bisa dikatakan unsur militer ini paling dominan dalam penentuan kebijakan politik strategis Golkar. Dari segi organisasional, unsur militer menempati posisi paling strategis antara lain sebagai ketua umum. Ketua Dewan Pembina Golkar, yang menentukan hitam-putuhnya Golkar adalah Soeharto yang juga adalah seorang Jenderal.

Dalam setiap pemilu Orde Baru militer, memainkan peranan politik yang sangat strategis dan vital. Militer merupakan bagian tak terpisahkan dari proses-proses politik yang terjadi. Tidak seperti di beberapa negara Barat yang memberlakukan prinsip supermasi sipil atas militer (civil supremacy over the military), di Indonesia prinsip itu ditolak tegas kaum militer. Justru yang terjadi dalam kasus Orde Baru (1967-1998) dan yang berlaku adalah supremasi militer atas sipil (military supremacy over civilian).²⁰⁶

Jika dilihat dari fakta tersebut menjadi semakin jelas bahwa militer dan Golkar merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di samping membidani kelahiran Golkar, militer juga memiliki peranan penting dalam memenangkan pemilu-pemilu Orde Baru, terutama 1971 dan 1977. Peran tersebut dilakukan oleh militer terutama dalam memobilisasi dukungan dari keluarga besar ABRI dan ikutan-ikutannya seperti Purnawirawan ABRI, Wanita ABRI, FKPP, dan Kino-Kino lainnya yang sudah ada terhadap Golkar pada setiap pemilu. Kegigihan Golkar dalam memobilisasi massa pendukungnya untuk memilih Golkar bukan tanpa pamrih, dibalik itu semua ada tujuan-tujuan tertentu yang

²⁰⁵ Said, Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, 83.

²⁰⁶ Hamid, et.al, Kajian Pemilu 1999, 92

ingin diraih oleh militer, terutama tujuan dasar pembentukan Golkar oleh militer, sebagaimana Boileau katakan, yakni guna mendukung dan memberikan legitimasi pada tujuan-tujuan militer, menciptakan stabilitas dan harmoni. Selain itu juga untuk meraih dukungan serta pengakuan akan peranannya dalam pemerintah.²⁰⁷

Peran militer ini nampaknya tidak berlangsung lama, hanya berlangsung hingga tahun 1984. Paska pemilu 1982, Golkar kemudian dipimpin oleh Soedharmono, seorang pensiunan tentara tetapi bukan berasal dari kesatuan. Soedharmono adalah seorang tentara yang identik sebagai pemikir. Meskipun demikian, Soedharmono tetap melakukan pelbagai strategi yang dilakukan untuk mempertahankan perolehan suara yakni dengan menyelenggarakan Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Pedesaan) sebuah mesin partai yang di kemudian hari digunakan oleh pengurus DPP Golkar untuk menjaring massa mengambang. Melalui strategi karakterdes ini pula, maka Golkar bisa menjangkau ke tingkat yang paling bawah yakni tingkat desa. Pada tingkat ini, Golkar bersama birokrasi desa yang dipimpin oleh kepala desa sedangkan, sedangkan dari sisi ABRI, bersama dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa). Strategi karakterdes terus bertahan hingga Ketua Umum DPP digantikan oleh Wahono seorang tentara ABRI yang tidak berasal dari kesatuan.²⁰⁸

Ini bagi kalangan indonesianis sebagai upaya Soeharto sebagai figur sentral dari Golkar untuk tidak memunculkan figur-figur baru dalam Golkar, apalagi berkaitan dengan sosok Benny Moerdani seorang tokoh yang memiliki karier militer begitu cemerlang. Benny Moerdani adalah seorang tentara yang berprestasi yang mendapatkan bintang jasa makayasa yang dianugerahkan Presiden Soekarno kepadanya dan Letkol Untung. Hal ini karena keberaniannya sebagai tentara dalam penaklukan Pemberontakan Rakyat Semesta tahun 1957.²⁰⁹ Peran Militer semakin menurun terkait dengan isu 'De-Bennysisasi' yang dimulai paska peristiwa Tandjung Priuk tahun 1984. Maka beberapa tentara yang ditengarai memiliki hubungan dekat dengan Benny Moerdani pun tidak diberikan jabatan-jabatan penting terutama sebagai ketua umum DPP Golkar. Pengangkatan Soedharmono sebagai ketua umum DPP Golkar merupakan salah satu indikasi itu.

²⁰⁷ Hamid, et.al, Kajian Pemilu 1999, 95

²⁰⁸ Lubis, 30 Tahun Golkar, h.105.

²⁰⁹ Tentang figure Benny Moerdani lihat Julius Pour, Profil Prajurit Pejuang, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Ditambah lagi ketika Golkar mengangkat Harmoko, merupakan kelanjutan upaya peluruhan pengaruh dari Benny Moerdani. Dengan pengangkatan Harmoko sebagai ketua umum justru di dalam Golkar kemudian memunculkan kekuatan Islam, terutama dengan strategi komunikasi politik dari Harmoko yang melakukan safari ramadhan keliling setiap kabupaten di Indonesia. Ini sebagai cara pemerintah Soeharto mengkooptasi masyarakat Islam. Pemerintahan Soeharto mulai 'menghijaukan' pemerintahan Indonesia dengan berusaha mengkooptasi dan mendapatkan dukungan sentimen Islam.

4. Birokrasi sebagai Pendukung Utama Golkar

Keterkaitan yang erat antara Golkar dengan Birokrasi terjadi ketika pada bulan Februari 1970, pemerintah mengumumkan semua pegawai pemerintah harus setia kepada pemerintah. Mereka harus bergabung dengan Golkar (Golongan Karya). Golkar juga menggunakan Departemen Dalam Negeri, yang menjangkau masyarakat melalui pejabat-pejabat propinsi, kabupaten, dan kecamatan yang dimanfaatkan untuk kampanye Golkar. Pada saat sebelumnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 1969 (PERMEN 12) tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut aktif dalam partai politik. Peraturan ini mendasari kebijakan monoloyalitas, di mana aspirasi politik PNS harus disalurkan kepada Golkar. Dengan asas monoloyalitas tersebut, birokrasi telah menjadi instrumen politik Orde Baru yang berintikan hirarki yang kompleks: seprangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan memungkinkan Soeharto dan pihak militer untuk menguasai masyarakat.²¹⁰

Permen 12 tersebut menandai adanya kebijakan monoloyalitas yang diberlakukan oleh pemerintah bagi PNS untuk hanya setia kepada Golkar. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan "bulldozer" Amir Machmud yang memihak pada Golkar dan "menggilas" partai-partai politik lain. Konsekuensi dari regulasi ini menmpatkan unsur PNS dan keluarga besarnya menjadi salah satu kunci kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu Orde Baru.²¹¹

Pengaruh yang kuat dan pentingnya unsur birokrasi dalam Golkar pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya "Jalur B" yang mewadai aspirasi atau kepentingan unsur birokrasi. Pola

²¹⁰ Daniel K. Emmerson, *Indonesia beyond Soeharto; Negera, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h.66

²¹¹ Adam Schwartz, *A Nation in Waiting*, (Newyork: Westview Press, 2000), 176.

hubungan Golkar dan Birokrasi telah terbentuk semenjak awal Orde Baru. Dukungan birokrasi untuk memuluskan kemenangan Golkar dalam berbagai pemilu 1971 terlihat sangat jelas.²¹²

Dengan besarnya kontribusi PNS terhadap Golkar inilah Departemen Dalam Negeri memiliki alasan yang kuat untuk turut terlibat dalam berbagai kebijakan Golkar, termasuk dalam proses seleksi daftar calon legislatif (caleg). Selain itu, birokrasi juga menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur dalam berbagai aktivitas Golkar, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Afan Gaffar menilai bahwa periode ini terdapat kecenderungan pemerintah untuk menjadikan Golkar sebagai partai hegemonik, yang ditandai dengan keterlibatan berbagai kekuatan sosial dan politik di luar Golkar yang memfasilitasi dan membantu, dengan beraneka ragam motif, bagi dominasi politik Golkar dalam pemilu-pemilu Orde Baru. Dengan demikian kemenangan demi kemenangan yang diraih Golkar secara mutlak dalam semua pemilu Orde Baru tidak murni merupakan buah dari usaha keras yang dilakukan oleh Golkar sendiri, tetapi lebih merupakan akibat dari keterlibatan kekuatan-kekuatan politik di luarnya.

5. Masyarakat Muslim Sebagai Khalayak

Meskipun pada awalnya Golkar merupakan organisasi politik yang berasaskan Pancasila, tetapi kepada Islam 1990 Golkar mulai mendekati, terutama pada tahun 1990 hingga akhir masa kepresidenan Soeharto, ini ditandai dengan masuknya unsur-unsur HMI dan Ansor ke dalam partai berlambang beringin itu pada masa Soedharmono, kedua adalah terbentuk sebuah organisasi yang mewadahi para cendekiawan muslim yang diketuai oleh BJ Habibie yang kelak menjadi presiden. Dengan dibentuknya ICMI masa ini sering disebut dengan masa bulan madu Presiden Soeharto dengan kelompok Islam.²¹³ HMI menjadi organisasi

Posisi Islam pada awal kekuasaan Orde Baru memang sedikit disisihkan, meskipun dalam beberapa hal Ali Murtopo sebagai aktor intelektual melakukan pula pendekatan dengan kalangan Islam tetapi hanya untuk menggalang dukungan kepada partai ini saja, tidak mengikutsertakan kalangan Islam dalam politik. Hal itu juga ditengarai dengan dilarangnya

²¹² Reeves, *Golkar of Indonesia: an Alternative to the Party System*,, 279.

²¹³ Hefner. Robert W., "Islam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for the Indonesian Middle Class," dalam *Indonesia*, No. 56, Tahun 1993, 1.

kembali pembentukan kembali partai Masyumi oleh pemerintah Orde Baru dengan alasan traumatik akan gerakan DI/TII. Kajian mengenai kebijakan negara terhadap agama selama masa kepemimpinana Soeharto (Orde Baru) yang dilaksanakan oleh tim LIPI (Anas Saidi, 2002) menunjukkan bahwa ada dua trend besar kebijakan Orde Baru terhadap Islam yang berlawanan secara diametral, yakni deideologisasi versus ideologisasi Islam. Pada dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, warna dasar dari kebijakan itu adalah upaya “deideologisasi” yang jelas berangkat dari asumsi dan persepsi Islam sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan.²¹⁴

Langkah pertama adalah dengan penggabungan partai-partai Islam yang eksis di awal tahun 1970-an ke dalam satu partai Islam tunggal yakni Partai persatuan Pembangunan (PPP). Orang yang menjadi arsitek dari pembaruan politik tersebut adalah orang dekat Soeharto, Ali Moertopo. Ia meyakini bahwa fusi partai-partai Islam yang berbeda-beda tersebut justru akan melamahkan suara umat Islam, dan bukan sebaliknya. Pemilu 1977 menunjukkan bahwa penilaian tersebut memang tepat.²¹⁵ Selanjutnya keputusan pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. MUI memiliki tugas: pertama, memberikan fatwa atas berbagai persoalan keagamaan. Kedua, mempererat tali persaudaraan Islam. Ketiga, mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan kelompok agama lain. Keempat, menjadi mediator antara pemerintah dengan ulama. Kelima, menerjemahkan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan agar mudah dipahami masyarakat umum.

Depolitisasi Islam ini membuat ormas Islam menjadi “tidak bergairah” untuk masuk gelanggang politik. Keluarnya NU dari PPP pada awal daswarsa 1980-an setidaknya menggambarkan hal itu, kendati keluarnya ormas ini didasri kekecewaan karena diperlakukan secara tidak adil menyangkut kepentingannya di dalam tubuh PPP atas jumlah daftar calon legislatif yang disusun pimpinan pusat partai. Orde Baru, pada sisi tertentu telah memperlakukan Islam Politik sebagai kelompok “ekstrem kanan” pelengkap sebutan “ekstrem kiri” untuk kelompok komunis. Kedua kelompok ini diposisikan sebagai “ancaman

²¹⁴ Hefner. Robert W., "Islam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for the Indonesian Middle Class," dalam *Indonesia*, No. 56, Tahun 1993, 4.

²¹⁵ Robert. W. Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.181.

negara dari ideologi Pancasila ” dengan mencurigai anggota partai maupun anggota organisasi sosial yang bersifat kritis terhadap Orba. Tokoh-tokoh Islam mencurigai, kebijakan politik dan kehidupan kenegaraan pemerintah Orde Baru di bagian tahun 1967-1985 sangat dipengaruhi “think thank” CSIS yang dibentuk perwira tinggi Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Sudjono Humardhani serta beberapa cendekiawan Katholik radikal etnis China seperti Liem Bian Koen, Liem Bian Kie, sekalipun pernyataan ini ditolak Soeharto.²¹⁶

Kebijakan politik Orde Baru sebelum tahun 1980-an, secara pasti telah menjadikan adanya pergeseran konsep umat dari gerakan politik ke gerakan dakwah – yang pada gilirannya telah mendorong tumbuhnya berbagai institusi dakwah, baik atas dasar desakan umat maupun atas jasa pemerintah. Para tokoh Masyumi lebih menekuni dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), pada 1967 dan diketuai Mohammad Natsir. Lalu lahir pula Lembaga Misi Islam (LMI) pada tahun 1969, GPII (1971), PITI (1972), PTDI (1973), MUI (1975), MDI (1978), Ittihadul Mubalighien (1978), Perti (1973) dan banyak lagi yang sifatna nasional maupun lokal.²¹⁷

Lebih jauh lagi, kondisi politik yang dibangun pada awal-awal Orde Baru telah “mengembalikan” organisasi massa Islam terbesar negeri ini, dari kalangan modernis, Muhammdiyah dan dari kalangan tradisional, Nahdhatul Ulama (NU), kembali kepada khittah perjuangannya, yakni sebagai “pelayan umat” dan meninggalkan gelombang politik.

Setelah 20 tahun kepemimpinan Orde Baru, Soeharto mengambil garis kebijakan baru yang berbalik 180 derajat dengan sebelumnya terhadap politik umat islam. Ada yang menyebut, garis kebijakan baru ini menandai era “ideologisasi” islam oleh negara. Era itu ditandai oleh pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 7 Desember 1990. Pada masa ini Soeharto banyak sekali melakukan akomodasi terhadap kelompok Islam.²¹⁸

Pada dekade 80-an gejala ini mendapat sebutan islamisasi birokrasi yang berakibat pada mencairnya dikotomi santri-priyayi. Kalangan kelompok Islam di luar birokrasi, khususnya aktivis lembaga swadaya masyarakat turut aktif memperkuat rakyat melalui praktis sosial politik dan tawar menawar dengan

²¹⁶ Adam Schwartz, *A Nation in Waiting*, (Newyork: Westview Press, 2000), 179

²¹⁷ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*,111.

²¹⁸ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*,113.

negara dan mereka mengembangkan islam transformatif yang mendorong kesadaran sosial politik dan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik alokatif diartikulasikan dengan mensubstansikan nilai-nilai dan etik keislaman secara inklusif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik.²¹⁹ Dengan demikian, dimensi politik dari islam kultural bersifat penetratif dan inklusif, tidak terbatas semata-mata dalam pergumulan politik maupun kekuasaan melainkan memberikan makna Islami kepada medan budaya dalam arti luas.

Menurut Bahtiar Effendi (1998) setidaknya ada empat jenis akomodasi yang ditempuh Orde Baru pada tahun 80-an tersebut: pertama, “akomodasi struktural” berupa terekrutnya orang-orang yang dianggap wakil atau tokoh Islam dalam jajaran kabinet maupun anggota DPR/MPR (dikenal dengan istilah “ijo royo-royo”). Dalam Kabinet 1993-1998 misalnya jumlah menteri Muslim mencapai 88% yang proporsional dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia. Kedua, “akomodasi legislasi” yang berwujud antara: (1) Disahkannya UU Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989 yang antara lain mengakui secara eksplisit pelajaran agama pada segala tingkatan (UU sebelumnya tidak mewajibkan). Juga ditekankan agama yang diajarkan harus sesuai dengan agama siswa yang bersangkutan. (2) Diberlakukannya UU Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. (3) Dicabutnya pelarnagan memaki jilbab tahun 1991. (4) Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri sehubungan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS). Ketiga, “akomodasi infrastrukural”, berupa pemberian izin pendirian bahkan dukungan terhadap pendirian berbagai institusi seperti Perbankan Islam (Bank Mu’amalat Indonesia), pendirian masjid-masjid oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila . Keempat, “akomodasi kultural” seperti penyelenggaraan Festival Istiqlal tahun 1991, dan yang dianggap paling fenomenal adalah keberangkatan Soeharto sekeluarga ke tanah Suci Mekkah untuk berhaji.²²⁰

Pergeseran sikap Soeharto ini disikapi umat Islam Indonesia dengan senang hati dan penuh harapan. “Bulan madu” antara umat Islam dan Orde Baru adalah membangun suatu hubungan yang saling pengertian (mutual understanding) yaitu perubahan saling kesediaan memberi dan menerima, yang menurut Moerdiono tidak hanya memberikan sumbangan konseptual saja, melainkan juga memberikan bantuan yang

²¹⁹ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*,114.

²²⁰ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*,115.

nyata dalam rangka memenuhi aspirasi dan kepentingan dari kalangan Islam. Hal ini merupakan menurut Robert W. Hefner sebagai hasil dari pembaharuan dari pemikiran keislaman yang sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 70-an oleh beberapa intelektual Islam seperti Nurcholish Madjid dan beberapa cendekiawan Islam lainnya²²¹, mereka memajukan pemikiran bahwa dalam Islam yang terpenting dalam penyaluran aspirasi umat Islam bukanlah dengan membentuk satu partai politik sehingga memunculkan adagium yang begitu terkenal "Islam 'Yes', Partai Islam 'No". Tentu saja ini menimbulkan pertentangan bagi kalangan Islam yang waktu itu melihat masih perlunya penyaluran aspirasi politik umat Islam kepada partai Islam.

Dengan adagium ini, kalangan cendekiawan Islam kemudian mendapatkan tempat di mata rezim Orde Baru pada waktu itu. apalagi kemudian muncul pula ide sekularisasi yang dimunculkan oleh Munawir Sadzali sebagai Menteri Agama yang menambah resah kalangan Islam politik yang melihat bahwa ide Islam mulai terkebiri. Pendapat-pendapat seperti ini menyebabkan lega dan hilang was-was dari pemerintah Orde Baru yang sempat menjadi trauma oleh adanya kalangan Islam politik yang masih berkeinginan Islam diterapkan di Indonesia dengan diterapkan pula syariat Islam. Apa yang diusung oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya dilihat sebagai penerapan Islam substansial bukannya Islam yang diterapkan secara tekstual.²²² Dengan penerapan seperti itu menjadi hangatlah hubungan antara Islam dan pemerintah sehingga di kemudian hari sebuah organisasi kecendekiawanan muslim dibentuk dengan langsung dipimpin oleh BJ Habibie.

ICMI dilahirkan pada Desember 1990, ketika terjadinya perhelatan akbar "Simposium Nasional Cendekiawan Muslim: Membangun Masyarakat Abad XXI" pada 6 – 8 Desember di Student Center Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur yang pembukaannya dihadiri Presiden Soeharto bersama Wakil Presiden Try Sutrisno beserta para menteri.

B.J. Habibie, terpilih sebagai ketua umum saat itu ia di dalam pemerintahan Soeharto menduduki kursi Menteri Riset

²²¹ Robert W. Hefner, *Islam, State, and Civil Society*, dalam *Indonesia* no. 56 tahun 1993. 5.

²²² Dalam perkembangan pemikiran islam, pemikiran Cak Nur dikategorikan sebagai pemikiran islam neo-modernis yang dipengaruhi Fazlur Rahman, seorang pemikir dari Pakistan yang mengembangkan pemikirannya ketika di Amerika Serikat. Lihat *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*.

dan Teknologi, Ketua BPPT, Ketua BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis), Direktur IPTN, Direktur PAL dan Ketua Proyek Otorita Batam serta sejumlah jabatan penting lainnya.²²³

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Makrum Kholil di mana bahwa kebijakan Golkar bersama pemerintah Orde Baru khususnya menyangkut umat Islam dapat dibedakan ke dalam tiga kategori: (1) Kebijakan yang memarjinalkan; (2) Kebijakan yang memahami, dan (3) Kebijakan yang mengakomodasi.²²⁴ Kebijakan pemerintah yang memarjinalkan umat Islam diantaranya Penolakan pemerintah terhadap berdirinya Partai Demokrat Islam Indonesia (yang diwakili oleh Muh. Hatta), Penolakan pemerintah terhadap rehabilitasi partai Masyumi, dengan mengarahkannya ke partai Parmusi yang lebih bisa mewakili aspirasi kaum muslim modernis, yang sudah mendapatkan restu dari pemerintah, namun dengan syarat orang-orang yang bekas Masyumi tidak diperkenankan duduk dalam kepemimpinan Parmusi, seperti Moh. Natsir dan Moh Roem misalnya dan setelah pemerintah sukses memecah belas (mengadu domba) internal Parmusi, pemerintah mengajukan M.S. Mintaredja yang sudah dikarbit oleh pemerintah, penyusunan draft GBHN yang mendiskreditkan atau merugikan bagi islam, di antaranya adalah menempatkan pelajaran agama dalam sistem pendidikan nasional, di mana pelajaran agama diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila di semua tingkat sekolah umum dan penurunan anggaran belanja negara untuk urusan-urusan agama, serta masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari “agama resmi” yang kedudukannya setara dengan agama lain yang sudah diakui negara. Dan yang tidak kalah pahitnya ketika pemerintah mengusulkan RUU Perkawinan dalam draft GBHN tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam terutama dalam hal aqidah Islam. Meskipun pemerintah mulai menurunkan tempo “pemaksaannya” setelah melihat reaksi keras dari umat Islam dan bersedia melakukan kompromi dengan membuang pasal-pasal yang sekiranya bertentangan dengan aqidah Islam. Dan masalah perjudian. Dengan dilegalkannya melalui beberapa gubernur berupa pembukaan kasino, steam bath, night club, dan sarana hiburan lainnya, meskipun akhirnya setelah mendapatkan reaksi keras, pemerintah melalui Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional menyatakan tidak akan mengizinkan lagi pendirian sarana-sarana perjudian dan semacamnya dan akan

²²³ Yusufpati, MiftaH., HM Soeharto; Membangun Citra Islam, Aisamark: Jakarta, 2007, 99-103.

²²⁴ Kholil, Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru, 205.

menertibkan yang sudah berdiri.²²⁵

Sementara Kebijakan pemerintah yang antagonistik terhadap Islam sebagaimana tersebut di atas, memuncak pada penerapan asas tunggal, yakni Pancasila, persisnya ketika Presiden Soeharto berpidato di depan Sidang DPR tanggal 18 Agustus 1982. “Ketengan Konseptual” yang tercipta menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak untuk saling memahami posisi masing-masing. Karena itulah, masa ini disebut masa resiprokal. Pada periode ini, hubungan antara Islam dan negara ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh political test yang dilakukan pemerintah dengan menyodorkan konsep azas tunggal bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia.²²⁶

Pemberlakuan azas tunggal tersebut direspon beragam oleh kalangan Islam sendiri, setidaknya ada tiga respon: (1) Menerima tanpa reserve, (2) Menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya Keormasan, dan (3) Menolak sama sekali. Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti, dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil, seperti Dewan Masjid Indonesia. Golongan yang kedua antara lain Muhammadiyah dan HMI. Sedangkan yang ketiga adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh-tokoh Islam, antara lain Deliar Noer, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, serta para mubalig yang secara terbuka melalui acara pengajian menyatakan ketidaksetujuannya terhadap azas tunggal, yang klimaksnya adalah meletusnya Peristiwa Tanjung Priok.²²⁷

Setelah sekian lama umat Islam diterpa berbagai ujian yang tidak mengenakkan oleh pemerintah, tak lama kemudian pemerintah memberikan angin segar berupa kebijakan-kebijakan yang lebih akomodatif. Kebijakan akomodatif pemerintah mulai terasa ketika menghapus peraturan larangan berbusana muslimah (berjilbab) di sekolah-sekolah, yang secara resmi diberlakukan tanggal 17 Maret, 1982. Perkembangan positif ini terus berlanjut, dengan pengesahan RUU Pendidikan Nasional; penyelesaian kasus Monitor; pengesahan RUU Peradilan Agama; pengiriman da’i ke daerah-daerah transmigran; pembentukan ICMI; peningkatan kiprah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila; pendirian Bank Muamalat; “penghijauan” di DPR/MPR Kabinet Pembangunan VI

²²⁵ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 209- 235.

²²⁶ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 235.

²²⁷ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 240.

dan pengurus DPP Golkar 1993/1998.²²⁸

Daripada menekan kegiatan politik umat Islam dan mensekularisasi politik (seperti yang dianjurkan sejumlah kaum elite), pemerintah lebih memilih langkah politik yang sifatnya menggabungkan antara kontrol yang keras terhadap Islam politik dan dukungan penuh terhadap Islam spiritual. Para perancang strategi rezim itu berupaya membentuk agama sebagai landasan moralitas publik, sebagai tameng untuk menghadapi liberalisme Barat dan juga sebagai penangkal terhadap komunisme.²²⁹

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, korban yang paling utama dari politik kekuasaan semacam ini adalah kelompok-kelompok Islam yang terorganisir, terutama orang-orang yang punya kaitan dengan partai-partai Islam yang pernah ada pada masa- Soekarno. Pembatasan dan penistaan yang dialami kelompok-kelompok ini membuat kalangan pengamat Barat berkeyakinan bahwa Soeharto dan para pembantunya merupakan penganut setia kejawaan yang memusuhi Islam. Akan tetapi, ketika pada akhir 1980-an, perimbangan kekuasaan mengharuskan kebijakan, rezim Soeharto segera bating setir, merangkul kalangan Muslim Konservatif dan meninggalkan teman-temannya yang berasal dari kalangan non-Muslim dan penganut kejawaan sendirian. Kebijakan keagamaan Soeharto tidak konsisten, karena kebijakan-kebijakan tersebut lahir bukanlah dari logika kultural budaya Jawa, tapi dari desakan-desakan kuat kekuasaan yang tidak terimbangi.²³⁰

Periode 1973 sampai 1985 merupakan periode yang menandai titik rendah hubungan umat Islam dan pemerintah. Namun demikian reaksi pemerintah terhadap protes umat Islam akibat RUU Perkawinan memberikan pandangan bagaimana elite Orde Baru menetapkan prioritas kebijakan-kebijakan mereka, dan memperlihatkan betapa tindakan-tindakannya tersebut untuk jangka panjang tidaklah menguntungkan baik kalangan penganut kejawaan maupun kalangan sekuler. Meski beberapa pejabat dalam pemerintahan menunjukkan sikap yang kurang bersahabat, dan melancarkan serangan tajam terhadap organisasi-organisasi Islam tertentu, namun pemerintah bagaimanapun tidak pernah memberikan prioritas

²²⁸ Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 257.

²²⁹ Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2000. 114.

²³⁰ Robert. W. Hefner, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, 135.

yang lebih tinggi pada nilai-nilai kejawan dan sekuler.²³¹ Ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah terhadap Islam sarat dipengaruhi oleh beragam kepentingan dalam praktik kekuasaan Orde Baru dan di situ Golkar memainkan peranannya.²³²

Tabel 3.1. Golkar dalam Pemilu Orde Baru

Periode pemilu	Perolehan suara (%)	
1971	39.750.096 (62,80)	-
1977	39.750.096 (62,11)	-0,69
1982	48.334.724 (64,34)	+ 2,23
1987	62.783.680 (73,16)	+ 8,89
1992	66.599.331 (68,10)	- 5,06
1997	84.187.907 (74,51)	+ 6,41

B. Konteks Reformasi

Reformasi merupakan satu kata yang menjadi judul sebuah era dalam perjalanan sejarah politik Indonesia.²³³ Reformasi ditengarai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI untuk kemudian digantikan oleh wakilnya BJ Habibie. Lengsernya Soeharto sebagai presiden tidak lepas dari akibat dari akumulasi dari strategi komunikasi politiknya yang dilakukan olehnya. Seperti mengintervensi pelbagai organisasi mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan hingga partai politik. Partai politik yang diintervensi oleh Soeharto pada waktu itu adalah PDI sehingga tampak sebagai partai yang teraniaya oleh kekuasaan dengan dibatalkannya hasil keputusan Kongres Surabaya yang memilih megawati soekarnoputri sebagai ketua umum PDI. Tetapi kemudian hasil kongres ini tidak "direstui" oleh Presiden Soeharto sehingga hasil kongres itupun dianulir. Intervensi yang dilakukan oleh Soeharto menjadikan partai itu pun terpecah menjadi PDI Suryadi dan PDI-Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. PDI-Perjuangan pada waktu itu kontan menjadi partai yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan, dalam hal ini adalah Soeharto.²³⁴ Kekesalan terhadap intervensi ini sesungguhnya

²³¹ Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, h.151.

²³² Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru*, 153. Rizal Mallarangeng melihat kedekatan Golkar Orde Baru dengan islam merupakan strategi Soeharto sebagai komunikator utama dalam komunikasi politik Indonesia Orde Baru dalam menghadapi menguatkan kelompok yang mengusung ekonomi pasar demi menjaga kepentingan bisnis dari anak- anaknya. Lihat Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, 207-233.

²³³ Kevin O' Rourke, *Reformasi: The Struggle for Soeharto in Post Soeharto Indonesia* (NewSouthWales: Allen and Unwin, 2002), 23.

²³⁴ Edward Aspinall, *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, (California: Stanford University Press, 2005).

puncak dari akumulasi pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter.

Ketika Indonesia diterpa oleh badai krisis moneter yang melanda beberapa negara di dunia. Maka, keadaan itu seperti momentum bagi gerakan oposisi yang selama ini hanya melakukan perlawanan di bawah tanah untuk muncul ke permukaan. Di sisi lain, gerakan mahasiswa yang menentang agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya untuk ketujuh kalinya, mulai memuncak, apalagi dengan tertembaknya dua orang mahasiswa Trisakti pada bulan Mei 1998 yang juga menimbulkan Revolusi Mei 1998. Sementara Presiden Soeharto sendiri menghadapi 14 menteri yang mengundurkan diri untuk tidak lagi terlibat dalam Kabinet Pembangunan Tujuh di antara keempat belas menteri yang mengundurkan diri tersebut terdapat tokoh-tokoh Golkar.²³⁵ Alasan tokoh Golkar yang mengundurkan diri tersebut melihat kondisi politik nasional yang sudah lagi tidak mengharap Soeharto sebagai presiden lagi sehingga para menteri ini terpaksa kemudian mengundurkan diri dengan diikuti kemunduran Soeharto sebagai presiden.

Dengan mundurnya Soeharto, maka berubahlah kondisi komunikasi politik Indonesia dari iklim yang terkekang kepada iklim yang terbuka. Pada waktu seluruh masyarakat dengan bebas mengekspresikan setiap aspirasinya sehingga terjadilah euforia reformasi. Euforia ini terjadi pada beberapa hal pertama pada dukungan politik kepada megawati sebagai simbol perlawanan terhadap Soeharto, kedua euforia pada pendapat sehingga pelbagai jenis perserikatan terbentuk termasuk terbentuknya pelbagai partai politik.²³⁶

Sebagai akibat dari euforia tersebut, Golkar terkena dampak negatifnya yakni Golkar mengalami kekerasan dan tekanan secara fisik, mental dan politik. sebagai sebuah partai yang dianggap bertanggung jawab atas krisis moneter yang terjadi.²³⁷ Golkar sendiri kemudian pada masa reformasi itu kemudian segera tanggap terhadap situasi yang dihadapinya. Pada waktu itu Golkar

²³⁵ Gerakan perlawanan mahasiswa sudah dimulai sejak masa pertengahan Orde Baru di beberapa perguruan tinggi di beberapa kota seperti UGM di Yogyakarta, ITB di Bandung dan UI di Jakarta, lihat Edward Aspinall, 2005, 116-144. Di antara empat belas menteri tersebut terdapat beberapa tokoh Golkar antara lain Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Subianto Tjarkawardaya, Haryanto Dhanutirto lihat Kevin O'Rourke, Reformasi: The Struggle for Soeharto in Post Soeharto Indonesia, 141.

²³⁶ Kevin O'Rourke, Reformasi: The Struggle for Soeharto in Post Soeharto Indonesia, 239.

²³⁷ Wawancara dengan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 1998-2004, Akbar Tandjung, 16 Juli 2010, pukul. 10-11.30.

pun menjadi partai politik sebagai sebuah jawaban terhadap tuntutan dari UU Politik yang dirumuskan pada tahun 1999 agar seluruh peserta pemilu diikuti oleh partai politik bukannya organisasi partai politik semu. Perubahan lainnya adalah tuntutan netralitas dari ABRI, yang kemudian menjadi TNI, agar kembali menjadi profesional tentara sebagai benteng pertahanan negara. Artinya dwifungsi ABRI yang sebelumnya dipraktikkan pada masa Orde Baru hilang sama sekali. Ditambah tuntutan netralitas dari pegawai negeri sipil yang sebelumnya merupakan kaki ketiga dari Golkar, pun menjadi netral.

Meskipun demikian ada hal yang patut disukuri pada tahun 1997-1998 adalah pola perubahan politik yang dipicu oleh gerakan reformasi berlangsung secara gradual, yaitu pola transplacement. Karena dengan pola yang tidak revolusioner ini sangat menguntungkan bagi Partai Golkar dalam mempertahankan hidupnya. Inilah fondasi utama yang memberi peluang bagi Golkar untuk tetap survive dan akhirnya mampu mendayagunakan kelembagaan yang sudah mengakar kuat dalam diri Golkar serta mampu melakukan berbagai kebijakan pembaruan yang disesuaikan dengan lingkungan sistem politik baru yang demokratis.²³⁸

Naiknya B.J. Habibie menggantikan pendahulunya sebagai presiden, menunjukkan masih kuatnya Golkar dalam lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif dan bahkan Golkar masih tetapi mendominasi posisi kunci baik di legislatif maupun pemerintahan membuktikan bahwa bagaimana perubahan yang dilakukan di era reformasi adalah secara gradual. Di situ Golkar diuntungkan karena masih diperkenankan untuk berkiperah dalam kancah perpolitikan nasional ke depan yang lebih demokratis dan mandiri. Golkar dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang akan diwarnai dengan kompetisi antarpolitical secara seimbang dan demokratis.²³⁹

Pencabutan Paket undang-undang politik dan mengagendakan percepatan pemilu yang dilakukan Presiden Habibie, merupakan suatu bentuk dari penyesuaian diri Golkar terhadap tuntutan dan keinginan masyarakat yang memang menghendaki dipercepatnya suatu perubahan yang lebih pasti. Kemudian Habibie menyerahkan

²³⁸ Tanjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 47.

²³⁹ Habibie sendiri dalam catatan hariannya menuliskan bahwa dia menjadi presiden pada masa transisi itu hanya sekedar mempertahankan NKRI agar tidak terjadi balkanisasi, Lihat B.J. Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan*, (Jakarta, The Habibie Centre, 2006).

penyusunan konsep RUU Politik pemerintah kepada beberapa intelektual yang dikenal sebagai “tim tujuh” yang dipimpin oleh Ryaas Rasyid. Tugasnya tim ini adalah menyusun separangkat rancangan undang-undang untuk dibahas di DPR. Paling tidak ada tiga isu yang diangkat dalam rancangan undang-undang tersebut di antaranya, jumlah perwakilan militer di parlemen, sistem pemilihan umum politik, pemilu serta susunan dan kedudukan DPR/MPR.²⁴⁰ Golkar yang pada masa Orde Baru diuntungkan dengan dukungan dari militer dan PNS dengan monoloyalitasnya, dituntut untuk membuat rancangan undang-undang baru yang lebih netral. Pemerintah juga membuat penentuan sistem pemilihan umum dan daerah pemilihan. Pemerintah mengusulkan RUU tentang Pemilu Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat dengan menggunakan sistem distrik yang dikombinasikan dengan sistem proporsional. Pemerintah juga mengeluarkan sistem multi-partai yang sejak era Orde Baru dibatasi keberadaannya, terutama sejak dimunculkannya undang-undang penggabungan dari 9 partai menjadi 2 partai dan Golongan Karya (Golkar).

Jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan di masa reformasi 1998 yang notabene sebagai patron Golkar semasa Orde Baru, menjadi ujian dan tantangan tersendiri bagi Golkar dalam mengubah paradigma yang baru sesuai tuntutan era reformasi atau sistem politik yang lebih demokratis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai atau kultur kepartaian yang masih layak untuk dipertahankan. Ujian dan tantangan tersebut tidak hanya datang dari eksternal partai tetapi juga di internal tubuh Golkar. Pernyataan Harmoko sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Golkar pada waktu dia mengatakan agar Presiden Soeharto mundur dari kekuasaannya memicu konflik internal Golkar, karena pernyataannya tersebut atas inisiatifnya sendiri dengan alasan tuntutan masyarakat yang menghendaki demikian, dan bukan mewakili internal Golkar karena tidak pernah dibicarakan sebelumnya di internal Golkar, meskipun pada akhirnya pernyataan tersebut akhirnya disetujui dalam rapat pertemuan Pleno DPP dan memberi bekal pada Fraksi Karya Pembangunan di DPR untuk rapat tanggal 19 Mei 1998 guna mendukung pernyataan Harmoko sebagai Ketua MPR/DPR dan juga Ketua Umum DPP Golkar tentang reformasi total.

Pernyataan Harmoko tersebut akhirnya menjadi pemicu terjadinya keretakan internal Golkar – kalau tidak mau disebut konflik. pertentangan-pertentangan tersebut muncul dari para pimpinan DPP Golkar sendiri yang masing-masing memiliki suara-suara yang beragam. Satu sisi menghendaki diadakannya Munas,

²⁴⁰ Tandjung , *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 74.

sisi yang lain menghendaki diadakannya Munaslub, dan yang tidak kalah panas dan provokatifnya adalah ketika beberapa pengurus DPP yang meminta Harmoko dan Abdul Gafur mundur dari jabatannya. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Rachmat Witoelar, mantan Sekjen Golkar, yang pada saat itu menduduki pos sebagai Duta Besar di Rusia.²⁴¹

Sementara itu, guna merespons perkembangan politik yang terjadi, pada 3 Juni 1998, Golkar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang kemudian menjadi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh pengurus DPP dan DPD I Golkar seluruh Indonesia di Jakarta. Agenda Rapimnas tersebut adalah mendengar pendapat dan saran-saran dari daerah guna merespons perkembangan politik, serta rencana percepatan penyelenggaraan Munas. Dalam Rapimnas terdapat polarisasi internal Golkar, antara kubu yang menghendaki Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan kubu yang menentangnya. Menurut Indra Bambang Utoyo, fungsionaris DPP Golkar, terdapat dua kelompok besar saat itu, yakni kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung Harmoko.²⁴²

Suasana Rapimnas tersebut dipenuhi perdebatan antara pimpinan dan peserta rapat, terutama dalam menyikapi kebijakan Harmoko, dan bagaimana memosisikan Golkar di tengah perubahan politik yang terjadi. Dinamika politik di internal Golkar menyusul pernyataan Harmoko agar Presiden Soeharto mundur tersebut memang kemudian berujung pada penyelenggaraan Munaslub Golkar.²⁴³

Tantangan lain yang tidak kalah kerasnya adalah datang dari eksternal yang menghendaki agar Golkar dibubarkan dari kancah perpolitikan nasional. Dalam sebuah acara, talk show bertema Membangun Kultur Bangsa Pasca-Orde Baru yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni-UI) di Balairung Kampus UI di Depok, tujuh fungsionaris dari parpol berbeda berkumpul untuk "menghakimi Golkar". Mereka sepakat usulan agar Golkar, karena kesalahan-kesalahan masa lalunya, tidak diperkenankan mengikuti pemilihan umum. tuntutan serupa datang dari elemen gerakan mahasiswa garis keras di Jakarta, antara lain dimotori oleh: Forum Kota (Forkot), PRD, dan Forum Komunikasi

²⁴¹ Akbar Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 80.

²⁴² Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 94.

²⁴³ Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 8

Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ).²⁴⁴

Tantangan eksternal ini tidak lepas dari perubahan komunikasi politik masa Habibie. Beberapa perubahan dilakukan Habibie seperti memudahkan penerbitan SIUP untuk media massa. Pada masa itu juga, masyarakat mengalami euforia komunikasi politik, dimana setiap orang merasa berhak mengatakan apapun juga. Hal inilah yang kemudian memunculkan pelbagai kelompok ideologi yang dulu sempat terbungkam pada masa Soeharto bermunculan seperti ideologi Islam yang ingin menerapkan kembali Piagam Jakarta hingga ideologi kiri radikal, meskipun tidak menggunakan nama komunisme. Partai Golkar yang berada dalam situasi tersebut harus menghadapi amarah masyarakat yang menstigma Partai Golkar sebagai partai yang bertanggung atas krisis moneter yang terjadi. Di sisi lain, Habibie sebagai Ketua Pelaksana Dewan Pembina Golkar pada waktu harus pula menghadapi satu realitas adanya ancaman dari kemungkinan perpecahan NKRI. Sehingga langkah yang dilakukan Habibie pada waktu itu antara melakukan percepatan Pemilu dengan menggunakan UU Politik yang baru. Golkar dalam menanggapi kondisi ini, melakukan komunikasi politik dengan melakukan pelbagai perubahan yang mendasar.

C. Golkar menjadi Partai

Sebagai tuntutan dari reformasi itulah kemudian Golkar mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Munaslub Golkar yang diselenggarakan pada 9-11 Juli 1998 merupakan momentum strategis dalam konteks penataan kesisteman organisasi Golkar. Munaslub tersebut selain merumuskan strategi baru dalam menghadapi perkembangan politik, juga mengagendakan pemilihan ketua umum secara demokratis. Berdasarkan hasil-hasil keputusan Munaslub, Golkar berubah menjadi partai Golkar dengan Paradigma Baru; merombak struktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan; memutus jalur-jalur politik yang menopangnya (Jalur A dan B); serta mengondisikan pelaksanaan musda-musda DPD Golkar di seluruh Indonesia.

Pada bulan Juli, ketika kongres nasional Golkar diselenggarakan, terjadi pertarungan sengit antara dua kubu. Kubu Habibie akhirnya menang dan calon mereka, Akbar Tanjung, menjadi Ketua partai. Akbar merupakan politikus ulung dan mempunyai reputasi sebagai reformis bahkan pada masa Soeharto. Bagaimanapun, naiknya Akbar mempertegas pendapat bahwa

²⁴⁴ Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 86-67.

Golkar baru, yang menyebut dirinya sebagai partai reformis, tidak akan dapat dengan mudah dikalahkan, walaupun 'sahamnya' dalam negara Indonesia pada pasca-Soeharto rendah sekali.²⁴⁵

Konsep Paradigma Baru pertama kali disampaikan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visi-misinya sebagai kandidat ketua umum DPP Partai Golkar dalam munaslub tersebut. Paradigma Baru tersebut adalah Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru yang selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.²⁴⁶

Selain mengubah paradigma baru, partai Golkar juga merombak Struktur Organisasi. Perombakan struktur organisasi diawali dengan penghapusan Dewan Pembina karena sejak Munas Golkar 1978 telah menjadi institusi internal yang "sangat berkuasa". Penghapusan Dewan Pembina tersebut tidak memperoleh hambatan yang berarti dalam Munaslub Golkar 1998. Karena kuatnya desakan pembaruan internal. Dalam persidangan Komisi A Munaslub Golkar 1998 yang membahas masalah AD/ART organisasi, secara aklamasi peserta menyepakati penghilangan struktur Dewan Pembina di tingkat DPP. Dewan Pertimbangan di tingkat DPD I dan Dewan Penasehat Golkar di tingkat DPD II

Begitu perombakan struktur selesai, partai Golkar melakukan berbagai upaya konsolidasi untuk memperkuat dan mempererat kembali jalinan yang retak akibat terpaan reformasi yang begitu dahsyat. Konsolidasi tersebut di antaranya dengan melakukan; Pertama; diadakannya Musda (Musyawarah Daerah) pasca-Munaslub 1998 di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasari atas pertimbangan antara lain untuk memperkuat jaringan organisasi yang sudah ada guna mempersiapkan pemilu 1999. Percepatan pelaksanaan musda- musda tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan (konsolidasi kelembagaan vertical) Partai Golkar di era transisi. Kedua; Tidak hanya kelembagaan secara vertical tetapi juga secara tidak langsung bisa dikonversi sebagai bagian penting dari konsolidasi politik Partai Golkar, yakni dengan melakukan berbagai interaksi dengan lapisan akar rumput, misalnya Ketua Umum Partai Golkar melakukan kunjungan ke berbagai

²⁴⁵ Greg Barton, Biografi Gusdur: The Authorized Biogaphy of Abdurrahman Wahid, LKiS: Yogyakarta, 311.

²⁴⁶ Tandjung , The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, 98.

daerah guna melakukan pertemuan-pertemuan dengan kader-kader Partai Golkar yang ada di daerah/kota. Ketiga; Melakukan Konsolidasi Organisasi melalui tertib organisasi dengan melakukan pendataan ulang keanggotaan partai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor: PO- 01/DPP/GOLKAR/III/1999 tentang Keanggotaan Partai Golkar. Kebijakan tersebut dilakukan guna mengetahui dan memastikan sejauh mana aktivitas pengurus dan seberapa besar kekuatan kader partai yang ada. Keempat; Konsolidasi Organisasi melalui pembentukan organisasi-organisasi sayap, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa. Selain AMPG dan KPPG, dikembangkan pula badan-badan dan lembaga-lembaga fungsional, seperti Lembaga Pendidikan Kader (LPK), Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), Badan Informasi dan Komunikasi (BIK), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar (KIMPG), serta Forum Komunikasi Tani Nelayan Karya Bangsa (FKTNKB).

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan langkah Partai Golkar di kancah perpolitikan nasional adalah dengan melakukan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan lingkungan system politik baru yang demokratis.

Pertama adalah dengan membangun paradigma baru bagi Partai Golkar guna menyesuaikan diri dengan lingkungan system politik yang ada. Wacana paradigma baru berkembang pada saat pelaksanaan Munaslub Golkar 1998. Konsep paradigm baru tersebut pertama kali dilontarkan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visi-misinya sebagai kandidat Ketua Umum DPP Golkar dalam munaslub tersebut. Intinya adalah mengharapkan Partai Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru yang selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang lebih terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsive terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat bangsa, dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten. Untuk membangun kultur dan jati diri baru, maka kepemimpinan Partai Golkar tanpa ragu-ragu menetapkan berbagai kebijakan yang progresif dan reformis, sebagaimana dirumuskan dalam konsep paradigma baru.

Meskipun paradigma baru sudah dicanangkan, sebagai respon atas perubahan system politik pada masa transisi, namun nilai-nilai lama yang dianggap masih tetap relevan akan tetap dipertahankan.

Partai Golkar perlu membangun jati dirinya yang baru dalam merespons berbagai perubahan masa transisi demokrasi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang dinilai masih tetap relevan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut diantaranya; Menjaga wawasan kebangsaan, menjaga pluralisme (Nonsektarian), Antikomunisme, Bersikap Moderat, dan Pembangunanisme.

Kedua; Perombakan struktur organisasi Partai Golkar yang diawali dengan penghapusan Dewan Pembina yang sejak Munas Golkar 1978 telah menjadi institusi internal yang "sangat berkuasa". Penghapusan Dewan Pembina merupakan bagian penting dalam proses reformasi internal Golkar. Golkar telah menghapus institusi yang mengakibatkan ketidakmandirian organisasi, yakni menghapus lembaga Dewan Pembina yang terlalu dominan dan sangat eksklusif.

Dengan dihapuskannya Dewan Pembina, maka secara otomatis akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis, di mana Musyawarah Nasional (Munas) merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

Perubahan struktur kepengurusan pasca-Munaslub 1998 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan yakni bersifat lebih demokratis, di mana Musyawarah Nasional (Munas) merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Pola ini dilakukan melalui forum-forum pengambilan keputusan yang partisipatif, dengan mengakomodasi berbagai masukan dari pengurus partai.

Ketiga; Langkah politik selanjutnya adalah pemutusan jalur-jalur pendukung Golkar. Pada Orde Baru Golkar didukung oleh tiga jalur politik, masing-masing jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi), dan Jalur G (Golkar) atau yang dikenal dengan jalur ABG. Jalur A terkait dengan keterlibatan kalangan militer (ABRI, khususnya AD) dalam sejarah kelahiran dan pertumbuhan Golkar di era Orde Baru. Sebagai inisiator kelahiran Golkar, posisi militer (ABRI) di tubuh organisasi Golkar amat istimewa.²⁴⁷

Sementara itu jalur birokrasi (Jalur B) hadir dan menguat ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 1969 (PERMEN 12) tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut aktif dalam partai politik. Peraturan tersebut mendasari kebijakan "monoloyalitas", di mana

²⁴⁷ Akbar Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 102.

aspirasi politik PNS harus disalurkan kepada Golkar. Dengan asas monoloyalitas tersebut, birokrasi telah menjadi instrument politik Orde Baru.²⁴⁸

Dengan putusnya hubungan dengan Jalur A dan Jalur B tersebut, Partai Golkar dituntut untuk menjadi partai politik yang mandiri dan inklusif. Partai Golkar harus berjuang untuk menyusun kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah dalam struktur kepengurusan partainya, tanpa melibatkan PNS dan anggota TNI/Polri yang masih aktif. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi partai Golkar, mengingat sebagian besar pengurusnya berasal dari unsure PNS yang masih katif, khususnya di daerah-daerah. Namun karena telah menjadi keputusan politik yang tidak dapat ditolak lagi, Partai Golkar harus menerima kenyataan tersebut.²⁴⁹

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan citra atau image. Pembentukan citra yang baik adalah hal fundamental yang harus dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Oleh karenanya, bagaimana partai Golkar mampu mengurangi pencitraan yang negatif dan membangun citra yang baik sangat menentukan dalam upayanya mempertahankan dukungan masyarakat di masa transisi demokrasi. Tekanan politik tersebut akan terus berlangsung apabila Golkar tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Golkar menikmati sebagai partai politik yang sudah mengakar lama di masyarakat. sebagaimana partai yang telah lama berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Sementara citra negatif khalayak terhadap Partai Golkar disebabkan adanya stigma negatif terhadap partai ini yang dikaitkan dengan Orde Baru.²⁵⁰

Atas sebab itulah kemudian Partai Golkar melakukan pelbagai langkah politik yang bisa mengangkat citra positif partai ini. Diantaranya adalah dengan selalu melakukan berbagai kebijakan khususnya internal organisasi senantiasa melalui proses yang lebih demokratis. Penyelenggaraan Munaslub Golkar pada 1998 telah mengubah tradisi Golkar dalam memilih dan menetapkan ketua umumnya. Munaslub 1998 menyelenggarakan proses pemilihan ketua umum secara demokratis, melalui mekanisme pemungutan suara.

²⁴⁸ Akbar Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 103.

²⁴⁹ Akbar Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 103.

²⁵⁰ Aulia Aman Rahman, *Citra Khalayak Partai Golkar: Peta permasalahan menjelang kemenangan Pemilu 2004*. (Jakarta: PSAP, 2006). 152-158.

Dalam Munaslub 1998 aspirasi arus bawah (DPD I) menjadi factor penentu dalam pemilihan. Dengan demikian, demokratisasi Partai Golkar telah mulai berjalan seiring dengan berlangsungnya reformasi politik di tingkat nasional. Kemanangan Akbar Tandjung membuka sejarah baru bagi Golkar di era politik yang telah berubah. Akbar Tandjung menyusun struktur kepengurusan Golkar dengan melibatkan sejumlah politikus sipil. Adapun dari kalangan militer (purnawirawan) hanya dua orang yang duduk dalam struktur pengurus harian. Pengangkatan aspirasi bawah inilah yang memungkinkan Partai Golkar kemudian dapat mempertahankan dukungan dari masyarakat bawah melalui strategi komunikasi politik yang berporos pada masyarakat dengan menggunakan market oriented program.²⁵¹

Kebijakan lain yang menyangkut peningkatan citra organisasi adalah penyelenggaraan Konvensi Nasional Penjaringan Calon Presiden dan wakil Presiden Partai Golkar, yang kemudian disebut Konvensi Nasional Partai Golkar. Konvensi tersebut merupakan gagasan politik yang inovatif dan menghasilkan peristiwa politik yang memperoleh liputan luas, yang menempatkan kembali Partai Golkar sebagai pusat perhatian. Jika partai-partai lain dapat dipastikan menetapkan ketua umumnya menjadi calon presiden, Partai Golkar justru memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh Golkar dan independen untuk berlaga di arena konvensi, yang kompetitif dan terbuka.

Dengan mengadakan konvensi ini berarti Partai Golkar membuka sebuah lembaran baru dengan menawarkan seleksi calon presiden (capres) secara inklusif. Konvensi Partai Golkar diyakini akan turut mengangkat citra Partai Golkar di mata masyarakat yang pada gilirannya akan memiliki dampak pada pemilihan umum, mengingat konvensi ini merupakan kebijakan yang sangat inovatif dan sejalan dengan cita-cita reformasi terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang terbuka dan demokratis.²⁵²

Golkar telah melakukan langkah-langkah nyata guna pembaruan internal maupun eksternal. Secara internal Partai Golkar dituntut untuk mengkontekstualisasi nilai-nilai dasarnya mendemokratisasi diri dalam struktur kelembagaan dan budaya politik kadernya. Demikian pula secara eksternal Partai Golkar juga

²⁵¹ Ruli Chairul Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar dalam tiga era*, (Jakarta: Grasindo, 2008).

²⁵² Upaya ini dilakukan sebagai cara mengurangi citra buruk Golkar yang ketua umumnya sedang dirundung kasus pidana kasus buloggate II, wawancara dengan Ruly Chairul Azwar, Rabu, 26 Juli 2010.

dituntut untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian diri terhadap aspek-aspek demokratisasi yang tengah berlangsung. Langkah paling realistis yang akhirnya dipilih oleh Golkar adalah mendukung agenda-agenda demokratisasi serta mengaskan komitmennya untuk berkiprah secara aktif dalam menyukkseskan berbagai agenda demokrasi yang sedang berjalan.²⁵³

1. Akbar Tandjung sang Penyelamat Golkar

Bisa dikatakan akbar tandjung merupakan penyelamat dari Partai Golkar, majunya dia sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan langkah tersendiri yang menjadikan Golkar tetap bertahan. Akbar Tandjung harus bersaing dengan edi sudrajat yang kemudian dikalahkannya. Setelah menjadi ketua umum, Akbar Tandjung kemudian mengubah paradigma partai Golkar sehingga partai ini tidak lagi tergantung pada Dewan Pembina, partai ini kemudian menjadi partai yang sama sekali baru, sebagaimana partai lainnya, bahkan kemudian membaaur.

Demi ikut pada pemilu 1999, Akbar Tandjung meyakinkan kepada para tokoh reformasi untuk memberi kesempatan kepada partai Golkar untuk menjadi peserta pemilu. Semula partai ini dianggap oleh aktivis reformasi sebagai partai yang bertanggung jawab terhadap krisis moneter yang sedang menimpa Indonesia.²⁵⁴ Akbar Tandjung membuktikan kepada masyarakatnya bahwa partai Golkar masih layak mengikuti proses politik pada perubahan politik pada masa reformasi. Bahkan Akbar Tandjung memberikan dukungan moril dan politik kepada pengurus-pengurus Partai Golkar yang mengalami tekanan politik. Setelah berhasil mendapatkan dukungan pada pemilu 1999 dengan menduduki posisi kedua, di bawah PDI P, Akbar Tandjung membawa partai Golkar sebagai partai yang ikut berperan dalam reformasi politik yang dilakukan bersama dengan partai-partai lainnya, seperti PAN, PKB, dan PDIP yang dilakukan di parlemen.

2. Kekalahan Beruntun Akbar Tandjung

Jasa Akbar Tandjung dalam menyelamatkan Partai Golkar dalam Munas VII di Bali Desember 2004, nampaknya hanya berkesan beberapa jam saja setelah itu dia harus menerima kekalahan dengan dikalahkan oleh Jusuf Kalla.²⁵⁵ Setelah itu, Akbar Tandjung harus menelan pil pahit kekalahan dalam

²⁵³ Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 133.

²⁵⁴ wawancara Akbar Tandjung, Juli 2010.

²⁵⁵ Dalam laporan pertanggungjawabannya peserta Munas VII melakukan standing ovation tetapi beberapa jam kemudian akbar tandjung dimaki-maki oleh peserta munas, wawancara Akbar Tandjung, 26 juli 2010.

Munas VII di Bali akhir tahun 2004. Akbar Tandjung dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang merupakan wakil presiden yang dicalonkan dari Partai Demokrat. Kekalahan Akbar Tandjung ini merupakan kekalahan ketiga setelah kekalahan pada konvensi presiden, kekalahan Partai Golkar dalam pilpres 2004, dan terakhir kealahannya dalam pencalonan kembali sebagai ketua umum. Kekalahan ini dilacak oleh Dirk Tomsa dalam beberapa faktor penyebab antara lain: adanya faksionalisme, kekalahan dalam pilpres, dan politik uang.

Faksionalisme dalam Partai Golkar muncul melalui satu sebab dari kemampuan akomodasi Partai Golkar di masa lalu (semasa masih Golkar) kepada seluruh komponen bangsa. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa Golkar adalah sekumpulan organisasi kekartisan yang dibentuk sebagai alternatif dari bentuk partai politik pada akhir masa kepresidenan Soekarno. Paska lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, faksionalisme dalam Partai Golkar yang paling keras adalah faksi Akbar Tandjung dengan faksi Iramasuka yang muncul ketika Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Munculnya faksi ini untuk mengusung pencalonan Habibie sebagai presiden RI ketiga, tidak sekedar menggantikan Soeharto.

Terjadinya faksionalisme ini terjadi pada masa akhir kepresidenan Habibie, sebelumnya dalam Partai Golkar tidak terjadi perpecahan tersebut tetapi saat Habibie memberikan laporan pertanggung jawaban dalam masa transisinya tidak didukung oleh beberapa orang dari Fraksi Partai Golkar, dan ditengarai oleh Kaukus Iramasuka adalah orang-orang dari Akbar Tandjung. Ada beberapa alasan mengapa konflik itu terjadi yakni, pertama, faktor ketidaksukaan pribadi Akbar Tandjung pada Marwah Daud Ibrahim. Kedua, faktor berkaitan dengan isu regional dan identitas politik yang terlampau diusung oleh faksi Iramasuka; ketiga kebutuhan akan strategi yang akan membawa Partai Golkar kepada kekuasaan eksekutif setelah dikalahkan oleh PDI-P.²⁵⁶ Pada kenyataannya Partai Golkar memang kemudian masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid bahkan dalam Kabinet Gotong Royong yang digantikan oleh Megawati, Akbar Tandjung lebih menancapkan pengaruhnya. Meskipun demikian Jusuf Kalla sebagai perwakilan faksi Iramasuka ditarik sebagai menteri pada dua kabinet hasil pemilu pertama era

²⁵⁶ Dirk Tomsa, "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", dalam *Indonesia*, No. 81 April 2006.

reformasi yakni pada kabinet KH Abdurrahman Wahid yakni Jusuf Kalla sebagai Menteri BUMN sedangkan pada masa Megawati Soekarnoputri sebagai Menko Kesra.²⁵⁷ Sedangkan dari Partai Golkar, menteri yang dikirimkan adalah Bomer Pasaribu dan Mahadi Sinambela pada masa KH Abdurrahman Wahid dan pada masa Megawati menambahkan beberapa menteri yakni Syamsul Muarif sebagai Meneg Kominfo, Fahmi Idris sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Sri Rezeki sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Masuknya banyak menteri dari Partai Golkar itu justru tidak menghilangkan adanya faksionalisme itu, bahkan itu terus meruncing ada masa-masa selanjutnya.

Sejatinya, munculnya faksi Akbar Tandjung ini bermula dari adanya kekuatiran munculnya politik identitas kedaerahan yang waktu itu diusung oleh Marwah Daud Ibrahim yang begitu vokal menyuarakan isu pembangunan Indonesia timur di parlemen. Di sisi lain, Marwah Daud Ibrahim menganggap Akbar Tandjung mencoba mengembalikan kekuatan Sumatera/Jawa yang dianggap sebagai kekuatan lama dari Partai Golkar, dan Marwah Daud Ibrahim berhasil menggalang kekuatan dari kalangan masyarakat untuk mendukung pembangunan Indonesia timur. Sementara di sisi lain pada masa itu Akbar Tandjung merasa ada kebutuhan untuk menyelamatkan Partai Golkar dari tekanan politik sehingga Akbar Tandjung berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikannya, Golkar pada waktu itu banyak sekali kehilangan suara di dua Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga isu-isu yang diusung oleh faksi Marwah Daud Ibrahim dianggap menjadi kontraproduktif bagi Partai Golkar.²⁵⁸ perpecahan semakin meruncing ketika faksi iramasuka yang menginginkan agar Habibie terpilih kembali sebagai presiden, terhambat hanya karena delapan orang anggota DPR yang dipelopori Akbar Tandjung memilih untuk tidak bersungguh-sungguh²⁵⁹ menerima laporan pertanggung jawaban Habibie. Faktor inilah yang kemudian menjadi akar perpecahan dari Partai Golkar di kemudian hari. Pertimbangan Akbar Tandjung sendiri adalah untuk menghindari perpecahan bangsa, waktu itu terdapat keterbelahan dukungan antara dukungan kepada Megawati,

²⁵⁷ Jusuf Kalla mengaku ditarik dalam kabinet persatuan nasional ataupun kabinet gotong royong bukan sebagai perwakilan dari Partai Golkar, "waktu Gus Dur saya jadi menteri waktu itu bukan dari partai Golkar. Pada waktu presiden megawati juga, Ibu Mega waktu itu langsung menelepon saya", Wawancara dengan Jusuf Kalla 27 Juli 2010.

²⁵⁸ Tomsa, "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", 12.

²⁵⁹ Istilah ini diungkapkan oleh Andi Mattalata dalam wawancara pada 27 Juli 2010

Ketua Umum PDI-P sebagai pemenang pemilu yang didukung oleh masyarakat abangan dan dukungan kepada incumbent, Presiden BJ Habibie yang didukung oleh kalangan Islam. Solusi yang diberikan oleh Akbar Tandjung adalah dengan mendukung Amien Rais dengan poros tengahnya dengan memajukan KH Abdurrahman Wahid sosok yang sekiranya dapat diterima oleh kalangan abangan ataupun muslim.²⁶⁰

Meskipun demikian, faksionalisme itu tidaklah menghilang, ini tampak pada saat Akbar Tandjung mendukung Megawati terjadi pembangkangan dari beberapa orang pengurus harian ketika mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden. Partai Golkar yang telah memajukan calon pasangan presiden Wiranto dan Shalahuddin tidak lolos pada putaran kedua, karena hal itu Akbar Tandjung mengalihkan dukungannya kepada pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi yang lolos putaran kedua. Dukungan Akbar Tandjung ini bukan tanpa nilai, pasangan Mega-Hasyim bersedia membayar nilai biaya kampanye sebesar Rp.1 trilyun kepada Partai Golkar dan pasangan yang maju.²⁶¹ Dukungan Partai Golkar ini disatukan dalam sebuah koalisi kebangsaan berisi dua partai pemenang pemilu yakni Partai Golkar dan PDI-P. Koalisi ini ditandingi oleh Koalisi Kerakyatan yang dibentuk oleh partai-partai pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yakni Partai Demokrat, PKS, PKB dan beberapa partai kecil lainnya yang lolos electoral threshold yang mendukung pencalonan SBY-JK.

Tetapi, pada hasil akhirnya pasangan ini kemudian kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kekalahan Megawati dan Hasyim menambah rentetan kekalahan dari Akbar Tandjung sejak kekalahannya pada konvensi presiden Partai Golkar oleh Wiranto yang kemudian maju sebagai presiden. Kekalahan ini menunjukkan bahwa dukungan politik yang diberikan oleh DPP Partai Golkar justru tidak mencerminkan dukungan seluruh partai itu pada seluruh tingkatan.²⁶² Kekalahan Partai Golkar dalam dua putaran presiden ini menjadikan Partai Golkar di bawah Akbar Tandjung untuk memantapkan diri dalam barisan oposisi terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla dengan

²⁶⁰ Lihat dalam Kevin O' Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia* (NewSouthWales: Allen and Unwin, 2002), 33.

²⁶¹ Lihat Tomsa, "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", 14.

²⁶² Ini diakui oleh Jusuf Kalla yang merasa pula tidak didukung oleh pengurus DPD tingkat satu maupun dua, Wawancara Jusuf Kalla 27 Juli 2010, pukul 11.00-13.00.

adanya koalisi kebangsaannya.

Tetapi niatan untuk menjadi oposisi ini kemudian batal karena kemudian pada munas VII di Bali, Akbar Tandjung dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang maju sebagai ketua umum. pada munas bali, banyak sekali tokoh Partai Golkar yang ikut meramaikan, antara lain adalah orang-orang yang meraih kursi kepemimpinan partai secara personal seperti Marwah Daud Ibrahim dan Surya Paloh. Selain itu juga terdapat calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto. Tetapi, sebelum majunya Jusuf Kalla, tidak ada satupun tokoh yang memiliki kekuatan setara dengan Akbar Tandjung, ketua umum yang dianggap yang paling berjasa menyelamatkan Partai Golkar. Beberapa calon seperti Wiranto, Surya Paloh, Slamet Effendy Yusuf ataupun Marwah Daud Ibrahim tidak memiliki kekuatan setara dengan Akbar Tandjung. Wiranto sebagai calon yang dianggap melawan Akbar Tandjung dihambat dengan diajukannya syarat sebagai calon ketua umum yakni, harus memiliki pengalaman sebagai pengurus partai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan syarat itu Wiranto tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai tersebut. Hingga menjelang dua hari Jusuf Kalla maju sebagai calon ketua umum.

Semula Jusuf Kalla hanya disiapkan sebagai ketua dewan penasehat oleh Surya Paloh jika ia menang dari Akbar Tandjung. Tetapi, nampak Surya Paloh melihat kekuatan Akbar Tandjung begitu kuat sehingga memilih memajukan Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar dan menukar posisinya sebagai ketua dewan penasihat. Pertimbangan ini diambil mengingat posisi Akbar Tandjung sangat kuat dalam pemilihan itu. Akhirnya dengan mengantungi dukungan dari 23 DPD tingkat satu Jusuf Kalla maju menantang Akbar Tandjung sehingga dapat memenangkan munas tersebut. Kemenangan Jusuf Kalla tidak lepas dari dukungan dari pimpinan partai lain yang semula berada dalam kepengurusan Akbar Tandjung yakni Agung Laksono yang semula akan maju sebagai ketua umum.²⁶³ Kemenangan Jusuf Kalla dalam munas di bali juga merupakan perpaduan dari tiga kekuatan dalam Golkar yakni kekuatan Indonesia timur yang diwakili oleh Jusuf Kalla, kekuatan jawa yang diwakili oleh Agung Laksono dan kekuatan Sumatera yang diwakili oleh Surya Paloh.

Maka kemenangan Jusuf Kalla sebagai melengkap

²⁶³ Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. 18.

kekalahan panjang dari Akbar Tandjung setelah keberhasilannya memperjuangkan dalam mempertahankan Partai Golkar sebuah partai yang berasal dari organisasi politik yang menjadi alat dari penguasa Orde Baru. Kemenangan Jusuf Kalla juga memiliki makna bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memiliki partai pendukung yang semakin banyak sehingga dalam menyelenggarakan kebijakannya dapat dengan mudah. Hanya saja pada kelanjutannya Partai Golkar justru hanya menjadi bumper pada setiap kebijakan dari pemerintah yang kontroversial dari keadaan yang terpaksa. Dengan kekalahan Akbar Tandjung pula kemudian Partai Golkar semakin terpecah, karena kemudian beberapa orang yang dianggap sebagai orangnya Akbar Tandjung disingkirkan.²⁶⁴

2. Peran dalam Parlemen

Partai Golkar dalam memainkan peran politik yang cukup penting di DPR/MPR, khususnya dalam meletakkan dasar-dasar perubahan sistem politik di Indonesia pasca-Orde Baru. Peran Partai Golkar dalam perubahan sistem politik di parlemen. Parlemen sebagai saluran komunikasi karena media massa waktu itu justru cukup keras terhadap Partai Golkar, bahkan pada komunikasi massa pun Golkar mendapatkan tekanan-tekanan di beberapa tempat seperti di Jawa Timur tekanan oleh massa pendukung Gus Dur, begitu juga di Purbalingga, Jawa Tengah, tekanan fisik kepada pengurus Partai Golkar dalam bentuk pelecehan seksual.²⁶⁵ Sehingga akhirnya Partai Golkar melakukan komunikasi politik pada level interpersonal, hubungan antar elit partai di parlemen dengan memperlihatkan kinerja dan peran dalam reformasi politik.

Kebijakan-kebijakan Golkar di era reformasi dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan Golkar di lembaga parlemen (MPR dan DPR), di pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan internal organisasi dalam merespons perkembangan politik. Berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma baru Partai Golkar, serta interaksi di antara para aktor di internal partai dalam menyikapi perkembangan politik yang berubah dengan cepat. Interaksi itu memunculkan inovasi-inovasi politik dalam konteks demokratisasi internal partai. Berbagai kebijakan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari

²⁶⁴ "Kelemahan dari Partai Golkar justru dalam penyusunan pengurusannya dilihat secara hitam putih, yakni banyak orang yang dianggap sebagai orangnya Akbar Tandjung kemudian disingkirkan," Wawancara dengan Syamsu Muarif tanggal 28 juli 2010 pukul 11.00.

²⁶⁵ Wawancara Akbar Tandjung Juli 2010.

peran Partai Golkar yang demikian strategis, termasuk dalam menjembatani kepentingan-kepentingan parlemen dan pemerintah, serta membangun koalisi dengan partai-partai politik lain.²⁶⁶

Di antara sumbangsih yang diberikan Partai Golkar di era reformasi adalah turut sertanya Partai Golkar dalam proses amandemen UUD 1945 dan proses-proses politik strategis terkait dengan sukses kepemimpinan nasional di era reformasi. Di dalam DPR Golkar turut ambil bagian dalam proses pembahasan berbagai RUU, khususnya paket RUU bidang Politik sebagai produk hukum yang mendasari penyelenggaraan proses-proses politik selanjutnya.

Partai Golkar dalam Sidang Istimewa (SI) MPR ikut andil dalam menghasilkan beberapa ketetapan strategis, seperti antara lain ketetapan tentang percepatan pemilu, pembatasan masa jabatan presiden, dan otonomi daerah. Langkah aktif Partai Golkar untuk menyetujui dan terlibat dalam amandemen UUD'45, selain didasarkan pada kebutuhan mengenai perlunya sebuah konstitusi yang kontekstual, juga dilandasi semangat reformasi ketatanegaraan yang demokratis. Golkar berharap amandemen merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, guna membangun Indonesia baru yang lebih demokratis, adil, tentram, dan sejahtera. Pandangan dan sikap Partai Golkar atas perubahan-perubahan secara mendasar dalam Amandemen UUD 1945 tahap I hingga IV (1999- 2000), sebagaimana dipaparkan di atas, secara faktual merupakan bagian dari kontribusinya dalam merespons dinamika politik di era transisi.²⁶⁷

Selain terlibat di dalam proses perubahan konstitusi, Golkar juga telah turut mengambil bagian di dalam proses politik di MPR, termasuk pada saat berlangsungnya SU MPR tahun 1999, khususnya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Di mana Golkar yang sebelumnya kecewa atas penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie di MPR, berusaha tidak mencalonkannya kembali dan mendukung Amien Rais yang mengusung Abdurrahman Wahid sebagai calon Presiden. Sementara Amien Rais bersih kukuh untuk tidak menerima tawaran dari Partai Golkar dengan alasan karena dia sudah punya calon sendiri yang tergabung menjadi poros

²⁶⁶ Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 254

²⁶⁷ Tandjung, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 253-260

tengah.²⁶⁸

Namun meskipun Partai Golkar mendukung poros tengah untuk mengukung Abdurrahman Wahid, tidak serta merta Golkar menjadi partai yang sepenuhnya mendukung pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam kenyataannya Golkar lebih bersikap kritis khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang kontroversial. Sementara di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, setelah Gusdur lengser, Partai Golkar bertindak lebih proporsional, dan pada kenyataannya tidak ada benturan politik yang serius antara partai Golkar dan Presiden Megawati.

Pada masa Habibie, Partai Golkar mendukung upaya-upaya kebijakan politik yang sesuai dengan semangat reformasi. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya, mendorong terselenggaranya SI MPR pada bulan November 1998 guna mempercepat pelaksanaan pemilu, menggulirkan kebebasan pers, mendorong amandemen konstitusi di MPR, membebaskan tahanan politik Orde Baru, mendorong reformasi Internal militer, hingga kebijakan kontroversial yakni menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Golkar turut mendukung gagasan-gagasan pemerintah di dalam merespons berbagai tuntutan reformasi. Sementara itu, keterlibatan Golkar dalam domain eksekutif turut mendorong kebijakan ekonomi, meletakkan independensi Bank Indonesia (BI), mengefektifkan peran IMF di dalam pemulihan krisis ekonomi, serta upaya-upaya memperkuat nilai tukar rupiah.²⁶⁹

Di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999- 2001), Partai Golkar turut berperan sebagaimana terlihat dengan adanya tiga menteri yang berasal dari Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla (Menteri Perdagangan dan Industri), Mahadi Sinambela (Menteri Pemuda dan Olah Raga), dan Bomer Pasaribu (Menteri Tenaga Kerja). Partai Golkar juga berhasil menempatkan seorang kadernya, yakni Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung RI. Sementara itu, Akbar Tandjung diangkat menjadi ketua DPR RI.²⁷⁰

Pada masa Megawati-Hamzah Haz, kondisi politik relatif stabil dan hubungan Partai Golkar dengan pemerintah secara

²⁶⁸ Barton, Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman, 307.

²⁶⁹ Barton, Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman, 275-277

²⁷⁰ Tandjung, Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman, 277, Jusuf Kalla sendiri merasa keikutsertaannya dalam kabinet Gus Dur dan Megawati Soekarnoepetri bukan mewakili Partai Golkar. wawancara Jusuf Kalla.

umum lebih baik dibandingkan hubungannya dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di tengah situasi politik yang dirasakan semakin kondusif, partai Golkar semakin memperoleh kesempatan untuk memperkuat proses konsolidasi partai.²⁷¹ Tinggal kemudian partai ini kemudian menjadikan masa-masa itu sebagai akhir dari turbulensi.

Meskipun demikian pada masa-masa berikutnya Partai Golkar mengalami ujian ketika ketua umum Partai Golkar terkena kasus hukum Buloggate, meskipun kemudian mendapatkan keputusan bebas dan Mahkamah Agung. Hal ini mempengaruhi pelaku pemilih. citra khalayak di Jakarta timur, Depok dan Purwakarta, Partai Golkar memiliki citra Partai Golkar yakni sebagai partai yang bagian dari Orde Baru; besar karena Soeharto; partai penuh KKN; partai yang kental nuansa politik uang; partai yang tidak demokratis; partai yang kurang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan Golkar tidak dianggap sebagai partai modern. Meskipun, citra itu muncul dari persepsi masyarakat yang berasal dari perkotaan daripada masyarakat yang berasal dari pedesaan. Masyarakat pedesaan masih melihat partai ini sebagai partai yang layak untuk dipilih. Partai Golkar juga dilihat sebagai Golkar pada masa Orde Baru, bahkan kemudian dianggap sebagai partai politik yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat dikarenakan partai ini tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak ikut serta dalam membongkar masalah KKN dalam Parlemen, dan tidak ikut serta dalam proses pendidikan politik masyarakat. Persepsi ini muncul dari masyarakat yang usianya relatif muda.²⁷² Meskipun pencitraan ini kemudian dapat dipupuskan setelah Partai Golkar kemudian melakukan pelbagai terobosan seperti konvensi presiden Partai Golkar.²⁷³ Sebagai hasilnya, Partai Golkar memenangkan Pemilu 2004 dengan perolehan suara 21 persen di 30 provinsi.

Keikutsertaan dalam proses politik reformasi tersebut menjadikan Golkar mempertahankan simpati publik dengan perolehan suara yang meningkat, meskipun pada prosentase terjadi penurunan. Kinerja partai Golkar dalam proses tersebut dinilai masyarakat sebagai konsistensi partai Golkar dalam

²⁷¹ Tandjung, Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman 277-278

²⁷² Rahman, Citra Khalayak Golkar: Peta Permasalahan menjelang Kemenangan Pemilu 2004, 169.

²⁷³ Menurut Rully Chairul Azwar, Konvensi merupakan salah satu taktik untuk memperbaiki citra partai Golkar yang kembali terpuruk karena kasus Buloggate II yang menimpa Akbar Tandjung. Wawancara Rully Chairul Azwar, Juli 2010.

reformasi.

D. Pilpres 2004

Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 melalui beberapa faktor yakni, Golkar sebagai partai yang tetap signifikan di mata publik. Pertama, Golkar hampir merupakan satu-satunya partai yang bersifat plural dan lintas ideologi serta agama. Kedua, secara faktual Golkar juga merupakan satu-satunya partai yang bersifat nasional dalam arti yang sebenarnya. Ketiga, suasana psikopolitik masyarakat yang kecewa terhadap kinerja dan performance partai-partai besar pada khususnya serta arah reformasi yang tak begitu jelas membuat sebagian rakyat gamang dan teralienasi secara politik sehingga terperangkap dalam memori “aman dan sejahtera” era Orde Baru. Keempat, pada akhirnya kerja partai adalah kerja organisasi. Sehingga meskipun unggul dalam pemilu legislatif, Golkar belum tentu menjanjikan peluang yang besar bagi Akbar Tandjung.²⁷⁴

Pasangan Calon Presiden Wiranto-Solahuddin Wahid yang diajukan partai Golkar lewat konvensi, tidak lolos ke putaran kedua, kalah dari pasangan Megawati Soekarnoputri- Hasyim Wahid, dan SBY-JK. Menghadapi kenyataan pahit seperti itu, Partai Golkar mengalami kesulitan dalam mengambil sikap politiknya ke depan, apakah harus berkoalisi dengan Pasangan Megawati-Hasyim atau berpaling ke pasangan SBY-JK. Perbedaan pendapat soal koalisi tersebut mulai meruncing menjelang pemilihan presiden putaran kedua, tepatnya dua hari setelah Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menerima kunjungan Megawati, calon presiden dari PDI-Perjuangan, Marzuki cs justru mengadakan pertemuan di sebuah hotel dengan calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla.²⁷⁵

Ancaman perpecahan di tubuh DPP partai Golkar makin mengkhawatirkan, di satu sisi Akbar Tandjung melakukan lobi-lobi ke kubu calon presiden Megawati, sebagian pengurus justru melakukan lobi dengan kubu Yudhoyono. Perpecahan tersebut disinyalir akibat dari sebagian anggota DPP partai Golkar yang mendahului partai dalam mengambil langkah politiknya.²⁷⁶

Di saat Akbar Tandjung mulai intensif melakukan kerja sama politik dengan Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla calon wakil presiden dari Partai Demokrat, melakukan silaturahmi dengan

²⁷⁴ Kompas, Selasa, 03-08-2004, 7.

²⁷⁵ Kompas, Selasa, 03-08-2004, 7.

²⁷⁶ Kompas, Kamis, 05-08-2004, 6.

pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bali, NTB, dan NTT, bersama pengurus Partai Demokrat di Denpasar, Kamis (5/8).²⁷⁷

Pertemuan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla dengan beberapa pengurus DPD Partai Golkar tersebut disesalkan oleh Ketua umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, karena pertemuan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan DPP. Akbar menyatakan “Pertemuan itu melanggar fatsoen dan kesepakatan rapat DPP Golkar agar pengruus menahan diri menjalin kerja sama politik menjelang pemilu presiden putaran kedua. Kesannya ada perpecahan di Golkar. Padahal, jika ada perbedaan, kita punya mekanisme penyelesaian.” Jusuf Kalla hadir dalam rapat tertutup 23 DPD Partai Golkar tingkat I dan delapan DPD Partai Golkar tingkat II serta 31 pengurus DPP partai Golkar, Minggu malam. Dari DPP Partai Golkar tampak hadir Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Abu hanifah, Abu Hasan Sazali, Sofyan Lubis, Abdul Gafur, Dharma Oratmangun, Hasan Hasibuan, Tjandra Muchtar, Yoris, Fahri Leluasa, Anton Sihombing, dan Andi Matalata.

Menurut Priyo Budi Santosa dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa “opsi Partai Golkar mendukung Mega- Hasyim hanyalah manuver Ketua Umum, demi kepentingan pribadi, bukan kepentingan Golkar. Kita harus melawan manuver itu untuk menyelamatkan Golkar”. Dalam pernyataan yang lain, Priyo Budi Santoso mengakui adanya tiga opsi dalam Golkar, yaitu mendukung Mega-Hasyim, mendukung SBY-JK, atau bersikap netral. Opsi yang diusulkannya adalah kedua dan ketiga.²⁷⁸

Keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar pada 15 Agustus 2004 menunjukkan bahwa dari 32 DPD I dan lima wakil pengurus organisasi sayap, 35 mendukung Mega- Hasyim dan hanya satu yang bersikap netral, yaitu DPD I Jawa Barat. Pada kenyataannya dukungan kepengurusan Partai Golkar ini tidak solid karena dukungan pada Rapim, atau DPP, tetap tidak didukung sepenuhnya oleh DPD Partai Golkar.²⁷⁹

Kenapa Partai Golkar akhirnya mendukung Mega- Hasyim, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, Pertama, sebagian besar fungsionaris partai tampaknya menilai bahwa parpol sebagai pilar demokrasi harus tetap dipertahankan. Kedua, Partai Golkar lebih memilih hubungan historis yang pendek dalam kerja sama dengan

²⁷⁷ Kompas, Kamis, 05-08-2004, 6.

²⁷⁸ Kompas, Selasa, 10-08-2004. 6.

²⁷⁹ “Lain pucuk, Lain Akar dan Ranting”, Majalah Tempo, 22 Agustus 2004, 92-94.

PDI- Perjuangan di era reformasi ketimbang sejah panjang dengan tokoh-tokoh mantan militer. Faktor ketiga ialah Partai Golkar akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika bergandengan dengan PDI-P. bukan saja Golkar akan dijanjikan delapan posisi di kabinet, tapi juga akan memiliki keleluasaan berpolitik di dalam koalisi ini, baik jika pasangan Mega-Hasyim menang ataupun kalah. Keempat, koalisi yang dibangun sebelum pilpres tentunya akan menimbulkan adanya ikatan moral dan politik dari partai-partai yang berkoalisi untuk menggerakkan mesin-mesin partai agar rakyat dapat diyakinkan untuk memilih pasangan yang didukung.²⁸⁰

Keputusan Rapim Partai Golkar yang mendukung pasangan Mega-Hasyim dinilai sebagai inkonsisten dan dapat menjerumuskan partai. Pernyataan tersebut dilontarkan di sela-sela deklarasi Forum Pembaharuan Partai Golkar di Jakarta, yang dihadiri oleh dua Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Marzuki Darusman dan Fahmi Idris, dan juga Jusuf Kalla, calon Wakil Presiden yang diusung Partai Demokrat berdampingan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Keberpihakan beberapa kader Golkar kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dengan pertimbangan pada pasangan tersebut terdapat kader Golkar, "paling tidak sebagai wakil presiden. Di sana (PDI-P, pen) bahkan wakil presiden pun tidak."²⁸¹

Di sisi lain Akbar Tandjung menyesalkan sikap Jusuf Kalla yang telah mencampuri urusan internal Partai Golkar terlalu jauh dengan menilai bahwa keputusan Rapim IX Partai Golkar merupakan keputusan yang tidak konsisten dan bersifat elitis. Sikap tersebut dinilai Akbar Tandjung sebagai sikap yang memecah belah partai Golkar.²⁸²

Tabel. III.2. Perolehan Suara Golkar hingga Partai Golkar²⁸³

Pemilu	Jumlah suara	Prosentase	Jumlah kursi	Peringkat
1971	34.348.673	62,82%	236	1
1977	39.750.096	62,11%	232	1
1982	48.334.724	64,34%	242	1
1987	62.783.680	73,16%	299	1
1992	66.599.331	68,105%	282	1

²⁸⁰ Kompas, Jum'at, 20-8-2004. 6.

²⁸¹ Wawancara dengan Fahmi Idris, Selasa 13 Juli 2010.

²⁸² Kompas, Kamis, 02-09-2004, 6.

²⁸³ Diambil dari www.Golkar.or.id

1997	84.187.907	74,51%	325	1
1999	23.741.758	22,44%	120	2
2004	24.480.757	21,58%	108	1

Dengan melihat pada tabel perolehan suara tampak bahwa Partai Golkar mengalami penurunan suara yang cukup signifikan yakni sebesar 52 persen atau sebanyak 60 juta hilang. Tentunya suara ini tersebar ke partai-partai lainnya yang dianggap oleh masyarakat sebagai pengobat harapan masyarakat untuk keadaan yang lebih baik. Tetapi dari sisi peringkat Partai Golkar telah berhasil menjadi partai yang lebih baik dari partai-partai baru sekalipun yakni peringkat kedua pada Pemilu 1999 dan peringkat pertama pada Pemilu 2004. Hal ini disebabkan ingatan masyarakat kepada Golkar tersebut masih kuat, sehingga partai ini tidak hanya menjadi partai yang tetap hidup bahkan partai yang berhasil memenangkan Pemilu 2004, mengalahkan PDI P sekalipun, partai pemenang pemilu pada 2004, hal ini tidak terlepas dengan peran Akbar Tandjung yang sukses sebagai ketua umum Partai Golkar.²⁸⁴

²⁸⁴ Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. 38.

BAB IV

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR ERA JUSUF KALLA: HUBUNGAN INTERNAL YANG RAPUH

Kemenangan Kalla pada Munas Bali menjadikan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan oleh kalangan elit Partai Golkar. Sebelumnya, ia adalah kader partai yang kurang diperhitungkan karena ia tidak pernah menjabat kepengurusan di DPP. Meskipun demikian ia memiliki beberapa karakter yang mempengaruhi cara kepemimpinan atas Partai Golkar yang kelak justru menciptakan hubungan yang rapuh antar elit partai politik. Karakter ini diwarnai dengan posisi rangkap sebagai wakil presiden yang merangkap ketua umum. Posisi ini dianggap oleh elit Partai Golkar sebagai posisi yang seharusnya menguntungkan Partai Golkar terutama berkaitan dengan pembagian kursi menteri sebagai jabatan publik yang selalu diinginkan oleh partai politik. Cara pandang elit partai Golkar ini tidak lepas dari semangat pragmatisme yang begitu kental dari Partai Golkar, tetapi cara pandang elit ini berbenturan dengan cara pandang Kalla yang lebih mengedepankan kepentingan Negara daripada kepentingan partai politik.

A. Pemosisian Partai Golkar

1. Antara Wakil Presiden Dan Ketua Umum Partai

Posisi ketua umum yang diduduki Jusuf Kalla berbeda dengan ketua umum partai lainnya. Jabatan Ketua Umum Partai Golkar diduduki oleh Jusuf Kalla sesudah dirinya menduduki wakil presiden. Lazimnya, ketua umum partai menjadi jembatan sebagai jabatan publik. Keadaan ini menimbulkan pada diri Jusuf Kalla perbenturan kepentingan dalam melakukan komunikasi politiknya. Posisi ini dilatarbelakangi oleh ikatan kerja Kalla dan Yudhoyono menumbuhkan kebutuhan bahwa kabinet yang dipimpin harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh partai yang ada di lembaga legislatif. Meskipun sistem pemerintahan adalah presidensial, pemerintah tetap membutuhkan dukungan yang cukup besar dari pemenang pemilu dalam hal ini adalah Golkar. Sehingga Kalla sebagai wakil presiden mendukung kebutuhan tersebut hingga mengincar posisi ketua umum Partai Golkar.

Apa yang terjadi pada masa Jusuf Kalla berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa Orde Baru dan Akbar Tandjung. Pada masa Orde Baru, Golkar adalah organisasi politik yang dimiliki oleh penguasa sehingga kepentingannya

adalah menopang kekuasaan. Sedangkan pada masa Akbar Tandjung kepentingannya sebagai perimbangan kekuatan politik yang kepentingan pada kekuasaannya tidak begitu besar karena ketua umumnya berada di parlemen.

Posisi Kalla sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum menjadikan kalangan elit politik partai Golkar mencoba membangun hubungan interpersonal yang menguntungkan bagi mereka dengan mengharapkan posisi yang baik dalam Partai Golkar. Di sisi lain, Jusuf Kalla berada pada posisi yang ambigu, dia sebagai pendukung terbesar pemerintahan tetapi berada pada posisi kedua. Maka dapat dilihat pada empat aspek tahapan yang mempengaruhi tindakannya sebagai ketua umum yakni ikatan hubungan (relationship), penilaian (judgment), kepentingan (interest), tindakan yang sepatutnya (proper exercise).²⁸⁵ Posisi yang ambigu ini berpengaruh pada pelaksanaan program kerja Partai Golkar yang lebih menitikberatkan pada keberhasilan pelaksanaan program pemerintah, sementara kepentingan partai politik menjadi terkesampingkan.

2. Pengaruh Posisi Wapres pada Program Kerja Partai Golkar

Hubungan Kalla dan Yudhoyono bisa dilacak pada pencalonan presiden pada pemilu 2004 oleh Partai Demokrat yang mencalonkan SBY sebagai calon presiden. Kalla sempat mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar, di tengah jalan Kalla mengundurkan diri karena diminta Yudhoyono menjadi calon wakil presiden. Sejak Kalla berpasangan dengan Yudhoyono, perpecahan terjadi pada tubuh Partai Golkar dengan munculnya dukungan dari sebagian pengurus Partai Golkar, terutama di tingkat pengurus daerah kepada pasangan ini. Di level pusat, dukungan diberikan kepada pasangan Mega Hasyim sehingga DPP memberikan surat pemecatan kepada elit yang memberikan dukungan pada pencalonan SBY-Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.²⁸⁶

Setelah pasangan ini memenangkan pilpres melalui dua putaran, antara Kalla dan Yudhoyono tumbuh ikatan hubungan (relationship) sehingga keduanya sering disebut dengan pasangan dwitunggal.²⁸⁷ Ikatan hubungan (relationship) Kalla

²⁸⁵ Michael Davis, "Introduction," dalam Michael Davis and Andrew Stark, eds, *Conflict of Interest in The Profession*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), 8-11.

²⁸⁶ Kompas, Selasa, 03-08-2004, 7.

²⁸⁷ Pasangan dwitunggal ini digunakan juga oleh kalangan indonesianis seperti R. William Liddle yang menyebutnya sebagai duumvirate. Lihat penggunaan istilah ini dalam

dan Yudhoyono menumbuhkan kebutuhan bahwa kabinet yang dipimpin mereka harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh partai yang ada di lembaga legislatif. Meskipun sistem pemerintahan adalah presidensial, pemerintah tetap membutuhkan dukungan yang cukup besar dari pemenang pemilu dalam hal ini adalah Golkar yang menguasai 23 persen kursi parlemen.

B. Komunikator

Pemosisian Partai Golkar yang ambigu karena diwarnai oleh konflik kepentingan Ketua Umum dapat pula dilihat pada level individu. Level individu melihat bagaimana sosok Kalla dengan melihat aspek kredibilitas, otoritas dan motivasi. Pada level ini juga tidak hanya melihat bagaimana sosok dari Kalla tetapi dilihat pula bagaimana Kalla sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya ternyata menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar komunikator.

1. Level Individu

Pada level ini melihat bagaimana sosok ketua umum pada level individu melakukan komunikasi politik. Pada level ini dilihat bagaimana ketua umum pada aspek motivasi, otoritas ataupun kredibilitas. Dalam analisis ini dilihat aspek- aspek yang menyebabkan konsolidasi gagal maka salah satu kelemahan kinerja komunikasi politik Partai Golkar terdapat pada komponen komunikator. Di dalam Partai Golkar terdapat komunikator utama seperti ketua umum yang merangkap sebagai wakil presiden.

- a. Komunikator Utama
- b. Kredibilitas

Sebagai seorang komunikator utama, kredibilitas Jusuf Kalla adalah seorang pimpinan partai yang awalnya seorang wakil presiden sehingga dalam berkomunikasi sebagai pimpinan partai ia dilihat sebagai seorang wakil presiden. Sebagai pemimpin partai ia tidak lepas sebagai wakil presiden yang berada di bawah bayang-bayang presiden. Dengan demikian setiap yang disampaikannya adalah pesan yang mewakili kekuasaan, tetapi ia tidak dilihat sebagai seorang ketua umum Partai Golkar tetapi sebagai seorang wakil presiden.

Sosok Jusuf Kalla: dari Pengusaha ke Politisi

artikelnya yang berjudul R. William Liddle, "Year One of Yudhoyono-Kalla Duumvirate," Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 41, No.3. 2005.

Melihat Jusuf Kalla sebagai komunikator politik tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai putra pertama pasangan Haji Kalla dan Hajjah Atthirah yang lahir pada 14 Mei 1942. Bapaknya merupakan pengusaha dan politisi partai NU tingkat daerah di Sulawesi Selatan di masa Orde Lama. Oleh orang tuanya, Jusuf Kalla dididik dengan disiplin dan harga diri dan sejak kecil ia telah dididik sebagai seorang pemimpin apalagi sebagai seorang anak laki-laki tertua yang diharapkan untuk meneruskan usaha keluarganya.²⁸⁸

Kecintaan Jusuf Kalla kepada keluarga juga nampak pada jejak hidupnya dengan memilih menjadi pengusaha dan memimpin perusahaan keluarganya, NV Haji Kalla, setelah kebangkrutan yang dialami saat runtuhnya rezim Soekarno. Di bawah kepemimpinannya NV Haji Kalla tumbuh menjadi sebuah perusahaan besar di kawasan Indonesia Timur.²⁸⁹ NV Haji Kalla dikembangkannya dengan usaha impor mobil Jepang pada saat pemerintah menunjuk PT Astra Internasional sebagai importir untuk wilayah Indonesia Barat dan NV Haji Kalla untuk wilayah Indonesia Timur. Pesatnya usaha NV Haji Kalla berkat boom coklat yang diekspor masyarakat Sulawesi Selatan dan hasil dari ekspor coklat itu yang digunakan untuk membeli mobil Jepang tersebut.

Bidang usaha NV Haji Kalla sendiri pada awalnya tidak bergerak di bidang otomotif tetapi pada hasil bumi, tekstil, dan bahan bangunan. Pada masa ayahnya, Jusuf Kalla sudah sering diikutsertakan dalam mengelola bisnis keluarga dengan tanggung jawab pertamanya menjadi kasir toko bangunan. Pada generasi Jusuf Kalla perusahaan ini mulai bergerak di bidang otomotif dan NV Haji Kalla adalah sedikit dari perusahaan yang bertahan hingga generasi kedua. Pada mulanya perusahaan ini bergerak di Bone kemudian pindah ke Makassar saat pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda.²⁹⁰

Kemampuannya mengurus perusahaan keluarga itu selanjutnya menjadikan Jusuf Kalla sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Dari

²⁸⁸ Pernah suatu ketika ayahnya memarahi Jusuf Kalla karena dia bekerja sebagai tukang jaga di tempat penitipan barang di sebuah sekolah di Makassar, ketika mengetahui hal itu, ayahnya langsung menjemputnya dan memarahinya, "kamu saya besarkan tidak untuk jadi pesuruh tetapi untuk menjadi seorang pemimpin." Dari pengalaman di atas nampaklah bahwa Taufik Adi Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla,, (Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2010), 15.

²⁸⁹ Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla, 19.

²⁹⁰ Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla, 40.

jabatan ini mengantarkannya menjadi anggota MPR Utusan Daerah yang dijalani hanya lima tahun sekali sehingga menjadikannya lebih terkonsentrasi mengurus bisnis.²⁹¹ Di Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan terutama di bidang agama untuk meneruskan kegiatan sosial almarhum ayahnya sebagai tokoh NU. Ia pun mendirikan Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai pusat kegiatan kegiatan keislaman. Masjid ini dibangun bersama Jenderal M. Yusuf, pejabat Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI.²⁹² Hubungannya dengan Jenderal Yusuf sangat baik selain juga ia berhubungan baik dengan Jenderal Sholihin GP seorang Panglima Kodam Wirabuana yang kelak menjadi salah satu Anggota Petisi 50.

Kesuksesan Jusuf Kalla sebagai pengusaha tidak lepas dari karakter dan kultur Bugis yang suka merantau dan berdagang. Hampir bisa dipastikan seluruh daerah di Indonesia memiliki hubungan usaha dagang dengan Bugis mulai dari Aceh hingga Papua.²⁹³ Sebagai pedagang, Jusuf Kalla menurut Bagus Takwin dan Niniek L. Kariem memiliki nilai-nilai yang dipegangnya seperti keuletan, kemampuan melihat celah kesempatan dan memanfaatkannya, sifat realistis pada kenyataan, berpikir taktis menggunakan prinsip ekonomi, kesederhanaan, serta kemampuan manajemen dalam usaha mencapai kemajuan. Juga diinternalisasi ke dalam dirinya dengan figur ibunya yang juga selalu memberi penguatan tentang pentingnya peran pengasuhan, sementara dari ayahnya memberikan penguatan karakter diri yang mengarahkannya menjadi pengusaha.²⁹⁴

Nilai-nilai yang dipaparkan Takwin dan Kariem itu nampaknya begitu menonjol dalam cara Jusuf Kalla bertindak sebagai wakil presiden. beberapa keputusan yang cukup penting nampaknya tidak lepas dari cara pendekatan yang dilakukannya yang kental sekali dengan pendekatan dagang yang logis, tegas, dan lugas.²⁹⁵ Pendekatan seperti ini belum tentu disukai semua orang karena dinilai tidak melihat pada akibat di belakang hari. Contoh dalam penyelesaian Aceh dalam Perjanjian Helsinki, Jusuf Kalla tidak mengindahkan bahasa

²⁹¹ Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla, 38.

²⁹² Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla, 22.

²⁹³ Christiaan Pelras, Manusia Bugis, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2006), 356.

²⁹⁴ Bagus Takwin dan Niniek L. Kariem, "M. Jusuf Kalla: Pengusaha Yang Dididik Jadi Pemimpin Yang Realistis," dimuat dalam Kompas, Kamis 24 April 2004, 61

²⁹⁵ Hamid Awaluddin, Solusi JK: Logis, Spontan, Tegas dan Jenaka, (Jakarta: Grasindo, 2009).

hukum yang menurut banyak kalangan sebagai kekalahan negara dalam menghadapi GAM.²⁹⁶ Jusuf Kalla dalam mengambil keputusan sering memperhitungkan dalam keadaan yang tidak normal meskipun begitu dia bukan tipe orang yang suka melempar tanggung jawab kepada anak buah.

Kiprah Jusuf Kalla di Golkar lebih kurang 39 tahun dengan tidak pernah putus selama itu. Pada masa menjadi mahasiswa ia menjadi ketua dan anggota Golkar serta menjadi anggota DPR mewakili pemuda kurang lebih 3 tahun. Sejak terbentuknya Pemerintah Orde Baru, Jusuf Kalla sudah menjadi anggota DPRD dari perwakilan Sekber Golkar unsur mahasiswa. Jusuf Kalla kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin tempat ia mengenal dunia aktivis melalui organ kemahasiswa HMI Cabang Makassar dengan menjadi ketua umum pengurus cabang juga merangkap Ketua KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) cabang Makassar.²⁹⁷ Pada tahun 1967 ia mengundurkan diri dari kursi DPRD Sulawesi Selatan karena meneruskan usaha keluarga. Namun demikian ia tetap berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi anggota MPR Utusan Daerah selama tiga periode, dari 1982-1997.²⁹⁸

Pada masa reformasi, Jusuf Kalla merupakan anggota MPR yang masuk dalam Kaukus Iramasuka (Irian Maluku Sulawesi dan Kalimantan) sebuah kaukus pendukung B.J. Habibie dari Indonesia Timur. Jusuf Kalla pertama kali masuk pemerintahan dengan menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan kabinet yang dibentuk berdasarkan kompromi antar partai-partai politik di lembaga legislatif.²⁹⁹ Kedudukan sebagai menteri itu hanya berlangsung beberapa bulan saja karena dicopot oleh Presiden dengan alasan Jusuf Kalla dituduh terlibat kasus korupsi sebagaimana

²⁹⁶ Dalam perjanjian di Helsinki, juru runding dari Indonesia, Hamid Awaluddin, sempat lama mengambil keputusan karena ada banyak bahasa hukum yang diminta oleh pihak GAM memosisikan Indonesia dalam kondisi kalah seperti penggunaan kata-kata DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) bukannya DPRDI Aceh; juga penggunaan istilah Undang-Undang Nanggroe Aceh Darrussalam, istilah-istilah ini menunjukkan bahwa Aceh sepertinya berdiri sejajar dengan RI. Tetapi Jusuf Kalla memerintahkan Hamid Awaluddin untuk segera menyepakati apa keinginan orang aceh dengan menggunakan analogi orang mendaftar kartu kredit yang tidak perlu melihat seluruh persyaratan. Lihat Nezar Patria, " Damai Aceh sebuah Penemuan," dalam Mereka Bicara Jusuf Kalla, (Jakarta: NPCI, 2009).

²⁹⁷ Susilo, Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla,, 21.

²⁹⁸ Infografis tentang riwayat Jusuf Kalla lihat Kompas, 20 Oktober 2004, 43.

²⁹⁹ Kompromi politik inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal adanya politik kartel yang kemudian dipraktikkan pada masa- masa berikutnya, lihat Kuskrido Ambhardi, Mengungkap Kartel Politik, (Jakarta: KPG dan LSI, 2010).

telah dituduhkan oleh A.A. Baramuli.³⁰⁰

Pencopotan ini menyebabkan kekecewaan dari Partai Golkar karena Jusuf Kalla saat itu di Partai Golkar menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat. Terlebih pencopotannya itu tidak diganti oleh kader Golkar melainkan digantikan oleh M. Rozi Munir, salah satu pengurus dari PBNU. Pencopotan Jusuf Kalla ini yang membuat posisi Abdurrahman Wahid digoyang dan dipaksa mundur pada tahun 2001.³⁰¹

Ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden, Jusuf Kalla kembali ditarik untuk menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Artinya ia naik tingkat dari menteri yang hanya menangani satu bidang kepada kementerian yang mengkoordinasi sekian bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Pada akhir masa kepresidenan Megawati, ia menjalin kedekatan dengan SBY yang waktu itu ditekan oleh Taufik Kiemas.³⁰² Kedekatan itu yang menjadikannya dipinang oleh SBY sebagai pasangan calon wakil presiden dan Jusuf Kalla memberi sumbangan cukup signifikan dalam memenangkan Pilpres 2004 itu.³⁰³

Pasangan SBY-Jusuf Kalla ini sering disebut sebagai Dwitunggal karena keduanya adalah perpaduan antara sikap kehati-hatian dan kecepatan.

Dengan mencermati pada latar belakangnya, terlihat Jusuf Kalla bukan sosok yang menjadi pemimpin puncak dalam karier panjang politiknya karena tidak memiliki pengalaman memimpin organisasi politik tingkat nasional. Semua organisasi yang dipimpinya merupakan level lokal seperti di HMI dan Kadinda. Dalam bidang politik Jusuf Kalla tidak pernah menduduki jabatan puncak dengan hanya menduduki status anggota MPR Utusan Daerah. Ia menjadi menteri hanya pada masa

³⁰⁰ Kevin O' Rourke, *Reformasi: The Struggle For Power in post- Soeharto Indonesia*, (NewSouth Wales: Allen & Unwin, 2002), 362. Adapun, kasus yang dituduhkan kepada AA Baramuli itu tidak pernah selesai.

³⁰¹ Menurut Greg Barton yang menjadikan Gus Dur mendapatkan tekanan bukanlah pencopotan Jusuf Kalla tetapi pencopotan Laksamana Soekardi dari jabatan Menteri BUMN sehingga dukungan dari PDI-P dilepas, lihat Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman*, (Yogyakarta: LKIS dan The Wahid Institute, 2004), 384.

³⁰² Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu dijuluki oleh Taufik Kiemas sebagai anak SD, sebutan cara mencemooh kepada Yudhoyono ini justru menjadikan Yudhoyono mendapatkan simpati dari banyak masyarakat.

³⁰³ Berdasarkan catatan KPU, kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebesar 65 persen. Perolehan suara ini disumbangkan oleh para pendukung Jusuf Kalla yang berasal dari pengurus Partai Golkar. Lihat majalah Tempo edisi Juli 2004.

Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnaputri sebagai utusan dari kawasan Indonesia timur. Latar belakang seperti yang menjadikan kredibilitasnya sebagai komunikator utama Partai Golkar tidak menonjol. Ia hanya dilihat sebagai sosok wakil presiden yang merangkap sebagai ketua umum Partai Golkar daripada ketua umum partai yang menduduki jabatan di pemerintahan.

b. Otoritas

Pada aspek otoritas Jusuf Kalla lebih nampak sebagai seorang yang memiliki otoritas jabatan eksekutif (wakil presiden) daripada sebagai ketua umum partai politik. Sesungguhnya ini sudah mulai tampak ketika sebagai ketua umum partai ia mengalihkan arah politik Partai Golkar dari partai oposisi menjadi partai yang pendukung pemerintah. Jusuf Kalla menjadi ketua umum setelah menjadi wakil presiden, artinya, ia justru melewatinya secara terbalik karena biasanya seorang politisi menduduki jabatan eksekutif setelah melalui jabatannya di partai politik. Proses terbalik ini menunjukkan motivasi yang berbeda dari Jusuf Kalla. Ia menjadikan posisi sebagai ketua umum partai politik sebagai penopang pemerintah yang sedikit dukungannya di parlemen.³⁰⁴ Ini kemudian mempengaruhi caranya dalam melakukan komunikasi politik dimana ia lebih sering menunjukkan komunikasi politik yang membela pemerintah dibanding membela partainya. Jusuf Kalla dapat melakukan kontrol atas legislatif dan eksekutif, ini tampak dalam perjalanannya memimpin partai tersebut.

Jabatan Jusuf Kalla sebagai ketua umum malah menjadikan lengkapnya kekuatan politik pemerintah SBY- Jusuf Kalla di awal pemerintahannya. Sebelumnya, Koalisi Kebangsaan yang mendukung pasangan Mega-Hasyim berniat menjadi oposisi pemerintahan SBY-Jusuf Kalla maka dengan pertimbangan stabilitas pemerintahan adalah hal yang penting maka pencalonan Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar mendapat persetujuan Presiden SBY.³⁰⁵ Sekaligus ini menunjukkan bahwa Jusuf Kalla tidak fokus sepenuhnya kepada tugas kepartaian dan untuk menyiasatinya dia mengadakan jabatan wakil ketua umum, sebuah jabatan baru dalam kepartaian di Golkar. Wakil ketua umum yang dirancang dengan tugas sebagai penghubung antara ketua umum dan DPD di bawahnya, sementara Jusuf Kalla lebih fokus dalam

³⁰⁴ Wawancara dengan Andi Mattalata Juli 2010. Meskipun demikian, Jusuf Kalla sendiri mengatakan bahwa kedudukannya sebagai ketua umum adalah pencapaian yang dicita-citakan sebagai anggota Partai Golkar, wawancara dengan Jusuf Kalla, Juli 2010.

³⁰⁵ Wawancara Jusuf Kalla dengan majalah Tempo 2007.

pemerintahan dan Partai Golkar dijadikan pendukung pemerintah di DPR.

Dengan kekuatannya sebagai pemenang Pemilu 2004 Jusuf Kalla lebih leluasa bergerak dalam pemerintahan sehingga ia nampak lebih dominan sampai-sampai julukan the real president disematkan oleh Syafii Ma'arif kepadanya.³⁰⁶ Dalam eksekutif Jusuf Kalla berada dalam posisi yang tepat karena ia melakukan banyak kebijakan terobosan misalnya kebijakan konversi energi, program 10.000 MW energi listrik, dan perannya sebagai inisiator perdamaian Aceh. Dalam menjalankan Partai Golkar beberapa kalangan menilai cara memimpinnya seperti cara mengendalikan perusahaan sehingga memunculkan istilah Era Saudagar.³⁰⁷

Beberapa keputusan sulit pemerintah menjadikan Jusuf Kalla harus maju membela keputusan itu seperti kebijakan kenaikan harga BBM karena kenaikan harga minyak dunia, dukungan pemerintah RI terhadap Resolusi PBB terhadap Nuklir Iran, atau kebijakan import beras. Hal-hal seperti membuat hubungan Jusuf Kalla dengan fungsionaris partai di DPP menjadi tidak nyaman.³⁰⁸

Dalam Partai Golkar bermunculan komunikator yang kadang bertentangan dengan ketua umum seperti pada Yuddy Chrisnandi³⁰⁹, atau Priyo Budi Santoso.³¹⁰ Yuddy merasa dirinya sering berhadapan dengan Jusuf Kalla karena sikapnya yang berseberangan dengan Partai Golkar untuk beberapa kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM, Resolusi PBB untuk Iran dan import beras, dimana Yuddi karena sikap berseberangannya sempat mendapat teguran dari DPP. Yuddi sendiri kemudian merasa bahwa ada orang tertentu yang memosisikan dirinya berhadapan dengan ketua umum.³¹¹ Sementara Priyo Budi Santoso juga merasa kewalahan dalam

³⁰⁶ A. Suruji (ed), Jusuf Kalla the "Real" President, (Jakarta: JK untuk Indonesia, 2009), 3-9

³⁰⁷ Pernyataan ini ditulis oleh Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way.

³⁰⁸ Wawancara dengan Yuddy Chrisnandi, Juli 2010.

³⁰⁹ Yuddy Chrisnandi kemudian berpindah ke partai Hanura, kepindahannya ke partai sempalan Golkar ini, wawancara dengan Yuddy Chrisnandi Kamis, Juli 2010.

³¹⁰ Priyo adalah ketua fraksi Partai Golkar yang menggantikan Andi Mattalata selepas tahun 2007. Andi sendiri menggantikan Hamid Awaluddin yang diangkat sebagai Dubes Rusia.

³¹¹ Yuddi sendiri kemudian maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada munas Partai Golkar di Pekan Baru, Riau, tetapi hanya mendapat 1 dukungan suara. Mengenai kekalahan yuddi lihat Memoir tiga kekalahan dari Indra Jaya Piliang, Meniti Ombak, Memoar Tiga Kekalahan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), 444-478.

membela berbagai pernyataan ketua umum dan beberapa kali ia mengeluhkan kepada ketua umum bahwa pilihan Jusuf Kalla yang berani maju di depan untuk mengumumkan kebijakan kontroversial pemerintah menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi Partai Golkar. Tetapi keluhan itu dijawab Jusuf Kalla bahwa sebagai seorang pemimpin ia berani mengambil resiko.³¹² Ini artinya bahwa tipe komunikasi Jusuf Kalla telah memunculkan komunikator lain di dalam Partai Golkar yang menyampaikan pesan yang berbeda dalam Partai Golkar yang menjadikan energi komunikasi politik dalam Partai Golkar terpecah, hal ini terjadi karena Jusuf Kalla menjadi ketua umum demi kepentingan stabilitas pemerintahan SBY-Jusuf Kalla.³¹³

Pada level vertikal dengan DPD baik tingkat I atau II, Jusuf Kalla juga kurang efektif dalam berhubungan karena batasan protokoler kepresidenan sehingga kunjungan ke setiap DPD berlangsung singkat. Sementara wakil ketua umum, meski bisa menggantikan peran ketua umum tidak bisa secara penuh memuaskan pengurus DPD.³¹⁴ Di sisi lain, secara psikologis Wakil Ketua Umum merasa sungkan jika memainkan peran Ketua Umum secara penuh.³¹⁵ Sementara Jusuf Kalla dalam berkomunikasi dengan DPD tidak dapat mengakrabkan diri dengan DPD dilakukan Akbar Tandjung pada masanya yang dikenal sebagai ketua umum yang tinggi kepeduliannya kepada dengan hal kecil dari urusan kepartaian seperti kesekretariatan dan sebagai.³¹⁶

c. Motivasi

Jabatan wakil presiden memang sudah diincar Jusuf Kalla ketika masuk sebagai pengurus DPP Partai Golkar dengan alasan itu adalah jabatan yang paling mungkin dicapainya

³¹² Sebagai seorang negarawan, Jusuf Kalla memang cukup baik, tetapi sebagai ketua umum keputusan Jusuf Kalla dalam setiap kebijakan yang kontroversial menjadi kontraproduktif bagi partai, wawancara Priyo Budi Santoso, Juli dan Agustus 2010. Keberanian menghadapi gempuran opini publik ini juga diungkapkan oleh Jusuf Kalla sebagai sikap yang harus dia ambil, wawancara dengan Jusuf Kalla, Juli 2010.

³¹³ "Tujuan partai itu kan untuk tujuan negara" ungkapan ini selalu diungkapkan oleh Jusuf Kalla dalam pelbagai kesempatan, wawancara Jusuf Kalla, Juli 2010.

³¹⁴ Wawancara dengan Aburizal Bakrie, Agustus 2010.

³¹⁵ "Meskipun saya gantikan tetapi saya merasa tidak enak kalau terus-terusan menggantikan peran Ketua Umum," wawancara dengan Agung Laksono, Agustus 2010.

³¹⁶ Jusuf Kalla tidak seperti Akbar Tandjung yang selalu memberi "uang" kepada para pengurus DPD, bahkan Akbar Tandjung dapat mengakrabkan dirinya dengan DPD II, hal yang tidak bisa dilakukan Jusuf Kalla, DPP harus berhemat dalam melakukan kunjungan ke daerah-daerah karena Jusuf Kalla tidak ingin ada salah satu pengurusnya yang masuk penjara gara-gara korupsi. Wawancara Soemarsono (Juli), nampaknya Soemarsono merasakan sisa iklim Akbar Tandjung pada DPD-DPD.

secara politik dan secara personal ia sanggup menjalaninya.³¹⁷ Posisi itu dianggapnya sebagai sesuatu yang strategis karena posisi wakil presiden sejajar dengan presiden karena keduanya dipilih secara bersama-sama. Sedangkan jabatan ketua umum Partai Golkar dicapainya setelah menjadi wakil presiden sehingga ini membedakannya dalam karakter kepemimpinannya di partai yaitu jabatan ketua umum digunakan untuk melandasi kekuatan jabatannya sebagai wakil presiden.³¹⁸

Partai Golkar merupakan partai yang paling solid di tengah partai-partai yang saling berebut pengaruh dan terpecah belah sehingga melahirkan beberapa -partai baru. Partai Golkar juga bukan partai yang tidak mengandalkan figur, anti sektarian, dan anti regionalisme, sehingga benar-benar siap menjadi partai modern dengan mengedepankan ideologi kekaryaan. Pembuktian sebagai partai modern dengan keterlibatannya dalam setiap agenda reformasi dan membuktikan dengan perolehan suara yang signifikan dalam dua pemilu di era reformasi.³¹⁹ Partai ini dilihat sebagai partai yang paling solid ditengah riuhnya keterbelahan partai-partai lain dan Golkar mendapat keuntungan dengan timbulnya perpecahan partai-partai tersebut.³²⁰ Kekukuhannya sebagai organisasi politik dibuktikan Jusuf Kalla sebagai ketua umum dalam mengkoordinasikan setiap komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, sehingga tidak ada komunikator lain yang menyalahi dia dari tujuannya memimpin partai politik itu. Namun begitu karena motivasi dari ketua umum hanya sebagai pendukung pemerintah maka ini menjadikan tidak optimal memberdayakan potensi yang ada dalam Partai Golkar, sebagai akibatnya menimbulkan ketidakefektifan dalam hubungannya dengan DPP dan DPD untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Ini berdampak pada menghasilkan kekalahan dalam Pemilu 2009.³²¹ Jusuf Kalla tidak pernah berpikir bahwa ia akan berpisah dengan SBY.

Jika kita melihat kategori kepemimpinan dari jejak karier baik politik atau ekonomi, Jusuf Kalla adalah sosok yang muncul pada saat situasi krisis. Pada saat menangani usaha dari orang tua ia justru menjadikan usahanya itu menanjak.

³¹⁷ Lihat wawancara Jusuf Kalla dengan Kompas dengan judul, "Semua Capres Tahu Apa Masalah Bangsa Indonesia," Kompas, 24 Juni 2004, 60.

³¹⁸ Wawancara dengan Andi Mattalata Juli 2010.

³¹⁹ "Parpol Rusuh, Golkar Makin Kukuh," Kompas, Sabtu, 07 Mei 2005, 39.

³²⁰ Sukardi Rinakit, "Politik 'no free lunch'", Kompas, Sabtu, 07 Mei 2005, 44.

³²¹ Wawancara dengan Bahtiar Ali, Juli 2010.

Meski demikian ia tidak pada level sebagai pemimpin kharismatik seperti Soekarno misalnya. Dan Nimmo mengkategorikannya sebagai pemimpin yang muncul dari sebab krisis tetapi jika dari karakter jejak politiknya Jusuf Kalla adalah sosok pemimpin yang begitu loyal dengan tugasnya. Jika merujuk pada karakter pemimpin ala Dan Nimmo, Jusuf Kalla merupakan karakter pemimpin yang muncul karena tugasnya. Karakter seperti ini nampaknya cukup baik pada saat ia dicalonkan sebagai wakil presiden.

2. Level Kelompok

Pada level kelompok, komunikasi yang terjadi pada lingkaran elit mulai terpecah karena adanya perselisihan kepentingan. Elit partai Golkar merasa pesan-pesan yang disampaikan oleh Kalla kepada publik ternyata justru kontraproduktif. Disharmoni antar komunikator muncul pada isu pencalonan dalam Pilpres 2009. Pada isu ini kental sekali perselisihan kepentingan baik dari sisi Kalla sebagai ketua umum ataupun Golkar sebagai bagian dari koalisi. Partai Golkar berada dalam kebimbangan antara apakah Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat atau tidak. Terutama pada saat munculnya pernyataan Ahmad Mubarak yang memicu reaksi pengurus DPD Partai Golkar.³²² Posisi Partai Golkar saat itu dilematis ketika sebagai partai yang mendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla di pemerintahan tapi di sisi lain sering merasa dijadikan bumper terhadap setiap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Partai Golkar juga dianggap tidak pernah mendapat porsi dalam pemerintahan yang sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan. Sementara citra partai di hadapan publik melemah karena statusnya sebagai bumper itu.

Pernyataan Ahmad Mubarak tentang bahwa Golkar hanya mendapatkan suara 2,5 persen terlanjur membuat marah para pengurus Partai Golkar sehingga memaksa Jusuf Kalla untuk maju menjadi calon presiden. Pertimbangannya, dengan majunya Jusuf Kalla maka martabat Partai Golkar sebagai pemenang pemilu dapat dipertahankan.³²³ Namun begitu aspirasi tersebut tidak satu irama karena terdapat kelompok yang menginginkan Golkar tetap berduet dengan Partai Demokrat dengan tidak memajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden karena sosoknya memiliki keterpilihan yang kecil

³²² Karena pernyataannya ini Partai Demokrat harus mengklarifikasi pernyataan wakil ketua umum tersebut. Lihat "Nama di Kantong Ki Lurah Sebelum Mangkat", Laporan Utama Majalah Tempo, 22 Februari

³²³ Wawancara Tempo dengan Jusuf Kalla lihat "Jusuf Kalla: "Saya Harus Siap", Majalah Tempo, 8 Maret 2009.

dalam sejumlah survei. Kelompok ketiga adalah mereka yang menginginkan Jusuf Kalla tetap mendampingi SBY dengan alasan mereka bisa menjamin stabilitas nasional dan kelanjutan momentum pembangunan yang dinilai telah berjalan baik.³²⁴

Dorongan untuk maju sebagai calon presiden dari pengurus DPD tidak membuat Jusuf Kalla bersungguh-sungguh maju sebagai calon, tetapi tetap mempertahankan agar duetnya dengan SBY dipertahankan. Institut Lembang Sembilan sebagai lembaga think tank Jusuf Kalla melihat ada upaya untuk memisahkan pasangan ini. Institusi ini menggunakan media cetak tabloid negarawan yang dicetak 100 ribu eksemplar sebagai saluran dari pesan pentingnya pasangan SBY-Jusuf Kalla dipertahankan.³²⁵

Sementara itu terdapat beberapa orang di Golkar yang menginginkan pasangan SBY-Jusuf Kalla tidak lagi bersatu, antara lain Akbar Tandjung yang mencoba beberapa kali berhubungan dengan SBY dan menjajagi kemungkinan mengajukan diri menjadi wakil presiden. Kemunculan Akbar Tandjung ini menjadikan konstelasi komunikator di Partai Golkar menjadi tidak satu irama lagi. Di luar partai pun sesungguhnya ada beberapa kemungkinan tentang dipasangkannya Jusuf Kalla dengan Hidayat Nur Wahid.³²⁶ Langkah ini membutuhkan energi yang besar karena menyasarkan fokus yang beragam sementara energi itu kurang dimiliki Partai Golkar setelah berusaha menjaga partainya tidak mengambil langkah "cari setoran" sebagaimana biasa dilakukan.

Pada masa-masa selanjutnya Jusuf Kalla lebih gencar menjajagi kemungkinan koalisi dengan partai lain seperti dengan Megawati Soekarnapoetri. Pertemuan keduanya ini difasilitasi Surya Paloh dan menghasilkan kontrak politik yang berisi perlunya pemerintahan yang kuat dari parlemen, penyamaan platform di bidang ekonomi, dan komitmen menyukseskan Pemilu 2009.³²⁷ Upaya yang dilakukan Surya Paloh ini adalah kelanjutan dari pertemuan dua ketua dewan penasihat Golkar dan PDI-P yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Medan.

Bagi beberapa elit Partai Golkar sendiri sesungguhnya

³²⁴ "Politik Dua Kaki Saudagar Bugis" dalam Majalah Tempo, 8 Maret 2009.

³²⁵ "Hikayat Jarum Mengumpulkan Benang" dalam Majalah Tempo, 8 Maret 2009.

³²⁶ "Para Penunggu Pengantin Cerai" dalam Majalah Tempo, 8 Maret 2009.

³²⁷ "Kesepakatan Nasi Goreng", dalam Majalah Tempo 22 Maret 2009.

masih berharap koalisi itu terus berlanjut. Nampaknya langkah yang dilakukan Jusuf Kalla dalam penjajagan dengan pihak lain ini sebagai komunikasi politik yang tidak diniatkan sebagai konsolidasi dukungannya untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Pada bulan April setelah kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu dengan kemenangan seperlima kursi kabinet, justru kemudian Jusuf Kalla berbalik mendekati Partai Demokrat. Kenyataan ini nampak di bulan Mei bahwa Jusuf Kalla meminta kepastian SBY apakah koalisi ini dipertahankan atau tidak.³²⁸ Artinya, sesungguhnya sejak Februari 2009 komunikasi politik Partai Golkar yang dilakukan Jusuf Kalla memang tidak diniatkan untuk maju sebagai calon presiden, karena masih mengharap tetap berkoalisi dengan SBY.

Pada akhirnya Partai Golkar dalam Rapimnassus di Hotel Borobudur pada 23 April 2009 membahas empat kemungkinan: (1) Golkar berkoalisi dengan Demokrat dan mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. (2) Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menyodorkan tiga, lima, atau tujuh nama kader Golkar untuk calon wakil presiden yang dalam Rapimnas bulan Oktober ada tujuh nama calon presiden yang masuk daftar. Mereka adalah Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono (Wakil Ketua Umum), Surya Paloh (Ketua Dewan Penasehat), Sri Sultan Hamengku Buwono X (anggota Dewan Penasehat), Aburizal Bakrie (anggota Dewan Penasehat), dan Fadel Muhammad (Ketua DPD Golkar Gorontalo). Mereka ini akan dibawa ke Yudhoyono untuk disaring dan pilihan sepenuhnya diserahkan kepada SBY. Ketiga, Golkar berkoalisi dengan PDI-Perjuangan; dan keempat Golkar maju sendiri mencalonkan presiden.

Dengan melihat kepada hal ini saja maka segera dapat disebut bahwa Partai Golkar dalam komunikasi politiknya justru tidak konsisten dalam hal pilihan sikap. Inkonsistensi ini terjadi karena tidak tegasnya sikap ketua umum yang justru menuai kritikan pula dari pengurus yang awalnya mendukungnya.³²⁹ Sikap yang tidak tegas Jusuf Kalla ini menyebabkan kejengkelan sehingga melahirkan aspirasi bahwa calon presiden bisa muncul tidak melulu dari ketua umum dan Sri

³²⁸ "Kalla: Golkar jadi 'Bumper'", Kompas, Minggu, 3 Mei 2009. 1.

³²⁹ Terdapat ungkapan ataupun sindiran dari pelbagai pengurus ketika diketahui bahwa Partai Golkar hanya mencapai suara 14,5%. Lihat "Koalisi Balik Lagi" Majalah Tempo, 29 Maret 2009. Tetapi, inkonsistensi dukungan ini pun nampaknya menunjukkan bahwa dalam Partai Golkar justru terdapat orang-orang yang sengaja menjerumuskan Jusuf Kalla dalam keputusan yang keliru, yakni keputusan untuk maju sebagai calon presiden. Wawancara dengan Yuddy Chrisnandi, 2 juli 2010.

Sultan Hamengku Buwono X secara terang-terangan menyatakan agar Golkar sudah menyebutkan calon presiden. Tentang hal ini banyak pengurus meminta kepada Jusuf Kalla agar menyebut diri sebagai calon presiden demi membuat soliditas Partai Golkar, tetapi sekali lagi, garis besar dari message dari komunikasi politik Partai Golkar berposisi sebagai partai pendukung pemerintah.³³⁰ Sementara bagi fungsionaris Partai Golkar lebih melihat pada martabat dan energi partai. Anehnya justru ini dianggap sesuatu yang menggosokkan orang-orang di sekitar Jusuf Kalla yang berkepentingan untuk mempertahankan duet SBY-Jusuf Kalla.³³¹ Pasalnya, Jusuf Kalla dianggap hanya siap sebagai wakil presiden sehingga terdapat kino-kino seperti SOKSI, MKGR, atau beberapa organisasi sayap seperti AMPI dan Hasta Karya yang mengusulkan nama selain Jusuf Kalla sebagai capres, yakni Sultan Hamengku Buwono X. Kondisi ini justru menunjukkan Partai Golkar sedang mengalami kekisruhan organisasi, karena meskipun bisa dilihat sebagai demokrasi internal tetapi seharusnya tidak melampaui aturan main dengan kebebasan bertindak atau berbicara semaunya. Fenomena ini juga merupakan perseteruan antara realis dan ortodoksis. Dalam hal ini Jusuf Kalla adalah seorang realistik dengan keadaan dirinya yang tidak bisa menembus realitas sosial budaya masyarakat Indonesia, sedang pengusung Sultan Hamengku Buwono X adalah ortodoksis yang melihat bahwa partai politik harus maju mencalonkan diri sebagai calon presiden.³³²

Pada Rapimnas itu kemudian muncul nama yang diusulkan DPD yang menjadi bakal calon presiden. Jusuf Kalla tentu yang paling banyak dicalonkan, selain itu ada nama Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Sultan Hamengku Buwono X, juga Syamsul Muarif, Priyo Budi Santosa, dan Akbar Tandjung juga berkeinginan maju sebagai bakal calon presiden. Nama-nama bakal calon presiden ini juga disebutkan oleh organisasi

³³⁰ Yuddi Chrisnandi mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu (yang lainnya adalah Zaenal Bintang) yang mengatakan kepada Jusuf Kalla untuk menyebutkan bahwa dirinya adalah calon presiden, tetapi Jusuf Kalla secara pribadi merasa tidak enak karena itu akan mengganggu kinerja kepresidenan, hubungan dengan SBY sebagai presiden akan terganggu sementara tiap hari Jusuf Kalla bertemu dengan SBY. Wawancara dengan Yuddy Chrisnandi, 2 Juli 2010.

³³¹ "Isu Capres Hangat di Rapim Golkar: Demokrat Belum Cari Pasangan Yudhoyono", Kompas, Selasa, 14 Oktober 2008. Jusuf Kalla sendiri sudah menerima pinangan Partai Demokrat pada 28 September untuk melanjutkan pemerintah koalisi Demokrat dan Golkar. lihat, "Pemilu Presiden: Kalla Akan Bersaing dengan Sultan," Kompas, Jum'at, 10 Oktober 2008. 5.

³³² Ikrar Nusa Bakti, "GOnjang-Ganjing Partai Golkar," Harian Kompas, 16 Oktober 2008.

sayap, seperti MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) yang menyebut Akbar Tandjung dan Priyo Budi Santoso. Kemudian AMPI, Majelis Dakwah Islamiyah, dan Satkar menyebut Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie. Adapun Gabungan Karyawan Indonesia mengusulkan Jusuf Kalla, Endriartono Sutanto, dan Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu dengan bakal calon wakil presiden Fadel Muhammad, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan SBY.³³³

Sebagai komprominya dalam Rapimnas IV, isu pencalonan presiden ditetapkan mengacu pada Rapimnas III yakni setelah melihat hasil pemilu legislatif.³³⁴ Dalam rapimnas ini Partai Golkar menyatakan siap untuk berkolasi secara permanen jangka panjang dengan partai politik lain atas dasar komitmen bersama yang kuat dan kokoh. Pernyataan ini untuk dapat terus menjalin hubungan dengan partai-partai politik yang sebelumnya pernah dijalin seperti dengan PDIP, juga yang kemudian membuka hubungan dengan PKS seperti yang telah diungkapkan di atas.³³⁵ Melalui bantuan lembaga survei, Partai Golkar menjaring nama-nama bakal calon presiden yang bisa dijadikan calon presiden dan nama-nama itu adalah Jusuf Kalla dan Sultan Hamengku Buwono X.³³⁶

Keinginan untuk menentukan capres dari Golkar ini membuat SBY pada saat membuka Rapimnas itu meminta agar Golkar dalam menentukan koalisi tepat pada waktunya. Ungkapan ini sebenarnya menunjukkan tentang kekhawatirannya sebagai pasangan duet Jusuf Kalla.³³⁷ Jusuf Kalla sendiri meyakinkan SBY bahwa dirinya tidak akan cepat-cepat untuk mengumumkan diri sebagai calon presiden untuk menjaga harmonisasi pemerintahan.³³⁸

Selepas Rapimnas, Jusuf Kalla mengadakan interaksi dengan PDI-P saat berkunjung ke Sukoharjo, Jawa Tengah,

³³³ "Kalla Bakal Bertarung Lagi Dengan Akbar: Sebut Capres Tidak Terbendung", Kompas, Minggu, 19 oktober 2008, 1.

³³⁴ "Rapimnas Golkar: Penetapan Capres Unggu Hasil Pemilu Legislatif", Harian Kompas, 20 Oktober 2008, 1.

³³⁵ "Partai Politik: PDIP Tetap Ajak Golkar Berkoalisi," Harian Kompas, 20 Oktober 2008, 4.

³³⁶ "Golkar Incar Kursi RI-1: Tanpa Koalisi Partai Menengah Sulit Usung Capres", Harian Kompas, 21 oktober 2008.

³³⁷ "Rapimnas: Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya," Harian Kompas, 18 oktober 2008, 1.

³³⁸ Suhartono, "Golkar Jaga Keutuhan Pemerintah" dalam Harian Kompas, 25 oktober 2008, 4.

dalam rangka mengajak bersama-sama menaikan perolehan suara partai.³³⁹ Dari pihak Partai Demokrat melihat bahwa apa yang dilakukan Partai Golkar itu adalah wacana yang dikembangkan oleh mereka belaka dan tidak memiliki kekuatan relevansi dalam pemilu 2009. Sementara bagi J. Kristiadi hubungan Golkar dengan PDIP adalah hubungan yang tidak masuk akal yang artinya hanya akan memunculkan lagi cara lama yaitu tawar-menawar kekuasaan.³⁴⁰ Dengan demikian artinya komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar selama ini hanya akan membawa partai kepada perilaku politik kartel yang menekankan kepada bagi-bagi kekuasaan.

Munculnya Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengajukan diri sebagai bakal calon presiden menuntut energi tersendiri yang harus dikeluarkannya sebab jika ia menyerahkan energi itu kepada Partai Golkar maka itu akan menjadi akumulasi energi dari Partai Golkar dalam memenangkan pemilu. Sultan akan maju meski tidak menggunakan Partai Golkar, yang pada berikutnya ia mewakili Partai Republik Nusantara yang dipimpin Muslim Abdurrahman dengan dukungan dari daerah NTT, Sumatera Utara, dan DIY.³⁴¹ Citra Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja Jawa yang didukung elemen non-Jawa ini menarik perhatian tokoh partai lain seperti dari Megawati Soekarnoputri.³⁴²

Dalam hal ini Sultan tidak dilihat sebagai tokoh Golkar, tetapi dilihat sebagai tokoh kultural yang memiliki peran dalam proses reformasi 12 tahun lalu. Pendekatan Megawati kepada Sultan seperti reuni Deklarasi Ciganjur, dan Sultan adalah calon yang paling kuat untuk mendampingi Megawati sehingga memunculkan jargon di PDI-P dengan akronim "Mega-Buwono".³⁴³ Sayangnya, Sultan Hamengku Buwono X sendiri menargetkan menjadi calon presiden sehingga tawaran PDI-P pun bertepuk sebelah tangan.³⁴⁴

³³⁹ "Golkar dan PDI-P Ingin Maju Bersama Pada Pemilu 2009: Golkar Bakal "dikeroyok" Parpol Lain," dalam *Harian Kompas*, 27 Oktober 2008, 5.

³⁴⁰ "SBY-JK Sampai 2009: diragukan Golkar dan PDIP Maju Bersama," *Harian Kompas*, Selasa, 28 oktober 2008. 5.

³⁴¹ "Tak Keluar Dari Golkar : 'Sultan HB X: Ubah Paradigma'," *Harian Kompas*, 16 November 2008, 2. Partai Republikan ini mencoba untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dan PDI-P, lihat "Partai Republikan Ingin Berkoalisi dengan Golkar," *Harian Kompas*, 27 november 2008. 5.

³⁴² "Megawati Jajaki dengan Sultan: Dinamika Parpol Tentukan Pencalonan," *Harian Kompas*, 12 november 2008, 4

³⁴³ "Setelah Perjamuan di Keraton Kilen," *Majalah Tempo*, 8 Februari 2009.

³⁴⁴ Wawancara *Majalah Tempo* dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam "Saya Calon Presiden, Bukan Calon Wapres", *Majalah Tempo*, 8 Februari 2009.

Dari pemaparan di atas maka bisa dilihat bahwa Partai Golkar telah mengeluarkan begitu banyak energi untuk komunikasi politiknya. Kekuatan-kekuatan dalam partai itu dikeluarkan untuk hal yang kemudian memecah-belah konsentrasi dan kekuatan Golkar.³⁴⁵ Pecahnya konsentrasi itu nampak pada wacana apakah ketua umum akan maju sebagai capres atau calon wapres, sementara di sisi lain terdapat tokoh partai yang mendeklarasikan diri siap menjadi calon presiden. Selain itu Jusuf Kalla adalah juga berhadapan dengan faksi Akbar Tandjung.

Akbar Tandjung sendiri muncul di tengah keputusan Rapimnassus di Hotel Borobudur yang mencalonkan Jusuf Kalla sebagai presiden. Ia merupakan orang yang selalu mengatakan kepada publik agar wacana SBY-Jusuf Kalla dihentikan³⁴⁶, kepentingannya agar dirinya menjadi kandidat calon wakil presiden. Kepentingan ini tampak ketika Partai Golkar kemudian menentukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden, dimana Akbar Tandjung dan pendukungnya mengadakan rapat tandingan. Kekuatan Akbar ini didukung oleh sekelompok dari pengurus Partai Golkar yang menginginkan agar koalisi Golkar- Demokrat tetap dipertahankan dan Akbar Tandjung berharap dirinya sebagai wakil presiden menggantikan Jusuf Kalla. Alasan yang diajukan, peroleh suara Partai Golkar tidak mencapai target yang diharap yakni 30% sehingga Akbar Tandjung mengatakan bahwa hendaknya Partai Golkar tetap bergandengan dengan Partai Demokrat. Ia menggalang kekuatan melalui DPD tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, dan Maluku. Akbar Tandjung juga meminta restu kepada para ulama NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Habib Muhammad Luthfi (Pekalongan), Kiai Muzakki Syah (Jember), ataupun Kiai Maktum Hannan (Babakan Ciwaringin, Jawa Barat) dan para ulama tersebut adalah guru spiritual SBY. Akbar Tandjung juga mendapatkan dukungan dari sesepuh Golkar seperti Sulasikin Moerpratomo dan Oetojo Usman saat bertemu dengan SBY.

Tokoh-tokoh Golkar yang muncul untuk menjadikan dirinya sebagai calon presiden pada awalnya berharap bisa maju melalui konvensi seperti yang pernah diadakan pada

³⁴⁵ Sebagaimana diungkapkan Rully Chairul Azwar bahwa para tokoh Golkar yang maju melalui partai lain dinilai tidak etis, yang paling baik adalah tokoh tersebut memperkuat Partai Golkar. Lihat, "Tidak Etis Kader Partai Golkar Gunakan Parpol Lain," Harian Suara Karya, Kamis 11 Desember 2008.

³⁴⁶ "Wacana SBY-JK Sebaiknya Dihentikan", Harian Kompas, 13 februari 2008. 2

kepemimpinan Akbar Tandjung. Tapi bagi Jusuf Kalla, penyelenggaraan konvensi itu menuntut biaya yang mahal dan politik uang sehingga yang penting dilakukan adalah menjaring aspirasi DPD melalui mekanisme survei yang ongkosnya lebih murah dibandingkan dengan konvensi.³⁴⁷ Terlebih lagi, menurutnya, konvensi juga belum tentu menghasilkan calon presiden yang populer di mara rakyat. Ini berkaca dari hasil konvensi sebelumnya dimana Wiranto yang berhasil menang di konvensi justru tidak lolos pada putaran pertama. Ketiadaan konvensi ini disesalkan Akbar Tandjung dan menganggapnya sebagai satu langkah mundur.³⁴⁸

Munculnya kekuatan-kekuatan di Golkar ini menunjukkan bahwa partai ini telah mengeluarkan energi yang begitu besar yang sebenarnya tidak terfokus pada sasaran utama memenangkan Partai Golkar dalam Pilpres 9 Juli 2009. Jusuf Kalla sebagai ketua umum nampaknya tidak berhasil mengelola berbagai kekuatan dalam Partai Golkar karena mereka saling bersaing. Ini terjadi di antaranya karena Jusuf Kalla sebenarnya terjebak dalam faksionalisme yang ada pada Partai Golkar yang mewarnai hubungan antar elit partai yang muncul sejak awal reformasi. Ia sendiri bukan yang pertama dalam mengelola konflik faksionalisme ini dan Akbar Tandjung lah yang pertama gagal mengelola konflik tersebut. Faksionalisme ini juga yang mengganggu efektivitas komunikasi politik kepada DPP, DPD dan kino-kino di Golkar.

Pada pemilu presiden, terpecahnya konsentrasi kekuatan komunikator Partai Golkar terlihat jelas sekali. Fahmi Idris merasakan hal itu dimana beberapa orang Golkar yang seharusnya menjadi komunikator dalam Pilpres ternyata tidak fokus pada penguatan kinerja komunikasi politik partai dalam mendukung kemenangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.³⁴⁹ Menurut Bahtiar Ali, terdapat tiga kategori elit Partai Golkar dalam hal sikap; (1) tetap habis-habisan mendukung Jusuf Kalla, (2) kelompok elit yang menyeberang dan mendukung seteru Golkar, dan (3) yang bersikap wait and see. Bagi mereka yang mendukung Jusuf Kalla didasarkan pada pertimbangan

³⁴⁷ Wawancara dengan Jusuf Kalla, 27 Juli 2010. Rully menceritakan bahwa konvensi adalah cara Partai Golkar pada waktu itu untuk menaikkan popularitas partai tersebut yang ketua umumnya terjerat kasus Buloggate II. Wawancara dengan Rully Chairul Azwar.

³⁴⁸ Akbar berharap dengan adanya konvensi dia akan dapat ikut konvensi tersebut, lihat, "Akbar Tandjung Sebenarnya Tetap Berniat Maju Pada Pilpres 2009," harian Kompas, 12 Januari 2008, 2

³⁴⁹ "Kika kamu (Linda) sebutkan siapa dari pengurus Partai Golkar, saya bisa tahu dia ada di barisan kita atau bukan," wawancara Fahmi Idris, Juli 2010.

kesetiaan kepada Partai Golkar.³⁵⁰ Sedangkan bagi yang menyeberang memiliki pertimbangan realistis dengan melihat popularitas maupun dukungan dana yang jauh berbeda di Partai Golkar.³⁵¹ Sementara yang bersikap menunggu masih melihat Jusuf Kalla sebagai figur ketua umum tetapi juga melihat realitas dari kekuatan dari lawan Golkar.³⁵² Hal ini yang membuat Fahmi Idris yang berkedudukan sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilpres sangat kecewa karena menurutnya kekalahan Golkar lebih dikarenakan oleh elit partai sendiri yang tidak loyal kepada platform partai.³⁵³

3. Level Organisasi

a. Internal

Pada level internal, kepemimpinan Kalla mencoba menjaga efektivitas kinerja organisasi, diadakan jabatan yang dapat menutupi kekurangan peran dari ketua umum, yakni wakil ketua umum. Agung Laksono sebagai wakil ketua umum yang juga merangkap sebagai ketua umum DPR RI diharapkan dapat menutupi sedikitnya waktu yang dimiliki oleh Kalla sebagai wakil Presiden. "Tetapi, sosok wakil ketua umum tidak memadai kehadirannya bagi pengurus di daerah," demikian diakui oleh Laksono.³⁵⁴ Kehadiran fisik sosok ketua umum dalam kepemimpinan organisasi ternyata dibutuhkan sehingga kehadiran wakil ketua umum tidak begitu berdampak baik dalam organisasi.³⁵⁵

Kalla sesungguhnya menyadari bahwa dalam kepemimpinan kehadirannya secara fisik sangat dibutuhkan oleh konstituennya. Untuk menyiasatinya ia hadir secara rutin kepada pengurus daerah tingkat satu.

"Sayangnya, dalam kunjungannya tersebut. Pak JK

³⁵⁰ Wawancara Bahtiar Ali, Juli 2010.

³⁵¹ "Beberapa saran dan masukan yang saya berikan tidak bisa dilaksanakan karena kita tidak ada hepeng", Wawancara dengan Bahtiar Ali, Juli 2010.

³⁵² "kamu bisa bayangkan sorenya kita rapat untuk tim sukses pak Jusuf Kalla, malamnya mereka rapat untuk tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono. Wawancara dengan Fahmi Idris, juli 2010.

³⁵³ "Fahmi Idris: Para Tokoh Berpengaruh Tak Mendukung Jusuf Kalla" Wawancara Majalah Tempo, Majalah Tempo 26 Juli 2010.

³⁵⁴ Wawancara dengan Agung Laksono, Agustus 2010.

³⁵⁵ Hal ini dirasakan pula oleh Aburizal Bakrie yang kini menjabat sebagai ketua umum, meskipun memiliki dua orang wakil ketua umum dia merasa harus tetap datang mengunjungi secara fisik. Wawancara Aburizal Bakrie, Juli 2010.

hanya hadir sebentar saja. Sak nyuk, saknyuk, ini berbeda dengan pak akbar tandjung yang bisa sampai menginap. Kalau kita tidak bisa menginap karena dibatasi oleh protokoler.”³⁵⁶

Rangkap jabatan sebagai wakil presiden dan ketua umum ternyata membatasi pula hubungannya sebagai ketua umum dengan pengurus-pengurus di bawahnya. Hal ini juga bisa dilihat bagaimana rangkap jabatan wakil presiden dan ketua umum juga ternyata menyebabkan pelaksanaan program partai pun tidak optimal.

Partai Golkar mencoba untuk konsisten sebagai partai yang sedang membersihkan diri dari citra ke-Orde-Baru-annya untuk menjadi partai yang modern. Untuk hal ini Jusuf Kalla di awal kepemimpinannya meminta kepada seluruh anggota DPR Fraksi Golkar untuk tidak menggunakan posisinya sebagai wakil presiden untuk mencari-cari proyek dengan alasan untuk memberi setoran pada partai. Bagi Jusuf Kalla antara politik dan dagang harus dipisahkan, "...Berdagang itu baik, politik juga baik. Yang tidak baik itu memperdagangkan politik.”³⁵⁷ Pernyataan Kalla tersebut menunjukkan agar para politisi Partai Golkar fokus pada program kerja. Dalam beberapa kesempatan rapat intern partai Jusuf Kalla selalu mengingatkan agar pengurus tidak memanfaatkan posisinya sebagai wakil presiden. "Oleh karena itu, DPP dan DPD tidak bregerak dalam kerangka otoriter, tetapi dalam kerangka pelaksanaan tujuan. Apabila DPP dan DPD mengambil tindakan-tindakan atau koreksi- koreksi haruslah berdasarkan tujuan dan AD/ART yang dimiliki partai.”³⁵⁸

b. Program-Program Partai Golkar

i. Garis Besar Program

Bagi partai politik, program merupakan sebuah acuan untuk menentukan langkah apa yang seharusnya dilakukan di masa mendatang. Dalam perspektif komunikasi, program yang digariskan merupakan suatu batas dan jangkauan tindakan yang ditentukan pelaku komunikasi, dalam hal ini partai

³⁵⁶ Wawancara Soemarsono, Juni 2010.

³⁵⁷ "Kalla Larang anggota F-PG Cari 'Setoran' Partai" , dalam Kompas, Selasa, 11 Januari 2005. 8.

³⁵⁸ "Parpol Tidak Baik Perdagangkan Politik", dalam Kompas, Minggu, 30 Januari 2005. 3.

politik. Program juga berupa garis besar dari seluruh pesan politik yang disampaikan pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga bawah, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif. Dengan begitu partai dilihat sebagai organisme politik yang program-programnya merupakan software dari penggerak partai politik tersebut.

Program dari partai tersebut dilaksanakan dalam sebuah jargon yang disebut Trisukses. Penggunaan istilah ini adalah cara untuk memberikan kemudahan pada kader pada setiap pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat luas.

Inti dari seluruh program Partai Golkar adalah membawa semangat menyukseskan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla 2004-2009. Seluruh tindakan komunikasi partai merupakan perwujudan dari sokongan kepada keberlangsungan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Hal ini yang selalu diungkapkan Jusuf Kalla, bahwa kepentingan partai politik bermuara pada kepentingan rakyat. Dan pernyataan ini yang kemudian disampaikan kepada anggota Golkar baik dalam forum Golkar maupun forum kenegaraan.³⁵⁹ Hal berikutnya adalah dalam merumuskan program, Partai Golkar tetap konsisten pada lajur proses reformasi yang perannya telah diikuti partai pada masa Akbar Tandjung.

Partai Golkar merumuskan program partai tersebut dengan nama Tri Sukses.³⁶⁰ Dalam budaya organisasi penggunaan istilah sebagai judul program yang dirancang adalah sebuah syarat mudah untuk diingat para anggota organisasi sehingga dapat memudahkan konsolidasi bagi partai bersangkutan. Tri sukses yang disukseskan Partai Golkar itu berisi:

1. Sukses Konsolidasi dan pengembangan Partai Golkar.
2. Sukses Reformasi Pembangunan
3. Sukses Pilkada Dan Pemilu 2009

Program pertama memiliki sasaran, bahwa Partai

³⁵⁹ Wawancara dengan Jusuf Kalla, 8 Juli 2010.

³⁶⁰ Penggunaan istilah Tri Sukses terdapat keserupaan dari cara berpikir dari kepengurusan Jusuf Kalla-Soemarsono dengan istilah pancasukses dari kepengurusan Akbar Tandjung- Budi Harsono.

Golkar adalah semakin mantap dalam kehidupan organisasi partai dalam mengembangkan pembinaan anggota, kaderisasi, dan kelembagaan yang dilandasi wawasan idiil, kebangsaan dan karya-kekaryaannya.

Program pertama ini diwujudkan dengan upaya untuk terus memperkokoh kesetiaan Partai Golkar kepada Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga tegaknya dan utuhnya NKRI, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideologi perjuangan Partai Golkar, dan meningkatkan kesadaran tentang moral, etik dan keteladanan. Pada bidang Konsolidasi Wawasan, program yang dicanangkan adalah: Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara serta memantapkan wawasan pembaharuan dan kemajuan, menuju percepatan kebangkitan Indonesia; Memantapkan wawasan kesinambungan dengan semua perubahan kehidupan bernegara yang terjadi di masa lalu dan dinamika yang terjadi di masa mendatang; dan Mengembangkan wawasan global dalam perspektif nasional. Sedangkan pada Konsolidasi Organisasi mencakup; pembinaan keanggotaan, kaderisasi dan kelembagaan program dengan memperluas keanggotaan, memperbaiki sistem, administrasi dan pendataan keanggotaan dan memantapkan pola rekrutmen anggota.³⁶¹ Sedangkan dalam Bidang Kaderisasi partai ini mengembangkan sistem kaderisasi demi menjamin kesinambungan cita-cita perjuangan partai dengan memantapkan pola perekrutan kader dalam menjamin terbuka kesempatan kader dari berbagai sumber dan lapisan masyarakat; mengembangkan kualitas kompetensi kader dalam menghidupi dan merespon berbagai masalah dalam meperkuat keberadaan Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat; memantapkan pengelolaan lembaga kader menjadi lembaga modern profesional; memantapkan pendayagunaan kader secara efektif dalam berbagai pranata di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta membangun sistem informasi dan jaringan kader secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan pada program Bidang Kelembagaan antara lain memantapkan peran dan fungsi kelembagaan organisasi yang bersifat vertikal dan horizontal; dan

³⁶¹ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009. 5.

meningkatkan sarana dan prarana organisasi; mengembangkan pengelolaan partai sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern.³⁶²

Jika melihat pada isi dari garis program di atas maka dapat dilihat bahwa Partai Golkar masih memiliki mental sebagai partai penguasa yang menjaga kesinambungan dan konsistensi pada nilai-nilai semangat berdirinya Golkar yang bersetia kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi yang diusung oleh penguasa Orde Baru.³⁶³ Landasan langkah Partai Golkar ini digunakan sebagai pedoman dari perubahan yang tengah berlangsung pada sistem politik partai sehingga Golkar menjadi partai yang tetap mengakar di bumi tetapi tinggi menjulang dan menaungi kehidupan politik Indonesia. Dengan bersandar kepada moral dan etik yang demikian itu Partai Golkar dapat melewati proses reformasi dengan melampaui seluruh tekanan yang dialami baik yang bersifat psikologis, sosiologis, politis, maupun fisik paska lengsernya Soeharto.³⁶⁴

Pada sukses keduanya, Partai Golkar ingin terlibat dalam menyukseskan proses reformasi yang dituliskan dengan sukses reformasi pembangunan.³⁶⁵ Dengan suksesnya reformasi pembangunan ini maka Indonesia akan kembali bangkit dan menjadi macan asia seperti pernah dialami pada era 1990-an. Dalam upaya kebangkitan Partai Golkar maka program yang disasar adalah program politik dan demokrasi; hukum dan HAM; perhatanan dan keamanan; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; agama, pendidikan dan pengembangan SDM; penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pada bidang politik dan demokrasi, Partai Golkar

³⁶² DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009. 5.

³⁶³ Untuk melihat semangat Golkar lihat bab satu dari buku David Reeve, *Golkar of Indonesia: an Alternative for Party System* (Singapore: Oxford University Press, 1985), 2-33.

³⁶⁴ Tentang bagaimana Partai Golkar mempertahankan diri pada awal era reformasi bisa lihat pada uraian Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik era Transisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 40-120

³⁶⁵ Konsep pembangunan merupakan konsep yang tidak pernah hilang dari Partai Golkar, karena kata pembangunan merupakan istilah yang lekat dengan semangat kekaryaannya dari Partai Golkar.

memantapkan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dasar negara, serta menempatkan UUD 1945 sebagai landasan pembangunan sistem politik; mengembangkan sistem kelembagaan melalui peningkatan kualitas pemilihan umum, pemilihan pejabat publik dan peningkatan partisipasi politik rakyat dalam sistem kepemimpinan nasional; mengembangkan budaya politik yang demokratis, terbuka untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat di segala bidang; meningkatkan kebebasan pers dan hak memperoleh informasi dalam rangka pendidikan politik; memantapkan kualitas peranan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.³⁶⁶

Sementara pada bidang hukum, HAM, pertahanan dan keamanan, Partai Golkar antara lain memperbaiki substansi hukum serta mengembangkan budaya hukum melalui peningkatan advokasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum; meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM melalui pemantapan fungsi, peran lembaga yang bergerak dalam advokasi, penegakan HAM serta mendorong penyelesaian pelanggaran HAM melalui proses hukum; meningkatkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme antara lain melalui pendaftaran kekayaan pejabat negara, pembayaran tertib pajak, memperkuat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); memantapkan eksistensi NKRI melalui upaya penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah nasional dan menjaga keselamatan bangsa; mendorong pemantapan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penegakan hukum.³⁶⁷ Dari program ini dapat dilihat bahwa Partai Golkar merupakan partai yang secara konsisten ikut terus dalam penyuksesan reformasi pembangunan. Titik tekan pada gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme selalu diungkapkan pada Ketua Umum Partai Golkar dalam setiap kesempatan saluran penyampaian pesan kepada pengurus Partai Golkar.

³⁶⁶ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Laporan Umum. 7.

³⁶⁷ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Laporan Umum. 7.

Hal ini karena partai ini pada masa kepengurusan Jusuf Kalla dibelit banyak sekali kasus korupsi yang sesungguhnya terjadi pada masa kepengurusan sebelumnya (mengenai hal ini akan dibahas di sub bab berikutnya).

Program bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah dengan mendorong pemantapan kebijakan dasar pembangunan ekonomi yang ditujukan agar kesejahteraan yang ditujukan agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Kedua mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran internasional; meningkatkan peran ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UKM, koperasi dan usaha mikro merupakan sarana utama dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan; mendorong peningkatan pembangunan pedesaan dan daerah tertinggal melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pedesaan, pengembangan jaringan ekonomi pedesaan dan antara ekonomi pedesaan dengan daerah perkotaan serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah; mendorong upaya pengurangan pengangguran melalui percepatan lapangan kerja, penyelenggaraan pendidikan keterampilan bagi calon pekerja, pengembangan pasar kerja aktif, dan perbaikan manajemen tenaga kerja Indonesia; mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan gizi anak, revitalisasi peran puskesmas dan pemantapan perencanaan KB; mendorong upaya pengentasan kemiskinan, melalui peningkatan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, pengembangan program pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan subsidi langsung pendidikan dan kesehatan dan peningkatan ketahanan pangan.³⁶⁸

Program di atas merupakan program yang kemudian diwujudkan oleh pemerintahan SBY-Jusuf Kalla melalui pelaksanaan program karitatif yang dijalankan di pelbagai bidang seperti kesehatan

³⁶⁸ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009. Buku I Laporan Umum, 8.

dengan adanya Jamkesmas, bantuan operasi sekolah, sertifikasi guru, sumbangan langsung tunai, bantuan raskin. Program-program ini lebih tegas lagi berjalan pada masa Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie yang dirancang melalui tiga kluster yakni program usaha, program pemberdayaan, dan program sosial.³⁶⁹ Sayangnya pada program yang diselenggarakan dipegang oleh menteri dari Partai Golkar tersebut (Aburizal Bakrie). ”

Padahal waktu itu kita (Partai Golkar) dan Pak SBY bersepakat untuk berbagi dengan demokrat, padahal kalau itu dimanfaatkan berapa banyak kader Golkar yang terlibat dalam program tersebut,”

Bakrie melihat bahwa program-program tersebut tidak dimanfaatkan oleh ketua umum Partai Golkar sehingga tidak membawa manfaat apapun pada peroleh suara pemilu legislatif 2009.

Partai Golkar dalam menetapkan programnya sebagai partai yang mendukung tujuan-tujuan reformasi yang menitik-tekankan pada isu HAM yang selama ini menjadi isu yang cukup penting sejak awal reformasi. Sedangkan isu hukum, pertahanan dan keamanan menjadi perhatian Partai Golkar berkaitan dengan perubahan struktur politik nasional terutama berkaitan dengan peran TNI/Polri dalam politik nasional. Isu ini merupakan isu yang menjadi perselisihan kepentingan karena kemudian ada banyak kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.

Dalam program tata kelola pemerintahan, Partai Golkar melakukan pemantapan posisi dan peran penyelenggara negara untuk meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, peningkatan pelayanan publik serta penciptaan kesetaraan akses publik atas informasi; mendorong perwujudan kebijakan pemerintah/publik yang berpihak pada kepentingan rakyat melalui perbaikan mekanisme penetapan kebijakan publik yang lebih transparan dan demokratis; mendorong perwujudan

³⁶⁹ Wawancara dengan Aburizal Bakrie, 7 Agustus 2010.

kelembagaan pemerintah yang profesional dan bersih dari KKN melalui pemantapan kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas PNS.³⁷⁰

Sukses ketiga adalah sukses Pilkada adalah sasaran keberhasilan Partai Golkar dalam Pilkada ataupun Pemilu 2009. Upaya Golkar memperjuangkan para kadernya untuk menduduki berbagai jabatan politik melalui pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia; berhasilnya Partai Golkar memenangkan kembali pemilu legislatif 2009 dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya di lembaga-lembaga perwakilan sebagai wahana memperjuangkan aspirasi rakyat; berhasilnya Partai Golkar memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden 2009.³⁷¹

Program yang dilakukan adalah memantapkan mekanisme penentuan calon kepala daerah yang akan diusulkan Partai Golkar; memantapkan mekanisme penentuan koalisi partai politik di masing-masing daerah yang ditujukan untuk memenangkan calon kepala daerah dari Partai Golkar; memantapkan peran lembaga pemenang pemilu Partai Golkar dalam menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah; memantapkan pemetaan politik dan evaluasi serta monitoring setiap tahapan pemilihan kepala daerah.

Program dalam rangka sukses pemilu legislatif 2009 antara lain melakukan kajian atas UU Politik untuk memantapkan strategi kemenangan pemilu legislatif; menyusun dan memantapkan rencana operasi kemenangan pemilu legislatif;

³⁷⁰ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 9.

³⁷¹ Pada buku materi rakernas yang diadakan pada bulan maret 2009, Partai Golkar belum mengambil ancangan bahwa akan memajukan calon presiden karena baru memenangkan pilpres 2004, dalam buku materi rakernas I 2005 yang dikeluarkan oleh Setjen DPP Partai Golkar. Sedangkan pada Buku Materi Rapimnas I baru dituliskan tentang bagaimana Partai Golkar menyempurnakan sistem pelaksanaan Konvensi Calon Presiden 2009 dari Partai Golkar secara terpadu, efisien, efektif dan berdayaguna sekaligus bertujuan untuk menjaring simpatik masyarakat pemilih. Buku materi rapimnas I 2005, 20.

menyusun dan memantapkan kriteria penentuan calon legislatif pada semua tingkata; menyusun dan memantapkan pendidikan untuk calon legislatif; menyusun dan mengevaluasi peta politik nasional dan daerah; memantapkan peran Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar.³⁷²

Program dalam rangka sukses pemilihan presiden 2009 antara lain melakukan kajian tentang UU Pemilu Presiden dan wakil presiden untuk memantapkan strategi pemenangan pemilihan presiden; menyusun mekanisme rekuritmen pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar; menjajagi kemungkinan koalisi dengan partai lain untuk memenangkan pasangan calon presiden/wakil presiden dari Partai Golkar menyusun strategi pemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden dari Partai Golkar seperti strategi peningkatan citra, popularitas dan akseptabilitas; melakukan kajian terhadap perilaku pemilih pada Pemilu 2009.³⁷³

Sebagai catatan dari tiga program utama (Trisukses) Partai Golkar tersebut terdapat program yang dirancang pada Rapimnassus setelah Partai Golkar tidak lagi bersama-sama dengan Partai Demokrat memajukan lagi pasangan SBY- Jusuf Kalla, yakni pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon presiden berpasangan dengan Wiranto sebagai calon wakil presidennya. Pada Rapimnassus ini Partai Golkar menambahkan satu target lagi yaitu program pemenangan Partai Golkar dalam Pilpres 2009.³⁷⁴

ii. Pelaksanaan Program

Pada pelaksanaan program, sebagaimana dijelaskan skema di atas, bahwa program tersebut

³⁷² DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 9.

³⁷³ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 9.

³⁷⁴ Pada buku materi Rakernas yang diadakan pada bulan maret 2009, Partai Golkar belum mengambil ancangan bahwa akan memajukan calon presiden karena baru memenangkan Pilpres 2004, dalam buku materi Rakernas I 2005 yang dikeluarkan oleh Setjen DPP Partai Golkar. Sedangkan pada buku materi Rapimnas I baru dituliskan tentang bagaimana Partai Golkar menyempurnakan sistem pelaksanaan Konvensi Nasional untuk menjaring calon presiden/wakil presiden untuk pemilu 2009 dari Partai Golkar secara terpadu, efisien, efektif dan berdayaguna sekaligus bertujuan untuk menjaring simpati masyarakat pemilih. Buku materi Rapimnas I 2005, 20.

merupakan perwujudan dari visi dan misi dari partai bersangkutan. Maka dalam pelaksanaan program, yang pertama dilakukan adalah melakukan konsolidasi landasan idiil dan wawasan. Dalam menyelenggarakan landasan idiil dan wawasan Partai Golkar mengembangkan ideologi Pancasila dan kenusantaraan yang menjadi acuan dalam merespons berbagai isu di bidang politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan HAM, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelesaian masalah Aceh adalah wujud nyata kontribusi dari Partai Golkar.³⁷⁵ Konsolidasi idiil dan wawasan ini kemudian menjadi ruh serta dilaksanakan secara terintegrasi dengan konsolidasi kelembagaan.

Internal

Pembiayaan Yang Terbatas

Pembiayaan partai politik merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Partai politik merupakan institusi yang tidak memiliki tradisi transparansi sehingga sering pembiayaannya didapatkan dari sumber-sumber yang tidak jelas status hukumnya terkadang diperoleh melalui institusi pemerintahan yang menyediakan dana non-bujeter. Hal inilah yang menjadi partai politik rentan terjadi korupsi.

Dalam kondisi tersebut Kalla memesankan kepada pengurus pusat agar tidak memanfaatkan jabatannya sebagai wakil presiden.

"Pada masa pengurusan saya tidak ada satupun pengurus yang terkena kasus korupsi, kalau mau 'nyari duit' jangan mengatasnamakan Partai Golkar. Kalau masuk kantung sendiri, kita tidak bisa melarang. Waktu itu pendanaannya berasal dari kantung beberapa pengurus, kita tidak pernah nambil dari sumber lainnya."³⁷⁶

ungkapan Kalla membandingkan beberapa kader Partai Golkar yang mendapatkan masalah pidana korupsi. Himbauan Kalla ini menimbulkan keluhan dari pengurus. Sebagaimana juga dikatakan oleh Andi Mattalata

³⁷⁵ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 11.

³⁷⁶ Wawancara Jusuf Kalla Juni 2010.

”banyak pengurus waktu itu mengeluh kepada saya (sebagai Ketua Fraksi di PG). Saya katakan kepada mereka, ‘ya, sebenarnya dana yang ada cukup, asal kita bisa aja berhematnya.”

Akibatnya, beberapa program yang dilaksanakan Partai Golkar kurang optimal.

Keanggotaan

Dalam program internal salah satu yang dilakukan adalah konsolidasi organisasi dengan memantapkan organisasi keanggotaan. Pendataan anggota, secara komunikasi bisa untuk memastikan jumlah anggota maka partai bisa mengetahui berapa potensi yang dimiliki. Dengan begitu dapat diketahui daya kapasitas yang dimiliki dalam menjalankan program-program yang dicanangkan. Pendataan dilakukan dengan terpusat di DPP Partai Golkar dengan melibatkan jenjang partai di daerah. Proses awal pendataan anggota dilakukan oleh DPD Partai Golkar kabupaten/kota melalui sistem satuan administrasi pangkal (SATMINKAL). Dengan adanya desentralisasi administrasi keanggotaan ke DPD Kabupaten maka terjadi penyederhanaan penomoran dari sebelumnya 13 digit menjadi 11 digit sehingga secara otomatis dalam pendataan tersebut terjadi pendaftaran. Tetapi kemudian dalam pendaftaran ulang ini Partai Golkar melakukan kerja sama dengan asuransi dari BRI melalui program BRIngin Life dimana kerja sama dapat menarik minat dari masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Partai Golkar.³⁷⁷

Berdasarkan hasil pendataan dari DPD dicatatkan bahwa kader Partai Golkar berjumlah 5.642.855 orang dengan KTA, sementara kader non-KTA tercatat 4.376.535 orang. Namun demikian pendataan kader itu tidak mencakup seluruh DPD dikarenakan ada beberapa DPD yang belum melaporkannya seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Papua.³⁷⁸ Dari kosongnya pada beberapa DPD ini saja menunjukkan bahwa Partai Golkar masih memiliki ruang ketidakpastian yang cukup luas.

³⁷⁷ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku II Laporan Pelaksanaan Korbid, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009), 17.

³⁷⁸ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 13.

Sedangkan untuk kader partai, DPP menargetkan bertambah 2,5 juta orang kader. Dengan perincian sebagai berikut:

Kader Umum (Kader Struktural dan Kader Fungsional):

Kabupaten	:	770.000 orang
Propinsi	:	330.000 orang
Nasional	:	5.000 orang
<u>Karakterdes</u>	:	<u>1.400.000 orang +</u>
Total	:	2.500.000 orang
kader khusus	:	100.000 orang.

Dengan demikian artinya Partai Golkar memiliki sebanyak 2,6 juta anggota yang siap menjadikan partai ini menang dalam pemilu legislatif. Selain itu juga kader merupakan tenaga inti dan komponen utama penggerak partai yang perlu terus dibina, dikembangkan, dan didayagunakan guna memperkuat posisi dan peran partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu Partai Golkar pun melakukan perkaderan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan karena kaderlah yang kelak akan menjadi komunikator kepada masyarakat luas demi menggalang dukungan suara untuk pemilu.³⁷⁹

Sesuai dengan jenis perkaderan, DPP Partai Golkar dan seluruh jajaran partai melaksanakan perkaderan umum, perkaderan khusus dan perkaderan teritorial. Perkaderan umum dilaksanakan dalam bentuk Diklat Instruktur (TOT), Orientasi Fungsionairs dan Diklat Karsinal. Sementara perkaderan khusus dilaksanakan melalui diklat pengembangan profesi masyarakat, diklat pengembangan kapasitas dan diklat peningkatan ketrampilan. Adapun perkaderan teritorial dilaksanakan dalam bentuk karakter desa.³⁸⁰

Pendidikan pelatihan yang dilakukan itu terdiri dari 17 diklat training of trainers dengan program-program sebagai berikut.³⁸¹

³⁷⁹ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 13.

³⁸⁰ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 15.

³⁸¹ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku III Laporan Pelaksanaan Program Organisasi Sayap, Badan, Lembaga,

1. Pembentukan LPK DPP Partai Golkar dan LPK DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pendidikan dan Latihan Training of Trainers Kader Struktural.
3. Pendidikan dan Latihan Training of Trainers Kader Fungsional.
4. Pendidikan dan Latihan Training of Trainers PKPM , kegiatan ini merupakan
5. Pelaksanaan Diklat Orientasi Fungsionaris, diklat ini merupakan kegiatan diklat yang khusus digunakan untuk mempersiapkan para fungsionaris sebelum ditugaskan ke daerah konstituen secara simultan di seluruh Indonesia melalui program penugasan fungsionaris. Pada diklat inilah kemudian Partai Golkar sudah menysar pada bagaimana merumuskan strategi dalam kemenangan pemilu. Selain juga pada diklat ini terdapat materi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi maupun kesejahteraan rakyat.
6. Pendidikan dan pelatihan kader fungsional mahasiswa, diklat ini dimaksudkan untuk mendekatkan Partai Golkar kepada para mahasiswa sehingga mengubah wawasan mahasiswa tentang Golkar sehingga pesan-pesan politik Partai Golkar sampai kepada mahasiswa. Perkaderan fungsional mahasiswa dipandang sangat strategis karena sejak tahun 1998 hingga 2007, kelompok mahasiswa masih memberi kritik yang tidak beralasan, bahkan ada sebagian mahasiswa yang secara terang-terangan bersikap tidak senang dan anti Golkar.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Perempuan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Diknaspota (Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga).
9. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Nakertrans (Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
10. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional PU (Pekerjaan Umum) dan PERA (Perumahan Rakyat).
11. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Telkominfo (Telekomunikasi dan Informasi).

12. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Bakumham (badan Hukum dan Hak Asasi Manusia).
13. Pendidikan Politik Kader Bangsa, SOKSI.
14. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Pemuda, KOSGORO 1957.
15. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Pemuda, AMPI.
16. Pendidikan dan Pelatihan Kader Fungsional Ulama, MDI
17. Pendidikan dan Latihan Relawan Indonesia, AMPG.

Nomor 6 hingga 12 adalah pendidikan yang diberikan kepada kordinator bidang yang ada dalam Partai Golkar sedang nomor 13-17 diberikan kepada organisasi sayap Golkar.

Dari seluruh kegiatan itu Partai Golkar telah mencetak kader sebanyak hampir tiga juta, yang berarti melebihi dari target semula yakni 2,5 juta. Rincian kader pada tingkat nasional dan tingkat daerah itu sebagai berikut:

Perkaderan Tingkat Nasional	
Diklat Instruktur Nasional (TOT)	: 617 orang
Orientasi Fungsionaris	: 1.419 orang
Perkaderan Fungsional	: 3.252 orang
PKPM	: 651 orang
Perkaderan Tingkat Daerah	
TOT dan Orientasi Fungsionaris	: 256.849 orang
Perkaderan Fungsional	: 554.145 orang
PKPM	: 98.106 orang
<u>Diklat Karakterdes</u>	<u>: 1.987.561 orang</u>
Total	2.902.600 orang

Menurut Syamsu Maarif, program ini tidak sepenuhnya berjalan karena dalam melakukan pendataan, konsep ini hanya berlangsung diatas kertas saja, karena DPP kemudian tidak memberi sokongan dana yang sesungguhnya cukup murah.³⁸² Sedangkan Yuddhi sendiri melihat bahwa laporan tersebut hanya laporan ABS (asal Bapak Senang) yang diberikan oleh para pengurus

³⁸² Wawancara dengan Syamsu Muarif (mantan Ketua Korbid OKK DPP Partai Golkar), 29 Juli 2010.

daerah.³⁸³

Para kader yang telah dicetak itu kemudian dimasukkan dalam data untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan perkaderan partai. Dengan data valid pendayagunaan kader maka akan terhindar dari unsur like and dislike. Ini sangat penting guna melihat bagaimana strategi marketing partai dalam rangka mendukung upaya kemenangan pemilu. Dalam melakukan pendataan, Partai Golkar menerapkan sistem database kader (SDK) yang disusun pada jumlah kader per provinsi dengan memperlihatkan grafik jumlah kader, input data kader, edit data kader, dan pencarian data kader.³⁸⁴ Sayangnya, tidak setiap DPD memiliki infrastruktur IT yang memadai sehingga sebagai alternatifnya oleh DPP dikeluarkan kebijakan penyusunan daftar riwayat hidup.

Kelembagaan

Secara kelembagaan Partai Golkar melakukan pembinaan secara struktural vertikal. Konsolidasi ini dilakukan dimulai dari DPD tingkat I hingga tingkat yang paling bawah yakni pimpinan desa/kelurahan secara berjenjang. Selain itu Partai Golkar melakukan pembinaan pada organisasi sayap yang disebut pembinaan jalur horizontal.

Pembinaan kelembagaan ini terdiri dari pembinaan struktur organisasi dengan pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah kepengurusan, pelibatan dalam kegiatan nasional atau tingkatan di atasnya, peningkatan kapasitas personalia, dan pengembangan sistem administrasi kepengurusan. Dalam pelibatan DPD, pengambilan keputusan pada tingkat nasional Partai Golkar dilakukan melalui Rapimnas, Rakernas, dan rapat konsultasi dan rapat koordinasi bidang. Sedangkan peningkatan pendayagunaan struktur DPD dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah daerah dan penyelesaian kasus kasus kepengurusan DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota, termasuk pengisian

³⁸³ Wawancara dengan Yuddi Chrisnandi, Juli 2010.

³⁸⁴ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 18. Sayangnya sistem data base kader yang demikian tidak dapat diakses sembarangan orang. Tetapi jika menurut Syamsul Muarif seharusnya pendataan itu dilakukan berdasarkan pada tingkat kabupaten bukan pada tingkat provinsi. Wawancara dengan Syamsul Muarif, 29 Juli 2010.

jabatan antar waktu yang lowong. Mekanisme yang dilakukan ini adalah cara Partai Golkar mengelola konflik yang dipastikan muncul dalam keorganisasian.³⁸⁵ Sebagai panduan setiap tindakan organisasi dari setiap tingkat itu, DPP menerbitkan PO (peraturan organisasi), Juknis (petunjuk teknis), Juklak (petunjuk pelaksanaan). Seluruh permasalahan diselesaikan melalui apa yang dinamakan juklak dan juknis.³⁸⁶

Sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2009 Partai Golkar memantapkan konsolidasi di tingkat desa/kelurahan melalui Juklak Nomor 19 yakni dengan merevitalisir Pokkar. Ini dilakukan untuk menginventarisir pembentukan Pokkar, mempercepat pembentukan Pokkar di TPS-TPS yang belum memiliki Pokkar, mendinamisasikan kegiatan-kegiatan Pokkar dengan memberikan tugas-tugas yang spesifik agar Partai Golkar dapat secara efektif meraih dukungan pemilih pada Pemilu 2009. Sampai akhir 2008, Pokkar yang telah terbentuk berjumlah 1.320.776 buah.³⁸⁷

Dalam menjalankan program-program tersebut ditemui kendala yaitu aktivitas fungsionaris OKK pada berbagai tingkat relatif terbatas karena tugas utamanya memang bukan di Partai Golkar. Kedua, adanya kendala integrasi perencanaan antara bidang OKK dengan bidang-bidang lainnya yang sering sulit diwujudkan. Ketiga, implementasi rencana kerja masih dihadapkan keterbatasan sumber daya organisasi terutama pada aspek pembiayaan. Keempat, sistem informasi kader belum dapat diwujudkan secara sempurna karena terbatasnya sarana pengolahan data kader di daerah utamanya di tingkat kabupaten.³⁸⁸

³⁸⁵ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 22.

³⁸⁶ Konflik yang cukup menonjol pada masa kepengurusan Jusuf Kalla adalah konflik yang berkaitan dengan Pilkada konflik yang terjadi pada Pilkada adalah adanya mekanisme penjangkaran bakal calon yang berasal dari tokoh masyarakat daerah tempat pilkada dilangsungkan melalui survey popularitas dan elektabilitas. Tetapi, sering terjadi ketua DPD tersebut merasa dirinya mampu sehingga kemudian, dia maju, sedangkan tokoh yang diinginkan akhirnya menggunakan kendaraan partai lainnya (hal ini akan dijelaskan pada bab V). Wawancara dengan Soemarsono 8 Juli 2010 dan Fahmi Idris 13 Juli 2010

³⁸⁷ Menurut Yuddy Chrisnandi, jumlah itu sesungguhnya hanya ada dalam catatan kertas. Itu hanya laporan ABS yang diberikan oleh pengurus DPD agar pimpinan DPP senang dengan kinerja dari DPD di bawah. Wawancara dengan Yuddy Chrisnandi, 2 Juli 2010.

³⁸⁸ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 22.

Pelaksanaan program internal yang kurang optimal ini menunjukkan pengelolaan partai yang kurang optimal disebabkan fokus ketua umum lebih dominan pada pemerintahan.

Eksternal

Setelah Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar maka pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat dukungan politik dari lembaga legislatif/DPR. Dalam DPR Partai Golkar memperoleh 156 kursi sebagai perwakilan dari 21,5% suara yang mereka dapat dalam pemilu 2004. Dengan tambahan dukungan ini pemerintah akan dengan mudah membuat kebijakan.

Dalam hal ini Partai Golkar mau tidak mau harus menempatkan diri sebagai penahan terhadap kritikan yang disampaikan oleh dari luar pemerintah, sehingga situasi ini menimbulkan kontraproduktif bagi Partai Golkar terutama untuk isu-isu yang berakibat buruk bagi Partai Golkar (hal ini akan dibahas pada bab V). Dari sisi efektivitas pemerintahan juga kenyataan ini justru menjadi blunder karena pada kelanjutannya cukup banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah yang dinilai kontroversial. Kondisi ini dapat dibaca sebagai penumpukan kekuasaan yang begitu besar sehingga menyebabkan hubungan SBY dan Jusuf Kalla terkadang ada muatan ketegangan-ketegangan, terutama berkaitan dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa kader Partai Golkar.³⁸⁹

Di sisi lain juga penumpukan kekuasaan pada sector ekonomi dan politik menjadikan Jusuf Kalla menjadi leluasa mengontrol roda pemerintahan.³⁹⁰ Realitas kekuatan Partai Golkar pada tahun 2004 cukup kuat mengingat separuh dari gubernur dan kepala daerah tingkat II merupakan para ketua DPD Partai Golkar sehingga kenyataan ini membuat posisi partai baik di pusat ataupun di daerah cukup besar dan sangat dominan dalam mengendalikan pemerintahan.³⁹¹ Sadar dengan

³⁸⁹ Muhamad Qodari, "Kembalinya Tradisi Golkar", dalam Kompas, Selasa 21 Desember 2004, 4.

³⁹⁰ Riswandha Imawan, "Bola Liar Munas VII Golkar," Kompas, Senin, 20 Desember 2004, 4. meskipun Imawan memprediksikan kontrol Jusuf Kalla atas pemerintahan terbukti, ada yang tidak terbukti yakni Golkar dapat menjadikan kontrolnya tersebut sebagai mesin pendulang suara, pada kenyataannya suara Golkar pada pemilu 2009 merosot tajam menjadi hanya 13,8%.

³⁹¹ Dominasi Partai Golkar dalam pemerintahan SBY-JK tampak pada munculnya surat

kekuatan yang dimiliki itu maka salah seorang fungsionaris, Burhanuddin Napitupulu, seolah memberi syarat bahwa Partai Golkar akan bersedia menyebut dirinya sebagai pendukung pemerintah jika benar-benar diberi peran yang cukup besar dalam kabinet. Menurut Napitupulu porsi yang diberikan Golkar selama ini belum sepadan dengan dukungan yang diberikan. Jumlah kader Golkar yang duduk di kabinet menurutnya belum mencukupi, bahkan terdapat kader Golkar tidak berasal dari Golkar tetapi dianggap sebagai profesional.³⁹² Dari pernyataan tersebut tampak bahwa Partai Golkar tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah yang seharusnya mendapatkan porsi lebih dalam pemerintah SBY-Jusuf Kalla.

Hubungan dalam Koalisi

Pesan komunikasi politik Partai Golkar yang disampaikan pada level eksternal pada sublevel hubungan koalisi adalah pada peran fraksi Partai Golkar. DPP menata lagi hubungan Partai Golkar dengan pemerintah, mengingat sebelumnya mereka menyatakan sebagai oposisi sebagaimana dicetuskan Akbar Tandjung dengan melanjutkan kerja sama dengan PDI-P dalam Koalisi Kebangsaan.³⁹³ Tetapi setelah Jusuf Kalla menjabat sebagai ketua umum maka orientasi partai pun berubah dari oposisi menjadi pendukung pemerintah. Meskipun demikian, Partai Golkar memosisikan sebagai kemitraan sejajar dengan pemerintah sehingga bisa memberi evaluasi terhadap kinerja kabinet.³⁹⁴

Hubungan dalam koalisi yang kemitraan sejajar

keputusan wakil presiden yang secara ketatanegaraan tidak dikenal, demikian juga munculnya surat sakti pada pengusulan jabatan eselon I. lihat, "Soal Surat Sakti Wapres: Ryaas Sesalkan Pernyataan Jusuf Kalla," Kompas, Senin, 18 April 2005, 6.

³⁹² Disebutkan oleh Agung Laksono, bahwa 15 dari 33 gubernur merupakan ketua DPD tingkat Provinsi dan 200-an bupati merupakan ketua DPD tingkat Kabupaten atau Kota, "Dominasi Golkar di Pemerintahan Kian Besar", Kompas, Senin, 03 Januari 2005, 8.

³⁹³ Pernyataan ini diungkapkan Akbar Tandjung setelah kekalahan pasangan Mega-Hasyim pada pilpres putaran kedua. Koalisi Kebangsaan merupakan koalisi yang dibangun untuk mendukung presiden, dalam "Mengikat Banteng di Akar Beringin" Majalah Tempo, 22 Agustus 2004. 98-99. ini disadari pula dalam "Laporan Fraksi Partai Golkar DPR RI Periode 2004-2009" dalam DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku III Laporan Pelaksanaan Program Organisasi Sayap, Badan, Lembaga dan Fraksi Partai Golkar, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009).

³⁹⁴ Ini disampaikan dalam pernyataan politik yang disampaikan pada Rapimnas I tahun 2005 yang disampaikan pada keputusan Rapimnas I Partai Golkar tahun 2005, Nomor: 03/Rapimnas- I/Golkar/XI/2005.

(equal partnership) ini yang di kemudian hari menentukan peran Jusuf Kalla dalam pemerintahan yang begitu dominan. Beberapa kebijakan pemerintah yang kontroversial ini selalu dikaitkan dengan namanya seperti kebijakan perdamaian di Aceh, kenaikan BBM, program PKPS BBM, dan SLT. Terutama program yang dikaitkan dengan Jusuf Kalla itu untuk sesuatu yang negatif sehingga Jusuf Kalla digambarkan sebagai bumper terhadap reaksi dan opini negatif publik. Sementara kemampuan untuk evaluasi kinerja cabinet selanjutnya memunculkan wacana reshuffle kabinet. Wacana ini dimunculkan Fraksi Partai Golkar di DPR dan pada kelanjutaannya reshuffle kabinet memang terjadi. Sebelumnya melakukan hal sebagaimana diuraikan di atas, Fraksi Partai Golkar menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan posisi itu kemudian bergeser saat Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas VII di Bali.³⁹⁵

Posisi yang diambil Fraksi Golkar dalam koalisi bersifat kemitraan sejajar dan dapat mengevaluasi kinerja itu tidak lepas dari posisinya sebagai pemenang Pemilu 2004. Fraksi Golkar dalam bersikap merupakan representasi sikap politik Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Dalam komunikasi politik, posisi Fraksi Golkar adalah komunikator yang akan selalu menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Pesan politik yang disampaikan itu senantiasa bergantung pada isu yang berkembang yang berkaitan dengan kebijakan nasional ataupun isu luar negeri dalam kaitan partisipasi Partai Golkar dalam politik luar negeri bebas aktif. Beberapa isu yang melibatkan Fraksi Golkar sebagai penyampai pesan dari partai adalah sikap mereka tentang hak angket kenaikan harga BBM, angket penyelenggaraan haji 2008 dan angket DPT Pemilu Legislatif dan penolakan Golkar terhadap Perpu Jaring pengaman Sistem Keuangan dan terakhir soal kasus Bank Century.³⁹⁶ Hubungan dalam koalisi ini diperkuat dengan usulan Partai Golkar untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Hal ini dengan pertimbangan untuk memperkuat sistem presidensiil yang selama ini berjalan tidak efektif karena terlalu banyak intervensi dari parlemen. Namun

³⁹⁵ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 32.

³⁹⁶ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 35.

ide pembatasan partai politik ini harus dilakukan dengan demokratis sehingga tidak mengingatkan khalayak pada kebijakan fusi tahun 1978 sehingga Partai Golkar mengusulkan sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai mekanisme membatasi jumlah partai politik melalui seleksi pemilu.³⁹⁷

Dalam pemilu legislatif Partai Golkar menetapkan kepada para calon legislatifnya melalui penetapan suara terbanyak. Penetapan ini merupakan respons terhadap munculnya usulan di kalangan masyarakat mengenai suara terbanyak. Dari Partai Golkar sudah ada aspirasi untuk menerapkan suara terbanyak ini. Meskipun dalam UU Nomor 10 tahun 2008, penetapan calon terpilih didasarkan atas perolehan suara dengan batasan sekurang-kurangnya 25 persen maka artinya yang tidak mencapai 25 persen penempatannya kembali ke nomor urut. Tetapi, Partai Golkar kemudian menetapkan penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak murni.³⁹⁸ Keputusan ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan peranan caleg dalam perolehan suara partai. Meskipun demikian, keputusan ini menjadi pesan politik sendiri bagi publik bahwa Partai Golkar merupakan partai pertama yang menerapkan penetapan calegnya dengan suara terbanyak. Langkah Golkar ini seolah "diikuti" dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon legislatif dengan suara terbanyak. Dengan demikian melalui langkah ini Partai Golkar menuai citra sebagai pioner dalam memperkuat sistem pemilihan berbasis rakyat. Hal ini yang kemudian menjadikan keputusan Partai Golkar ini menjadi keputusan yang biasa.

Pilkada

Pilkada merupakan salah satu arena bagi partai-partai politik untuk bersaing di daerah meski di tingkat pusat mereka mungkin bersekutu. Hal ini yang juga menimbulkan hubungan dengan partai lain juga menghangat.

Berdasarkan Rapimnas I tahun 2005 Golkar pasang

³⁹⁷ Sebagaimana diketahui ada ratusan partai yang berdiri sejak masa reformasi, dan terdapat 48 partai yang menjadi peserta pemilu pada tahun 1999. Jumlah itu terus berkurang pada Pemilu 2004 menjadi 24 partai, tetapi kemudian bertambah lagi pada Pemilu 2009 menjadi 34 partai politik di tingkat nasional, www.kpu.go.id

³⁹⁸ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. 32.

target memenangkan 60% pilkada yang artinya menang sebanyak 179 kabupaten, 36 kota, dan 11 provinsi.³⁹⁹ Target yang dipasang ini bersamaan dengan target yang dipasang PDI-P dengan target 40% dari pilkada langsung, yakni dengan kemenangan pilkada provinsi dan 50 persen pilkada kabupaten/kota.⁴⁰⁰

Itu sebabnya pilkada dianggap sebagai hal yang signifikan karena dapat menentukan strategi kemenangan Pemilu 2009 baik untuk legislatif dan presiden.⁴⁰¹ Dalam Rakernas itu ditetapkan bahwa daerah yang memperoleh suara lebih 50% suara dalam pemilu targetnya adalah kepala daerah, sedang daerah dengan perolehan suara 15-50% targetnya wakil kepala daerah. Untuk pencalonan itu Golkar menetapkan persyaratan calon yang berumur di bawah 65 tahun untuk tingkat provinsi dan di bawah 60 tahun untuk tingkat kabupaten atau kota. Bakal calon yang hendak maju adalah mereka yang memiliki track record kiprah di Golkar dan pengaruhnya di tengah masyarakat dan pencalonan ini berbasiskan pada kompetensi dan penyaringan dahulu.⁴⁰² Jusuf Kalla mengingatkan bahwa reputasi dari figur calon kepala daerah merupakan faktor kunci kemenangan dari pilkada bukan partai politik yang mengajukan.⁴⁰³ Ini dibuktikan dari strategi pilkada di Jambi yang memilih calon gubernur dari partai lain karena lebih disukai masyarakatnya, dan calon Golkar diposisikan sebagai calon wakil gubernur.⁴⁰⁴

Pesaing Partai Golkar dalam arena pilkada adalah Partai Demokrat, meski pada beberapa pilkada Golkar dan Demokrat bersatu seperti di Jakarta dengan mengusung Fauzi Bowo sebagai calon gubernur.⁴⁰⁵ Partai lain yang menjadi pesaing adalah PKS selain Partai Demokrat. Sementara PDI- P atau PPP bukan pesaing karena Demokrat dan PKS adalah partai baru yang muncul di era

³⁹⁹ Buku Materi II, Rapimnas I -2005 Partai Golkar, Partai Golkar 2005. 6.

⁴⁰⁰ "Golkar dan PDI-P Bersaing Kuasai Kepala Daerah", Kompas, 18 April 2005, 8.

⁴⁰¹ "Golkar Anggap PKS dan Partai Demokrat Ancaman," Kompas, 22 Februari 2004. 1. calon kepala daerah yang maju pun diminta komitmennya untuk menjadikan Partai Golkar unggul dalam Pemilu 2009, lihat "Calon Bupati Teken Kontrak Besarkan Golkar", Kompas, Sabtu 28 Mei 2005. 8.

⁴⁰² "Jusuf Kalla: Golkar Makin Solid", Kompas, 7 Juni 2005, 38.

⁴⁰³ "Golkar dan PDI-P Bersaing Kuasai Kepala Daerah", Kompas, 18 April 2005, 8.

⁴⁰⁴ Hal ini menyebabkan perpecahan dalam membulatkan dukungan pasangan calon kepala daerah di jambi. Lihat "Konvensi Cawagub Gagal, Partai Golkar Jambi Pecah", Kompas, Selasa 15 Maret 2005, 33.

⁴⁰⁵ "Mengelus Calon yang Penuh Fulus," Majalah Tempo, 16 Juli 2006, 36-37.

reformasi. PKS merupakan partai baru yang identik dengan jargon sebagai partai bersih sehingga dianggap sebagai pesaing berat di pilkada. Selain itu PKS memiliki basis massa jelas melalui massa pengajian yang terdapat di berbagai perguruan tinggi. Mereka (PKS) juga mendapat kenaikan suara signifikan pada pemilu 2004.

Hasil pemetaan yang dinyatakan dalam publik itu ternyata mendapatkan respons yang salah pengertian dari PKS Soeripto, Ketua Dewan Pakar PKS, menilai bahwa pernyataan ini dilihat sebagai masih adanya pemikiran yang menggunakan paradigma lama dari Partai Golkar sebagai partai warisan Orde Baru. Demikian juga dengan Ketua Umum DPP Pemuda Partai Demokrat, Akbar Faizal. Menurutnya perasaan terancam itu dianggap Akbar Faizal sebagai sikap yang salah karena seharusnya antara Partai Demokrat dan Partai Golkar bekerja sama dalam memenangkan setiap pilkada.⁴⁰⁶

Pada kenyataannya Golkar tidak selalu menganggap partai-partai lainnya sebagai saingannya, setidaknya sebanyak 32,9 % kegiatan pilkada diikuti Golkar dengan berkoalisi partai lainnya. Ini berbeda dengan partai-partai lain yang menjadikan koalisi sebagai strategi dalam mengikuti pilkada. Partai Golkar bersaing dengan PDI-P yang merupakan runner-up Pemilu 2004 dan PDI-P merupakan partai yang memiliki prosentase koalisi tertinggi dibanding Partai Golkar untuk Pulau Jawa. Sedangkan Partai Golkar lebih tinggi tingkat koalisinya di luar Jawa dan Golkar memiliki daya tarik bagi PAN, PKB dan PKS.⁴⁰⁷ Antara PDI-P dan Golkar nampaknya muncul persaingan setelah terjadinya perubahan orientasi Partai Golkar di masa kepemimpinan Jusuf Kalla. Ini karena sebelumnya di masa Akbar Tandjung Partai Golkar berkoalisi dalam PDI-P dalam Koalisi Kebangsaan. Setelah itu PDI-P dan Partai Golkar menjadi poros baru yang saling berlawanan. Dalam keadaan seperti ini Partai Demokrat menjadi partai yang berusaha berdiri di tengah dengan tidak mengambil posisi dalam konstelasi persaingan itu.

Masing-masing daerah pilkada memang memiliki

⁴⁰⁶ "PKS: Golkar Masih Paradigma Lama dan Masih Orde Baru", Kompas, 23 Februari 2005, 6.

⁴⁰⁷ "Menebak Arah Koalisi Parpol Di Pilkada," Kompas, Selasa 26 Juni 2005. 5.

konstelasi yang khas. Pada beberapa daerah Partai Golkar memang berseteru dengan satu partai tetapi di daerah lain menjadi sekutu. Gejala ini menunjukkan bahwa pilkada menjadi arena yang bersifat lokal dari masing-masing partai politik. Seperti Golkar, pada mulanya memperhitungkan Partai Demokrat sebagai partai yang menjadi ancaman dalam pilkada, namun pada Pilkada Jakarta kedua partai itu bekerja sama, termasuk di dalamnya bekerja sama dengan PDI-P. Begitu juga dengan PKS meski di beberapa daerah Partai Golkar menjadikannya sebagai seteru seperti di Depok, Jakarta, Banten, Cilegon, tetapi pada beberapa kasus di luar Jawa keduanya malah bersekutu. Demikian halnya dengan PDI-P, meskipun sebagai oposisi di tingkat pusat tetapi pada beberapa daerah PDI-P berkoalisi dengan Partai Demokrat seperti yang dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ataupun di DKI Jakarta, PDI-P justru memasang calonnya dengan calon dari Partai Golkar. Konstelasi yang demikian rupa menunjukkan partai politik lebih sering mengambil pilihan pragmatis dalam pilkada tersebut.⁴⁰⁸

Meskipun demikian pertarungan Golkar dengan PKS begitu kental, seperti pilkada di beberapa daerah lainnya seperti Depok, Cilegon, Banten, Jakarta, Tangerang, dan beberapa daerah lain. Di Depok, Partai Golkar berseteru hingga harus diselesaikan sampai tingkat MA,⁴⁰⁹ begitu juga dengan beberapa kejadian di Cilegon, Banten dan DKI.⁴¹⁰ Dalam beberapa pilkada yang menang Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain seperti di DKI, Golkar bersama partai-partai koalisi mengusung calon gubernur Fauzi Bowo untuk mengalahkan calon gubernur dari PKS. Demikian juga dengan provinsi Banten, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan beberapa daerah lainnya.

Dari pihak PKS sendiri, Partai Golkar dilihat sebagai partai yang mengandalkan mesin birokrasi dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung.⁴¹¹ Hal ini karena Golkar bukanlah partai yang memiliki basis

⁴⁰⁸ "Parpol Makin Pragmatis: Koalisi Pilkada Pentingkan Interes", Kompas Sabtu 6 Agustus 2005, 3.

⁴⁰⁹ Sengketa pilkada Depok begitu menarik perhatian karena yang bertarung adalah mantan menteri kehutanan era KH Abdurrahman Wahid, Nurmahmudi Ismail, dia juga bekas Presiden Partai Keadilan.

⁴¹⁰ Sidik Purnomo, "Ge(r)geran Wali Koa Depok," Kompas, Selasa, 3 Januari, 2004, 4.

⁴¹¹ "Golkar Masih akan Andalkan Mesin Birokrasi," Kompas, Jumat, 15 April 2005, 8.

massa ideologis sebagaimana PKB yang mengandalkan basis massa NU, PAN dengan massa Muhammadiyah, ataupun PDI-P dengan massa abangannya. PKS sendiri memiliki massa yang solid pada kelompok-kelompok pengajian tarbiyah yang mulai menyebar di berbagai tempat mulai dari kampus perguruan tinggi hingga ke musola kampung. Kemenangan PKS di Depok adalah bukti dari kuatnya pengaruh kader PKS di lingkungan kampus.⁴¹²

Meskipun demikian apa yang ditetapkan dalam strategi pemenangan pilkada tidak seluruhnya berjalan lancar. Pada beberapa daerah Partai Golkar harus mengalami konflik kepentingan. Apalagi yang berkaitan dengan dukungan pengurus pusat dan aspirasi DPD, sebagaimana yang terjadi pada calon kepala daerah di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah basis dari Partai Golkar dimana calon yang didukung DPP, calon incumbent, justru dikalahkan oleh kader Golkar yang maju ke partai lain. Konflik vertikal Partai Golkar terkadang justru membuat partai itu gagal memenangkan pilkada di beberapa tempat seperti di Sulawesi Selatan itu dimana calon yang disetujui oleh DPP dan DPD tingkat satu justru kalah oleh kader Golkar yang maju lewat partai lain.

Sementara itu target 60% kemenangan dalam pilkada tidak terdapat korelasi positif dengan hasil pada pemilu di tingkat pusat sebagaimana terbukti pada Pemilu 2009. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya korelasi positif adalah; pertama, para elite politik Jakarta atau lokal yang bertarung dalam pilkada untuk gubernur, bupati, wali kota, dan di masing-masing wakilnya memang dikenal secara dekat para pemilih di daerah bersangkutan. Sebagian besar dari mereka merupakan putra daerah yang sudah dikenal sebelumnya baik di tingkat daerah atau nasional. Pada level nasional, suka atau tidak suka, hitung-hitungan kedaerahan ini memengaruhi pilihan pemilih untuk memilih kandidat presiden.

Kedua, Jusuf Kalla dalam kaitannya dengan poin yang pertama di atas, lebih sibuk menemui para kader Partai Golkar dan berkampanye mendongkrak dukungan para calon Partai Golkar di luar Jawa, khususnya untuk sebagian daerah Sumatera. Tindakan ini seperti mengingkari kenyataan bahwa penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di Jawa dan Bali. Prioritas untuk daerah itu

⁴¹² Tempo Maret 2006

ternyata menjadi bumerang bagi Jusuf Kalla sehingga hasil Pemilu 2009 suara Golkar merosot. Ketiga, pasangan yang didukung Partai Golkar adalah pasangan campuran dari partai lain sehingga kemenangan dari pilkada itu tidak mewakili seluruh Partai Golkar.

C. Saluran Penyampaian Pesan: Penguasaan pada Level Massa

Saluran komunikasi yang Kalla adalah komunikator utama Partai Golkar yang selalu muncul sebagai pembuat berita (news maker). Keakrabannya dengan kalangan jurnalis membuat sosoknya sebagai wakil presiden yang paling sering muncul di media massa. Jusuf Kalla selalu memelihara hubungan tokoh dan pengurus pelbagai organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Hal ini tidak lepas dari sosok Jusuf Kalla merupakan anak seorang politisi NU di Orde Lama sedang dari ibu dan istrinya memiliki hubungan dengan Muhammadiyah.⁴¹³ Pada level komunikasi massa Jusuf Kalla sering muncul untuk mengumumkan kebijakan pemerintah dalam cara-acara intern Partai Golkar atau acara-acara tertentu yang diselenggarakan kelompok tertentu dan mengundangnya sebagai wakil presiden.

Jika melihat dari karakter saluran komunikasinya, peran Jusuf Kalla sebagai komunikator terbagi menjadi dua yakni sebagai seorang ketua umum dan sebagai wakil presiden. Tetapi dari sekian banyak peran yang dimainkan dalam komunikasinya, ia sangat sedikit yang membawa pesan-pesan Golkar. Jusuf Kalla dalam berkomunikasi lebih kuat membawa pesan pemerintah, bahkan dalam tubuh Golkar sendiri ia ternyata jarang membawa pesan-pesan kepartaian. Sebagai komunikator utama justru Jusuf Kalla lebih menonjol pada bagaimana menyolidkan dukungan Partai Golkar pada kinerja pemerintah. penggunaan saluran komunikasi publik digunakan pada sasaran khalayak seperti Partai Golkar, mahasiswa, pedagang, pengusaha, masyarakat Indonesia di luar negeri dan sebagainya.⁴¹⁴ Saluran komunikasi massa pun sering digunakan Jusuf Kalla saat ia menjadi bumper dalam kebijakan kenaikan BBM, impor beras, dan lainnya. Hal ini menjadi kontraproduktif karena saluran komunikasi yang dibawakan Partai Golkar yang muncul dalam pelbagai isu karena ketidakpuasan partai itu

⁴¹³ Taufik Adi Susilo, 2009, 4-7.

⁴¹⁴ Kodrat Wahyu Dewanto (ed), Jusuf Kalla: berkarya Bagi Bangsa, Bunga Rampai Pandangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pengurus Pusat Badan Informasi dan Komunikasi, 2007. atau lihat dalam kumpulan pidato Jusuf Kalla.

terhadap kebijakan pemerintah seperti dalam isu reshuffle, kenaikan BBM, dan sebagainya.

Saluran komunikasi massa ini didukung oleh komunikasi interpersonal, dan ini cara yang cukup efektif sehingga Jusuf Kalla sebagai komunikator utama sering mengontrol komunikator Partai Golkar di DPR terhadap isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mendatangkan kontroversi.⁴¹⁵ Sebagai akibat dari sistem pemerintahan presidensiil dalam iklim multipartai ekstrim, partai politik di DPR memiliki suara yang sering dapat menghambat jalan pemerintahan, sehingga Jusuf Kalla dalam mengatasi keadaan itu sering menggunakan komunikasi interpersonal dengan partai-partai politik untuk dapat mengontrol komunikator dari partai lain dan sebagai akibatnya ini dapat mereduksi kritik yang muncul di DPR.⁴¹⁶ Penggunaan saluran komunikasi interpersonal juga dilakukan untuk meredam kritik dari kebijakan kenaikan BBM, dengan salah satu upaya pendekatan Jusuf Kalla kepada sesepuh TNI dan mantan Wakil Presiden Try Soetrisno yang tidak setuju dengan kebijakan kenaikan BBM.⁴¹⁷

Sebagai ketua umum partai, Jusuf Kalla jarang melakukan komunikasi interpersonal di level DPD. Jika itupun terjadi ia sering terhambat dengan aturan protokoler yang rumit sehingga pada saluran ini tidak seluruh DPD bisa dikunjunginya sehingga interaksi antara DPP dan DPD tidak terbangun dengan baik.⁴¹⁸ Sementara saluran ini juga kurang diisi dengan baik oleh komunikator utama pengganti yaitu wakil ketua umum Agung Laksono.

Sementara hubungan vertikal dengan level yang lebih rendah kurang terbangun secara baik. Partai Golkar harus mengadakan komunikasi politik secara horisontal dan pada level ini Partai Golkar mengadakan silaturrahi dengan partai politik lain sebagaimana pertama kali dilakukan oleh Surya Paloh dan Taufik Kiemas, yang memiliki derajat yang sama dalam kepengurusan partai politik yakni Dewan Penasehat dan Majelis Pertimbangan dalam pertemuan yang melibatkan kader

⁴¹⁵ Wawancara dengan Soemarsono, Juli 2010.

⁴¹⁶ Wawancara Soemarsono, Juli 2010.

⁴¹⁷ Pada waktu itu Try Soetrisno berada dalam barisan yang mengkritik bersama Gus Dur dan tokoh lainnya seperti Megawati, "Hikayat Dua Wakil", Majalah Tempo 9 Oktober 2005.

⁴¹⁸ Wawancara Sumarsono, Juli 2010.

dua partai besar tersebut.⁴¹⁹ Selain dengan PDI-P, Partai Golkar pun melakukan komunikasi interpersonal dengan petinggi PKS ketika Jusuf Kalla hendak diusung partai ini menjadi calon presiden.⁴²⁰ Dalam hal ini kepentingan Partai Golkar adalah untuk menjajagi koalisi dengan partai lain selain dengan Partai Demokrat. Namun saluran ini pada level ini kurang mendapat hasil yang optimal karena mendapat tantangan dari elite politik lainnya.⁴²¹

Pada masa kampanye Pilpres, saluran komunikasi politik interpersonal Partai Golkar menjelajahi hampir seluruh kelompok dan elemen masyarakat mulai dari kelompok Islam, organisasi sosial kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, Persis, pesantren, dan sebagainya. Dalam serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat itu Golkar mendapatkan respon yang cukup positif sampai-sampai Fahmi Idris yang semula pesimis akan kemenangan Jusuf Kalla berubah memiliki harapan.⁴²² Tim-tim jaringan ini mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari mereka yang ditemui.⁴²³ Namun begitu ini kemudian gagal karena dalam komunikasi interpersonal intern Partai Golkar sendiri terjadi konflik sehingga banyak orang berpengaruh partai yang tidak mendukung Jusuf Kalla sebagai calon presiden.⁴²⁴ Meskipun tokoh-tokoh berpengaruh itu dimasukkan dalam tim kampanye dan dijadwalkan sebagai juru kampanye, tetapi komitmennya untuk mengusung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto diragukan. Fahmi Idris dan Soemarsono menengarai hal tersebut hanya saja tidak menyebutkan nama-namanya.⁴²⁵ Saluran komunikasi interpersonal juga sering dilakukan Jusuf Kalla setelah ia maju sebagai calon presiden. Saluran-saluran komunikasi interpersonal merupakan cara yang lebih sering dilakukan untuk menjajagi kemungkinan koalisi ataupun kerja sama dengan partai politik lainnya. Dalam komunikasi media Partai Golkar sangat ditentukan oleh irama komunikasi Jusuf Kalla sebagai

⁴¹⁹ "Baru sebatas Koalisi Batin," *Majalah Tempo*, 1 Juli 2007.

⁴²⁰ "Para Penunggu Penganti Cerai," *Majalah Tempo*, 26 Juli 2007.

⁴²¹ Wawancara dengan Surya Paloh, Juli 2010.

⁴²² Fahmi sempat mengatakan kepada JK bahwa kali ini Jusuf Kalla akan kalah dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang masih paternalistik (lihat sub bab khalayak), wawancara Fahmi Idris, Juli 2010.

⁴²³ Wawancara Soemarsono, Juli 2010.

⁴²⁴ "Fahmi Idris: Para Tokoh Berpengaruh tidak Mendukung JK", *Majalah Tempo* 26 Juli 2010.

⁴²⁵ Meskipun tidak disebutkan secara terus terang, *Majalah Tempo* sempat mengangkat tulisan tentang kelompok-kelompok dalam Partai Golkar yang menjadi akar perpecahan Partai Golkar yakni kelompok Akbar Tandjung dan kelompok Agung Laksono, lihat "Beringin Yang Terabaikan," *Majalah Tempo*, 30 Oktober 2005.

ketua umum. Jusuf Kalla adalah sosok yang akrab dengan wartawan sehingga hampir setiap edisi pemberitaan selalu muncul namanya dan ini yang menyebabkannya begitu menonjol dalam pemberitaan media massa. Tetapi sayangnya kemunculannya ini lebih mengesankan dirinya sebagai "troublemaker" (pengacau) dibandingkan sebagai "troubleshooter" (pemberi solusi). Padahal semangat yang dibawa Jusuf Kalla adalah semangat kinerja dan ia tidak peduli dengan pencitraan buruk yang ditujuakn kepada dirinya. Menurutny, kinerja yang baik akan membawa pada pencitraan yang baik pula dan ia tidak memperhatikan bahwa pencitraan itu dilakukan agar publik mengetahui kinerja baiknya. Sedangkan, selama ini pemberitaan di media melulu menggambarkan dirinya sebagai sosok ambisius dan pragmatis. Kemenonjolan Jusuf Kalla dilihat oleh media massa sebagai adanya matahari kembar dalam pemerintahan,⁴²⁶ dan ini justru menjadi kontraproduktif karena masyarakat kurang suka dengan orang yang menonjol- nonjolkan dirinya. Hal ini justru dilihat sebagai sesuatu yang buruk karena di sisi lain frekuensi Jusuf Kalla yang tinggi dalam kemunculannya di komunikasi media (hampir setiap hari Sabtu berita tentangnya nya muncul).

Berbeda dengan apa yang dilakukan SBY yang memanfaatkan media massa sebagai alat untuk publik relation sehingga dapat mendongkrak pencitraannya. Sebagaiman yang dilakukan SBY dalam memunculkan dirinya pada isu korupsi penerimaan dana dari BI yang melibatkan dua menterinya dimana SBY muncul seolah-olah pemimpin yang bertanggung jawab dan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.⁴²⁷ Ini jelas menunjukkan apa yang dilakukan Jusuf Kalla dibandingkan dengan yang dilakukan SBY cukup berbeda. Jusuf Kalla bekerja apa adanya sesuai dengan kesepakatan awalnya dalam Pilpres 2004 sehingga ini yang membuat komunikator lain di lingkungan Golkar menjadi kebingungan dalam melakukan komunikasi politik karena dalam komunikasi media justru Jusuf Kalla berposisi sebagai bumper. Hal ini terjadi karena Kalla tidak sadar bahwa peran-peran yang diambil justru seharusnya diambil oleh para menteri.

Awalnya Kalla berusaha menyatukan elit partai golkar terutama untuk mensukseskan program pemerintah, tetapi, apa yang telah dilakukan Kalla justru menjadi bumerang hubungan antar elit partai golkar sedemikian rapuh sehingga sering antara komunikator tidak satu suara dalam beberapa isu seperti isu

⁴²⁶ "Dua Matahari atau Dua Sejoli", Majalah Tempo, 30 Oktober 2005.

⁴²⁷ "Mengharap Urat pada Lesung," Majalah Tempo, 17 Agustus 2008.

tentang BBM, pencalon presiden, ataupun BLT. Sebagai akibatnya, pada momentum pencalonan presiden justru Kalla ditinggalkan secara diam-diam oleh elit partai yang dulu berbaris di belakangnya yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB V

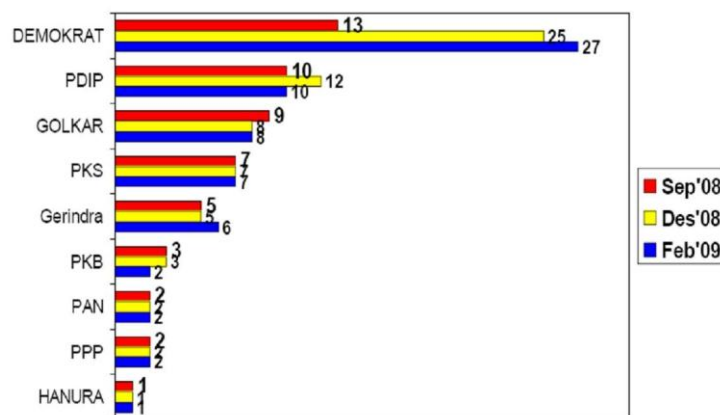
EFEK KOMUNIKASI POLITIK DAN RETAKNYA HUBUNGAN ANTAR ELIT INTERNAL

Hal yang patut diperhatikan dalam komunikator ini adalah munculnya komunikator pengganggu yang justru menjadi Jusuf Kalla harus menyelaraskan irama komunikasi politiknya terutama pada isu pencalonan kembali calon presiden. Hal ini kemudian yang menjadi faktor yang paling utama dalam kekalahan komunikasi politik Partai Golkar yakni habisnya energi dalam menentukan apakah Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat atau tidak. Hal ini menjadikan elit partai golkar justru terpecah.⁴²⁸

Posisi Partai Golkar pada saat itu berada pada posisi yang dilematis, ketika dia sebagai partai yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada perjalanan pemerintahannya tetapi di sisi lain sering merasa dijadikan sebagai pembela pada setiap keputusan dari pemerintah yang kontroversial. Sementara di sisi lain, Partai Golkar dianggap tidak pernah mendapatkan porsi jatah dalam pemerintahan sesuai dengan pengorbanannya yang telah diberikannya.

Sementara Partai Golkar, di sisi citra publik kemudian melemah beberapa narasumber menyebutkan bahwa peran sebagai pembela ini mengakibatkan citra Partai Golkar melemah, hal ini dibuktikan pada hasil survey yang dilakukan oleh LSI bahwa citra partai Golkar tidak pernah dianggap baik oleh 20 persen responden baik dalam hal pemberantasan korupsi, program dan kepeduliannya terhadap rakyat (lihat tabel di bawah).⁴²⁹

Grafik V.1. Rata-rata citra partai, Februari 2009.



⁴²⁸ "Konflik di Bawah Beringin", Laporan Utama Majalah Tempo, 22 Februari

⁴²⁹ LSI, 'Grafik Citra Partai', Februari 2009.

A. Pesan

Pada sub bab ini menjelaskan hal-hal pembicaraan politik dan simbolik yang membentuk pencitraan partai yang akan ditampilkan dalam sub bab opini publik.

1. Pembicaraan Politik

Ada banyak tema pembicaraan politik berkaitan dengan masa kepemimpinan Jusuf Kalla di Partai Golkar, partai ini merupakan partai yang mendukung setiap kebijakan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan yang bersifat ekonomi, sosial hingga politik. Isu-isu antara lain, sebagai berikut: persaingan antar partai; Isu Perdamaian Aceh (isu luar negeri) 2005; Isu BLT dan konversi energi (ekonomi) 2005; Perombakan kabinet 2007; Isu BUMN 2007; Isu korupsi (berkaitan dengan kader Partai Golkar yang ditangkap) 2008/ isu syariat Islam.

a. Perombakan Kabinet

Sebagai partai pendukung yang paling besar beberapa pengurus partai Golkar merasa berhak untuk mendapatkan kursi. Perombakan (reshuffle) kabinet adalah tema pembicaraan politik yang paling sering muncul dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Isu perombakan kabinet sejatinya isu yang muncul dari adanya mekanisme evaluasi kerja dari kabinet yang berlangsung. Tetapi munculnya ide perombakan cabinet justru dianggap dikarenakan Jusuf Kalla memenangkan kursi Golkar 1 pada Munas VII di Bali. Perombakan ini menjadi perhatian Susilo Bambang Yudhoyono mengingat pengalaman kepresidenan KH Abdurrahman Wahid, perombakan menteri yang mendapatkan dukungan politik menentukan durasi kepresidenannya. Perombakan terjadi sebagai akibat terlalu kuatnya posisi tawar Partai Golkar dalam komunikasi politik-nya dengan penyelenggara negara. Perombakan pertama kali muncul pada satu tahun pertama pemerintahannya dengan mengevaluasi kinerja menteri-menteri dalam kabinet tersebut. Hal ini disampaikan oleh Jusuf Kalla dalam Rapimnas I Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).⁴³⁰ Perombakan kabinet merupakan buah dari ketidakpuasan Jusuf Kalla terhadap susunan kabinet yang pertama kali disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Golkar hanya mendapatkan dua menteri dalam kabinet tersebut yakni Menteri Perekonomian yang dijabat oleh Aburizal Bakrie dan Menteri Tenaga Kerja dan

⁴³⁰ "Golkar akan mereposisi Kadernya di Kabinet," Kompas, 14 Mei 2005, 7.

Transmigrasi dijabat oleh Fahmie Idris.⁴³¹ Dalam isu perombakan itu kabinet tersebut Partai Golkar mengusulkan agar mendapatkan sebanyak tujuh menteri. Penambahan jumlah menteri dari Partai Golkar pun mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya yakni PKB dan PPP.⁴³²

Permintaan penambahan menteri ini tidak hanya disampaikan oleh AMPG dan KPPG tetapi juga oleh Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia dengan mengajukan beberapa nama seperti Gunawan Sumadiningrat, salah satu staf ahli wakil presiden yang dianggap serba bisa.⁴³³ Permintaan tambahan menteri itu sebagai bentuk reposisi dari Partai Golkar menjadi partai yang pendukung pemerintah, bukan partai yang diperintah (cetak miring dari penulis), pernyataan demikian diungkapkan oleh Idrus Marham. Pernyataan itu, bagi Ikrar Nusa Bakti bisa dimaknai sebagai keinginan kaum muda Partai Golkar untuk berkiprah dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Selain juga, adanya potensi persaingan yang mulai menampak antara RI-1 dan RI-2.⁴³⁴

Persaingan antara dua Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ini mulai dirasakan justru oleh kalangan petinggi Partai Golkar. Akhirnya, dalam Rapimnas yang diadakan di Jakarta Partai Golkar pun memutuskan sebagai partai yang mendukung pemerintah setelah sebelumnya sempat ada usulan untuk menarik dukungan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Tetapi dengan konsekwensi adanya penambahan kursi menteri dalam kabinet tersebut.⁴³⁵ Dari pihak Partai Demokrat sendiri mengatakan bahwa proses perombakan tersebut dengan memperhatikan kinerja dari menteri

⁴³¹ Kedua orang menteri itu dianggap sebagian pengurus Partai Golkar bukan sebagai perwakilan Partai Golkar mengingat keduanya sempat mendapatkan teguran oleh

⁴³² "Golkar minta tujuh menteri itu wajar. Golkar itu besar dan punya orang-orang yang berkualitas, serta punya peran menstabilkan pemerintahan. Apalagi ketua umumnya jadi wakil presiden," pernyataan ini diungkapkan oleh Effendy Choirie salah satu Ketua DPP PKB. Juga diungkapkan oleh Chozin Chumaidi, "minta tujuh itu wajar, bahkan lebih dari tujuh juga tidak apa." Pernyataan ini dikutip dari "Ide 'perombakan' dari Partai Golkar Dapat Dukungan," Kompas, Kamis 19 Mei 2005. 6.

⁴³³ "Kino Golkar Bangkit Lagi," Kompas, Sabtu 28 Mei 2005, 6.

⁴³⁴ Ikrar Nusa Bakti, "Partai Golkar dan 'Perombakan' Kabinet", Kompas, Jumat, 20 Mei 2005. 4.

⁴³⁵ "Rapimnas: Golkar Ingin Kabinet Dibagi Proporsional", Kompas, 13 Oktober 2005. 2.

tersebut.⁴³⁶ Hal ini dianggap oleh Yuddy Chrisnandi bahwa perombakan kabinet sudah menjadi kewenangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memegang hak prerogatif.⁴³⁷ Karena tuntutan perombakan adalah sebagai bentuk dukungan dari Partai Golkar kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dari kalangan pengamat sendiri, tuntutan dari Partai Golkar ini disebutkan sebagai hal yang menghambat kinerja eksekutif dalam menjalankan program- programnya.⁴³⁸

Partai Golkar hanya meminta agar kewenangan Menko Perekonomian diperbesar. Meskipun, pada akhirnya Partai Golkar pada saat ulang tahunnya menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah.⁴³⁹

Perombakan kabinet tersebut bagi PKS sebaiknya tidak mempertimbangkan pada satu partai tertentu saja tetapi juga pada profesionalisme. Pertimbangan faktor ini agar pemerintah tidak menghabiskan ongkos politik yang besar, terutama berkaitan dengan konsolidasi kabinet.⁴⁴⁰ Pasalnya PKS menganggap sering dijadikan pembela dalam setiap kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, PKS sendiri dalam isu perombakan itu berharap mendapatkan jabatan Jaksa Agung.⁴⁴¹ Isu perombakan kabinet yang sejatinya sebagai akibat dari evaluasi kinerja pemerintahan bukan sebagai akibat dari mekanisme tawar menawar antara partai politik yang menyokong pemegang kekuasaan.

Kinerja pemerintahan pada waktu, bahkan dinilai oleh anggota partai lain seperti Pramono Anung dari PDI-P, hanya berhasil dalam beberapa indikator saja yakni pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus meningkat. Tetapi

⁴³⁶ "Evaluasi Kabinet: Sistem 'Perombakan' Masih Dibicarakan," Kompas, 15 Oktober 2005. 2.

⁴³⁷ " 'Perombakan' Bukan Lagi Agenda Golkar, Kompas, 18 oktober 2005. 2.

⁴³⁸ Syamsuddin Haris "Golkar , DPR, dan Yudhoyono", Kompas, Sabtu 29 Oktober 2005. 6.

⁴³⁹ "Hari Ulang Tahun: Golkar Partai Pendukung Pemerintah," Kompas 27 November 2005. 1. positioning Partai Golkar yang demikian kemudian menjadikan partai ini dikategorikan sebagai partai kanan oleh Dodi Ambardi, yakni partai yang mendukung kebijakan yang pro pengusaha, lihat dalam Dodi Ambardi, "Golkar, Partai Kanan?" Kompas 25 November 2005. 6.

⁴⁴⁰ "Pergantian Tidak Partai 'Oriented'," Kompas, Jumat 11 November 2005, 4.

⁴⁴¹ "Perombakan Kabinet: PKS Incar Jaksa Agung," Kompas, Sabtu 19 November 2005, 2.

beberapa indikator lainnya memperlihatkan penurunan seperti inflasi yang mencapai 17%, cadangan devisa dan kurs rupiah dan peningkatan jumlah keluarga miskin dari 9 juta menjadi 13,4 juta keluarga miskin.⁴⁴² Meskipun bagi Sutradara Ginting, perombakan kabinet ini sudah terlambat karena dalam kondisi post-factum dari kenaikan harga-harga barang konsumsi yang melambung tinggi.⁴⁴³

Sikap Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu lama mempertimbangkan keputusan membuat pihak PAN tidak sabar dalam keraguan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Bagi PAN, sikap yang terlalu lama mempertimbangkan justru menimbulkan ketidakpastian politik yang akan membawa kepada ketidakpastian politik. Ketua Umum PAN sendiri meminta tiga menteri di bidang perekonomian dan satu menteri di bidang non-perekonomian diganti. Desakan partai-partai kepada presiden ini kemudian menjadikan rancunya sistem pemerintah yang diterapkan, karena dalam sistem presidensial, kewenangan presiden begitu besar, dan kedudukan oposisi berperan dalam penentuan kebijakan belaka.⁴⁴⁴

Jika melihat pada hasil akhir dari perombakan kabinet memasukkan Paskah Suzetta ke dalam posisi Menteri/Kepala Bappenas. Sedangkan, dari PKB sendiri Menko Kesra Alwi Shihab digeser menjadi Duta Khusus untuk Timur Tengah dan memasukan Saifullah Yusuf dan Erman Soeparno sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi. Aburizal Bakrie justru digeser dengan DR Boediono sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, sedangkan Aburizal duduk sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Fahmi Idris digeser menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Hasil akhir dari perombakan menunjukkan bahwa sangkaan publik yang melihat Partai Golkar sebagai partai yang haus jabatan menteri tidak terbukti. Hasil dari perombakan ini pun menimbulkan kekecewaan sebagian pengurus Partai Golkar karena terdapat penempatan yang keliru seperti Paskah Suzetta yang lebih tepat sebagai menteri negara BUMN.⁴⁴⁵

⁴⁴² "Ketua DPR Meminta Presiden Konsisten," Kompas, Kamis 17 November 2005, 2.

⁴⁴³ "Pastikan Ada Tidak 'Perombakan'," Kompas, Jumat, 18 November 2005, 2.

⁴⁴⁴ "Rapimnas: Partai Golkar Tak Bicara 'Perombakan' Kabinet," Kompas, Sabtu 26 November 2005, 1.

⁴⁴⁵ "Kabinet Indonesia Bersatu, 'Perombakan' Baik, tapi sarat Akomodasi Politik,"

Pada pembicara politik pada isu ini, Partai Golkar menumbuhkan citra sebagai partai yang 'serakah' karena ingin mendapatkan jatah yang banyak dalam kursi kabinet.

b. Hubungan Publik (Luar Negeri dan Hankam)

Hubungan luar negeri merupakan aspek yang penting terutama dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang harus dioptimalkan dan diabdikan bagi kepentingan pembangunan nasional secara menyeluruh serta upaya menciptakan perdamaian dunia.

Partai Golkar sangat menyadari tentang pengaruh globalisasi yang mengubah tatanan dan pola hubungan antar negara dan internasional pada umumnya, selain permasalahan bidang-bidang dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan politik, ekonomi, hankam, dan sosial budaya. Juga sangat disadari tentang semakin berkembangnya para aktor dalam konteks komunikasi politik ini sehingga disadari pula tentang adanya iklim komunikasi politik era baru. Salah satu isu yang menarik pada awal pemerintahan SBY-Jusuf Kalla adalah tentang perdamaian di Aceh dimana penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai. Konflik ini berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan sehingga meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Sejak kemerdekaan, rakyat Aceh belum pernah menikmati kemerdekaan secara penuh karena selalu dilanda konflik. Jusuf Kalla dalam hal ini berperan dalam menyelesaikan konflik melalui diupayakannya MOU Helsinki dengan pihak Aceh. Sedangkan Fraksi Partai Golkar DPR berperanan besar dalam menuntaskan pembahasan UU Pemerintahan Aceh.⁴⁴⁶

Kemudian isu terorisme yang mulai muncul sejak akhir tahun 2001 ketika Gedung WTC di New York, Amerika Serikat dibom pada 11 September tahun itu juga. Sejak itu pemerintah Amerika Serikat mencanangkan perang terhadap terorisme. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang konon menjadi salah satu basis terorisme gerakan Jamaah Islamiyah yang disinyalir memiliki jaringan dengan Al-Qaeda. Partai Golkar nampaknya tidak begitu memiliki perhatian yang

Kompas, Rabu, 7 Desember 2005. 1.

⁴⁴⁶ Meskipun keputusan ini kemudian menjadi kontroversial karena dalam perjanjian ini oleh sebagian orang menganggap menafikan martabat kedaulatan NKRI.

khusus pada isu ini karena mengikuti langkah yang dilakukan pemerintah.

Isu yang cukup menjadi perhatian Partai Golkar adalah hubungan RI-Malaysia selama kurun waktu lima tahun terutama berkaitan dengan sengketa isu-isu Sipadan-Ligitan, Blok Ambalat, penganiayaan dan tindakan semena-mena, pemerkosaan, perampokan dengan alasan imigrasi dan hukum terhadap TKI, pemukulan terhadap wasit yang merupakan delegasi resmi atlet Indonesia ke SEA Games, pembajakan lagu, tarian sampai dengan merek batik, penyelundupan alat sadap warga negara Malaysia. Dalam menanggapi itu semua Partai Golkar mengemukakan keras tindakan Malaysia baik melalui oknum dan aparatnya serta meminta agar Malaysia segera menghentikan tindakan yang tidak bersahabat dan mengkhianati hubungan serumpun itu. Tetapi sayang Partai Golkar kemudian kurang mengkapitalisir sikapnya ini sehingga menjadi dukungan publik yang sesungguhnya berposisi sama. Di level publik isu ini merupakan isu yang kuat menyatukan seluruh komponen bangsa sehingga sebenarnya sangat berpotensi bisa menarik dukungan publik. Ini dikarenakan Golkar memiliki hubungan baik dengan partai penguasa Malaysia, UMNO, dan kerja sama keduanya telah terjalin jauh sebelum masalah itu muncul dimana kerja sama itu sudah berlangsung sejak kemerdekaan Malaysia.⁴⁴⁷

Pada isu lainnya adalah pada dukungan pemerintahan Indonesia yang mendukung Resolusi DK PBB No. 1747 tentang sanksi PBB terhadap Iran yang mempertimbangkan kepentingan nasional dan sensitifitas masyarakat Indonesia. Dengan penyetujuan pemerintah Indonesia terhadap sanksi PBB terhadap Iran tersebut memberikan dampak citra negatif terhadap Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Apalagi kemudian keputusan Indonesia untuk mendukung resolusi itu kemudian mendatangkan usul hak angket dari DPR.⁴⁴⁸

Sayangnya pada isu-isu internasional tersebut partai

⁴⁴⁷ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku III Laporan pelaksanaan Program Organisasi Sayap, Badan, Lembaga Dan Fraksi Partai Golkar, 2009.

⁴⁴⁸ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku III Laporan pelaksanaan Program Organisasi Sayap, Badan, Lembaga Dan Fraksi Partai Golkar, 2009.

golkar tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat karena hal tersebut kurang dianggap sebagai hal yang krusial bagi kehidupan masyarakat.

c. Perdamaian Aceh

Tema pembicaraan politik lainnya adalah perdamaian Aceh. Tema ini muncul beberapa bulan setelah kemenangan Pemilu 2004, Desember 2004 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus menghadapi musibah nasional yang menarik perhatian internasional yakni gempa yang mengakibatkan terjadinya tsunami yang memakan korban sebanyak 96.000 jiwa. Jumlah itu belum termasuk kerugian pelbagai materiil seperti hancurnya infrastruktur milik negara, hancurnya rumah milik warga, dan kerugian psikologis yang harus ditanggung oleh warga Aceh akibat bencana tersebut. Secara geologis, gempa itu terjadi akibat tumbukan dua lempeng asia dan eurasia sehingga mengakibatkan gempa di Samudra Hindia dengan kekuatan 9,3 SR dan tsunami yang menerjang negara di sekitar samudra hindia: Thailand, Srilangka dan Indonesia mendapatkan dampak paling parah selain itu terdapat beberapa negara lain seperti Malaysia, India, Somalia, Myanmar, Maladewa, Seychelles, Tanzania, Bangladesh, Afrika Selatan dan Kenya. Gempa ini dikategorikan sebagai gempa yang paling banyak memakan korban dalam sejarah gempa yang tercatat oleh dunia ilmu pengetahuan modern, dan merupakan gempa terdahsyat yang pernah mengguncang Aceh selama 40 tahun terakhir.⁴⁴⁹ Bencana tersebut dijadikan oleh banyak partai sebagai medan untuk memperlihatkan dukungan kepada publik. Golkar sebagai partai pemenang pemilu justru terlambat bergerak dibandingkan partai-partai lainnya dalam konteks bencana⁴⁵⁰ Tetapi, kemudian justru menjadi partai yang paling awal bergerak dalam proses awal perdamaian melalui ketua umumnya yang mengawali inisiatif perdamaian Aceh.⁴⁵¹

Meskipun demikian, terdapat hikmah di balik kejadian

⁴⁴⁹ Adriaan Vickers, *A History of Modern Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 224.

⁴⁵⁰ "Kiprah Parpol Pada Saat Bencana Menerjang," *Kompas*, 10 Januari 2005, 9.

⁴⁵¹ Proses perdamaian Aceh tidak lepas dari keikutsertaan dari Abdullah Puteh, mantan gubernur Aceh, yang dimintai keterlibatannya oleh Jusuf Kalla, melalui balik jeruji sel penjara. Puteh dianggap Jusuf Kalla memahami konteks psikologis dari masyarakat Aceh. Wawancara Jusuf Kalla Juli 2010.

tersebut, yakni perhatian pada isu perdamaian Aceh lebih terfokus karena dalam keadaan tertimpa musibah. Antara pihak RI dan GAM mulai memikirkan dihentikannya konflik, sehingga Jusuf Kalla diwakili dengan Sofyan Djalil berinisiatif untuk berdamai dengan Aceh. Proses perdamaian Aceh inilah yang menyebabkan nama Jusuf Kalla kemudian mencuat karena beberapa aktor perundingannya adalah orang-orang yang dibawa oleh Jusuf Kalla dalam kabinetnya, seperti Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil.

Isi Perjanjian Helshiki tersebut dianggap mendapatkan kritik dari banyak kalangan tidak hanya dari partai-partai politik yang menjadi saingan Partai Golkar tetapi juga Gubernur Lemhanas yang menilai bahwa perjanjian tersebut harus ditinjau ulang yang disampaikan di dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Dalam forum tersebut Ermaya menyampaikan kajian Lemhannas tentang Pertemuan helsinki yang intinya adalah meminta pertemuan itu ditinjau kembali karena memperkuat posisi politik gerakan separatis Aceh di mata dunia. Perjanjian itu dianggap sebagai pengakuan Gerakan Aceh Merdeka sebagai sebuah negara yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁵² Dari PDI-P juga melihat bahwa perjanjian yang dilakukan di Helshinki adalah perjanjian internasional karena dilakukan di luar negeri dengan perantaraan pihak asing artinya telah terjadi internasionalisasi masalah yang harusnya diselesaikan secara nasional.

Menurut Partai Golkar perjanjian itu bukanlah perjanjian internasional, tetapi perjanjian sesama bangsa hal ini karenanya tidak membutuhkan persetujuan DPR. Isi dari perjanjian Helsinki yang mengkhawatirkan dari sisi sistem kepartaian adalah pembentukan partai lokal yang akan menabrak UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik.

Tetapi hal yang paling utama menjadi alasan Jusuf Kalla adalah pertama, dalam perjanjian itu digunakan istilah Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) yang sifatnya berada dalam satu institusi negara, artinya kesepahaman ini tidak berbeda dengan

⁴⁵² Gara-gara permintaan tersebut Jusuf Kalla kemudian menegur Gubernur Lemhannas yang justru menimbulkan polemik, lihat "Teguran Kalla menuai Kritik," Kompas, Kamis 23 Juni 2005, 6.

kesepahaman pada kesepakatan Malino yang mendamaikan pihak yang bertikai di daerah Poso dan Ambon, sebagai kesepahaman bukan Treaty sebagaimana halnya perjanjian antar dua negara. Kedua adalah penarikan Warga Negara Indonesia, tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Swedia.⁴⁵³

Dalam kelanjutannya dari pelaksanaan MOU tersebut, Partai Golkar konsisten memperjuangkan majunya calon independen dalam Pilkada NAD yang kemudian dimasukkan akan dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh, meskipun tidak masuk dalam RUU yang dikirimkan dalam Pemerintah ke DPR.⁴⁵⁴

Dalam isu ini, sedikit citra positif yang diperoleh oleh Partai Golkar. Karena kemudian ketika isu ini menjadi isu internasional, karena meredam konflik separatis GAM, justru isu ini diambil alih oleh Yudhoyono, Kalla sendiri tidak lagi dilihat sebagai orang yang memiliki peran penting dalam penandatanganan MOU Helsinki. "saya melakukannya untuk negara," ungkap Kalla.⁴⁵⁵

d. Isu Syariat Islam

Isu ini cukup menyedot perhatian dari masyarakat Islam, isu pertama kali penerapan syariat justru di beberapa daerah yang cukup banyak perolehan suara bagi Golkar seperti daerah Nanggroe Aceh Darrussalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang cukup menonjol mengusung syariat Islam baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun surat keputusan dan daerah-daerah tersebut yang memberikan dukungan suara kepada Partai Golkar pada Pemilu 2004. Syariah Islam dalam Indonesia memiliki perjalanan sejarah dari mulai polemik dasar negara dari sejak perumusan UUD 1945 hingga pada penyusunan UUD baru yang hampir final tetapi dihentikan oleh Soekarno melalui dekrit presiden 5 Juli 1959.⁴⁵⁶

⁴⁵³ Harry Tjan Silalahi, "Terobosan Wapres Jusuf Kalla," Kompas Senin 22 Agustus 2005, 6.

⁴⁵⁴ "RUU Pemerintahan Aceh, Wapres: Golkar akan perjuangkan Calon Independen," Kompas, Senin 6 Februari 2006. 4.

⁴⁵⁵ Wawancara Jusuf Kalla, Juli 2010.

⁴⁵⁶ Dalam David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, eds, *Indonesian Politics and Politics: A Reader*, (London: Routledge, 2003), 240-241.

Penerapan Syariah Islam pada daerah-daerah tersebut merupakan penerapan syariat yang hanya bersifat ritual, penerapan syariat ini mendapatkan pertentangan dari pelbagai kalangan, baik dari pihak yang pro-penegakan syariat Islam maupun dari pihak yang menolak syariat Islam. Bagi yang pro penegakan syariat Islam, syariat yang ditegakkan adalah konsep syariat Islam yang dimaknai sebagai ideologis dalam sebuah sistem kekhilafahan, mulai dari adanya jabatan-jabatan kenegaraan sampai pada sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Artinya, syariat Islam merupakan aturan yang menjadi rujukan masyarakat dalam berhubungan antara sesama ataupun dengan penguasa. Sedangkan, bagi kalangan yang tidak setuju syariat Islam, hal yang diinginkan oleh pihak yang setuju syariat Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan ritual keseharian yang sesungguhnya tanpa penerapan syariat pun sudah dipraktikkan.⁴⁵⁷

Meskipun demikian, syariat Islam yang diterapkan pada tingkat masyarakat bukanlah syariat Islam yang bersifat komprehensif ideologis, sebagaimana keharusan penegakan syariat Islam di negara-negara timur tengah. Karakter penerapan syariat Islam yang demikian dipengaruhi oleh karakter Islam di Indonesia yang memiliki wajah yang lebih toleran dan sinkretik.⁴⁵⁸ Ketika terjadi penerapan syariat Islam maka syariat Islam yang dilaksanakan adalah syariat yang sifatnya ritual yang bersifat kerutinan, seperti shalat lima waktu, dan hal-hal yang bersifat artificial seperti tata cara berpakaian, kemampuan mengaji dan kewajiban menggunakan busana muslim pada hari-hari tertentu.

Meskipun berada dalam aturan praktik keseharian,

⁴⁵⁷ Keadaan ini juga diamini oleh Abdul Azis Kahar Muzakar, seorang ketua dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, lihat "Syariat Islam di Jalur Lambat," Majalah Tempo, 14 Mei 2006. Hidayat Nurwahid melihat bahwa penerapan pelbagai aturan yang berkaitan dengan syariat Islam sesungguhnya tidak menyalahi Pancasila terutama sila pertama, lihat wawancara Hidayat Nurwahid "Hidayat NurWahid: Yang Tidak Suka Syariat Berlindung di Balik Pancasila," Majalah Tempo, 14 Mei 2006.

⁴⁵⁸ Warna Islam di Indonesia sangat lentur sehingga bisa berdamai dengan tradisi lokalnya. Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1971). Meskipun demikian menurut Mark R. Woodward, tradisi lokal tersebut banyak sekali memiliki kesamaan makna yang berasal dari nilai-nilai Islam sehingga Islam justru sesungguhnya menyerap ke dalam tradisi lokal sehingga Islam bisa berdamai dengan tradisi lokal, lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Antara Kesalahan Normatif dan Ritual*, (Yogyakarta: LKiS, 2000)

penerapan syariat Islam dapat mengganggu masyarakat, seperti adanya peraturan anti pelacuran yang memunculkan adanya petugas ketertiban yang merazia pelacur yang bekerja malam hari. Peraturan ini justru meresahkan pekerja yang pulang malam, ini terjadi di Kota Tangerang dan juga beberapa perda di daerah- daerah lainnya.⁴⁵⁹

Ironisnya, isu syariat Islam justru muncul di daerah yang memiliki perolehan suara yang cukup signifikan dalam Pemilu 2004 antara lain mulai dari Aceh hingga Mataram. Meskipun jika melihat pada daftar di bawah mengenai daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam masih berlaku hanya pada level yang artifisial belaka lihat tabel di bawah.

Tabel 5.1. Daftar Perda dan Surat Edaran yang Dinilai Bernuansa Pemberlakuan Syariat Islam

Nama Daerah	Nomor perda	Hal Yang Diatur
NAD	UU no.18/2001	Masuk dalam otonomi khusus Aceh
Riau	HTI dan PPP	Mempersiapkan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam
Kepri (P. Batam)	Perda no.6/2002	Ketertiban sosial untuk memberantas pelacuran, pengaturan pakaian warga dan pemberantasan kumpul kebo.
Padang Pariaman	Perda. No.2	Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Kemaksiatan
Solok	Perda No. 6 tahun 2002	Wajib Berbusana Muslim
	Perda no. 10/2001	Wajib Baca Alquran Untuk Siswa Dan Pengantin
Sumatera barat	Perda no. 11/2001	Pemberantasan dan Pencegahan Kemaksiatan
Kota Padang	Instruksi Wali Kota 7 Maret 2005	Pemakaian Busana Muslim
Pasaman Barat		AturanWajib Berbusana Muslim Untuk Siswa Sekolah

⁴⁵⁹ "Jika Malam Selalu Mencemaskan", Majalah Tempo, 14 Mei 2006. 30-31.

Bengkulu	Perda no. 24/2000	Pelarangan Pelacuran Wali Kota Bengkulu
	Instruksi No. 3/2004	Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
Sumatera Selatan	Perda No.13/2002	Pemberantasan Maksiat,
Palembang	Perda No.2/2004	Pemberantasan Pelacuran
Banten	Himbauan di beberapa daerah seperti Serang, Pandeglang dan Lebak	Perempuan dihimbau mengenakan jilbab
Kota Tangerang	Perda No.8/2005	Tentang pemberantasan Kemaksiatan
DKI Jakarta	MUI DKI	Mendesak DPRD membahas kemungkinanperda anti maksiat di Ibu Kota
Kota Depok	Rancangan Perda	Pemberantasan Pelacuran dan Minuman Keras
Tasikmalaya Kab.	Surat Edaran Bupati	Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan
Garut	Perda no.6/2000	Kesusilaan Bupati membentuk Lembaga Pengkajian Persiapan Syariat Islam pada tahun 2002
Kab. Cianjur		Program gerakan pembangunan masyarakat berakhlaqul karimah pada september 2001.
Kota Cianjur	Surat Edaran pada 29 Agustus 2003	Wajib berjilbab untuk siswa sekolah
Indramayu	Perda no.7/1999	Prostitusi dan juga ada Surat Edaran Bupati mengenai wajib busana muslim dan pandai baca Al-Quran bagi siswa sekolah.

Pamekasan	Surat Edaran no.450/2002	Pemberlakuan syariat Islam
Jember	Perda No.14	Tentang Penanganan Pelacuran
Sulawesi Selatan	Perda	Tentang Pendidikan Alquran
Enrekang	Perda no.6/2005	Busana Muslim dan pandai baca tulis Alquran
Gowa		Mewajibkan pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambahan jam pelajaran agama Islam
Sinjai		Menerapkan aturan penggunaan jilbab untuk pegawai negeri sipil
Kab. Maros	Perda No.15/2005	Gerakan Bebas Buta Aksara Alquran
Bulukumba	Perda No.4/2003	Busana muslim dan perda mengenai kemampuan baca Alquran bagi siswa dan calon Pengantin
Takalar	Perda	Busana Muslim
NTB dan Mataram	Raperda	Wajib berbusana muslim

Beberapa daerah yang menerapkan berbau syariat Islam itu merupakan daerah yang mendapatkan suara cukup banyak pada Pemilu 2004. Seperti daerah Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat dan beberapa daerah Sumatera Barat yang disebutkan di atas.

Jusuf Kalla juga dianggap mendukung penerapan syariat Islam. Tapi dalam kenyataannya, syariat Islam yang dimaksudkannya adalah yang bersifat ritual dan mu'amalah belaka yang diterapkan tanpa adanya peraturan perundang-undangan.⁴⁶⁰ Perda-perda yang bernuansa syariat Islam tersebut tidak ada satupun yang berkaitan dengan ideologi Islam sebagaimana yang ditakutkan kalangan kebanyakan. Meskipun demikian pelaksanaan dari perda bersyariat Islam itu memang meresahkan. Contoh kasus di Kota Tangerang yang merupakan daerah yang berdekatan ibu kota dimana diberlakukan perda ketertiban umum dengan maksud

⁴⁶⁰ "Jusuf Kalla: Golkar Makin Solid," Kompas, 7 Juni 2005, 38.

membersihkan praktik pelacuran yang marak di daerah itu. Tetapi dalam penerapannya masyarakat biasalah yang mendapat eksekus buruknya. Warga yang biasa melakukan aktivitas malam hari seperti pulang kerja malam hingga mereka yang sekedar santai di depan warung.⁴⁶¹ Dengan banyaknya eksekus yang ditanggung masyarakat awam itu akhirnya Jusuf Kalla bersuara bahwa syariat Islam yang diterapkan sesungguhnya tidak perlu diterapkan dalam bentuk formil.⁴⁶²

e. Isu Kenaikan BBM/BLT/ Konversi Gas 2005

Pada awal tahun 2006 harga minyak dunia naik dari 30-an dollar ke angka 54 dollar per barrel. Kenyataan ini turut berpengaruh dalam kebijakan pemerintah di bidang energi. Kenaikan harga itu menyebabkan beban subsidi negara untuk energi juga ikut naik. Ini dikarenakan negara Indonesia masih mengimpor minyak yang siap dikonsumsi. Kenaikan BBM ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak populer sehingga berdampak kepada menurunnya popularitas pasangan SBY-Jusuf Kalla. Dari jajak pendapat harian Kompas tentang kebijakan tersebut didapatkan fakta 63% dari responden menilai kebijakan itu sebagai kebijakan yang keterlaluan karena menyebabkan beban hidup rakyat menjadi bertambah berat.⁴⁶³ Terakut dengan langkah pemerintah itu, Akbar Tandjung menilai anggota legislatif menjadi tidak optimal sebagai kekuatan penyeimbang dari eksekutif.⁴⁶⁴

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang muncul sebagai eksekus dari kenaikan harga minyak dunia itu yakni; (1) Pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM subsidi untuk beberapa jenis bahan bakar, (2) Memberikan subsidi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM, (3) Mengubah pola konsumsi energi keseharian masyarakat terutama untuk jenis minyak tanah dengan pilihan antar gas atau batubara. Pengurangan subsidi ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan APBN yang waktu itu tidak mampu menanggung melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai level lebih dari 100 dollar per barrel.

Keputusan penarikan subsidi yang berakibat naiknya harga BBM membuat sebagian besar anggota DPR Partai Golkar merasa keberatan karena ini akan menjadi isu yang tidak

⁴⁶¹ "Jika Malam Selalu Mencemas," Majalah Tempo 14 Mei 2006. 30-31.

⁴⁶² Wawancara dengan Jusuf Kalla. Juli 2010.

⁴⁶³ "Pemerintah dan DPR Kelebihan langkah," Kompas, Senin, 21 Maret 2005, 7.

⁴⁶⁴ Wawancara dengan Akbar Tandjung, Juli 2010.

menguntungkan bagi mereka.⁴⁶⁵ Yuddy Chrisnandi anggota Golkar di Komisi I menjadi satu-satunya anggota yang menyatakan ketidaksetujuannya secara terang-terangan dan ini disampaikannya ketika DPR mengajukan hak angket mengenai hal ini. Karena sikapnya ini ia mendapat teguran Ketua Umum Partai Golkar.⁴⁶⁶

Jusuf Kalla sendiri kemudian memberikan solusi dengan memutuskan pemberian BLT kepada masyarakat miskin yang sebelumnya menggunakan minyak tanah dengan mengganti uang pengeluaran untuk membeli minyak tanah yang dinaikkan sebanyak 300 %. Mengenai hal ini Jusuf Kalla menjulukinya sebagai "Kebijakan Robinhood".⁴⁶⁷ Meski ia telah menetapkan kebijakan itu tapi keputusannya telah menjadi hambatan terhadap keberhasilan program ekonomi dan kesejahteraan yang ditetapkan Partai Golkar dalam Trisukses-nya karena kebijakan ini berakibat pada naiknya harga pangan. Rakyat dan pihak oposisi meradang melihat hal ini dan menilainya sebagai kebijakan keterlaluan mengingat sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM dua kali, pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005, meski kenaikan dua yang pertama sebagai akibat dari penundaan kenaikan di Megawati Soekarnoputri. Kelompok penekan pun bermunculan yang berasal dari kelompok menengah (madani) seperti Jaringan Pemuda Penggerak, Front Aksi Mahasiswa, Front Kebangkitan Petani dan Nelayan, dan Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan.⁴⁶⁸

f. Kaum Muda

Kalangan muda merupakan isu yang cukup panjang diperdebatkan di Partai Golkar karena partai ini memiliki banyak sekali kader muda, sementara kaum tua masih begitu dominan dalam kepengurusan partai. Realitas ini terjadi baik di tingkat pusat hingga daerah sehingga banyak para kader muda yang mengantri itu kemudian melakukan lompat pagar ke partai lain yang baru berdiri. Kecenderungan ini juga terjadi pada partai besar lain seperti PDI-P yang dalam beberapa kali kongres tetap mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, demikian halnya untuk pencalonan calon presiden. Fenomena munculnya kaum muda justru anehnya kemudian terjadi pelembagaan politik "gerontokrasi" (kekuasaan para

⁴⁶⁵ Wawancara dengan Priyo Budi Santoso, 23 Juli 2010, juga wawancara dengan Rully Chairul Azwar, 26 Juli 2010.

⁴⁶⁶ "Golkar Tegur Yuddy Chrisnandi," Sabtu, 28 Juni 2008 | 20:37 WIB

⁴⁶⁷ "Kenaikan Bensin ala Robinhood," dalam Majalah Tempo, 18 Mei 2008, 125.

⁴⁶⁸ "Siaga RI-1," Majalah Tempo, 1 Juni 2008, h 111.

pinisepuh) dan kemenangan Jusuf Kalla juga dinilai sebagai menguatnya praktik politik gerontokrasi itu.⁴⁶⁹

Menguatnya gerontokrasi ini juga dikeluhkan kader muda Golkar, Ade Komaruddin, yang melihatnya sebagai sesuatu yang kontraproduktif bagi masa depan partai. Hal ini yang menyebabkan partai ini hanya dikuasai oleh orang itu-itu saja, terlebih pada partai baru lain muai menyiapkan regenerasi yang jelas.⁴⁷⁰ Ade mengeluhkan Golkar yang masih memiliki ciri partai yang otoritarian karena masih didominasi orang-orang tua.

”Di Amerika Serikat tokoh teras politik didominasi generasi berusia 40-an dan 50-an yang kapabel di bidangnya. Sedangkan dominasi politisi gaek merupakan ciri dari sistem politik yang otoritarian. Keberadaan kalangan muda selalu menjadi darah segar bagi organisasi politik sehingga terlambatnya regenerasi akan membuat antrean untuk menduduki jabatan menjadi terlalu panjang. Kesudahan itu akan membuat cendekiawan akan memilih bergabung dengan partai lain karena eksistensi mereka lebih mudah diakui.”

Menguatnya isu kaum muda juga disebabkan oleh elit partai yang lebih mementingkan kepentingan politik pribadi dibanding kepentingan politik masing-masing. Isu ini memunculkan Kaukus Kaum Muda yang mengusulkan Munaslub sebagaimana digagas Kamrusamad, politisi dari Sulawesi yang sebelumnya adalah mantan pimpinan AMPG yang dipecat Jusuf Kalla.⁴⁷¹ Persoalan regenerasi muncul seiring dengan praktik politik yang membelit Golkar dan dunia politik Indonesia. Politik uang merupakan gejala umum di negara berkembang dan Indonesia tidak luput darinya. Yuddy Chrisnandi adalah kader Golkar yang mencoba untuk mengadakan perubahan dari dalam. pada Munas di Pekan Baru tahun 2009 Yuddy hanya mendapat satu suara.

Setahun menjelang pemilu, Jusuf Kalla mencoba mendekati kaum muda sebagai bentuk pendekatannya kepada generasi muda. Dalam beberapa kesempatan ia berkesempatan melihat hasil karya kaum muda seperti menonton film Ayat-Ayat Cinta sebuah film yang mendapat respon masyarakat tentang

⁴⁶⁹ Munafrizal Manan, “Politik Gerontokrasi dan Partai Politik,” Kompas, Sabtu, 7 Mei 2005, 43.

⁴⁷⁰ “Parpol Rusuh, Golkar Makin Kukuh,” Kompas, Sabtu 7 Mei 2005. 39.

⁴⁷¹ “Kaukus Muda Golkar Minta Jusuf Kalla Mundur”, Persda Network dimuat pada Kamis, 17 April 2008 | 12:53 WIB

percintaan anak muda yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁷² Isu kaum muda pertama kali ditiupkan Yuddy Chrisnandi yang dikenal lantang dalam menyuarakan regenerasi di Partai Golkar. Alasannya, kaum muda adalah yang menggerakkan setiap perubahan dalam perjalanan bangsa mulai dari masa pergerakan nasional hingga reformasi. Lembaga Survei Indobarometer mengungkapkan bahwa masyarakat sebagian sudah setuju atas kemunculan pemimpin muda sebagaimana hasil risetnya yang menyatakan 62,8% masyarakat setuju dengan munculnya pemimpin muda.

Grafik V.2. Tentang Kepemimpinan Muda.

Hal ini juga nampak dari sikap masyarakat yang melihat bahwa pemimpin parpol yang pada waktu itu dinilai sudah banyak yang tua sehingga tidak pantas memimpin. Ini juga menunjukkan bahwa Jusuf Kalla juga dianggap sebagai representasi kaum tua.

⁴⁷² "Aktivitas Wapres, "Kagumi Orang Muda, Jusuf Kalla Menonton "Ayat-Ayat Cinta"" Kompas Minggu, 23 Maret 2008, 2.

Grafik V.3. Tentang Kepemimpinan

f. Isu Korupsi

Sejak era reformasi tema dan isu korupsi selalu menjadi perhatian semua kalangan termasuk partai politik.⁴⁷³ Golkar merupakan partai yang dianggap kelanjutan Orde Baru itu seringkali tertimpa isu tentang korupsi. Selama itu juga Partai Golkar berusaha membuktikan sebagai partai yang bersih dari praktik korupsi. Jusuf Kalla sendiri mengingatkan kepada para pengurus untuk tidak melakukan korupsi karena banyaknya kader partai yang menjadi pejabat daerah. Jusuf Kalla melihat bukan berarti Partai Golkar sebagai partai yang paling korup, karena menurutnya partai-partai lain juga akan mengalami hal sama ketika berada dalam posisi Partai Golkar.⁴⁷⁴

Beberapa pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi antara lain Ali Mazi yang tersandung perkara korupsi pengalihan hak guna bangunan Hotel Hilton saat masih menjadi pengacara PT Indobuildco pemilik PT Hilton. Selain itu juga di DPR di Partai Golkar di masa sebelumnya terdapat anggota parlemen yang tersangkut dengan serangkaian kasus korupsi seperti kasus Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, kasus BLBI, kasus aliran travel cheque BI, dan kasus aliran dana YPPI. Kasus ini sesungguhnya terjadi di masa sebelumnya yakni masa Akbar Tandjung. Kasus ini muncul dari adanya motif pembiayaan

⁴⁷³ PKS adalah partai politik yang sukses mengusung isu pemberantasan korupsi sehingga menghasilkan citra partai politik yang bersih. Berkat kesuksesannya perolehan suaranya menanjak signifikan dari 1,4% pada Pemilu 1999 menjadi 7,2 % pada Pemilu 2004, lihat, Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, (Newyork: Routledge, 2007), 26.

⁴⁷⁴ "Wapres Akui Tak ada Parpol yang Bebas Tindak Korupsi," Kompas, 16 Februari 2006, 3.

untuk operasional partai politik.

Hal ini kemudian mengganggu pembiayaan politik dalam operasional partai. Partai Golkar dianggap sebagai partai yang banyak penyumbangannya, tetapi pada masa Jusuf Kalla kemudian harus menjaga agar pengurusnya tidak ada yang bermasalah.⁴⁷⁵ Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Andi Mattalata pun meminta kepada koleganya untuk tidak menerima atau mencari uang untuk Partai Golkar, jika itu dilakukan untuk kepentingan pribadi partai tidak bisa menanggungnya.⁴⁷⁶ Sebagai bukti dari pesan tersebut, tampak di laporan pertanggung jawaban, dalam pelaksanaan program Partai Golkar mengalami hambatan pelaksanaan program disebabkan kurangnya biaya.⁴⁷⁷

Dalam hal isu korupsi justru Jusuf Kalla menyampaikan pesan dengan mengatakan bahwa Partai Golkar bukan sebagai bunker dari koruptor yang hal ini menjadi blunder bagi Partai Golkar, yakni pengurus daerah menjadi ketakutan dan kemudian tidak bersetia kepada Golkar sehingga dukungan kepada partai ini pun menjadi melemah.⁴⁷⁸ Pesan ini sebenarnya untuk mengubah citra partai yang pada masa sebelumnya begitu kental dengan citra korupsinya.⁴⁷⁹

g. Pemilu Legislatif 2009

Berdasar UU Pemilu, maka dalam pemilu 2009 menerapkan sistem nomor urut dengan suara terbanyak sebesar 25%. Artinya calon legislatif jadi adalah mereka yang memperoleh suara 25 persen, tetapi jika peroleh suara caleg tidak sampai angka itu caleg yang jadi akan dikembalikan pada nomor urut. Partai Golkar termasuk partai di awal menerapkan aturan suara terbanyak setelah PAN. Penerapan aturan suara terbanyak merupakan berkah bagi para caleg yang merasa pantas duduk di nomor jadi tetapi oleh partai diposisikan pada nomor urut besar, artinya berdasarkan aturan tersebut maka nomor urut masih diutamakan. Yuddy Chrisnandi adalah caleg yang ditempatkan pada nomor urut besar (nomor urut lima) di Daerah Pemilihan/Dapil Jawa Barat V (Cirebon Kabupaten dan Kota, Indramayu). Penempatan ini cukup merugikan Yuddy

⁴⁷⁵ Wawancara dengan Jusuf Kalla, Juli 2010.

⁴⁷⁶ Wawancara Andi Mattalata, Juli 2010.

⁴⁷⁷ "Gratifikasi Jebol Pundi Parpol," Gatra 30 Juli 2008.

⁴⁷⁸ "Kalla mengakui BLT dijadikan alat politik"

⁴⁷⁹ Jusuf Kalla nampaknya begitu puas pada masa kepengurusan tidak ada anggotanya yang bermasalah. Wawancara Jusuf Kalla Juli 2010.

sehingga ia mengundurkan diri.⁴⁸⁰ Justru setelah mengundurkan diri dari pencalegan itu Partai Golkar kemudian memutuskan penerapan suara terbanyak setelah opini publik dari kalangan masyarakat sipil gencar menuntut pada suara terbanyak.⁴⁸¹ Semula keputusan suara terbanyak itu menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang unik karena tidak semua partai melakukan kebijakan yang sama. Ini tentu sangat positif untuk pencitraan Partai Golkar sebagai partai yang demokratis, ditambah dengan keluarnya Keputusan MK yang mengabulkan tuntutan Shaleh, caleg dari PDI-P Surabaya yang merasa dirugikan haknya dan mengadukan aturan nomor urut itu kepada MK. Perkembangan ini membuat konstelasi pemilu legislatif menjadi semakin bergairah karena seluruh caleg memiliki kesempatan untuk lolos ke parlemen.⁴⁸² Namun begitu hal ini juga tetap menimbulkan ekses karena bisa menjadi lahan jual beli suara di KPU. Dari sisi yang dirasakan oleh para caleg sendiri seolah mereka harus bertarung melawan kawan sesama caleg partai yang sama.⁴⁸³

Jika melihat pada pesan kampanye yang dibawakan para caleg, umumnya mereka hanya membawakan pesan yang sekedar memberitahukan keberadaan mereka dan para caleg yang menyampaikan informasi mengenai apa yang kelak akan dikerjakan dan caleg juga tidak menarik emosi dari publik akan pentingnya memilih dirinya. Sering para caleg itu hanya menjadikan masa kampanye yang panjang ini dengan memasang spanduk dan poster sekedarnya saja. Dengan begitu dalam kampanye ini kognisi publik tidak ditarik oleh sesuatu yang menghentak sehingga mampu menggerakkan massa untuk memilih mereka. Di sisi lain, aturan suara terbanyak ini membuat terlena para caleg karena melupakan simbol warna kuning dan pohon beringin yang justru menurut Dirk Tomsa yang membuat Partai Golkar menang dalam Pemilu 2004 lalu.⁴⁸⁴ Para caleg justru lebih menonjolkan unsur identitas diri dengan serangkaian model seperti memiripkan dengan tokoh superhero ataupun mengaitkan dirinya dengan tokoh atau pesohor tertentu. Padahal Partai Golkar sesungguhnya masih

⁴⁸⁰ Hal ini tidak disesali oleh Yuddy Chrisnandi, justru dia merasa bangga, pengunduran dirinya justru menyumbangkan perubahan kebijakan bagi Partai Golkar, lihat buklet Mengapa Yuddy Maju? Kader bertanya, Yuddy menjawab: Calon Ketua Umum Partai Golkar Periode 2009- 2014.

⁴⁸¹ Penerapan suara terbanyak pada waktu itu diputuskan sebagai ikutan dari opini publik yang pada waktu itu kuat mengarahkan pada suara terbanyak, wawancara dengan Rully Chairul Azwar, Juli 2010.

⁴⁸² "Tidak Ada Lagi Durian Nomplok," Majalah Tempo 4 Januari 2010.

⁴⁸³ Indra Jaya Piliang, Memoar Tiga Kekalahan, 433.

⁴⁸⁴ Dirk Tomsa, Party Politic and Democratization in Indonesia, 177.

memiliki simbolisasi partai yang diwariskan di masa lalu.⁴⁸⁵ Tetapi, aturan tersebut telah melenakan para caleg sehingga justru menjadikan Partai Golkar berseteru dengan sekutu satu partai, sementara kognisi masyarakat masih menyisakan simbolisasi Partai Golkar masa lampau. Justru hal ini yang kemudian dilakukan Partai Demokrat yang lebih menonjolkan segitiga, warna biru, sosok SBY dan nomor urut partai politik.⁴⁸⁶ Sebagai akibatnya Partai Golkar melorot perolehan suaranya sedangkan Partai Demokrat melonjak hampir tiga kali lipat.

Pesan pada Pemilu Presiden

Pada pemilu presiden Rapimnassus Partai Golkar memberi mandat kepada ketua umum maju sebagai calon presiden serta mencari mitra koalisi dan partai yang menjadi koalisi adalah Partai Hanura.⁴⁸⁷ Pada waktu itu pilihannya terdiri dari beberapa calon yakni Megawati Soekarnaputri, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Menurut Soemarsono, pilihan jatuh kepada Hanura karena jumlah perolehan suara dari kedua partai mencapai angka yang disyaratkan KPU yakni 20 persen.⁴⁸⁸ Selain itu juga Partai Hanura merupakan partai yang secara kultur cukup dekat dengan Partai Golkar. Pertimbangan lain Megawati Soekarnaputri dan Prabowo Subianto merupakan calon yang menyatakan dirinya sebagai calon presiden. Bahkan popularitas Prabowo Subianto sempat menanjak karena selama tiga tahun terakhir gencar beriklan di televisi. Setelah berpasangan maka Jusuf Kalla dan Wiranto merumuskan pesan kampanye dengan menyebut Pasangan Nusantara, Islami, Bekerja Cepat, dan Kemandirian.

Sayangnya pesan yang disampaikan untuk pemilu presiden itu tidak sampai dengan tepat kepada kognisi khalayak. Pesan yang tepat dan sampai mungkin adalah pesan sebagai Pasangan Nusantara. Pesan ini disampaikan dalam lagu medley berisi lagu-lagu dari pelbagai daerah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Tetapi pesan lagu disampaikan terlalu cepat dan ramai, sehingga kurang memberi efek hipnotis dan dorongan emosional yang bisa memenangkan hati atau pikiran khalayak. Lagu yang berdurasi beberapa menit itu berima semangat dan riang. Tetapi menurut Ted Brader dalam berkampanye politik seharusnya citra dan irama musik disampaikan pada aspek emosional yang sesuai dengan

⁴⁸⁵ Dirk Tomsa, *Party Politic and Democratization in Indonesia*, 187.

⁴⁸⁶ Sebagai akibatnya terdapat calon senator yang lolos ke DPD hanya karena kesamaan nomor dengan nomor urut Partai Demokrat.

⁴⁸⁷ Keputusan Rapimnassus di Borobudur

⁴⁸⁸ Wawancara dengan Soemarsono, Juli 2010.

karakter masyarakatnya.⁴⁸⁹ Selain itu juga pesan tentang Pasangan Nusantara disampaikan melodramatik karena masyarakat lebih bersimpati pada sesuatu yang patut dikasihani. Jusuf Kalla lupa justru nuansa melodramatik ini yang menjadikan dia dan SBY menang pada Pemilu 2004.



Pada penggunaan warna Partai Golkar kurang menonjolkan warna kuning, dengan lebih menonjolkan warna merah putih yang juga dipakai pasangan Megawati-Prabowo. Padahal baik Golkar dan Hanura sangat kuat pada warna kuning dan ini juga dilupakan dalam pembuatan pesan pemilu presiden.

Pesan berikutnya, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memajukan pesan citra Islam yang kemudian tidak ditangkap dengan menampilkan pasangan Jusuf Kalla-Siti Mufidah yang mengenakan busana muslim. Foto lain, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto bersama istri masing-masing dengan latar belakang para siswi sekolah. Foto-foto ini ingin menunjukkan betapa pasangan ini dekat dengan kehidupan Islam. Tetapi, pesan ini kurang mendapat perhatian pada kognisi publik karena tergerusnya politik aliran dalam masyarakat Indonesia.

⁴⁸⁹ Ted Brader, *Campaigning for Heart and Mind*, (Newyork: Sage Publication, 2005), 67.



Pesan ini justru menjadi blunder dengan muncul kampanye hitam tentang istri dari calon wapres Boediono sebagai penganut Katolik.⁴⁹⁰ Kampanye ini justru kemudian dituduhkan pada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto meskipun hal itu tidak terbukti.



Kemudian pesan lain, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto membawa pesan sebagai pasangan pemimpin yang akan membawa pada kemandirian bangsa. Di dalamnya Jusuf Kalla menceritakan saat ia bertemu dengan Wakil Presiden AS ketika negara itu terkena krisis. Dalam pertemuan itu Jusuf Kalla justru menawarkan kepada John Kerry apa yang bisa Indonesia bantu kepada AS? Pesan ini ingin menunjukkan betapa Indonesia bisa menjadi negara yang jaya dan bermartabat bahkan di depan Amerika Serikat sekalipun. Hal ini dilihat sebagai hal yang

⁴⁹⁰ Kampanye hitam ini muncul dalam bentuk selebaran tabloid monitor yang memberitakan tentang istri Boediono yang katanya beragama Katolik lihat "Selebaran Ustad Tak Berkereta," Majalah Tempo 12 Juli 2009.

kurang bagus ditangkap masyarakat kita. Pesan itu ditangkap sebagai pesan yang sombong sementara rakyat tidak begitu suka dengan pernyataan yang sombong.

Citra yang dimajukan Jusuf Kalla adalah kinerja cepat dalam mengambil keputusan demi kepentingan rakyat. Selama ini dalam pelbagai kebijakan pemerintah terutama bidang ekonomi ia memang cepat dan tanggap. Sehingga jargon yang dimajukannya; "Lebih Cepat Lebih Baik." tapi pesan ini kemudian bertabrakan dengan konsep umumnya masyarakat Indonesia, "Alon-alon waton kelakon" (biar lambat asal selamat). Jargon yang ditawarkan Jusuf Kalla justru sama dengan ungkapan "kebat keliwat" (cepat tetapi banyak hal yang terlewatkan). Penggunaan istilah ini juga tidak disetujui Indra Jaya Piliang karena dianggap menabrak cara berpikir masyarakat kita.

Dengan demikian secara umum pesan yang disampaikan dalam kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto atau Partai Golkar ternyata cenderung melanggar nilai yang diyakini secara umum oleh masyarakat. Di sisi lain, menurut Indra Jaya Piliang, sosok Jusuf Kalla ini nampaknya lebih bekerja sendirian dan Wiranto kurang memberikan gereget pesan yang cukup baik.⁴⁹¹ Belum lagi tim Jusuf Kalla-Wiranto ini menghadapi pelbagai kampanye negatif. Beberapa data kampanye itu adalah:

1. BLT: Jusuf Kalla menang akan dihentikan
2. Konversi minyak tanah ke gas: Jusuf Kalla makin kayak arena punya pabrik gas
3. Sertifikasi guru: Jusuf Kalla menghentikan
4. Ahmadiyah: mendukung Jusuf Kalla-Wiranto
5. Jusuf Kalla menang, pesantren diawasi
6. Becak di Makasar dilarang.
7. Rumah-rumah miskin di Sulawesi Selatan : Jusuf Kalla akan bongkar dan dijadikan mall
8. Di daerah Kristen: Jusuf Kalla akan jalankan Syariat Islam.
9. Aceh: Wiranto akan terapkan DOM
10. Jk: Jawa Kegusur
11. Sumatera Barat: Jusuf Kalla setahun diganti Wiranto.

Jika melihat dari isu kampanye negatif itu lebih ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap Orde Baru yang disematkan kepada Jusuf Kalla-Wiranto yang disebarkan

⁴⁹¹ Tetapi, bagi kami, pendapat Indra ini tidak lepas dari sikapnya terhadap Wiranto yang menurutnya bermasalah dalam Kasus HAM, Indra sendiri menuliskan hal tersebut dalam memoirnya, Indra Jaya, Memoar Tiga Kekalahan..., 455.

Jaringan Rakyat Anti-Orba dan Aliansi Rakyat Korban JK. Pada selebaran pertama ditulis bahwa kemenangan Jusuf Kalla akan menyebabkan kebangkitan Golkar yang mengingatkan pada peristiwa-peristiwa yang membawa traumatika umat Islam seperti pelarangan jilbab, pesantren dituduh sarang teroris, saat pemilu umat Islam dibutuhkan tetapi setelah menang dikorbankan (beberapa peristiwa yang terjadi seperti di Tanjung Priok, Lampung, Haur Koneng, dan Banyuwangi).

Kemenangan Jusuf Kalla juga dikaitkan dengan ketakutan akan munculnya kekuasaan di tangan saudagar yang berpotensi melupakan kaum miskin sehingga dimunculkan kampanye negatif tentang rumah-rumah miskin di daerah Sulawesi Selatan akan dibongkar dan akan dijadikan mal-mal. Sebagaimana diketahui bisnis dari Jusuf Kalla berpusat di Indonesia Timur sehingga kampanye negatif ini ditujukan untuk mengurangi dukungan masyarakat Sulawesi Selatan kepadanya.⁴⁹² Sedangkan di Aceh ketakutan dimunculkan melalui figur Wiranto yang memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan HAM sehingga kampanye negatif yang disebar di daerah ini adalah isu penerapan kembali status DOM (Daerah Operasi Militer) yang merupakan sebuah kebijakan yang sempat membuat trauma masyarakat Aceh di masa lalu. Sementara itu jasa Jusuf Kalla nampaknya dilupakan begitu saja meskipun ia adalah sosok yang sangat berperan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh.⁴⁹³

Kampanye negatif inipun berisi tentang hal –hal yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat Islam. Meski sebelumnya Jusuf Kalla mencoba mengangkat tema keislaman sebagai isu yang lekat pada dirinya, ternyata dirinya tidak lepas dari kampanye negatif dengan tema ini. Jusuf Kalla disebutkan sebagai sosok yang menakutkan bagi kalangan muslim dengan menyampaikan pesan kampanye negatif bahwa pesantren akan diawasi jika ia menang. Pengawasan ini dilakukan terkait dengan isu terorisme yang telah menjadi perhatian publik sejak tahun 2001.⁴⁹⁴ Tetapi kebalikannya untuk wilayah Kristen, Jusuf Kalla diisukan sebagai presiden yang akan menerapkan syariat Islam. Hal ini memang sempat ditanyakan para wartawan mengenai citra Jusuf Kalla yang kental dengan

⁴⁹² Tentang riwayat bisnis Jusuf Kalla lihat biografi singkat dari Jusuf Kalla, Taufik Adi Susilo, Biografi singkat Jusuf Kalla, , 50-70.

⁴⁹³ Jusuf Kalla tidak peduli dirinya tidak dinominasikan sebagai peraih Hadiah Nobel. Wawancara Andi Mattalata, Juli 2010.

⁴⁹⁴ Terorisme muncul menjadi istilah yang kental bagi masyarakat amerika ketika serangan 11 September terhadap gedung WTC.

fundamentalisme Islam.⁴⁹⁵ Padahal di Ambon ataupun di Poso Jusuf Kalla adalah orang yang memiliki peran dalam merekonsiliasi pihak Islam dan Kristen.⁴⁹⁶

Dalam kaitannya dengan aliran dalam Islam yang selalu mendapatkan sorotan yakni Ahmadiyah, maka di Jawa Barat yang merupakan basis Partai Golkar terbentang spanduk ucapan selamat dari Ahmadiyah kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Ucapan ini memberikan kesan bahwa pasangan ini mendapat dukungan dari Ahmadiyah.

Pada keberhasilan program pemerintah pada 2004-2009, kampanye negatif untuk Jusuf Kalla bahkan menarik ingatan masyarakat tentang perannya dalam menelurkan kebijakan pemberian BLT, BOS, dan PNPM. Dalam hal ini Aburizal Bakrie punya penilaian sendiri, Partai Golkar tidak mau memanfaatkan program pemerintah terutama dalam hal PNPM. Padahal PNPM merupakan program pemerintah yang melibatkan masyarakat banyak yang dapat menggerakkannya serta memberi pencitraan Partai Golkar sebagai partai yang sangat berperan dalam proses pembangunan.⁴⁹⁷

Sebagaimana diungkapkan Karen S. Johnson-Cartee dan Gary A. Copeland bahwa dalam kampanye negatif adalah bagaimana menggerakkan kebencian terhadap musuh, dan dalam hal ini Jusuf Kalla sebagai calon yang dimajukan Golkar mengalami hal seperti ini melalui penyematan hal-hal buruk yang akan dilakukan Jusuf Kalla kelak. Di sisi lain harapan yang baik disematkan kepada pihaknya sendiri.⁴⁹⁸ Maka dalam kampanye negatif itu masyarakat ditakut-takuti akan hilangnya BLT, sertifikasi guru, ataupun BOS. Padahal program-program tersebut merupakan program yang dirancang Partai Golkar melalui para menteri di kabinet SBY-Jusuf Kalla.⁴⁹⁹ Isu yang ditakut-takutkan oleh lawan pasangan ini adalah sesuatu yang benar ada dalam program pemerintah seperti BLT, Sertifikasi Guru, BOS, Ahmadiyah, DOM, dan penggusuran yang artinya isu-isu ini adalah sesuatu yang ada nyata dan ditemui masyarakat.

⁴⁹⁵ Wawancara Kompas dengan Jusuf Kalla. Maret 2007, 5

⁴⁹⁶ Hamid Awaluddin, *Damai Poso*, (Jakarta: Grasindo, 2009)

⁴⁹⁷ Wawancara Aburizal Bakrie, Juli 2010.

⁴⁹⁸ Karen S. Johnson-Cartee and Gary A. Copeland, *Strategic Political Communication: Rethinking Social Influence, Persuasion, Propaganda*, (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher, 2004), 244.

⁴⁹⁹ Wawancara dengan Aburizal Bakrie, Agustus 2010.

Kampanye negatif ini dapat bekerja pada publik pemilih dikarenakan pihak Jusuf Kalla-Wiranto sendiri tidak melakukan tangkisan sehingga masyarakat pemilih menganggapnya sebagai benar. Sangat wajar jika kemudian perolehan suara pasangan ini menyusut dari perkiraannya. Ini berbeda dengan isu kampanye negatif yang ditiupkan kepada pasangan SBY-Boediono tentang agama istri Boediono yang langsung ditanggapi dengan pengajian yang dihadiri istri Boediono itu.

2. Simbol

Simbol yang digunakan oleh Partai Golkar yang adalah pemenang pemilu 2004, sehingga dalam percakapan politik yang dimunculkan adalah sebagai partai pendukung utama pemerintahan. Tapi yang muncul kemudian adalah simbolnya sebagai pembela dari pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Sebagai pembela, maka Partai Golkar tidak pernah menjadi hero dalam pemerintahan, bahkan sebagaimana diakui anggota DPR dan kalangan elite lain, partai harus mendapat efek kontraproduktif dari simbol pembela tersebut.

Sebagaimana nampak dalam topik-topik pembicaraan politiknya seperti pada tema perdamaian Aceh yang meski Jusuf Kalla sering muncul sebagai pelopor tapi yang kemudian yang muncul sebagai nominator penghargaan Nobel Perdamaian adalah SBY. Demikian halnya mengenai kebijakan kenaikan BBM dimana Jusuf Kalla ditempatkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas naiknya harga BBM dan tidak dikaitkan sebagai sosok yang mengusulkan program pro-poor policy. Justru dalam hal BLT malah lebih melekat pada sosok SBY.⁵⁰⁰

Simbol Islam sendiri tidak begitu muncul dalam tema pembicaraan politik. Jusuf Kalla justru memilih untuk menjaga jarak dengan simbol Islam selama pemerintahannya, dan baru saat kampanye saja ia mengkapitalisir sosok dirinya yang berlatar belakang Muhammadiyah dan NU. Selama pemerintahannya Jusuf Kalla nampaknya menjaga diri dari kesan mendukung ideologi Islam yang selama ini dilekatkan kepadanya.⁵⁰¹

Simbol lain yang dimunculkan oleh Golkar adalah sebagai partai yang bersih dari korupsi. Simbol ini dimunculkan sebagai pembersih dari banyaknya kasus korupsi yang muncul di Partai Golkar seperti kasus pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-Api, BLBI, aliran dana

⁵⁰⁰ Ini tampak pada penghitungan suara pada pemilu presiden 2009 yang menyebutkan nama Susilo Bambang Yudhoyono dengan BLT. "Tebar Duit Jaring Suara," *Majalah Tempo*, 26 Juli 2009.

⁵⁰¹ Wawancara Jusuf Kalla dengan Kompas dengan judul, "Semua Capres Tahu Apa Masalah Bangsa Indonesia," *Kompas*, 24 Juni 2004, 60.

BI, pengadaan mobil pemadam kebakaran, dan sebagainya. Jusuf Kalla selalu memunculkan dalam pesannya sebagai partai yang bersih sehingga mengharapkan kemenangan yang bersih dan berulang kali ia menyerahkan kasus korupsi itu kepada proses hukum.⁵⁰² Sayangnya simbol ini tidak ditangkap secara positif oleh pengurus Golkar yang lain karena justru hal ini menjadi sesuatu yang bisa mengancam keberadaan mereka dalam dunia politik. Hal ini yang kemudian memunculkan pembelotan beberapa pengurus daerah saat Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden.

Ketiga simbol dalam pembicaraan politik yang dipakai dalam komunikasi politik Partai Golkar tampak gagal, bahkan menjadikan hubungan interpersonal Jusuf Kalla dengan pengurus lainnya menjadi tidak harmonis karena simbol-simbol tersebut menyebabkan sesuatu yang kontraproduktif bagi Partai Golkar, terutama dalam meraih dukungan publik. Sebagaimana tampak pada simbol sebagai pembela, justru publik melihat Golkar sebagai partai yang terlalu dominan dan kesan meminta jatah lebih di mata publik dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas. Ditambah lagi Golkar masih dilihat sebagai warisan Orde Baru, meski pada masa kepengurusan sebelumnya muncul istilah SARS (Sindrom Amat Rindu Soeharto) sebuah istilah yang disematkan kepada Partai Golkar yang lekat dengan Orde Baru. Di masa Jusuf Kalla, Partai Golkar mencoba kembali kepada semangat kekaryaannya sebagaimana terlihat saat Jusuf Kalla lebih memilih untuk memperlihatkan kinerja sebagai wakil presiden yang bersetia kepada presidennya, tetapi di sisi lain memprioritaskan kepentingan bangsa.⁵⁰³

B. Khalayak

Khalayak dapat dilihat pada khalayak umum dan kita bisa membahasakan itu dalam kata masyarakat awam dan khalayak konstituen dimana khalayak ini merupakan khalayak yang diperkirakan menjadi simpatisan atau anggota dari suatu partai politik yang dalam hal ini adalah Partai Golkar.

1. Khalayak Umum

Pada perspektif khalayak umum kita melihat bagaimana karakter dari masyarakat pemilih Indonesia. Pada mulanya masyarakat pemilih dilihat kalangan Indonesianis dalam attachment-nya pada aliran yang dikategorikan oleh Clifford Geertz sehingga

⁵⁰² Jusuf Kalla selalu mengatakan bahwa masyarakat sudah muak dengan banyaknya kasus korupsi, "Kalla: Banyak Yang Muak Jangan Lagi Ada Kader Golkar Yang Dipenjara," Kompas 3 Mei 2008, 15

⁵⁰³ "Presiden adalah yang tertinggi" Wawancara Tempo dengan Jusuf Kalla, Majalah Tempo 30 Oktober 2005.

kemudian muncul istilah politik aliran. Politik aliran ini muncul pada tahun 1955 dengan melihat partai-partai pemenang pemilu pada pemilu 1955 dan hasil riset dari Clifford Geertz serta analisa ini dilakukan oleh Herbert Feith.

Tetapi dalam perkembangannya politik aliran ini sudah tidak nampak lagi⁵⁰⁴, sebagaimana terlihat pada kemenangan SBY- Jusuf Kalla dalam pemilu 2004. SBY dan Jusuf Kalla adalah pasangan yang maju dengan tanpa ada latar belakang tertentu dan saat itu selain SBY-Jusuf Kalla, calon presiden yang maju adalah pasangan Wiranto-Shalahuddin Wahid yang mengandalkan massa Golkar dan NU; pasangan Megawati Soekarnaputri-Hasyim Muzadi yang mengandalkan massa Nasionalis dan NU struktural; pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo yang berbasis pada Muhammadiyah dan Nasionalis; serta pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar yang membasiskan pada massa Islam dan Nasionalis. Sebagaimana diketahui pasangan SBY-Jusuf Kalla yang didukung partai bukan pemenang pemilu legislatif sanggup mengalahkan pasangan lain yang memiliki basis massa kuat baik di NU, Muhammadiyah, dan Nasionalis.

Fenomenan ini menjadi tengara tentang mulai runtuhnya dukungan politik primordial dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya politik Indonesia selalu dibaca sebagai politik primordial yang membagi masyarakatnya berdasar tiga kelompok; abangan, santri dan priayi. Atau jika melihat pembagian menurut Herbert Feith terbagi ke dalam kelompok sosialis, kelompok nasionalis dan kelompok santri.⁵⁰⁵ Pemilu presiden 2004 adalah saat ketika politik aliran dan pembagian dan pengkotakan masyarakat di Indonesia mulai tidak berlaku.

Politik aliran adalah melihat pilihan masyarakat berdasarkan aliran yang diyakini masyarakat Indonesia. Aliran yang dimaksudkan adalah trikotomi yang dikategorikan Clifford Geertz: Abangan, Santri dan Priyayi.⁵⁰⁶ Sementara politik aliran dikembangkan oleh Herbert Feith ketika menulis tentang pemilu di Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Menurutnya, partai politik yang ada di Indonesia pada masa demokrasi konstitusional, demikian dia menyebutkan masa itu, mewakili aliran-aliran masyarakat yang ada di masyarakat Jawa yakni partai yang mewakili kelompok santri seperti NU dan Masyumi dan beberapa partai kecil lainnya, partai yang mewakili kelompok abangan seperti PKI dan beberapa partai kecil lainnya dan partai

⁵⁰⁴ Saiful Mujani, " 2004: tahun SBY dan JK" dalam Majalah Tempo, 27 Desember 2004.

⁵⁰⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, (Cambridge: Cambridge University, 1988).

⁵⁰⁶ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

yang mewakili priyayi yang diwakili PNI dan beberapa partai kecil lainnya. Untuk kelompok santri terdapat kelompok santri yang modernis yang menyalurkannya pada partai Masyumi dan kelompok santri yang tradisional yang menyalurkannya pada partai NU.⁵⁰⁷ Politik aliran ini terus berlanjut hingga masa demokrasi terpimpin, bahkan kemudian disatukan oleh Soekarno dengan sebutan Nasakom: Nasionalis, Agama dan Komunis.

Pada era Orde Baru, politik aliran ini dihapuskan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1983 dengan memaksakan kepada partai-partai politik peserta pemilu untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang artinya ideologi-ideologi yang menjadi asas dari partai-partai politik itu harus diganti dengan asas Pancasila. Pemaksaan ini dilakukan pemerintah Orde Baru setelah pada tahun 1973 memfusikan delapan partai politik menjadi dua partai politik yakni PPP dan PDI. Partai pertama difusikan dari partai-partai Islam, Orde Baru menyatukan berdasarkan kategori orientasinya pada spirituiil-materiil, sedangkan partai kedua disatukan berdasarkan kategori orientasinya pada materiil- spirituiil, sedangkan Golkar sebagai partainya penguasa (ruler's Party) dianggap berada di tengah-tengah.⁵⁰⁸ Pada masa Orde Baru politik aliran terkubur sama sekali, karena Orde Baru senantiasa melakukan teror kepada masyarakat tentang buruknya politik masa Orde Lama, tentang bagaimana perseteruan dalam keluarga terjadi karena perbedaan orientasi politik.⁵⁰⁹ Melalui operasi khusus dari Ali Moertopo, kekuatan politik Orde Lama di level masyarakat dapat teredam, pada lapisan berikutnya dilanjutkan oleh "orang-orangnya" Soeharto.

Ternyata apa yang dilakukan oleh Soeharto itu tidak mampu menghilangkan sama sekali politik aliran itu. Paska lengsernya Soeharto apa yang telah dicoba untuk dihilangkan Orde Baru justru muncul kembali dengan ditandai munculnya berbagai kekuatan politik yang pernah berjaya pada masa Soekarno (baik pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin). Partai-partai kemudian bermunculan berdasarkan ideologi yang hidup pada masa lalu dengan kemunculannya yang mengenakan baju yang berbeda dan banyak wujud seperti NU di masa Orde Lama muncul dengan baju PKB, PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PKU (Partai Kebangkitan Ummat), Sunny. Dari Masyumi muncul PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Masyumi (Masyarakat Muslim Indonesia). Sementara dari PNI muncul dengan pelbagai wujud seperti PDI-P, PNI Supeni, PNI Massa Marhaen, PNI Gerakan Marhaen. Hanya saja komunisme yang sempat hidup justru tidak

⁵⁰⁷ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, 76.

⁵⁰⁸ Vedi R Hadiz dan David Bouchier, *Indonesian Politics and Society: A Reader*, 89.

⁵⁰⁹ Lihat, John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*, (Jakarta: Insititute Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008).

muncul, memang terdapat beberapa partai yang mengusung ideologi sosialisme demokrat seperti PRD (Partai Rakyat Demokratik). Pada era itu Golkar berubah dengan paradigma barunya menjadi Partai Golkar, perubahannya dilakukan dengan menghilangkan Dewan Pembina. Anehnya terdapat partai yang baru muncul di masa reformasi yang memiliki lembaga kewenangan dominan layaknya dewan pembina itu seperti yang dilakukan PKB.⁵¹⁰ Selain itu muncul partai yang merupakan gabungan partai yang dibubarkan pada masa Soekarno, Masyumi dan PSI, yakni PAN.

Ideologi partai-partai yang disebutkan di atas tidak disebutkan, tetapi semangat dari mereka mirip dengan partai lamanya, seperti PKB memang tidak menyebutkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ideologinya NU tetapi menyebutkan sebagai ideologi kebangsaan. Tetapi semangat yang diusung PKB adalah semangat NU di masa lalu selain itu juga basis massanya adalah massa NU. Sehingga ketika orang melihat PKB atau pertama kali menyebutkan namanya maka ingatan pertama kalinya akan merujuk pada Partai NU di masa Orde Lama.⁵¹¹

Pada awal reformasi itu lima partai papan atas adalah partai yang mewakili politik aliran seperti PDI-P yang menang dalam pemilu 1999 dengan 33 % suara, Partai Golkar dengan 22 % di posisi kedua, PKB berada di posisi ketiga dengan 17%, PPP sebagai partai Islam Orde Baru mendapat dukungan 10%, dan PAN mendapat 7%. Kekuatan itu tidak bertahan lama dan belum ada yang memastikan mengapa kekuatan itu menyusut pada Pemilu 2004 saat muncul Partai Demokrat memecahkan dukungan massa politik aliran tersebut. Partai yang didirikan SBY ini mendapatkan simpati rakyat dengan mendapat 7% suara pada pemilu 2004. Dukungannya diperoleh dari massa yang sebelumnya mendukung partai-partai seperti PDI-P dan PKB dan dukungan itu muncul karena Partai Demokrat mengusung jargon nasionalisme- religius, sebuah jargon yang manjur dalam menyatukan masyarakat Jawa yang realistis yakni dua kelompok masyarakat yang pada analisa Clifford Geertz sebagai masyarakat yang dapat berkonflik tetapi dapat hidup berdampingan.⁵¹² Partai Demokrat dalam hal ini mengambil pada sisi positif yakni menjadikan keduanya berdampingan. Ini yang menjadi kekuatan Partai Demokrat dalam mengakumulasi suara dalam pemilu selanjutnya pada tahun 2009.

Ide nasionalisme religius sendiri sesungguhnya bukan ide baru, Golkar sesungguhnya telah melakukan itu dengan upaya

⁵¹⁰ Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980)

⁵¹¹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, 45.

⁵¹² Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi, 456.

menghilangkan politik aliran di era Orde Baru secara berhasil dengan mengajukan konsep kekaryaan sebagai ideologi. Masyarakat yang sudah lelah dengan politik propaganda revolusi dari Soekarno itu pun kemudian tertarik kepada Golkar dan masyarakat segera melupakan politik aliran itu. Hanya saja pada masa reformasi Partai Golkar terlanjur distigmakan sebagai partai yang bertanggung jawab atas kegagalan dan kebobrokan negara sehingga menjadikan partai ini tidak mendapat simpati dari rakyat. Dukungan yang diderikan kepada Golkar di masa lalu merupakan akibat dari kebijakan massa mengambang dari pemerintah Orde Baru untuk mengempiskan dukungan kepada partai-partai politik meski kebijakan ini kemudian memberi sumbangan terhadap hapusnya politik aliran di masa itu.

Politik Orde Baru memunculkan politik yang paternalistik artinya dukungan politik diberikan kepada tokoh tertentu yang dijadikan anutan. Pada level ini Orde Baru sangat dipengaruhi politik ala Jawa yang menjadikan figur dan tokoh bapak sebagai panutan. Pada level pusat Soeharto adalah figur bapak dan warga negara adalah anak-anak mereka. Konsep ini merupakan semangat dari konsep negara integralistik yang dikonsepsikan Mr. Soepomo dalam perdebatan mengenai sistem kenegaraan yang sangat dipengaruhi oleh ide Hegelian.⁵¹³ Ide ini kemudian diadopsi Golkar dalam semangatnya (lihat Bab Tiga) yakni pada ide kolektivisme yang dipraktikkan secara adat. Pada level lokal pun terdapat "bapak-bapak" lainnya yang menjadi anutan dari masyarakat. Soeharto dalam hal ini sebagai bapak pusat. Konsep paternalistik ini dikembangkan pula oleh Golkar sebagai cara untuk menjaring dukungan dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari pelbagai kelompok dan warna kekhasan lokalitasnya.

Konsep paternalistik begitu kental pada masyarakat Jawa terutama pertemuan dalam konsep "manunggaling kawula gusti", di mana masyarakat merupakan representasi dari keluarga. Artinya seorang pemimpin adalah kepala keluarga dan rakyat adalah anak-anaknya, dalam konsep ini pemimpin adalah sosok yang dijadikan panutan masyarakat sehingga dalam penampilan (appearance) dan tutur kata ucap mencerminkan citra baik dan positif. Karakter yang seperti inilah yang diinginkan oleh masyarakat, dan ini begitu berhasil dimanfaatkan oleh SBY. Kondisi masyarakat seperti ini telah disadari ketua tim kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Fahmi Idris, bahwa kemenangan SBY atas Jusuf Kalla adalah kemenangan yang tidak terelakkan lagi.⁵¹⁴

Kemenangan SBY tahun 2009 memang berbeda dengan tahun

⁵¹³ Reeve, *The Golkar of Indonesia: Alternative Party System*, 22.

⁵¹⁴ Meskipun demikian, tim tetap berusaha dan melakukan pendekatan kepada pelbagai pihak, merancang format kampanye yang baik. Wawancara Fahmi Idris Juli 2010.

2004 yang menggunakan aspek melodramatik emosi masyarakat Indonesia terhadap SBY yang sangat kental citra sebagai orang yang dizhalimi. Selain itu juga kemenangan SBY karena berhasil memanfaatkan kegagalan pemerintahan Megawati, terutama pada aspek kenaikan bahan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan.⁵¹⁵ Pada tahun 2009 pencitraan yang dimajukan SBY adalah keberhasilan kepemimpinan nasional yang dirasakan oleh rakyat melalui program-program yang dilaksanakannya.⁵¹⁶ Kesamaan kemenangan SBY adalah keberhasilannya memajukan tentang citra pemimpin yang santun, baik, jujur, dan menyelesaikan segala masalah. Sifat-sifat seperti ini menempel pada karakter paternalisme dalam kepemimpinan politik Indonesia dan karakter ini tidak bisa dimungkiri sebagai sisa-sisa dari karakter masyarakat Indonesia.

Ini berbeda dengan karakter Jusuf Kalla yang apa adanya dan ceplas-ceplos sehingga menampakkan citra sebagai sosok yang kurang disukai oleh masyarakat.⁵¹⁷ Tipikal seperti ini memang muncul pada masyarakat Jawa yang mensyaratkan pemimpin sebagai sosok yang memiliki image berwibawa, menjaga kata-kata, dan gagah dalam penampilan.⁵¹⁸ Meski hal itu bisa diperdebatkan tetapi hal itu juga yang berhasil memenangkan SBY-Jusuf Kalla dari pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dalam pemilu 2004. Dari riset tentang party ID yang dilakukan LSI pun menyatakan bahwa sosok kepemimpinan merupakan faktor yang paling penting selain memang faktor kampanye.⁵¹⁹

Aspek-aspek nilai dari tindak dan laku SBY ini memiliki keterkaitan dengan aspek kepemimpinan Jawa yang mengedepankan kesantunan dalam tutur kata dan penampilannya yang gagah. Aspek ini tidak lepas dari komposisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar etnis jawa.⁵²⁰ Faktor non-jawa merupakan faktor yang ikut menyumbang pada dominan dari kekalahan Partai Golkar dalam Pilpres. Pasalnya partai ini tidak ada satupun memiliki calon yang

⁵¹⁵ R. William Liddle and Saiful Mujani, "Indonesia in 2004, The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono," dalam *Asian Survey*, Vol. XLV. No. 1, Januari/Februari 2005, 122

⁵¹⁶ Strategi ini kemudian diakui oleh Kalla, bahwa beberapa program pemerintah yang seharusnya dijadikan klaim keberhasilan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto justru tidak begitu kuat dikaitkan dengan keberhasilannya, lihat "Kalla Akui BLT jadi Alat Politik Pemilu," *Harian Kompas*, 19 Agustus 2009. 4.

⁵¹⁷ Kondisi ini juga disadari oleh tim pemenang pemilu dan kampanyenya Jusuf Kalla-Wiranto, wawancara dengan Soemarsono dan Fahmi Idris, Juli 2010.

⁵¹⁸ Bisa dikatakan presiden ataupun kepala daerah adalah sosok yang berpostur tinggi ataupun di atas rata-rata tinggi orang Indonesia. Wawancara Fahmi Idris, Juli 2010.

⁵¹⁹ Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Personalities, Parties, and Voters," dalam *Journal Of Democracy*, Vol. 21, Number 2 April 2010. 35-49.

⁵²⁰ Keadaan ini juga diakui oleh Soemarsono pada konteks demografinya, wawancara Soemarsono, 2 Juli 2010.

berasal dari Jawa. Jusuf Kalla sendiri sebelum mencalon diri sebagai calon presiden menyadari bahwa dirinya bukan orang Jawa sehingga kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden akan sulit untuk menang.⁵²¹ Meskipun demikian pada langkah berikutnya justru keyakinan itu dipupuskannya karena menurutnya ia kemudian ditegur oleh seorang kiai yang mengatakan bahwa Jusuf Kalla menuduh orang Jawa diskriminatif.⁵²² Atas dasar hal itu kemudian Jusuf Kalla tetap maju sebagai capres dengan tidak lagi mengusung faktor Jawa dan non-Jawa.

Di sisi lain, hal itu justru yang diangkat oleh saingannya, Partai Demokrat, melalui Andi Mallarangeng yang sesama orang Makassar dengan mengatakan orang Sulawesi Selatan belum saatnya jadi presiden.⁵²³ Aspek Jawa dan non-Jawa merupakan aspek yang cukup sensitif dalam pemilihan ini, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah Jawa sebanyak 60 % dari populasi penduduk.⁵²⁴ Pintarnya justru yang mengatakan itu adalah Andi Mallarangeng yang merupakan orang Makassar.

Konteks kejawaan memang begitu kental seolah menjadi representasi dari politik Indonesia hal ini karena secara demografis 60 % penduduk Indonesia juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada sisi lain etnis Jawa pun juga tersebar di pelbagai provinsi sehingga kemudian konteks kejawaan ini pun turut mempengaruhi tidak hanya penduduk di Pulau Jawa tetapi daerah lain. Kondisi ini dikritisi oleh Syamsul Muarif, bahwa seharusnya memang dalam pemilihan umum ini menggunakan sistem sebagaimana Orde Baru yakni perimbangan antara Jawa dan luar Jawa,

”Karena sistem voters kita untuk negara Indonesia ini itu satu permasalahan, pada masa presiden Soeharto sistem itu diatur sistem proporsional bukan one man one vote seperti sekarang ini, sehingga ada keseimbangan luar jawa dan jawa untuk perwakilan. Sehingga jika ada 500 kursi DPR 250 jawa, 250 non-jawa. Sekarang agak sulit untuk membuat aturan-aturan seperti itu, apalagi kalau dikaitkan dengan pilpres yang notabene pilpres itu di daerah padat dan tidak padat akan sangat berarti. Barangkali itu yang terkait dengna pak Jusuf Kalla dikaitkan dengan faktor kepemimpinannya dan positioning Partai Golkar. sehingga tidak otomatis popularitasnya pak Jusuf Kalla itu bisa mengangkat partai maupun posisinya sebagai

⁵²¹ “Dawuh Kiai, Maaf Saja,” Majalah Tempo 19 Juli 2010.

⁵²² “Dawuh Kiai, Maaf Saja,” Majalah Tempo 19 Juli 2010.

⁵²³ Majalah Tempo, 19 Juli 2009

⁵²⁴ Leo Suryadinata, *Etnis dan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2004).

calon presiden”.⁵²⁵

Apa yang menjadi pertimbangan dari Syamsul Muarif adalah aspek keberimbangan dalam perwakilan yang mempertimbangkan aspek warga negara dan aspek kewilayahan. Representasi kejawaan inilah yang kemudian menjadi bahan analisa dari para indonesianis untuk menganalisa politik Indonesia. Hal itu tidak menjadi alasan, karena kemenangan SBY di beberapa provinsi di luar Jawa justru mengindikasikan dukungan kepada pasangan Jawa, padahal calon presiden yang maju dari Partai Golkar bersamaan dengan calon wakil presiden.⁵²⁶

Aspek itu meskipun kemudian memudar bersamaan dengan perubahan iklim komunikasi politik yang berubah. Politik aliran sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan untuk membaca attachment masyarakat kepada partai politik tertentu berdasarkan golongannya. Pada Pemilu 2004 adalah contoh yang mencolok ketika Megawati Soekarnaputri yang merupakan representasi politik dari kelompok abangan berpasangan dengan Hasyim Muzadi yang merupakan representasi kelompok santri tradisional, atau ketika Amien Rais yang representasi dengan kelompok santri modernis berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo yang merupakan representasi kelompok priyayi. Artinya, pengelompokan identifikasi partai politik berdasarkan pengelompok aliran dalam masyarakat sudah tidak berlaku lagi. Ini memperlihatkan bahwa tema isu “Islam” ternyata tidak dapat memenangkan dukungan dari pemeluk yang beragama Islam yang notabene adalah mayoritas.⁵²⁷

2. Konstituen

Khalayak jenis kedua adalah khalayak konstituen yakni melihat bagaimana khalayak yang selama ini menjadi simpatisan dari Partai Golkar. Selepas Orde Baru, Partai Golkar harus menjadi partai politik dan bersaing dengan partai politik lain. Beberapa privilese telah dilepaskan darinya dan ratusan partai politik bertumbuhan. Meski demikian, partai politik yang tumbuh pada era reformasi bukanlah partai politik yang memiliki ideologi yang jelas. Beberapa partai memang memiliki ideologi tegas tetapi itu merupakan ideologi reinkarnasi dari ideologi partai politik pada masa Orde Lama seperti ideologi Islam dari PBB yang merupakan reinkarnasi dari Masyumi, ideologi nasionalis dari PDI-P yang merupakan reinkarnasi dari

⁵²⁵ Wawancara dengan Syamsul Muarif, Juli 2010.

⁵²⁶ Saiful Mujani dan R. William Liddle, “Personalities, Parties, and Voters,” 39.

⁵²⁷ Saiful Mujani dan R. William Liddle, “Voters and the new Indonesia Democracy,” dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner, *Problem of democratization in Indonesia: Election, Institution and Society*, (Singapore: ISEAS, 2010), 80.

PNI.⁵²⁸

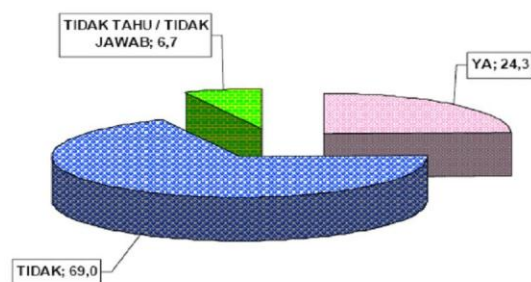
Masyarakat kesulitan dalam menentukan diferensiasi 24 partai politik yang ikut pada Pemilu 2004 apalagi jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 yang berjumlah 34. Berdasarkan dari survey yang dilakukan oleh Indobarometer bahwa masyarakat merasakan kesulitan dalam menentukan pilihan partai politiknya.⁵²⁹

Tabel 5.2. alasan kedekatan masyarakat kepada partai

DIFERENSIASI	YA	TIDAK	TIDAK TAHU/ TIDAK JAWAB
Dari 24 partai politik yang ada, secara umum kesulitan membedakan satu partai dengan partai lain?	73,3	21,8	4,9
Dari 24 partai politik yang ada, Kesulitan membedakan nama satu partai dengan partai lain?	63,7	31,1	5,3
Dari 24 partai politik yang ada, Kesulitan membedakan tanda gambar satu partai dengan partai lain?	63,1	32,2	4,8
Dari 24 partai politik yang ada, Kesulitan membedakan pimpinan satu partai dengan partai lain?	63,9	29,4	6,7
Dari 24 partai politik yang ada, apakah B//S merasa kesulitan membedakan sikap politik satu partai dengan partai lainnya?	72,3%	15,6%	12,1%
Dari 24 partai politik yang ada, apakah B//S merasa kesulitan membedakan kebijakan ekonomi satu partai dengan partai lainnya?	72,3%	13,8%	14,1%

Sementara sebagian besar masyarakat juga tidak memiliki kedekatan (loyalitas) terhadap partai politik, artinya masyarakat memang tidak memiliki kesetiaan kepada partai politik tersebut. Hingga survei ini dilaksanakan Indobarometer hanya 24,3 persen yang bersetia kepada partai politik tertentu, sedangkan sebanyak 69,0 persen tidak memiliki kesetiaan terhadap partai politik tertentu.

Grafik V.4. Kesetiaan Publik Terhadap Partai Politik⁵³⁰.



⁵²⁸ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy*, 233.

⁵²⁹ Survey Indobarometer, "Berpacu dalam Pemilu: Konstelasi Kekuatan Partai Politik dan skenario Pemerintahan" Juni 2008. 12.

⁵³⁰ Survey Indobarometer, "Berpacu dalam Pemilu: Konstelasi Kekuatan Partai Politik dan skenario Pemerintahan" Juni 2008. 17

Artinya, memang karakter masyarakat memang tidak akrab dengan kesetiaan partai tertentu sehingga partai politik. Pertimbangan masyarakat terhadap partai politik tertentu disebabkan adanya isu-isu yang dianggap penting menurut survei Indobarometer pada waktu yang paling penting adalah isu kepedulian terhadap rakyat sebanyak 34,2 persen dan isu penting kedua yang penting adalah partai politik yang dianggap jujur dan bebas KKN, sedangkan isu-isu yang mengarahkan pada politik aliran memang tidak begitu kuat diperhatikan oleh masyarakat, seperti partai yang membawa isu Islam ataupun isu nasionalisme, secara lebih rinci adalah sebagai berikut.⁵³¹

Tabel 5.3. Alasan Politik Bagi Masyarakat

KATEGORI	PERSENTASE
PEDULI / DEKAT DENGAN RAKYAT	34,2
JUJUR DAN TIDAK KKN	10,8
DEKAT DENGAN PENGURUS/ANGGOTANYA	7,2
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT	6,4
MAMPU MEMIMPIN BANGSA	4,6
VISI DAN MISINYA JELAS	4,5
PARTAI YANG DIKENAL	4,4
PARTAI ISLAM	4,0
PARTAI YANG BERPENGALAMAN	3,5
PARTAI NASIONALIS	1,6
LAINNYA	14,5
TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB	4,4

Distribusi alasan politik itu jika kemudian dilihat pada sebaran pilihan politiknya dengan pilihan PDI-P sebagai partai yang paling unggul dilihat sebagai partai yang mengangkat isu-isu yang disukai oleh masyarakat dengan sebaran sebagai berikut:

KATEGORI	PDIP	GOLKAR	DEMOKRAT	PKB	PKS	PAN	HANURA	PPP	TT /TJ
PEDULI / DEKAT DENGAN RAKYAT	36,9	20,0	9,0	8,6	12,8	3,1	2,1	2,8	0,3
JUJUR DAN TIDAK KKN	28,3	5,4	10,9	14,1	25,0	8,7	1,1	3,3	0,0
DEKAT DENGAN PENGURUS/ANGGOTANYA	50,8	6,6	19,7	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT	40,7	14,8	11,1	2,6	10,3	3,7	3,7	0,0	0,0
MAMPU MEMIMPIN BANGSA	25,6	15,4	28,2	5,7	4,9	2,6	10,3	2,6	0,0
VISI DAN MISINYA JELAS	18,4	34,2	15,8	10,5	5,3	5,3	2,6	0,0	0,0
PARTAI YANG DIKENAL	35,1	40,5	8,1	6,6	3,3	6,6	0,0	0,0	0,0
PARTAI ISLAM	0,0	2,9	0,0	64,7	11,8	11,8	2,9	2,9	0,0
PARTAI YANG BERPENGALAMAN	30,0	40,0	13,3	14,8	9,3	0,0	0,0	0,0	3,3
PARTAI NASIONALIS	64,3	21,4	14,3	5,4	0,0	2,7	8,1	0,0	0,0

⁵³¹ Survey Indobarometer, "Berpacu dalam Pemilu: Konstelasi Kekuatan Partai Politik dan skenario Pemerintahan" Juni 2008. 18

Tabel 5.4. Distribusi Alasan Partai Politik⁵³²

Jika melihat pada distribusi alasan berpolitik dari partai politik tersebut jelas bahwa sebagian besar masyarakat ikut kepada Partai Golkar sebagai partai yang dikenal. Sedikit sekali masyarakat yang mengikuti Partai Golkar sebagai partai yang jujur dan bebas KKN (hanya 5,4%). Prosentase terbesar dapat dilihat pada kategori alasan partai yang dikenal dan partai yang berpengalaman, alasan ini sudah ada sejak partai ini masih berbentuk organisasi politik non-partai. Artinya, konstituen Partai Golkar masih melihat partai ini sebagai partai yang lekat dengan Golkar pada masa Orde Baru.

Meskipun demikian, partai ini tergolong sebagai partai yang memiliki kesetiaan partai yang cukup tinggi yakni sebesar 35,8% atau ketiga tertinggi setelah Partai Demokrat dan PDI-P. Kenyataan di atas menunjukkan konstituen Partai Golkar masih melihat Partai Golkar sebagai partai layak dipilih pada tiap-tiap pemilu. Hal yang perlu dilihat adalah bahwa Partai Golkar dalam menjalankan komunikasi politiknya masih menggunakan cara-cara lama, bahkan cenderung menghidupkan cara-cara lama tanpa mempertimbangkan perubahan iklim komunikasi politik yang dipenuhi dengan keberlimpahan informasi.

Tabel 5.5. Kesetiaan Para Pemilih Terhadap Partai⁵³³

Partai yang dipilih pada 2009	Partai yang dipilih pada 2004						
	P. Golkar	PDI-P	PKB	PPP	P. Demokrat	PKS	PAN
Golkar	35,8%	5,9%	3,7%	1,3%	4,2%	3,3%	1,6%
PDI-P	4,4%	38,6%	4,9%	2,1%	4,4%	3,3%	1%
PKB	1,2%	1,3%	34,3%	3,4%	1,5%	0,8%	0%
PPP	1,9%	1,3%	2,9%	31,5%	1%	0,8%	1%
P. Demokrat	13,4%	8,7%	7,5%	11,9%	42%	9,1%	7,3%
PKS	3,7%	3,5%	3,5%	6%	3,5%	53,7%	39,1%
PAN	3,2%	2,4%	2%	2,6%	1,7%	3,3%	20,30%

⁵³² Survey Indobarometer, "Berpacu dalam Pemilu: Konstelasi Kekuatan Partai Politik dan skenario Pemerintahan" Juni 2008. 19

⁵³³ Diambil dari Daniel Dhakidae, "Partai Politik di Persimpangan Jalan". dalam Prisma Vol 28. Juni 2009, 87-98.

P. Hanura	2%	3%	1,7%	2,6%	3,9%	0,8%	3,1%
P. Partai Gerindra	3,1%	3%	2%	2,6%	2,7%	2,5%	2,1%
Lainnya	10,90%	9,6%	16,1%	10,2%	6,5%	6,6%	4,2%
Tidak memilih	0,3%	0,6%	0%	0,4%	0,4%	0,8%	0%
Menolak memberi informasi	20%	21,9%	21,3%	25,5%	28,10%	14,9%	20,30%

Upaya yang dilakukan Partai Golkar dengan merevitalisasi Karakterdes (kader penggerak teritorial desa) merupakan upaya romantis sebagaimana yang dilakukan pada pengurus pada masa Soedharmono yang berhasil meningkatkan suara pemilu hingga 70 persen. Tetapi upaya itu tidak didukung oleh kinerja dari pada tiap-tiap level pengurus. Karena karakterdes merupakan strategi yang menjangkau masyarakat untuk menjangkau suara di tingkat desa. Jika tidak dilakukan oleh pengurus pada level paling rendah hal itu tidak menjadi strategi ini bisa efektif.⁵³⁴ Menurut Yuddy Chrisnandi, banyak pengurus Partai Golkar melaporkan capaian yang mereka lakukan dan dapatkan yang tidak benar-benar menggambarkan dari kondisi sebenarnya. Kebanyakan mereka melaporkan demikian karena merasa tidak enak jika melaporkan kondisi sebenarnya yang rendah. Dengan demikian perkiraan raihan 30 persen suara yang ditetapkan oleh ketua umum sesungguhnya berasal dari data yang invalid.⁵³⁵

Pada masa Orde Baru, strategi karakterdes didukung oleh infrastruktur kepengurusan yang baik. Hal ini bisa terjadi pada iklim komunikasi politik yang top-down yang mana Partai Golkar merupakan partai penguasa yang bisa merancang strategi apapun dan didukung oleh sumber daya yang melimpah.⁵³⁶ Sedangkan pada paska Orde Baru hal itu berbeda, Partai Golkar harus menghadapi banyak saingan dari partai-partai lain ditambah lagi Partai Golkar dalam semangat kerja organisasi kepartaian menghadapi munculnya sikap kurang militan dimana setiap ada kegiatan para pengurusnya selalu mempertanyakan biaya operasional tetapi tidak dibarengi dengan kinerja yang memadai.⁵³⁷ Keadaan-keadaan seperti ini semakin mengempis konstituennya tetapi effort yang dikeluarkan tidak sepadan.

C. Opini Publik

Opini publik dilihat sebagai penilaian masyarakat pada apa yang telah dilakukan oleh komunikator dalam komunikasi politik. Ini bisa

⁵³⁴ Wawancara Yuddy Chrisnandi, Juli 2010.

⁵³⁵ Wawancara Yuddy Chrisnandi, Juli 2010.

⁵³⁶ Dedy N Hidayat, et.al, Political Communication in Indonesia, 178.

⁵³⁷ Wawancara dengan Fahmi Idris, Juli 2010. Dalam hal ini Fahmi Idris membandingkan dengan PKS yang memiliki militansi yang luar biasa.

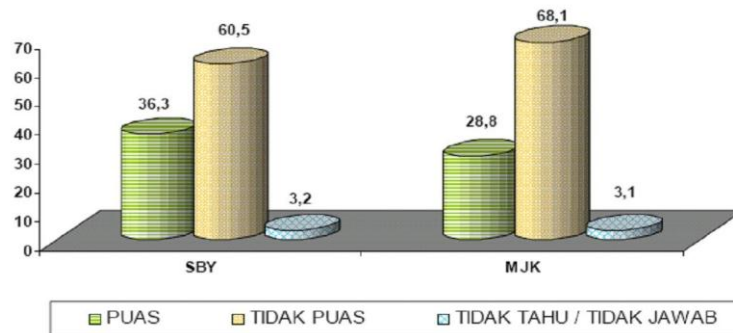
dilihat sebagai hasil dari seluruh kinerja komunikasi politik dari partai politik yang nampak pada kecenderungan penentuan pilihan publik terhadap partai politik ataupun kandidat dalam pemilu. Dalam hal ini, kinerja komunikasi politik Partai Golkar dapat dilihat melalui hasil-hasil survei berupa pencitraan dari calon presiden yang akan dimajukan atau pada pencitraan partai politiknya. Efek bisa dilihat semacam opini publik tentang Partai Golkar setelah partai ini melaksanakan komunikasi politiknya.

Efek dari komunikasi politik Partai Golkar sesungguhnya sudah nampak dari pelbagai survei yang diselenggarakan oleh pelbagai lembaga survey seperti Lembaga Survei Indonesia, Indobarometer, LP3ES, CSIS dan Litbang Kompas. Secara keseluruhan hasil survei tersebut menunjukkan efek dari komunikasi politik Partai Golkar yang sering menjadi pembela memang telah menjadi citra partai dan juga ketua umumnya menurun dalam nilai kepositifannya di mata masyarakat, sementara di sisi lain telah menaikkan citra positif dari SBY sekaligus juga memberikan efek magnitude yang lebih unggul bagi calon-calon yang lainnya yang kelak menjadi saingan dari SBY.

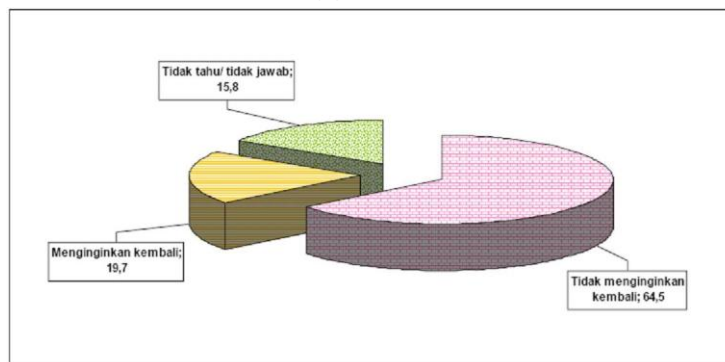
Kemunculan Jusuf Kalla di media massa sebagai pembela menjadikan pencitraan Partai Golkar justru menjadi buruk.⁵³⁸ Sementara, hal itu justru kemudian menguntungkan bagi Partai Demokrat yang kemudian malah menjadi saingannya pada pemilu. Hal ini memang karena Jusuf Kalla selalu maju sebagai penangkis dari setiap tekanan publik dari hampir seluruh kebijakan pemerintah yang kontroversial. Jika melihat pada hasil survei yang dilaksanakan oleh Indobarometer setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, maka tingkat ketidakpuasannya terhadap Jusuf Kalla justru lebih tinggi daripada ketidakpuasan terhadap SBY. Ketidakpuasan terhadap Jusuf Kalla sebesar 68,1 persen sedangkan ketidakpuasan terhadap SBY sebesar 60,5 persen. Sementara tingkat kepuasannya justru kepada SBY sebesar 36,3 persen, lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap Jusuf Kalla sebesar 28,8 persen.

⁵³⁸ Tentang peran pembela dari Jusuf Kalla ini banyak sering dikeluhkan oleh fungsionaris Partai Golkar di DPR, terutama fraksi Partai Golkar, wawancara dengan hal ini juga muncul dalam LPJ

Grafik V.5. ketidakpuasan terhadap SBY dan JK⁵³⁹



Bahkan, pasca kebijakan kenaikan BBM tahun 2008, Kalla mendapat respon dari publik untuk tidak lagi dipilih lagi. Hanya 19,7% publik menginginkannya terpilih lagi menjadi wakil presiden SBY dan sebanyak 64,5 persen tidak menginginkannya untuk dipilih lagi. Nampaknya dari hasil survei ini yang memunculkan terpecahnya kinerja komunikasi politik Partai Golkar yang terus mendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla hingga dua periode.



Grafik V.6 Keinginan Publik Atas Terpilihnya Kembali Jusuf Kalla Sebagai Wapres⁵⁴⁰

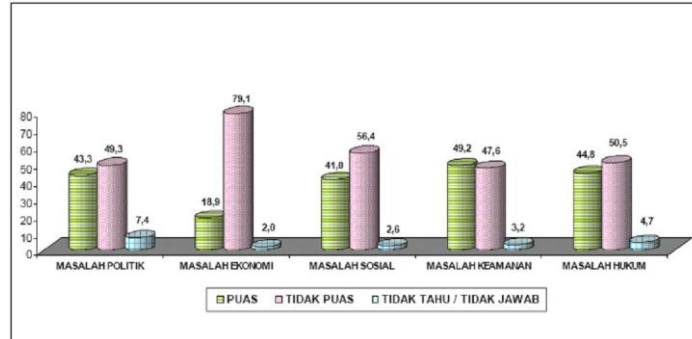
Ketidaksukaan yang tinggi terhadap Jusuf Kalla disebabkan terlalu seringnya ia di media massa dengan komentar yang santai dan ringan tetapi itu dirasakan sebagai menyakitkan dalam pendengara khalayak.⁵⁴¹ Hal ini juga sejalan dengan tidak kepuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi yang rendah dari pemerintah SBY-Jusuf Kalla di tahun 2008 yakni hanya sebanyak 18,9 persen padahal bidang ini ditangani Jusuf Kalla. Bidang yang paling tinggi

⁵³⁹ Indobarometer, "SBY-JK tergelincir BBM?: Evaluasi Publik Satu Bulan Kenaikan BBM dan Dampak Sosial Politiknya," 29 Juni 2008. 28. diunduh dari www.Indobarometer.com.

⁵⁴⁰ Indobarometer, "SBY-JK tergelincir BBM?: Evaluasi Publik Satu Bulan Kenaikan BBM dan Dampak Sosial Politiknya," 29 Juni 2008. 33, diunduh dari www.Indobarometer.com.

⁵⁴¹ Jusuf Kalla pernah menanggapi naiknya harga beras dengan komentar itu justru menguntungkan petani. Ungkapan ini ada benarnya tetapi masyarakat yang lebih suka penggunaan bahasa eufimisme dari pemimpin dan menganggap ungkapan ini tidak pantas dikeluarkan oleh petinggi negara karena kurang simpatik. Soemarsono juga memaklumi hal ini bahwa masyarakat kurang suka dengan orang yang ceplas-ceplos, Wawancara Soemarsono Juli 2010.

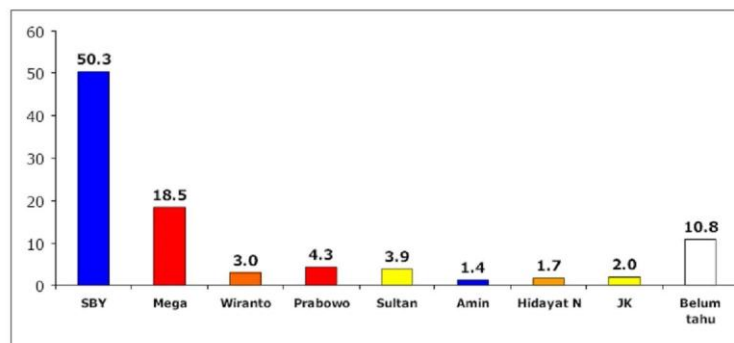
kepuasannya adalah politik dan keamanan yang merupakan sejak awal ditangani SBY:⁵⁴²



Grafik V.7. Kepuasan Publik Terhadap Penyelesaian Masalah

Pada tahun 2009, SBY menjadi presiden yang begitu kuat dalam pencitraan. Tidak hanya lebih kuat dibandingkan Jusuf Kalla tetapi juga dengan para tokoh lain yang sering muncul dan diusulkan untuk maju sebagai calon presiden seperti Megawati, Prabowo Subianto, atau Wiranto. Sebagaimana dilihat dari hasil survei oleh LSI (lembaga) tentang magnet dari calon presiden yang pada bulan Februari 2009.⁵⁴³ Sebagai pembela, sesungguhnya apa yang dilakukan Jusuf Kalla telah berhasil karena menjadikan citra SBY naik sedang citra Partai Golkar menurun dimana magnet SBY menjadi baik sementara magnet keterpilihan Jusuf Kalla begitu kecil.

Grafik V.8. Magnet calon presiden pada 20 Februari 2009



Melihat pada gambar di atas maka tampak bahwa SBY begitu kuat dibanding tokoh manapun. Dengan angka 50,3 % dan hampir seluruh tokoh partai tidak mencapai angka 5 % sekalipun, hanya Megawati yang memiliki magnet lebih dari dari lima belas persen, yakni 18,5 %. Tetapi ini tidak cukup untuk menandingi SBY. Jusuf

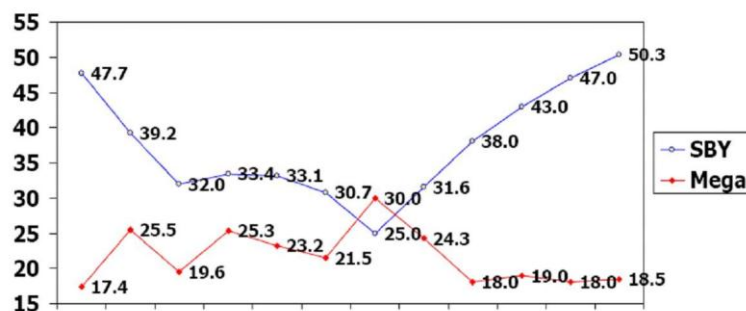
⁵⁴² Indobarometer, "SBY-JK tergelincir BBM?: Evaluasi Publik Satu Bulan Kenaikan BBM dan Dampak Sosial Politiknya," 29 Juni 2008. 30, diunduh dari www.Indobarometer.com.

⁵⁴³ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

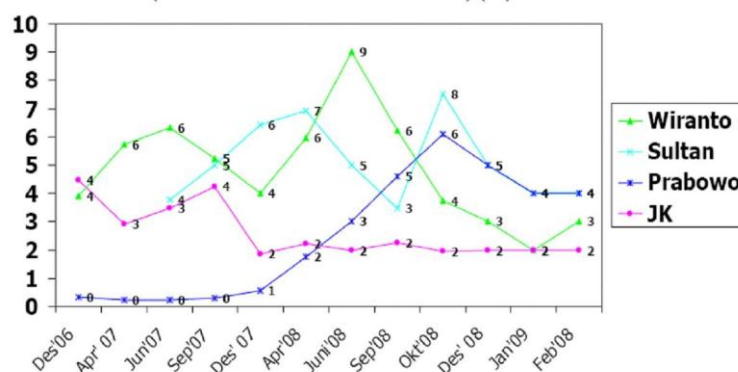
Kalla sendiri yang kelak maju sebagai calon presiden hanya mendapat 2 % saja. Memang kalau melihat dari masa pengambilan dari survei ini adalah february 2009 yakni masa ketika Jusuf Kalla belum mengumumkan sebagai calon presiden. Tetapi ini menunjukkan bahwa sosok Jusuf Kalla memang sangat jauh dibandingkan dengan SBY dalam hal magnitude-nya.⁵⁴⁴

Magnit ini merupakan penerjemahan dari kecenderungan elektabilitas SBY yang dari waktu ke waktu begitu tinggi, kecuali satu masa yang dikalahkan oleh Megawati yakni September 2008 tetapi kemudian kecenderungan tersebut tidak bisa menandingi lagi pada masa berikutnya.

Grafik V.9. Kecenderungan pemilihan Capres dari 2006⁵⁴⁵



Apalagi dengan tokoh lain seperti Wiranto, Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto. Jusuf Kalla sendiri, tidak pernah memiliki pemilihan yang cukup tinggi sebagai presiden. Nampaknya ia hanya cocok untuk wakil presiden yang maju pemimpin membutuhkan bantuannya dan ini terlihat dari keterpilihannya yang tidak pernah mencapai 5 % sekalipun.



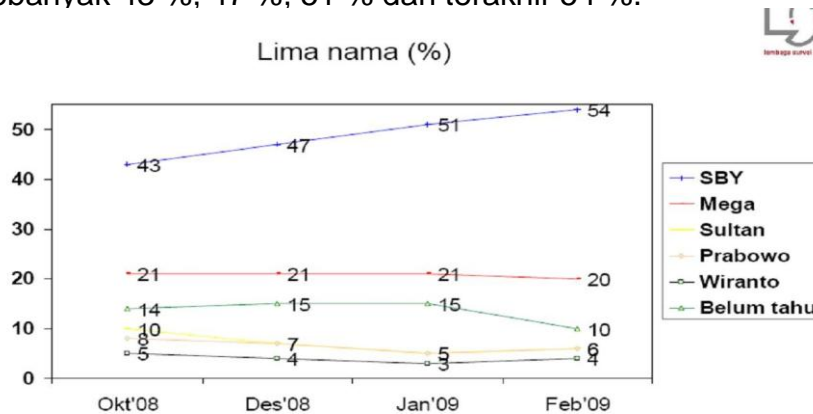
Grafik V.10. keterpilihan empat nama selain

⁵⁴⁴ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

⁵⁴⁵ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

Susilo Bambang Yudhoyono.⁵⁴⁶

LSI membandingkan sosok SBY dengan empat tokoh lainnya, maka ia tetap mendapat persentase tetap yang paling tinggi yakni 54 % dengan kecenderungan dari Oktober 2008- Februari 2009 sebanyak 43 %, 47 %, 51 % dan terakhir 54 %.



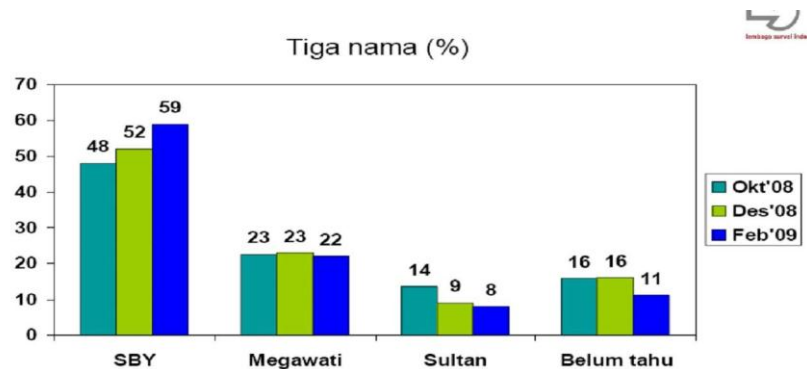
Grafik V.11. yang membandingkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan empat nama lainnya⁵⁴⁷

Keempat tokoh lainnya selain memiliki prosentase di bawah 25 % juga memilih kecenderungan stagnan atau malah turun. Tokoh Partai Golkar lain, Sri Sultan Hamengku Buwono X hanya mendapat angka 8 % dengan kecenderungan turun untuk kemudian naik lagi pada angka 6 %. Maka kemudian dapat dilihat betapa sosok SBY begitu kuat dalam hal keterpilihannya dibandingkan dengan para tokoh lain.

Jika dibandingkan dengan dua tokoh lainnya pun, SBY masih kuat. Seperti dengan membandingkan dengan Megawati dan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dimana persentase SBY tetap tinggi bahkan memiliki kecenderungan naik. Dibandingkan keduanya itu, SBY memiliki kecenderungan untuk naik dari bulan Oktober 2008- Februari 2009 dengan persentase dari 48 %-59%.

⁵⁴⁶ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survei LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

⁵⁴⁷ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survei LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.



Grafik V.12.Perbandingan SBY dengan Dua Nama Lainnya⁵⁴⁸

Malahan Megawati mengalami stagnasi dalam keterpilihannya, yakni 23 % dan 22 % dari Oktober 2008-Februari 2009, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X mengalami kemerosotan terus, dari 14 % turun 9 % hingga 8 % . Sebanyak 11- 16 % belum mengetahui keterpilihan masing-masing tokoh yang akan dipilih sebagai calon presiden. Angka ini menunjukkan sosok SBY begitu kuat dalam persepsi masyarakat sehingga mereka kemudian menjadikannya sebagai sosok yang masih layak untuk memerintah lagi periode berikutnya, sedangkan Jusuf Kalla tidak diperhitungkan.

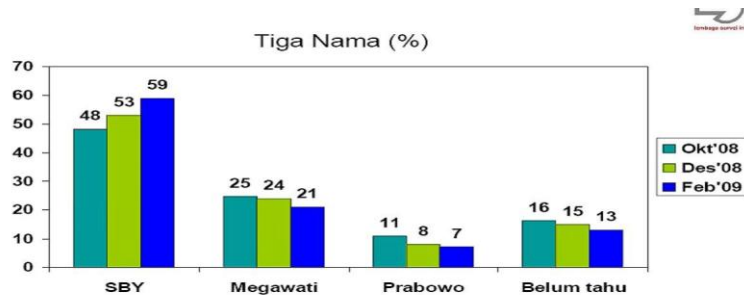
Karena beberapa hal yang Jusuf Kalla sendiri tidak pernah secara terang-terangan kepada publik menyatakan dirinya akan maju sebagai calon presiden. Meski konon beberapa pengamat mengatakan, jika ia maju sebagai calon presiden maka itu akan mengubah konstelasi kekuatan politik. tokoh Golkar yang begitu kuat dipersepsikan publik sebagai calon adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.⁵⁴⁹

Begitu juga ketika Prabowo Subianto masuk dalam jajaran tiga nama, maka SBY tetap menjadi sosok yang lebih unggul. Bahkan Prabowo juga mengalami kecenderungan untuk terus turun pada Oktober 2008, Desember 2008, dan Februari 2009. Sebagaimana perbandingan dengan dua tokoh yang lainnya.

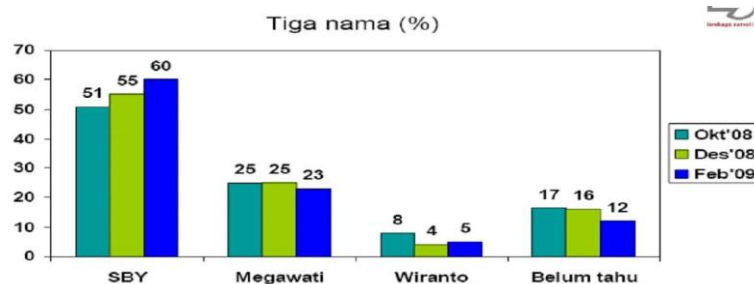
⁵⁴⁸ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

⁵⁴⁹ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

Grafik V.13. perbandingan dua tokoh



Begitu juga dengan Wiranto memiliki kecenderungan yang sama.

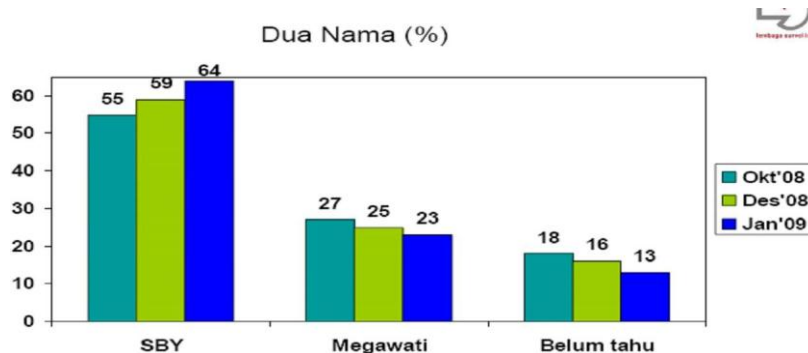


Dari tiga nama yang persentasenya besar adalah SBY, Megawati, dan (Sri Sultan, Wiranto, Prabowo). Dari ketiga tokoh tersebut, Wiranto merupakan tokoh yang paling rendah tingkat elektabilitasnya. Sayangnya sampai akhir 2008 sosok Jusuf Kalla tidak dilihat sebagai calon presiden yang mendapatkan perhatian masyarakat. Pada masa itu Jusuf Kalla memang lebih fokus sebagai wakil presiden justru pada waktu itu ia sedang menghadapi wacana tentang konvensi seperti yang pernah dilakukan masa dan Jusuf Kalla waktu itu berpendapat agar konvensi tidak dilakukan.⁵⁵⁰

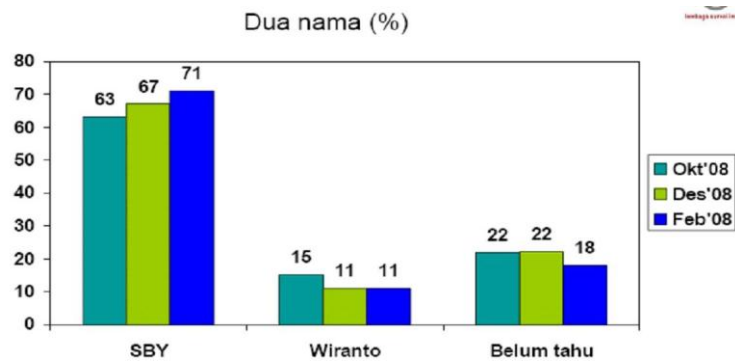
Sementara jika dipasangkan dua nama antara SBY dan calon lainnya seperti Megawati, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X maka SBY tetap dilihat masyarakat sebagai sosok yang kuat untuk maju sebagai presiden. Sosok Megawati adalah sosok berikut untuk menyaingi SBY dengan angka 20 %.

⁵⁵⁰ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

Grafik V.13. perbandingan Megawati dan SBY



Sementara Wiranto dalam menghadapi SBY hanya sanggup memperoleh angka elektabilitas tidak lebih 15 %, dan SBY bisa menembus dukungan dengan kecenderungan terus meningkat lebih dari 70 %.⁵⁵¹

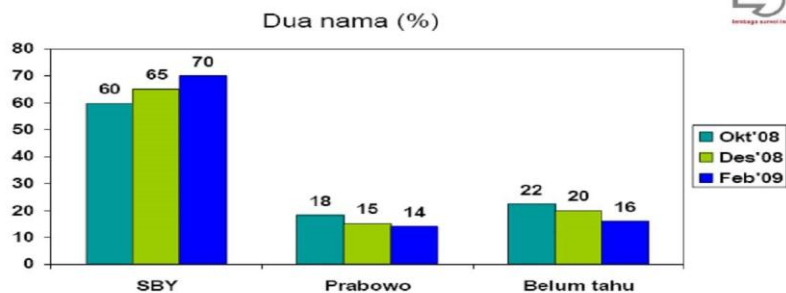


Grafik V.14. perbandingan SBY dan Wiranto

Ketika dipasangkan nama Prabowo Subianto yang menghadapi SBY, Prabowo mendapatkan dukungan di atas 15 % meski dengan dukungan yang cenderung merendah. Artinya memang jika dibandingkan dengan dukungan kepada Wiranto dalam elektabilitas, maka sosok Prabowo Subianto dilihat sebagai sebagai sosok yang lebih dipilih daripada Wiranto. Ini bisa menjelaskan mengapa pasangan Jusuf Kalla-Wiranto kelak pada Pilpres 2009 mendapat suara paling rendah.⁵⁵²

⁵⁵¹ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

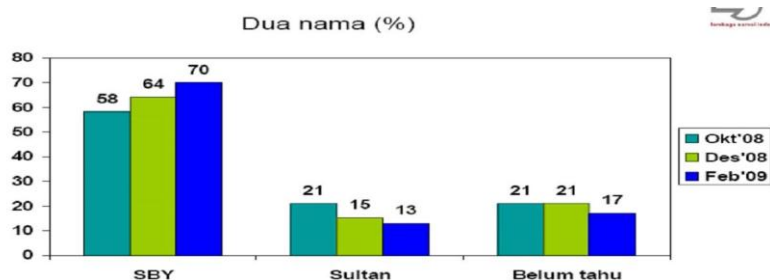
⁵⁵² "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.



Grafik V.15. Perbandingan SBY dan Wiranto

Berikutnya adalah ketika Sri Sulatn Hamengku Buwono X menghadapi SBY dimana ia memiliki dukungan "perlawanan" yang cukup berarti pada Oktober 2008, tetapi kemudian mengalami kecenderungan menurun hingga mencapai 13 %.

Dimungkinkan ini terjadi berkaitan dengan ditutupnya mekanisme konvensi oleh DPP Partai Golkar.⁵⁵³



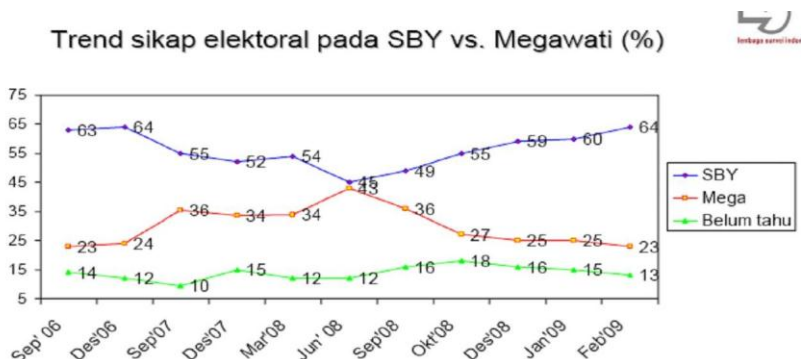
Grafik V.16. perbandingan SBY dan Sultan

Sedangkan trend-nya jika diadu antara SBY dan Megawati Soekarnaputri adalah sebagai berikut:⁵⁵⁴

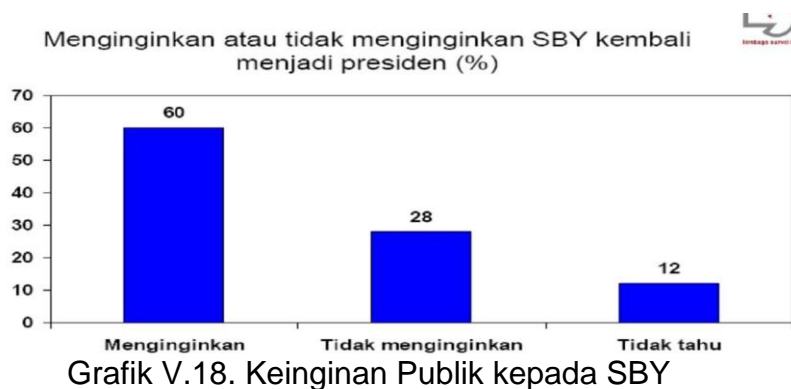
⁵⁵³ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

⁵⁵⁴ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

Grafik V.17.

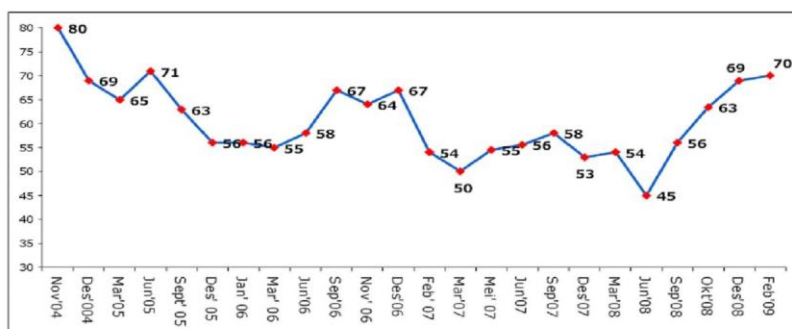


Dan jika dilihat pada keinginan masyarakat (responden survey), maka keinginan SBY untuk menjadi presiden lagi cukup kuat. Dalam empat tahun menjabat presiden tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY sangat fluktuatif. Kepuasan tertinggi dicapai ketika “bulan madu”, tahun ketika SBY baru terpilih (akhir 2004 dan awal 2005). Penurunan terdalam ditemukan pada Juni 2008 di mana kepuasan terhadap SBY di bawah 50 persen, yakni 45% yang dimungkinkan karena adanya kebijakan kenaikan BBM untuk ketigakalinya. Tapi pada September-Desember 2008, kepuasan publik pada kinerja Presiden SBY kembali naik signifikan dan berada di atas tingkat psikologis 50%, dan berada di angka paling sering muncul dalam survei selama empat tahun terakhir yakni 50- 60%. Kepuasan pada kinerja Presiden pada Februari 2009 70% makin mendekati keadaan saat SBY baru menjabat selama 3 bulan sebagai presiden (Desember 2004) yakni sebesar 80%. Terlihat alasan rasional mengapa dukungan pada SBY terus menguat: Karena makin banyak yang merasa puas dengan kinerjanya. Semua ini terkait dengan evaluasi atas kondisi makro. Hal ini juga kemudian menjadi keinginan masyarakat untuk memilih kembali SBY tetap tinggi yang kisaran 60 persen yang angka itu kemudian sejalan dengan hasil akhir Pilpres 2009.⁵⁵⁵



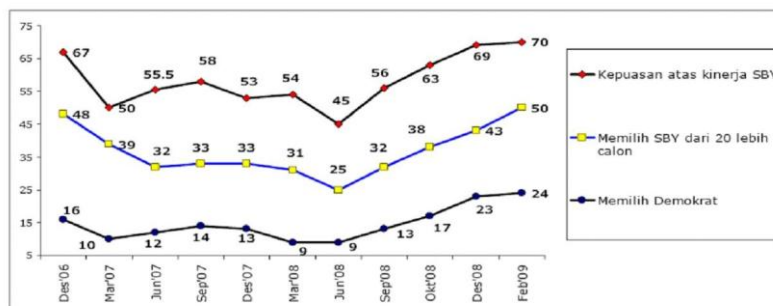
⁵⁵⁵ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

Tingginya aspek SBY ini sebenarnya tidak terlepas dengan tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan yang lebih dikaitkan dengan namanya. Jika melihat pada kecenderungan kepuasannya publik terhadap kinerja pemerintahan memang terjadi fluktuatif dengan titik awal paling tinggi 80 (kemudian angka itu tidak pernah dicapai lagi pada masa berikutnya) tetapi pada masa akhir terjadi kenaikan di angka 70.⁵⁵⁶



Grafik V.19. Grafik tingkat kepuasan sepanjang kepemimpinan

Tingkat kepuasan inilah yang kemudian mempengaruhi tingkat keinginan publik untuk memilihnya lagi. Meskipun dengan angka yang tidak sama dengan angka tingkat kepuasannya.



Grafik V.21. Tren Kepuasan Masyarakat

Hal ini menjadi keuntungan Partai Demokrat, sosok SBY yang berpengaruh pada citra Partai Demokrat yang kemudian berpengaruh positif juga bagi para caleg Partai Demokrat karena publik lebih melihat citra Partai Demokrat daripada calon legislatif.⁵⁵⁷ Secara rinci tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah SBY

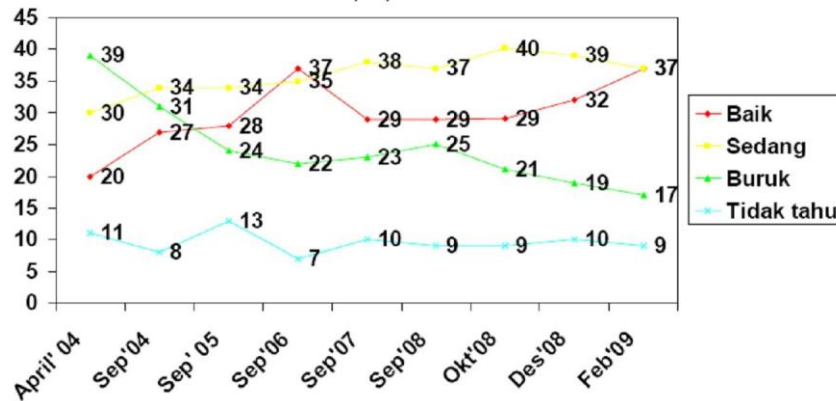
⁵⁵⁶ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

⁵⁵⁷ Saiful Mujani mengatakan "ibaratnya ditaruh iblis juga terpilih" lihat "Strategi Tempur Caleg Melempem" dalam Majalah Tempo, 22 Februari 2009. Partai Demokrat sendiri merasa kekuatan partai itu masih belum mumpuni dalam memenangi Pemilu 2009 sehingga kemudian membentuk tim-tim yang mendampingi Badan Pemenangan Pemilu, tim-tim tersebut terdiri dari sejumlah tim seperti tim delta, romeo, foxtrot dan sebagainya, lihat "Jejak Siluman Di Kemayoran", Majalah Tempo 22 Februari 2009.

adalah sebagai berikut:

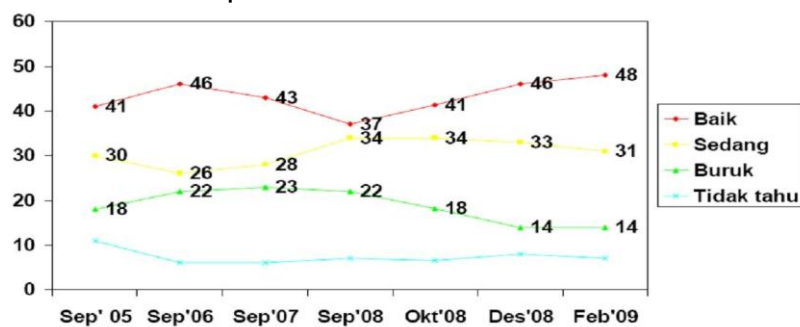
Grafik V.22.

Keadaan politik dan pemerintahan nasional sekarang



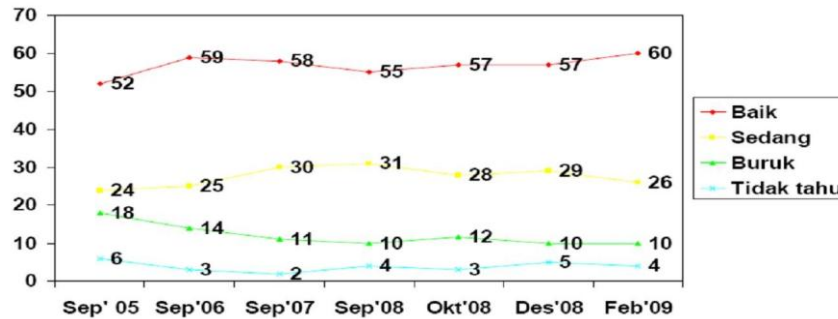
Kecenderungan serupa juga sama dengan keadaan penegakkan hukum nasional yang terjadi pada bulan Februari. Masyarakat publik mempersepsikan bahwa penegakan hukum secara nasional mengalami fluktuasi naik kemudian turun dan terakhir naik kembali. Artinya pasangan Yudhoyono-Kalla dipersepsikan melakukan kinerja yang cukup baik.

Grafik V.22. Keadaan penegakan hukum secara nasional pada bulan Februari 2009



Sedangkan pada bidang keamanan mengalami kekonstanan dalam persepsi publiknya, bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Grafik V. 23. Keadaan Keamanan dan Ketertiban secara nasional



Dari ketiga grafi tersebut terdapat sejumlah kecenderungan menarik dari evaluasi publik atas kondisi politik dan pemerintahan, keamanan, dan penegakan hukum.⁵⁵⁸ Pada bulan April 2004 ketika Megawati menjabat sebagai presiden, dan ketika pemilu presiden akan dilaksanakan, yang menilai kondisi politik dan pemerintahan secara negatif (buruk) sebesar 39%. Kemudian pada September menurun lagi menjadi 31%.

Setelah setahun SBY menjadi presiden, penilaian negatif ini kembali turun menjadi 24% dan angka ini tidak banyak berubah hingga September 2008. Setelah itu pada Oktober-Desember kembali turun dari 25% (September 2008) menjadi 19% (Desember 2008) dan turun lagi menjadi 17% pada Februari 2009. Pada masa Presiden SBY yang mengatakan kondisi politik dan pemerintahan “baik” selalu di atas yang mengatakan sebaliknya meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Yang mengatakan “baik” dan “sedang” selalu di atas 60%.

Pada masa setahun terakhir Megawati berkuasa, penilaian itu rata-rata di bawah 60%. Dengan kata lain, pada masa SBY sekarang kondisi politik dan pemerintahan “cukup baik”, sedangkan pada masa Mega “cukup” sehingga pada masa SBY lebih baik. Dalam penegakan hukum sepanjang empat tahun pemerintahan SBY, yang mengatakan buruk relatif stabil di angka antara 18-22%. Yang mengatakan “baik” selalu dua kali lipat dari yang mengatakan sebaliknya. Dan yang mengatakan “sedang” juga cukup jauh dari yang mengatakan “buruk” dan relatif stabil. Jadi secara umum kondisi penegakan hukum secara nasional dinilai publik “cukup baik.” Yang terbaik pada masa SBY adalah kondisi keamanan nasional. Dalam empat tahun terakhir yang mengatakan bahwa kondisi keamanan nasional “buruk” hanya sekitar 10-20%, dan kecenderungannya semakin menurun. Sebaliknya, yang mengatakan baik selalu di atas

⁵⁵⁸ “Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009”, Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

50%. Yang mengatakan sedang selalu dua kali lebih besar dari yang mengatakan buruk, dan cenderung meningkat.

Jadi secara umum, publik menilai bahwa kondisi keamanan nasional di bawah Presiden SBY “baik” atau bahkan “sangat baik”. Hal inilah yang kemudian memunculkan korelasi bahwa SBY dipilih lagi karena dinilai kinerjanya baik dalam menciptakan kondisi ekonomi. Ia lebih unggul dibanding pemimpin partai yang lain dan mampu menjadi gantungan Partai Demokrat yang cukup kuat di tengah tarikan partai-partai lain dari bawah karena kinerja pemerintahannya dinilai cukup baik. Hal ini diakui oleh Anas Urbaningrum bahwa Partai Demokrat menjadikan sosok SBY sebagai cantolan untuk mengatrol partai tersebut.⁵⁵⁹

Tabel 5.6. Korelasi pilihan atas Susilo Bambang Yudhoyono

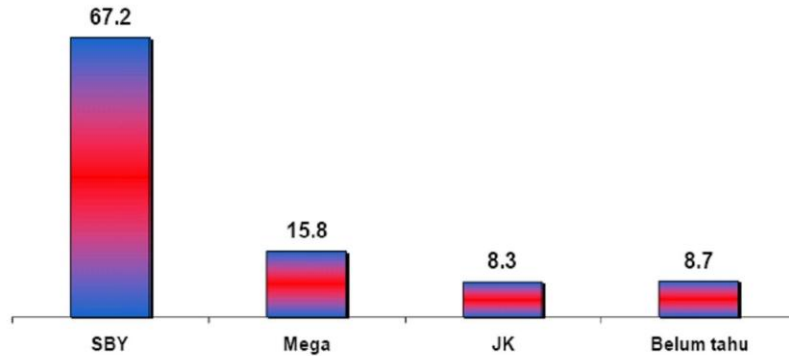
	Pilih SBY	Pilih Demokrat	Kinerja SBY	Ekonomi Nasional
Pilih SBY	1	.86	.83	.83
Pilih Demokrat		1	.91	.86
Kinerja SBY			1	.93
Ekonomi nasional				1

Sebagai pembela, sesungguhnya apa yang dilakukan Jusuf Kalla telah berhasil karena menjadikan citra SBY menaik sedangkan citra Partai Golkar merosot.

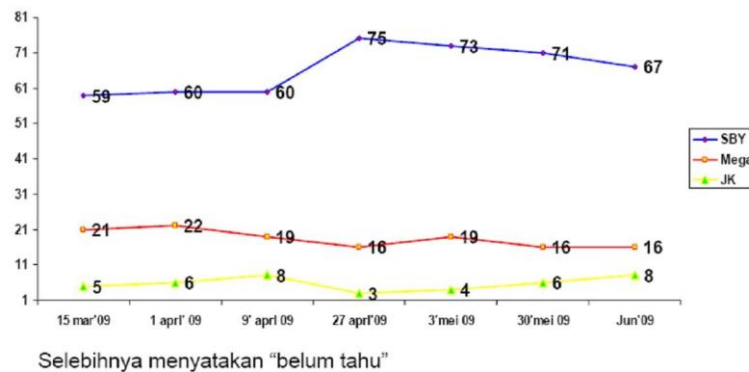
Trend elektoral ini kemudian berubah ketika LSI melakukan survei pada bulan Juni 2009 menjelang pemilu presiden. Tingkat kepemilihan Jusuf Kalla sudah muncul setelah menyatakan diri sebagai calon presiden.

⁵⁵⁹ Saat penghitungan suara, ketika diteriakkan “demokrat!” maka jawabnya adalah “BLT”, lihat “Anak Bawang Pembawa Bola”, Majalah Tempo 19 April 2009.

Grafik V.25. Jika Pemilu Presiden Diadakan Sekarang Siapakah Nama-Nama Yang Akan Dipilih?⁵⁶⁰



Munculnya nama Jusuf Kalla pada nama calon akan dipilih setelah ia menyatakan diri maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Adapun kecenderungannya keterpilihan dari ketiga nama tersebut tampak dalam grafik di bawah;



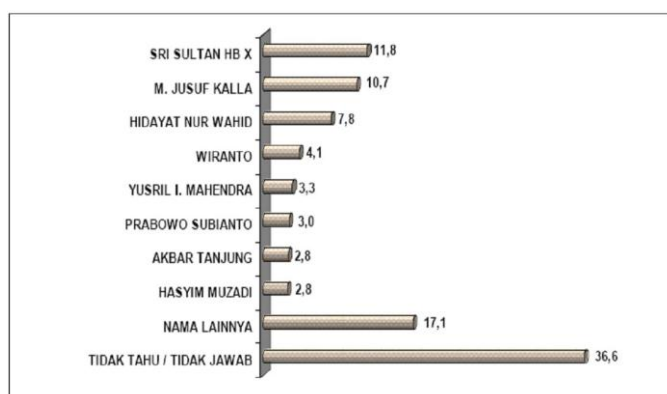
Grafik V. 26. Keterpilihan SBY.

Pada keterpilihan Jusuf Kalla, meskipun muncul sebagai calon presiden ternyata tidak dapat terus melonjak pada angka keterpilihan yang drastis kepada dua digit apalagi pada waktu yang pendek. Jusuf Kalla justru hanya muncul cukup tinggi sebagai wakil presiden, pada sebuah survei yang dilaksanakan Indo Barometer disebutkan bahwa Jusuf Kalla memiliki keterpilihan yang cukup tinggi sebesar 10,7 persen bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X sebesar 11,8 persen. Ini berarti komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar telah terserap energinya oleh Jusuf Kalla yang lebih memfokuskan kinerja komunikasi politiknya untuk "pasang badan" bagi SBY yang di kemudian hari justru tidak lagi memilihnya sebagai pasangannya

⁵⁶⁰ "Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009: Trend Opini Publik updated 8-18 Februari 2009", Hasil Survey dari LSI Februari 2009, diunduh dari www.lsi.or.id.

dalam Pilpres 2009. Beberapa pengurus Partai Golkar menjadikan hal inilah yang menjadikan kekalahan dari Jusuf Kalla pada pilpres tersebut.⁵⁶¹

Grafik V.28. keterpilihan Wakil Presiden⁵⁶²



Dari tabel-tabel di atas dapat mengerti mengapa SBY begitu kuat. Dalam beberapa hal itu disebabkan oleh appearance-nya yang memukau sehingga Megawati Soekarnaputri sering mengkritiknya dengan ungkapan "tebar pesona". Tetapi di sisi lain juga kinerja dari pemerintahan SBY-Jusuf Kalla ini cukup baik terutama di bidang politik yang mendapatkan evaluasi kinerja yang cukup baik. Aspek politik merupakan bidang yang ditangani SBY sedangkan Jusuf Kalla yang diserahi menangani urusan ekonomi yang kemudian mendapat evaluasi kinerja kabinet yang buruk. Keadaan ini betul-betul berimbas kepada Partai Golkar yang terkena buruknya akibat kinerja tersebut.⁵⁶³

Ini yang kemudian dilihat Priyo Budi Santoso bahwa kekalahan Golkar disebabkan faktor SBY yang begitu kuat. Secara sederhana lampu yang disediakan Golkar kalah terang oleh benderang SBY yang melakukan pencitraan secara luar biasa, selain juga karena Jusuf Kalla sering mengambil peran-peran pemerintahan yang kontraproduktif bagi pencitraan Partai Golkar maupun terhadap Jusuf Kalla sendiri sebagai ketua umum partai.⁵⁶⁴

Jusuf Kalla sendiri adalah sosok pemimpin yang berani mengambil resiko pada keputusan-keputusan yang beresiko, seperti dalam kenaikan BBM. Saat itu ia maju dengan berani di televisi serta

⁵⁶¹ "ibarat kita awalnya meniatkan perjalanan ke Depok tetapi kemudian pada waktu yang sempit memindahkan tujuannya ke Bogor, tentu saja itu akan mempengaruhi kinerja komunikasi politik Partai Golkar" wawancara dengan Bachtiar Ali, Juli 2010.

⁵⁶² Laporan Hasil Survey Indobarometer, "Mencari Pemimpin (Muda) Baru" Pelaksanaan Survey Juni 2008.

⁵⁶³ Wawancara dengan Rully Chairul Azwar, Juli 2010

⁵⁶⁴ Wawancara Priyo Budi Santoso, Juli 2010

memberikan penjelasan mengenai kondisi anggaran negara yang tidak cukup baik pada saat harga minyak dunia melambung tinggi. Peran-peran seperti ini yang kemudian menjadikan Partai Golkar mendapat citra buruk. Terlebih Partai Golkar melalui fraksinya di DPR juga harus membela kebijakan itu secara terang-terangan, kecuali hanya satu orang yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan kenaikan BBM itu.⁵⁶⁵ Sebagai akibatnya maka publik menilai Jusuf Kalla sebagai sosok pemimpin antagonistik yang merupakan berkebalikan dengan SBY.

Sosok SBY muncul begitu kuat pada sisi pencitraan yang positif, bahkan sejak mula dan selama kepemimpinannya ia mengedepankan penampilan yang baik, tutur kata sopan dan terukur, dan pengambilan keputusan yang tidak langsung melibatkan dirinya, sehingga untuk itu Jusuf Kalla lah yang selalu harus maju ke depan.⁵⁶⁶ Karakter ini sesungguhnya sebagai pemenuhan kebutuhan akan kepemimpinan masyarakat Indonesia yang selalu terobsesi pada pemimpin yang berwibawa dan memiliki citra. Ini yang dipenuhi SBY dalam setiap public speaking yang tampil sebagai presiden dengan tutur kata teratur dan santun serta berpenampilan gagah.⁵⁶⁷

Tampilan-tampilan ini yang disebutkan dalam khazanah ilmu politik sebagai politik paternalistik. Fahmi Idris sendiri hal tersebut sehingga pada saat awal-awal kampanyenya ia mengatakan kepada Jusuf Kalla bahwa sangat kecil kemungkinan untuk memenangi pertarungan dari pemilu presiden ini.⁵⁶⁸

Keyakinan ini tidak hanya dimiliki oleh Fahmi Idris tetapi hampir seluruh pengurus Partai Golkar yang kemudian menjadi tim kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Hampir seluruh narasumber yang diwawancarai menyebutkan Jusuf Kalla akan kalah dalam pilpres dengan menyebutkan masing-masing sebabnya dan kemenangan SBY dengan masing-masing sebabnya.⁵⁶⁹

⁵⁶⁵ Wawancara dengan Yuddi Chrisnandi Juli 2010

⁵⁶⁶ Wawancara dengan Priyo Budi Santoso, Agustus 2010.

⁵⁶⁷ Hal ini juga diakui oleh JK dalam pidato yang disampaikan sebagai ketua umum di Partai Golkar. "Quo Vadis Partai Golkar" dalam DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla Berkarya Bagi Bangsa: Bunga Rampai Pandangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, (Jakarta)

⁵⁶⁸ "saya katakana kepada JK bahwa kita akan kalah", waktu itu Jusuf Kalla marah kepada saya, dan balik bertanya kepada saya mengapa bisa kalah? Kemudian saya jelaskan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang paternalistik yang menginginkan pemimpin yang selalu tampil baik." Wawancara dengan Fahmi Idris,

⁵⁶⁹ Hanya saja dengan ungkapan yang berbeda-beda Seperti Priyo Budi Santoso yang mengatakan Yudhoyono's Factor, atau Yuddi Chrisnandi yang mengatakan bahwa Jusuf Kalla memang sengaja dijerumuskan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ataupun Surya Paloh yang mengatakan bahwa Jusuf Kalla sejak awal tidak men-drive Partai Golkar untuk memenangi pemilu. Sedangkan Aburizal Bakrie mengungkapkan Partai Golkar yang tidak mau memanfaatkan program pemerintah yang bisa digunakan oleh

Nampak memang antara SBY dan Jusuf Kalla adalah sepasang yang memang seharusnya saling melengkapi. SBY sebagai sosok penimbang dalam mengambil keputusan, sedangkan Jusuf Kalla cakap sebagai eksekutor. Kedua sosok ini menurut Andi Matalatta tidak lepas dari latar belakang masing-masingnya, SBY seorang tentara yang jika dalam mengambil keputusan terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Sedangkan Jusuf Kalla berlatar pedagang yang mempertimbangkan aspek keuntungan yang jika ada kerugian bisa ditutupi pada keuntungan berikutnya.⁵⁷⁰ Tipe pengambilan keputusan yang demikian oleh Hamid Awaluddin direkamkan sebagai sebuah buku Solusi JK yang dituliskan dalam kumpulan pengalamannya selama bersama dengan Jusuf Kalla. Menurut Hamid Awaluddin, Jusuf Kalla adalah sosok pemimpin yang dekat dengan siapapun tetapi juga seorang pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan, cepat, dan logis. Nampaknya ini yang justru sering dilihat sebagai sesuatu yang kontraproduktif⁵⁷¹, karena mayoritas dalam masyarakat kurang menyukai pada sosok yang ceplas-ceplos dan mereka lebih menyukai jika sebuah solusi atau keputusan disampaikan melalui kalimat yang nyaman. Realitas ini merupakan suatu keadaan dari sisa kecenderungan sisa Orde Baru yang menyukai kata-kata, ungkapan atau kalimat yang disampaikan dengan santun sehingga setiap perubahan bisa diterima dengan baik.⁵⁷²

Kedua orang ini ketika berpasangan merupakan pasangan yang saling melengkapi, tetapi kemudian ketika terjadi persaingan antara keduanya, maka maka hal itu menjadi kontraproduktif bagi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Jusuf Kalla yang berada pada posisi yang tidak diuntungkan, karena sejak awal ia tidak pernah meniatkan dirinya sebagai presiden. Dalam sebuah wawancara dengan The Jakarta Post, Jusuf Kalla mengatakan bahwa ia bukan sosok yang tepat untuk menjadi presiden, mengingat dirinya tidak berasal dari Jawa. Ini juga sebagai satu kenyataan bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, bahkan Bachtiar Ali, sebagai konsultan dari kampanye politik Partai Golkar mengatakan niatan Jusuf Kalla tidak sampai kepada menjadi presiden tetapi hanya sebagai wakil presiden saja.⁵⁷³ Tetapi karena demi martabat partai maka Jusuf Kalla maju

Partai Golkar, ataupun Indra Jaya Piliang yang melihat pada pendeknya waktu.

⁵⁷⁰ Wawancara dengan Andi Matalatta, Juli 2010.

⁵⁷¹ Hamid Awaluddin, Solusi Jusuf Kalla: Cerdas, Logis, Jenaka, (Jakarta: Grasindo, 2009).

⁵⁷² Karakter yang seperti ini juga diakui oleh Soemarsono terhadap karakter komunikasi Jusuf Kalla yang begitu berkebalikan dengan karakter dari Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan kesantunan, wawancara dengan Soemarsono

⁵⁷³ Wawancara dengan Bachtiar Ali, Juli 2010

sebagai calon presiden yang diusung Partai Golkar.⁵⁷⁴

Nampak bahwa Partai Golkar sesungguhnya terjebak dalam uncertainty yang tidak bisa dikelola dengan baik. Faktor ketidakpastian bahwa Jusuf Kalla memiliki kemungkinan untuk tidak lagi berduet dengan SBY justru kemudian menjadikan partai ini gagal dalam mengkonsolidasikan kekuatan internal partai Golkar. Mereka gagal untuk dapat menandingi figur SBY yang begitu kuat yang juga turut mendongkrak peroleh suara Partai Demokrat.

Jika melihat pada korelasi antara SBY dan Partai Demokrat pada tabel korelasi antara Pilihan terhadap SBY dan pilihan atas Partai Demokrat maka terdapat hubungan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,86 sehingga dapat meningkatkan perolehan partai untuk memenangkan pemilu legislatif.

Dari pemaparan tentang efek di atas dimaksudkan bahwa efek dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar semasa Jusuf Kalla justru tidak menurunkan elektabilitas dari SBY, bahkan kemudian SBY dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Ini tampak dari bagaimana ketika SBY dibandingkan dengan nama-nama lain seperti Megawati Soekarnaputri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Keadaan yang didapat oleh SBY ini karena Jusuf Kalla benar-benar menjadi pembela dan majunya Jusuf Kalla sebagai calon presiden tidak memberikan dampak apapun pada keterpilihan SBY kecuali hanya peta koalisi yang berubah.⁵⁷⁵

Citra Yudhoyono yang selalu meningkat tidak lepas dari jerih payah Kalla yang terus menerus membela Yudhoyono dalam setiap tindakannya. Citra yang dihasilkan oleh kinerja komunikasi Partai Golkar tidak lepas dari Partai Golkar yang tidak pernah meniatkan sebagai partai yang melepaskan diri dari Yudhoyono. Ini sebagai akibat dari yang Partai Golkar gagal dalam mengelola konflik kepentingan yang terjadi di partainya.

C. Pecahnya Elit Partai Golkar dan Kekalahan Kalla

Citra Yudhoyono yang begitu kuat ini menjadikan beberapa elit partai Golkar melihat bahwa Yudhoyono-lah yang pasti akan memenangkan pada pemilihan presidenitu. Seperti yang diungkapkan oleh Priyo sebagai Yudhoyono's Factor.⁵⁷⁶ Faktor ini tidak lepas dari peran Kalla yang selalui bersusah payah membela presidennya jika

⁵⁷⁴ Wawancara dengan Jusuf Kalla, Juli 2010

⁵⁷⁵ "SBY Tidak Mau Kader Golkar: Peta Koalisi Politik Berubah", Kompas Jum'at 24 April 2009, 1.

⁵⁷⁶ Wawancara Priyo Budi Santosa Agustus 2010.

terjadi isu ataupun opini masyarakat yang kurang baik tentang pemerintah. Alhasilnya, popularitas Kalla kalah oleh Yudhoyono. Karena popularitas inilah banyak elit partai Golkar yang hengkang atau memainkan dua kakinya satu di pasangan Kalla Wiranto dan satu lagi di SBY-Boediono.⁵⁷⁷ Kalla sendiri waktu itu tetap dengan percaya diri maju sebagai calon presiden dengan tanpa mempedulikan popularitas dari Yudhoyono.⁵⁷⁸

Kondisi inilah yang menjadikan elit Partai Golkar terpecah menyebabkan kepemimpinan Kalla kacau memfokuskan pada program pemenangan pemilu presiden secara baik.

Dari pihak Kalla sendiri merasa bahwa kekalahannya dalam pemilu tersebut bukan disebabkan oleh strategi yang keliru tetapi oleh karena kecurangan dan persiapan yang kurang.⁵⁷⁹ Sebagaimana kemudian mereka mendaftarkan beberapa indikasi kecurangan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Partai Golkar melihat kekalahan yang dialaminya tidak wajarnya, selain karena proses persiapan pemilu yang tidak baik sehingga menimbulkan permasalahan di banyak tahapan.

Hal yang lebih krusial lagi bagi Partai Golkar adalah adanya dugaan DPT Pilpres yang tidak sepenuhnya diperbaiki oleh KPU dan tidak diumumkan 30 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Padahal tim Jusuf Kalla-Wiranto telah mengingatkan kembali kepada KPU beberapa hari sebelum pemungutan pada pilpres, agar temuan-temuan terhadap pemilih ganda ini segera diperbaiki, namun hal ini tidak terjadi. Terdapat dua persoalan mendasar dalam permasalahan DPT tersebut yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, banyak yang hilang dalam DPT. Kedua adalah pemilih yang terdaftar ganda, di mana pemilih yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Pemilih tersebut pada umumnya terdapat di TPS lainnya, dalam satu daerah pemilihan, bahkan dalam satu kabupaten tertentu. Kasus yang dijumpai oleh Tim Verifikasi DPT Tim JK-Wiranto, telah menemukan 25 juta pemilih, dari 123 juta pemilih yang diverifikasi, memiliki NIK ganda, artinya ada 25 juta hak pilih cloning yang siap diperjualbelikan secara tidak sah, sementara yang bersangkutan tidak mengetahuinya.⁵⁸⁰

⁵⁷⁷ Hal ini ditengarai oleh Fahmi Idris yang merasa mengetahui betul siapa-siapa saja yang bermain dua kaki. Wawancara Fahmi Idris Juli 2010.

⁵⁷⁸ Diungkapkan oleh Aburizal Bakri pada wawancara Juli 2010.

⁵⁷⁹ Persiapan tiga bulan dengan hasil 13 persen adalah hasil yang baik dari pada lawan yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Wawancara Jusuf Kalla Juli 2010.

⁵⁸⁰ DPP Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009 pada Munas VIII Partai Golkar 2009: Buku II Laporan Pelaksanaan Program Korbid-Korbid, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009), 31.

Di sisi lain, terdapat upaya mengkooptasi lembaga survey sebagai alat kampanye, menjelang pencoblosan pada pilpres muncul iklan dari Lingkaran Survey Indonesia yang mengkampanyekan agar pemilu presiden dilakukan hanya satu putaran saja. Kampanye ini dianggap mengarahkan masyarakat untuk memilih pada calon presiden tertentu dalam hal ini pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.⁵⁸¹ Dalam hal ini, survey memang di satu sisi bisa digunakan untuk melihat pada bagaimana efek satu kebijakan atau komunikasi publik dari aktor komunikasi politik tetapi di sisi lain survey memiliki potensi untuk mengarahkan massa untuk ikut pada satu pendapat yang mayoritas sehingga survey terkadang jika disebarluaskan akan menyalahi etika dalam pemilihan umum.⁵⁸²

Hal yang sama juga ketika dalam perhitungan cepat dilihat oleh Partai Golkar sebagai upaya proyeksi dari pasangan calon tertentu memenangkan pemilu presiden.⁵⁸³ terutama dugaan pada adanya proyeksi hasil quick count yang diproyeksikan pada hasil akhir pilpres. Partai Golkar melihat hal ini, sebagaimana juga partai lainnya, PDI-P dan Partai Gerindra, yang mengusung calon presiden/calon wakil presiden, sebagai penyesatan bagi publik. Meskipun bagi beberapa kalangan mekanisme hitung cepat ini dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki aspek keterwakilan, meskipun terdapat kemelesetan (margin error) berkisar 1%.⁵⁸⁴

Sebagai upaya untuk melihat kecenderungan kecurangan tersebut tim dari Jusuf Kalla dan Wiranto mengajukan kepada MK permohonan pembatalan keputusan KPU nomor: 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009.⁵⁸⁵ menemukan pelbagai kegagalan terutama dalam kegandaan DPT. Sedangkan bersama dengan tim Megawati Soekarnapoetri dan Prabowo Subianto, pun mengajukan keberatan kepada MK yang akhirnya oleh MK permohonan tersebut ditolak.⁵⁸⁶ Akhirnya, meskipun ditolak oleh MK, pihak pemohon, dengan mempertimbangkan untuk menghindari keadaan kacau tidak melanjutkan upaya hukum ataupun upaya yang lainnya seperti

⁵⁸¹ "Putar-putar Satu Putaran," majalah Tempo, 5 Juli 2009.

⁵⁸² Irawan Saptono dan Ahmad Faisal "Bagaimana Seharusnya Media memberitakan Hasil Survey," dalam Irawan Saptono (eds), Media, Pemilu dan Politik, (Jakarta: ISAI dan Yayasan TIFA, 2010), 131-154.

⁵⁸³ Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa Bakti 2004-2009, 70.

⁵⁸⁴ "Pemilu Dengan Data Cepat Saji," Majalah Tempo 12 April 2009.

⁵⁸⁵ Dokumen pengajuan pembatalan hasil pemilu presiden 2009, Tim Advokasi dan Hukum "Jusuf Kalla-Wiranto"

⁵⁸⁶ "Kalah Tapi Tak Menyerah," Majalah Tempo, 19 Juli 2009.

menolak hasil pemilu presiden.⁵⁸⁷

Dari kalangan elit Partai Golkar sendiri sudah menerima kekalahan tersebut karena terbukti beberapa elit partai Golkar mendapatkan jabatan ataupun posisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

⁵⁸⁷ Wawancara dengan Rully Chairul Azwar Juli 2010.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan besar dari buku ini, hubungan antar-elit adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan kinerja komunikasi politik. Hubungan antar-elit ini merupakan komunikasi antar individu, yang artinya komunikasi level individu pun bisa menentukan efektivitas komunikasi politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Joseph Devito, Frederick William, dan Dan Nimmo melihat komunikasi antar individu merupakan level yang paling penting dalam komunikasi antar-manusia. Dalam konteks komunikasi politik, hubungan antar-manusia yang dimaksudkan adalah hubungan interpersonal dalam menciptakan hubungan antar-elit yang harmonis.

Pada level individual, ketua umum gagal mengelola perselisihan konflik dalam dirinya. Sebagai representasi Partai Golkar, dia selalu berperan sebagai pelindung dari setiap kebijakan pemerintah. Ini disebabkan ketua umum partai meniatkan posisinya untuk menopang stabilitas pemerintahan sebagai sebuah tuntutan dari sistem presidensial. Pesan-pesan yang disampaikan lebih memprioritaskan kepentingan pemerintah (koalisi) daripada kepentingan partai. Bahkan Jusuf Kalla lebih menonjolkan dirinya sebagai pelindung koalisi tersebut. Akibatnya, saluran pesan yang digunakan Kalla tidak berbeda, baik saluran dari partai ataupun saluran dari pemerintah. Hal ini membuat khalayak menilai buruk Jusuf Kalla. Masyarakat tidak hanya melihat Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, tapi juga sebagai ketua umum partai. Karakter khalayak, masyarakat Indonesia, melihat sosok pemimpin haruslah menyampaikan sesuatu yang bernilai positif. Pemimpin yang memperlihatkan hal yang buruk hanya akan memperoleh respon negatif dari khalayak. Alhasil, efek yang diperoleh dari pesan tersebut adalah buruknya citra Partai Golkar.

Pada level kelompok, terlihat jelas bagaimana Ketua Umum kurang berhasil mengelola konflik antar-elit Partai Golkar di tingkat pusat (horisontal) yang tampak dari adanya disharmoni dalam pembicaraan politik beberapa isu. Sementara, di sisi lain juga kurang intensif berkomunikasi dengan elit Partai Golkar yang lebih rendah di tingkat daerah, karena hambatan protokoler dan keterbatasan waktu.

Level organisasi terkena dampak lanjutan dari level kelompok, yakni bagaimana Golkar menentukan arah politik partainya yang memosisikan diri sebagai pembela pemerintah, dan mengesampingkan kepentingan sendiri. Hal ini tampak pada sedikitnya program partai yang dilaksanakan, karena partai lebih fokus pada pembelaan kepentingan koalisi. Pada level

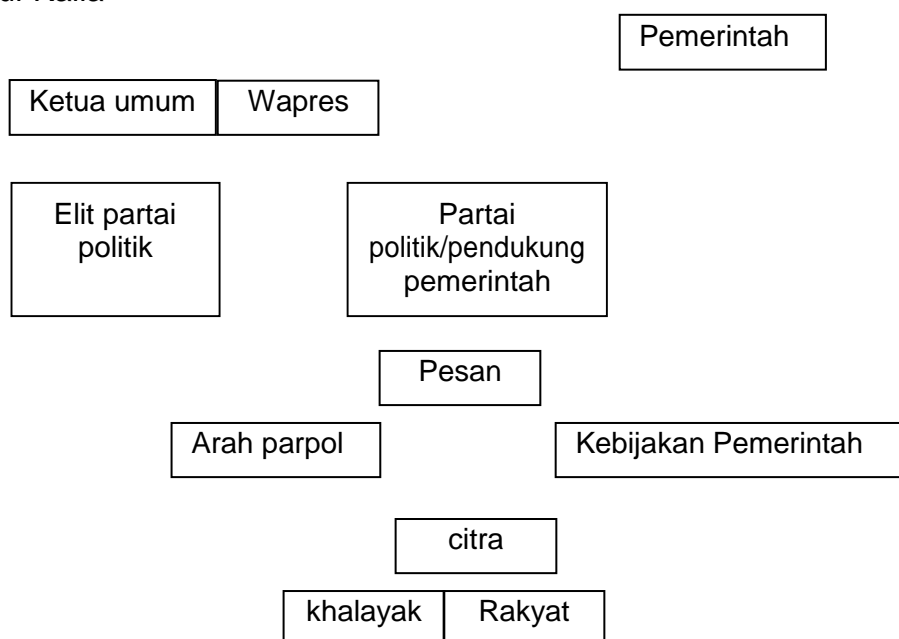
ini, meskipun terdapat kedudukan wakil ketua yang dapat menopang rangkap jabatan ketua umum, wakil ketua umum masih tidak mampu memenuhi kebutuhan akan kinerja ketua umum.

Pada level massa, Partai Golkar menjadi lebur dalam mitra koalisi (Yudhoyono/Demokrat), sehingga publik melihat setiap nilai positif dari Kalla/Golkar menjadi milik mitranya. Ironisnya, Kalla/Golkar justru selalu mendapatkan nilai negatif. Ini dikarenakan Kalla selalu maju sebagai pembela kebijakan, sehingga muncul persepsi buruk terhadap Golkar dari publik.

Dari uraian di atas dapat dilihat, kekalahan Partai Golkar dikarenakan kegagalan komunikasi pada level individual. Kegagalan ini disebabkan oleh kegagalan pengelolaan perselisihan kepentingan dalam sosok ketua umum yang menduduki jabatan pemerintahan.

Penelitian ini berseberangan dengan teori yang melihat kinerja komunikasi politik sangat dipengaruhi kemampuan memenangkan perhatian dari publik melalui media. Sebuah pendapat yang umum diterima dalam khasanah penelitian komunikasi politik, bahwa untuk memenangkan perhatian publik harus memperhatikan faktor pencitraan, simbol, dan informasi yang disampaikan pada level massa. Teori komunikasi politik melihat pencitraan sangat memperhatikan keberlimpahan informasi, sehingga masyarakat harus disugahi dengan pencitraan yang kuat bagi partai ataupun kandidat. Penelitian ini menguatkan pendapat, bahwa dalam komunikasi politik, yang paling berpengaruh adalah para politisi bukan media.

Grafik VI.1. Kondisi Komunikasi Politik Partai Golkar era Kepemimpinan Jusuf Kalla



2. Rekomendasi

Setelah melakukan kajian dan menyimpulkannya, penulis merasa perlu untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum melihat aspek sosial budaya. Artinya, dalam penelitian ini, belum dilihat bagaimana sesungguhnya komunikasi politik itu dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi pesan dari komunikator kepada komunikan. Pada kajian budaya komunikasi politik, pesan tidak dilihat sebagai sesuatu yang mengalir di jalur yang lurus, tapi dilihat sebagai sesuatu yang mengalir pada wahana yang memiliki aral melintang meski tetap mengalir.
2. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar dalam pengelolaan partai politik aspek perselisihan kepentingan (conflict of interest) diperhatikan, terutama individu pemegang posisi kunci partai. Dengan demikian, tidak mengganggu kinerja komunikasi politik partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. Islam dan Masyarakat Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Abu Rabi', Ibrahim. Contemporary Arab Thought: Studies in Post 1967 Arab Intellectual History. London: Pluto Press, 2004.
- Abuza, Zachary. Political Islam and Violence in Indonesia. Newyork: Routledge, 2007.
- Adams, Cindy. Penyambung Lidah Rakyat: Biography as Told to Cindy Adams. Jakarta: Gunung Agung Press, 2000.
- Ahmad, Zaid. The Epistemology of Ibn Khaldun. London: Routledge, 2003.
- Alfian, Alfian. "Desimplifikasi Partai Golkar." Kompas. Senin 13 Desember 2004.
- Al-Jabiri, Muhammed Abed. 'Aql Al-Arabi Al-Siyasi, Maroko: Markaz Dirasat 'l-Arabiyyat-i'l-wahdat-i, 1998.
- _____ Democracy, Human Right and Law in Islamic Thought. NewYork: IB Tauris Publisher and The Center for Arab Unity Studies, 2009.
- Al-Rasheed, Madawi. Contesting the Saudi State: Islamic Voice from A New Generation. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Alzastrouw, Ng. Gerakan Islam Simbolik: FPI Studi tentang Gerakan Radikal di Indonesia. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Ambhardi, Kuskrido. Mengungkap Kartel Politik, Jakarta: KPG dan LSI, 2009. Ananta, Aris, Arifin, Evy Nurfidya dan Suryadinata, Leo. Indonesian Electoral Behavioral. Singapore: ISEAS, 2004.
- Anderson, Benedict R.'OG. Imagined Communities: Reflections on The Origins and Spread of Nationalism. London: Verso Press, 1991.
- _____ Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia. Singapore: Equinox Publishing, 2010.
- Ascher, William dan Ascher, Barbara Hirschfelder, Revitalizing Political Psychology: The Legacy Of Harold Lasswell, New Jersey: LEA Publisher, 2005.
- Aspinall, Edward. Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia, California: Stanford University Press, 2005.
- _____ and Mietzner, Marcus. Problems of Democratisation in

- Indonesia: Election, Institutions and Society. Singapore: ISEAS, 2010.
- Atwater, Jeanne E and Waldman, David A. Leadership, Feedback and Open Communication Gap. Oxon: LEA Publishing, 2008.
- Awaluddin, Hamid Solusi JK: Logis, Spontan, Tegas dan Jenaka. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Azwar, Ruli Chairul. Politik Komunikasi Partai Golkar dalam Tiga Era. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ba'ali, Fuad. Society, State and Urbanism, Newyork: SUNY Press, 1988.
- Badaracco, Claire H. (eds). Quoting God: How Media Shape ideas about Religion and Culture. Texas: Baylor University, 2005.
- Bakrie, Aburizal, dll, Mereka bicara Jusuf Kalla. Jakarta: National Press Club of Indonesia, 2010.
- Barton, Greg. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: a View from The Inside. Sidney: UNSW Press, 2002.
- _____ Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman. Yogyakarta: LKIS dan The Wahid Institute, 2004.
- Belloc, Hillaire and Chesterton, Cecil. The Party Sistem. Virgina: IHS Press, 2007.
- Benda, Harry J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Bawah Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Benoit Kenneth and Laver Michael. Party Policy in Modern Democracy. Oxon: Routledge, 2006.
- Berger, Arthur Asa. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approach, California : Sage Publication, 2000.
- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. The Social Construction of Reality: Treatise in The Sociology of Knowledge. New York: The Penguin Books, 1991.
- Bertrand, Jacques. Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Bhakti, Ikrar Nusa Bhakti. "Pilkada dan Kans JK pada 2009". Kompas Senin, 27 Juni 2005. h. 4.
- _____ "Gonjang-Ganjing Partai Golkar." Harian Kompas, 16 Oktober 2008. h. 4.
- Bhakti, Ikrar Nusa Bhakti. "Partai Golkar dan 'Reshuffle' Kabinet." Kompas, Jumat, 20 Mei 2005. h. 4

- Blackburn, Susan. *Woman and State in Modern Indonesia*. Newyork: Cambridge University Press, 2004.
- Boudreau, Vince. *Resisting Dictatorship: Resisting and Protest in Southeast Asia*,
Newyork: CambridgeUniversity Press, 2004.
- Boun, Arjent, et.al. *The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure*. Cambridge: Cambridge University, 2005.
- Bourchier, David dan Hadiz Vedi R. *Indonesian Politics and Society: A Reader*.
London: Routledge Curzon, 2003.
- Brader, Ted. *Campaigning for Hearts and Minds: How Emotional Appeals in Political Work*. Chicago: University Chicago Press, 2006.
- Budiman, Hikmat dan Subianto, Landry H. *Komunalisme dan Demokrasi: Negosiasi dan Negara*. Interseksi dan The Japan Foundation Asia Center, 2003.
- Budiyono, Zaenal A. "Senjakala Politik Aliran dan Patron Klien" dalam *Seputar Indonesia*, edisi 15 Juli 2009.
- Bull, Peter. *The Microanalysis of Political Communication: Claptrap and Ambiguity*. Oxon: Routledge, 2003.
- Bunte Marco and Ufen Andreas. *Democratization in Post-Suharto Indonesia*.
Oxon: Routledge, 2009.
- Butler Patrick dan Collins Nei., "A Conceptual Framework for Political Marketing," dalam Newman Bruce I. *Handbook of Political Marketing*, California: Sage Publication, 1999.
- Cangara, Hafid. *Komunikasi Politik: Konsep, Strategi dan Metode*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2009.
- Castells, Manuels. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Choirie, A.Effendi. *PKB, Politik Jalan tengah NU: Eksperimen Pemikiran Islam Inklusif Paska Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Cribb, Robert and Kahin, Audrey. *Historical Dictionary of Indonesia*, 2nd edition. Oxford: Scare Crow Press, 2004
- Dake, Anthony C.A. *The Sukarno File 1965-1967: Chronology of a Defeat*. Boston: Brill, 2006.
- Denzin. Norman K. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dhakidae, Daniel. "Partai Politik di Persimpangan Jalan." dalam Prisma Vol 28. Juni 2009. h 87-98.

DPP Partai Golkar. Buku Materi II, Rapimnas I -2005 Partai Golkar. Partai Golkar 2005..

_____Keputusan Rapimnas I Partai Golkar tahun 2005, Nomor: 03/Rapimnas-I/Golkar/XI/2005.

_____Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar periode 2004-2009, Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009.

_____Laporan pertanggung jawaban Korbid Hubtelkom Infokom DPP Partai Golkar 2004-2009, Jakarta Oktober 2009.

_____Laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2004-2009, Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009.

_____Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku I Laporan Umum. Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009

_____Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku II Laporan Pelaksanaan Korbid. Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009.

_____Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Masa Bakti 2004-2009, Buku III Laporan pelaksanaan Program Organisasi Sayap, Badan, Lembaga Dan Fraksi Partai Golkar, Jakarta: DPP Partai Golkar, 2009.

_____Laporan Pertanggungjawaban Koordinator bidang Keagamaan DPP Partai Golkar, Jakarta 2009.

_____Laporan pertanggungjawaban Korbid Ekonomi dan UKM, Jakarta: DPP Partai Golkar , 2009.

Durham, Marcus, Ph. D., et.al. Leadership and Success in Organization, Culture and Ethics: Group or Horizontal Interaction. Tulsa: Dream Point, 2005.

Duverger, Michael. "Asal Mula Partai Politik." dalam Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1988.

Edelman, Murray. The Politics of Misinformation. California: Sage Reference Publication, 2009.

Eickelman, Dale F. and Anderson, John. New Media in the Muslim World: The Emerging of Public Sphere, Indiana: Indiana University Press, 2003.

Ekloef, Stefan. Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia: PDI and Decline of New Order (1986-1998). Copenhagen: NIAS

Press, 2003.

Elson, RE. Soeharto: A Political Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Emmerson, Daniel K. Indonesia Beyond Soeharto; Negera, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Erb, Maribeth, et.al. Regionalisme in Post Soeharto Indonesia, London: RoutledgeCurzon, 2005.

Eriyanto. Kekuasaan Otoriter; Dari Gerakan Penindasan menuju Politik Hegemoni: Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000.

Esser, Frank and Barbara. Comparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges, Newyork: Cambridge University Press, 2004.

Faisal, Ismail. "Islam, Politics and Ideology in Indonesia: a Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila." Disertasi Fakultas Paskasarjana dan Riset, Institut Kajian Islam, University of McGill, 1995.

Faisol. Ahmad. "Bab I, Media dan Pemilu." dalam Saptono Irawan. Media, Pemilu dan Politik: kecenderungan media dalam politik 2009. Jakarta: ISAI, 2010.

_____ "Memberitakan Rekam Jejak Peserta Pemilu, Kewajiban Media Massa Dalam Pemilu Demokratis" Saptono Irawan. Media, Pemilu dan Politik: kecenderungan media dalam politik 2009. Jakarta: ISAI, 2010.

Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama NU 1952-1965. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Feener, R. Michael. Muslim Legal Thought in Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Feith, Herbert. Indonesia Election of 1955. Modern Indonesian Project (southeast Asia Project, Cornell University, 1971.

_____ dan Castle Lance. Pemikiran politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES, 1988.

_____ The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. New York: Cornell University Press, 1988.

Fiederspiel, Howard. Islam and Ideology in Emerging Indonesia State The Persis 1923-1957. Leiden: Brill, 2001.

Forshee, Jill, Culture and Customs in Indonesia, Connecticut: Greenwood Press, 2006.

Frederich Neumann Stiftung. Radio dan Pemilu 2004. Jakarta: KPU, 2005.

Freedman, Amy L. Political Participation and Ethnic Minorities: Chinesess

- Overseas in Malaysia, Indonesia, and USA. New York: Routledge, 2000.
- Friend, Theodore. Indonesian Destinies. Cambridge: The Belknap of Harvard University Press, 2003.
- Furkon. Aay Muhammad. Partai Keadilan. Jakarta: Teraju, 2004.
- Gaffar, Affan. Javanese Voters: A Case Study of election Under Hegemonic Party System. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1992.
- Geertz, Clifford. Abangan, Santri dan Priyayi. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- _____. Islam Observed: Religious Development in Morroco and Indonesia. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.
- _____. The Interpretation of Cultures. New York: The Basic Books, 2000.
- Graber, Doris A. "Methodological Development Research." dalam Kaid Lynda Lee. Handbook Of Political Communication Research. New Jersey : Lawrence Elbaum Associate, 2010.
- Gross, Max L. A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia. Washington: National Defense Intellegence College, 2007
- H. Dan O'Haire and William F. Eadi. 21st Century of Communication Handbook. California: Sage Reference Publication, 2009.
- Habibie, Baharoeddin Joesoef. Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri, 2009.
- Hamad, Ibnu. "Political Marketing: Konsep dan Metode." Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis dan Birokrasi, Vol. XIV/no.3/September/2006. h. 602-622.
- _____. Komunikasi Sebagai Wacana, Jakarta: Latrofi, 2010.
- Hamdi, Muchlis (et.al). Kajian Pemilu 1999, Jakarta, 1999.
- Haris, Syamsuddin, "Golkar , DPR, dan Yudhoyono", Kompas, Sabtu 29 Oktober 2005, h. 4.
- Harre, Rom. Social Being. London: Blackwell, 1996.
- Hartley, Eugene L. dan Hartley, Ruth E. Fundamental of Social Psychology. New York: Albert A. Knopf, 1961.
- Hartley, Peter, Interpersonal Communication, 2nd Edition, London: Routledge, 1999.
- Haryanto, Ariel and Mandal, Summit K. (eds), Challenging Authoritarianism in Southeast Asia Comparing Indonesia and Malaysia. London: Routledge, 2003.

- Haryanto, Ariel. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. Oxon: Routledge, 2006.
- Haryanto, Ignatius, *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- _____. *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- _____. "Islam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for the Indonesian Middle Class," dalam *Indonesia*, No. 56, Tahun 1993.
- Hefner, Robert (eds). *Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*. Hawaii: University of Hawaii, 2001.
- _____. *Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Hawaii: Hawaii University, 2009.
- Hidayat. Dedy N., Menayang, Victor. dan Gazali, Effendy, "Political Communication in Indonesia in Three Era," dalam *Political Communication in Asia*, Newyork: Routledge, 2008.
- Hikam Muhammad AS. *Islam, Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 2000).
- Hill David T. and Sen Krishna. *The Internet in Indonesia's New Democracy*. London: Routledge, 2005.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture Of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 3 (The Gunpowder Empires and Moderns Times).Chicago: The Chicago University Press, 1974.
- Hough, Jerry F. *Changing Party Coalition: The Mistery of The Blue State and Red State Allignment*. Newyork: Agathon, 2006.
- http://gusdur.net/Berita/Detail/?id=473/hl=id/Wimar_Kalau_Orang_Benar_Pesan_nya_Tidak_Hilang. diakses pada tanggal 22 Mei 2010.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Simon and Schuster, 1996.
- _____. *Third Wave Democratization: Democratization in the Late 20th Century*, London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Hurgronje, C. Snouck, *Mekka in The Later Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning. The Moslimf of East-Indian Archipelago*. Leiden: Brill, 2007.
- Ibn Hisyam, Muhammad. *Shirat-u 'I-Nabawiyah*, Trans: Abdussalam M. Harun. Alfalalah Foundation, 2000.
- Ibn Ishak, Muhammad. *Al-Shirat-u 'I-Nabawiyah*. Muhakik: Ahmad Farid Al- Mazidi. Beirut: Dar-u 'I-Kutub Al-'ilmiyah, 2004/1424.

- Ibn Khaldun, Abdurrahman, Muqaddimah, Beirut: Darul Fikr,
- Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1988.
- Imawan, Riswandha, "Bola Liar Munas VII Golkar," Kompas, Senin, 20 Desember 2004. h. 4.
- ISAI. Pemilu 1997: Jajak Pendapat dan Analisa. Jakarta: ISAI, 1997.
- Jajak Pendapat Kompas, "Partai Golkar: Kenangan yang Menghanyutkan", Kompas, Selasa, 21 Juni 2005, h. 35.
- Jandt, Fredt. "Culture," dalam H. Dan O'Haire and William F. Eadi. 21st Century of Communication Handbook. California: Sage Reference Publication, 2009.
- Jarvis Sharon E dan Han Soo-Hye, "Political Communication" dalam H. Dan O'Haire and William F. Eadi 21st Century of Communication Handbook, California: Sage Reference Publication, 2009.
- Jenkins, David. Soeharto and His General. Singapore: Equinox Publishing, 2009.
- Johnson-Cartee, Karen S. and Copeland, Gary A. Strategi Political Communication: Rethinking Social Influence, Persuasion, and Propaganda. Oxford: Rowman and Littlefield, 2004.
- Johnston, Richard, et.al. The 2000 Presidential Election and The Foundation of Party Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Kahin, Audrey and Cribb, Robert. Historical Dictionary of Indonesia. 2nd edition. Lanham: Scarecrow Press, 2004.
- Kahin, George Mc T. Southeast Asia: A Testament. Newyork: RoutledgeCurzon, 2003.
- KH, Ramadhan dan Dwipayana, G. Autobiografi Soeharto: Tindakan, Ucapan dan Pikiran Saya. Jakarta: CiptaLamtoringung, 1995.
- Khiabany, Gholam. Iranian Media: The Paradox of Modernity. Oxon: Routledge, 2010.
- Kholil, Makrum. Dinamika Politik Islam – Golkar di Era Orde Baru; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Kingsbury, Damians. Power Politics and The Indonesian Military, (London: Routledge, 2003), h. 36-66.
- Knowles, Eric S and Linn, Jay A. Resistance and Persuasion. Newyork: LEA, 2004.
- Kompas, edisi 2004-2009
- Konijn Elly A. et.al. Mediated Interpersonal Communication. Newyork:

Routledge, 2008.

Kotler, Phillip dan Kotler Neil. "Effective Candidates, Campaign, and Causes," dalam Newman, Bruce I. Handbook of Political Marketing, California: sage publication, 1999.

KPU. Pemilu Legislatif 2004. Jakarta: KPU, 2004.

Kraidy, Marwan M. Reality Television and Arab Politics: Contention in Public Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Laffan, Michael Francis. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: the Umma Below the Wind. London: Routledge, 2003.

Lamoreux, Florence. Indonesia: A Global Study Handbook. California: ABC Clio, 2003.

Laporan Hasil Survey Indobarometer, "Mencari Pemimpin (Muda) Baru" Pelaksanaan Survey Juni 2008.

Laporan Hasil Survey LSI, "PartyID: Merasa Dekat dengan Partai Politik Tertentu...(%)", Februari 2009.

Laporan Hasil Survey LSI, Efek Calon Presiden, Februari 2009.

Liddle, R. William dan Mujani, Saiful. "Indonesia: The Rise of Susilo Bambang Yoedhoyono", Asian Survey, Vol. XLV, no.1, January/February, Bimonthly Review Of Contemporary Asian Affairs, University of California Press, 2005. h. 119-128.

"Indonesia: The Rise of Susilo Bambang Yoedhoyono", Asian Survey, Vol. XLV, no.1, January/February, Bimonthly Review Of Contemporary Asian Affairs, University of California Press, 2005. h. 119-128.

Liddle, R. William. Crafting Indonesia Democracy, International Conference: Toward Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problem and Prospect. Jakarta: LIPI, The Ford Foundation, Pustaka Mizan, 2001.

Pemilu-Pemilu Orde Baru; Pasang Surut Kekuasaan Politik, LP3ES: Jakarta, 1994.

"Year One of Yudhoyono-Kalla Duumvirate". Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 41, No.3. 2005.

Lilleker, Darren G. Key Concept in Political Communication, ondon: Sage Publication, 2006.

Lipmann, Walter. Opini Publik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Littlejohn, Stephen W. Theories of Human Communication, Albuquerque : New Mexico, 2002.

Lombard, Denys. Nusa Jawa-Silang Budaya. Jakarta: Gramedia, 2006.

Louis-Hunter, Helen. Soekarno and The Indonesia Coup: The Untold

- Story. Connecticut: Praeger, 2007.
- Lowe, Peter. *Contending with Nationalism and Communism: British Policy toward Southeast Asia 1945-1945*. Newyork: Palgrave Macmillan, 2009.
- Lubis, Sofyan. *30 Tahun Golkar*, Jakarta: DPP Golkar, 1994.
- Luhman, Niklas. *Ecological Communication*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- MacGeorge, Erina L. "Social Support" dalam H. Dan O'Haire and William F. Eadi. *21st Century of Communication Handbook*. California: Sage Reference Publication, 2009.
- Macmillan, Richard. *The British Occupation of Indonesia: 1945-1946, The Netherlands and The Indonesia Revolution*. London, Routledge, 2006.
- Majalah Gatra, 2004-2009
- Majalah Tempo, 1971-2009
- Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992*, Jakarta: KPG, 2008.
- Manan. Munafrizal, "Politik Gerontokrasi dan Partai Politik", Kompas, Sabtu, 7 Mei 2005, h. 43.
- Mann, Richard. *Fight for Democracy in Indonesia*. London: Gateway Books, 1999.
- Manning, Chris and Van Diermen, Peter. *Indonesian in Transition: Social Aspect of Reforms and Crises*. Singapore: Zed Books, 2000.
- Marham, Idrus. *Partai Golkar dan Dinamika Politik Multipartai*. Jakarta: AMPG Press, 2006.
- May, R.J. dan Selochan, Viberto. *The Military and Democracy in Asia and the Pacific*, Melbourne: ANU Press, 2004.
- McKibbin, Ross. *Parties and People: England 1914-1951* .Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Mcluhann, Marshal. *Understanding Media The Extension of Man*. London: Routledge, 2001.
- McNair, Brian. *Introduction to Political Communication*. London: Routledge, 2003.
- Messariss, Paul. *Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising*. California: Sage Publication, 1997.
- Michels, Robert. *Political Parties: A Sociological Tendencies of Modern Democracy*. Transaction Publishing, 1999.
- Millard, Frances. *Election, Parties and Representation in Post-Communist*

- Europe. Newyork: Palgrave Macmillan, 2004
- Miller, Michel Ann. *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta Security and Autonomy Polices in Aceh*. Newyork: Routledge, 2009.
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- Moloney. Kevin. *Rethinking Public Relation: PR Propaganda and Democracy*. London: Routledge, 2002.
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Bandung: RosdaKarya, 2008.
- Mujani, Saiful dan Liddle R. William. "Party, Personality, and Voters", dalam *Journal Of Democracy*, Vol. 21, Number 2 April 2010. h. 35-49.
- _____. "Voters and the new Indonesia Democracy," dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner, *Problem of democratization in Indonesia: Election, Institution and Society*, (Singapore: ISEAS, 2010), h. 80.
- Mujani, Saiful. " 2004: tahun SBY dan JK" dalam *Majalah Tempo*, 27 Desember 2004.
- _____. *Religious Demokrat: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Soeharto Indonesia*. Doctor Dissertation in Political Science, Ohio State University, 2003.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Hussain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung : Rosdakarya, 2004.
- Nainggolan, Bastian dan Setiawan, Bambang. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.
- Nimmo, Dan. eds. *Handbook of Political Communication*. Newyork: LEA Publisher, 1988.
- _____. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosdakarya, 2000.
- _____. *Komunikasi Politik: KoMunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- _____. *Political Communication and Public Opinion in America*. Newyork: LEA Publisher, 1997.
- Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1992 Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 1975.
- O'Haire, H Dan and William F. Eadi. "Communication as an Idea and

- Ideal.” dalam H. Dan O’Haire and William F. Eadi. 21st Century of Communication Handbook. California: Sage Reference Publication, 2009.
- Oates, Sarah, et.al. The Internet and Politics: Citizen, Voters and Activist. Oxon: Routledge, 2006.
- Packard, Vance. The Hidden Persuader. Newyork: IG Publishing, 2007.
- Patria, Nezar. “ Damai Aceh sebuah Penemuan” dalam Mereka Bicara Jusuf Kalla, Jakarta: NPCI, 2009.
- Pelras, Christian. Manusia Bugis, Jakarta: Penerbit Nalar, 2006.
- Pepinsky, Thomas. B. Economic Crises and The Breakdown of uthoritarian, New York: Cambridge University Press, 2009.
- Pidato Petanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 1998-2004 disampaikan pada Musyawarah Nasional VII Partai Golongan Karya, Desember 2004.
- Piliang, Indra Jaya. Meniti Ombak, Memoar Tiga Kekalahan, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.
- Porter, Daniel. S. Managing Politics and Islam in Indonesia, London: Routledge Curzon, 2002.
- Pour, Julius. Profil Prajurit Pejuang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. Prisma. Demokratisasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Putnam, Robert D, et.al. Bureaucrats and Politician in Western Democracies. Cambridge: Harvard University, 1981.
- Pye, Lucien W. and Jackson, Karl D. Political Communication in New Order, Newyork: Princeton University Press, 1984.
- Qodari Muhammad, “Kembalinya Tradisi Golkar”, dalam Kompas, Selasa 21 Desember 2004. h. 4.
- Rabasa, Angel and Chalk, Peter. Indonesia’s Transformation and The Stability of Southeast Asia, Rand Project Air Force.
- _____ and Haseman, John. The Military and Democracy in Indonesia: Challenges Politics and Power. Rand Project Air Force, 2002.
- Rahman, Aulia Aman. Citra Khalayak Partai Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004. Jakarta: PSAP, 2006.
- Ramage, Douglas E. Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi, Mata Bangsa: Yogyakarta, 2002.
- _____ Politics in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Toleration. London: Routledge, 1995.

- Reeve, David. Golkar of Indonesia: an Alternative to the Party System. Singapore: Oxford University Press, 1985.
- Ricklefs, Merle C. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2001.
- _____ Sejarah Indonesia Modern Sejak Indonesia Modern sejak tahun 1200. Jakarta: Penerbit Serambi, 2009.
- Robinson, Kathryn. Gender, Islam and Democracy in Indonesia. Oxon: Routledge, 2009.
- Robinson, Richard and Hadiz, Vedi R. Reorganising Power in Indonesia: The Politics Of in an Age Market. London:Routledge, 2004.
- Romli. Lili, "Partai Islam dan Pemilu 2009" dalam Jurnal Poelitika, vol. 5. No. 10 thn. 2009, h. 583-598.
- Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Insititute Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008.
- Rourke, Kevin O'. Reformasi: The Struggle For Power in Post-Soeharto Indonesia, NewSouth Wales: Allen & Unwin, 2002.
- Ruben, Brent D. dan Stewart Lea P. Communication and Human Behaviour,5th edition, Newyork Pearson, 2006.
- Rush, Michael and Althoff, Phillip. Pengantar Sosiologi Politik, (terj. Drs. Kartini Kartono), Jakarta: CV Rajawali : 1983.
- Said, Salim. Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, Jakarta : Aksara Karunia, 2002.
- _____ Genesis Of Power: Jenderal Soedirman and Indonesian Military In Politics 1945-1949. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- _____ Militer dan Politik Indonesia: Dulu, Kini dan Kelak. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- _____ Tumbuh dan Dwifungsi; Perkembangan Pemikiran Politik Miltier Indonesia 1958 – 2000, Jakarta : Aksara Karunia, 2002.
- Salim Arskal. Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Indonesia.Hawai: University of Hawai Press, 2008.
- Samples, John. The Fallacy of Campaign Finance Reform. Chicago: Chicago University, 2006.
- Saptono Irawan. Media,Pemilu dan Politik: kecenderungan media dalam politik 2009. Jakarta:ISAI, 2010.
- Schaap, Andrew. Politics of Reconciliation. London: Routledge, 2005.
- Schwartz, Adam, A Nation in Waiting, Newyork: Westview Press, 2000.

- Seib, Phillip, eds. *New Media and New Middle East*. Newyork: Palgrave Macmillan, 2007.
- Silalahi, Harry Tjan. "Terobosan Wapres Jusuf Kalla", *Kompas* Senin 22 Agustus 2005, h. 4.
- Spitzberg, Brian H. *The Dark Side of Close Relationship*. Newyork: LEA, 1998. *Suara Karya*, edisi 2004-2009
- Subangun, Emanuel, *Negara dan Anarkhi*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Suhartono, "Golkar Jaga Keutuhan Pemerintah" dalam *Harian Kompas*, 25 oktober 2008.
- Sukardi Rinakit, "Politik 'no free lunch'", *Kompas*, Sabtu, 07 Mei 2005. h. 44. Suruji, A. (eds). *Jusuf Kalla the "Real" President*. Jakarta: JK untuk Indonesia, 2009.
- Suryadinata, Leo. *Golkar, Mlliter dan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Susilo, Taufik Adi. *Membaca JK: Biografi Singkat Jusuf Kalla*. Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2010.
- Swanson, David *Political Communication in a new Era*, Newyork: Routledge, 2008.
- Takwien Bagus dan Kariem Niniek L., " M. Jusuf Kalla: pengusaha yang dididik jadi pemimpin yang realistis," dimuat dalam *Kompas*, Kamis 24 April 2004.
- Tandjung, Akbar. *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tibbi, Bassam. *Islam Between Culture and Politics*. Newyork: Palgrave Macmillan, 2001.
- _____ *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad*. Newyork: Routledge, 2009.
- Ting-Toomey, Stella. *Communicating Across Cultures*. New York: Guilford Press, 1999.
- Tomasello, Michael. *The Origin of Human Communication*. Massachussets: a Bradford Book, The MIT Press, 2008.
- Dirk. "The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tandjung", dalam dalam *Jurnal SEAP Indonesia*. No. 81 April 2006. h. 1-22.
- _____ *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. Oxon: Routledge, 2008.
- Van Der Molen, Henk T. and Gramsbergen-Hoogland, Yvone. *Communication in Organization: Basic Skill and Conversation*

- Models. Newyork: Psychology Press, 2005.
- Van Dijk, Kees. A Country in Despair: Indonesia Between 1997 and 2000. Jakarta: KITLV, 2001.
- Van Kroef, J.M. Indonesia After Soekarno. Vancouver: British Columbia University Press, 1971
- Varma, SP. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Vatikiotis, Michael R.J. Indonesian Politics under Soeharto: The Rise and Fall of The New Order, London: Routledge, 1998.
- Vermonte Phillip J, "the Tale of Two Incumbent in the 2009 Presidential Election" dalam THE INDONESIA QUARTERLY, Vol. 37, No. 3. 2009. h 306-330.
- Vickers, Adriaan. A History Of Modern Indonesia. Newyork: Cambridge University Press, 2005.
- Voltmer, Katrin. Mass Media and Political Communication in New Democracies. Newyork: Routledge, 2006.
- Williams, Frederick. The New Communication, 2nd edition. California: Wadsworth Publishing Company, 1989.
- Wolfsfeld, Gadi. Media and Path to Peace. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Wood Michael. Official History in Modern Indonesia. Leiden: Brill, 2005.
- Woodward, Mark R. Islam Jawa: Antara Kesalahan Normatif dan Ritual. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- www.indobarometer.or.id
- www.kpu.go.id
- www.lp3es.or.id
- www.lsi.or.id
- www.suarakaryaonline.com
- Yusufpati, Miftah. H. HM Soeharto; Membangun Citra Islam. Aisamark: Jakarta, 2007.
- Zakaria, A. Syamsul, Indra Muchlis Adnan. KOnvensi Nasional Pemilihan Presiden: perbandingan Partai Golkar di Indonesia dan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara, 2004.
- Zulkifli. The Struggle of The Shi'is in Indonesia. Disertasi Doktor di Universitas Leiden diujikan tanggal 24 September 2009.

Wawancara

Wawancara Aburizal Bakrie, Agustus 2010.

Wawancara Agung Laksono, Agustus 2010.

Wawancara Akbar Tandjung, Juli 2010.

Wawancara Andi Mattalata, Juli 2010.

Wawancara Bachtiar Ali, Juli 2010.

Wawancara Fahmi Idris Juli 2010.

Wawancara Jusuf Kalla, Juli 2010.

Wawancara Priyo Budi Santoso, Juli dan Agustus 2010.

Wawancara Rully Chairul Azwar, Juli 2010.

Wawancara Soemarsono Juli 2010 .

Wawancara Surya Paloh Juli 2010.

Wawancara Syamsu Muarif Juli 2010.

Wawancara Theo L. Sambuaga, Juli 2010.

Wawancara Yuddy Chrisnandi, Juli 2010.

Indeks

A

A.A. Baramuli
Abdul Gafur
Abdul Kadir Besar
Abdurrahman Wahid
 Gus Dur
ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar)
ABRI
Aburizal Bakrie
AC Nielsen
Aceh
 perdamaian Aceh
 Tsunami
 Helsinki
AD/ART
Agung Laksono
Ahmad Mubarak
AKUI.
Ali Moertopo
Al-Irsyad.
Al-Jami'ah al Washliyah
Aljazair
Al-Qaida
Alwi Shihab
Amandemen
Amien Rais
Amino Gondo Hutomo
Amir Machmud
AMPG
AMPI
Andi Mattalata
Angkatan Darat
Ansor
Anwar Rashid
APBN
Aristoteles
Aulia Aman Rachman
Azas Tunggal

B

B.J. Habibie
 Habibie

Babinsa (Bintara Pembina Desa)
Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS)
Badan Informasi dan Komunikasi (BIK)
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Badan Pengembang Potensi Karya
Badan Pengendali Pemilihan Umum Bagus Takwin
Bahtiar Effendi Bali
Bangka Belitung
Bank Mu'amalat Indonesia
Bappilu
Barisan Nasional
BBM
Benazir Bhutto
Benny Moerdani
Berita Yudha
BI
black campaign
BLT
Boediono Boileau
Bomer Pasaribu
BPPK
BPPT
BRI
 BRIngin Life
Brian McNair
Bugis
Buloggate
BUMN

C

Cicero
Citra
CSIS

D

Dan Nimmo
Deideologisasi
Deklarasi Ciganjur
Deliar Noer
Departemen Penerangan
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
Dewan Pembina
Diklat Instruktur
Diklat Karsinal

Dirk Tomsa
Djuhartono
DKI
Dominggus Nanlohy
DPD
DPP
DPR
DPRS
DPT
dwifungsi ABRI

E

Efek
Endriartono Sutanto
Era Saudagar
Erman Suparno
etnis China

F

Fadel Muhammad
Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)
Festival Istiqlal
Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ)
Forum Komunikasi Tani Nelayan Karya Bangsa (FKTNKB)
Forum Kota (Forkot)

G

Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam
GAM
Gasbindo
GBHN
Geertz
Gerakan 30 September 1965
Ginandjar Kartasasmita
Golkar
 Golkar Putih
 Golongan Karya
 Golongan Karya ABRI
 Golongan Karya Non-ABRI
 Fraksi Golkar
 Fraksi Karya Pembangunan
 Fraksi Partai Golkar
 Partai Golkar

Gunawan Sumadiningrat

H

Habib Muhammad Luthfi

HAM

Hamzah Haz

Hanura

Harmoko

Harold Lassweld

Hasta Karya

Hasyim Muzadi

Herawati Boediono

Herbert Feith

Hidayat Nur Wahid

Higley dan Burton

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

HMI

HSBI

I

ICMI

IHSG

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

ikatan hubungan

Iluni

Imam Pratiknjo

IMF

Petahana

Incumbent

Indeks Harga Saham Gabungan

Indra Bambang Utoyo

Indra Jaya Piliang

Institut Lembang Sembilan

Interpersonal

IPTN

Iramasuka Nusantara

Islam

Islam 'Yes', Partai Islam 'No'

Islam modernis

Islam Modernis

Islam tradisional

Kompilasi Hukum Islam

Partai Islam

syariat Islam
politik Islam
partai politik Islam
Wanita Islam
Muhammad SAW
Nabi Muhammad

J

Jakarta
Jaksa Agung
Jarves dan Han
JK. Tumakaka
Juanda Kartawinata
Jusuf Kalla
JK
Haji Kalla
Hajjah Atthirah
Jusuf Kalla dan Wiranto
Jusuf Kalla-Wiranto
Kalla
NV Haji Kalla

K

Kabinet Koalisi
Kader Fungsional
Kader Struktural
Kadinda
kajian interdisiplin
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
KAMI
kampanye negatif
kampanye politik
Katholik
Kaukus Iramasuka
KB
KBIM
Kejawen
Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar (KIMPG)
Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1964
Kesatuan Perempuan Partai Golkar
Kiai Maktum Hannan
Kiai Muzakki Syah
KINO

KKN
KKN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Komunikasikan (khalayak)
komunikator
Komunikator
komunitas politik
Konstituante
konversi energi
KOSGORO
KOWANI
KPK
KPPG
Kristen
KTA

L

Lembaga Pemenangan Pemilu
Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP)
) Lembaga Pendidikan Kader (LPK)
Letkol Untung
Liem Bian Kie
Liem Bian Koen
Lili Romli
LIPI
LP3ES
LSI
Lukman Eddy

M

M. Rozi Munir
M.S. Mintaredja
MA
Mahadi Sinambela
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Dakwah Islamiyah
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Makrum Khalil
Malaysia
manipulasi media
Marwah Daud Ibrahim
Marzuki Darusman

Mas Isman
Masyumi
Maurice Duverger
Mega-Buwono
Mega-Hasyim
Megawati
Megawati Soekarnoputri
Megawati-Hamzah Haz
MK
MKGR
Mochtar Lubis
Mohammad Natsir
monoloyalitas
MPR
MPR/DPR
Muhammadiyah
Munas
Munaslub
Musda

N

Nahdhatul Anwar
Nahdhatul Ulama
Nahdhatul Wathan
Nasionalis
Niniek L. Kariem
Non-KTA
NU
Nurcholish Madjid

O

Oetojo Usman
OKK
Opini publik
Orde Baru
Orde Lama
Orientasi Fugnsionaris
Otorita Batam

P

Pakistan
PAL
Pancasila

Pandu Kartawiguna

Panitia Sembilan

Papua

Paradigma Baru

Parliamentary threshold

Partai

Parmusi

Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional

Partai Demokrat

Partai Keadilan Persatuan

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Partai Persatuan Pembangunan

PAS

Paskah Suzetta

Paul Lazarsfeld

PBNU

PDI Suryadi

PDI-Perjuangan

Pelajar islam Indonesia (PII)

pemilih mengambang

Pemilu

Pemilu 1955

Pemilu 1971

Pemilu 1977

Pemilu 1982

Pemilu 1987

Pemilu 1992

Pemilu 1997

Pemilu 1999

Pemilu 2004

Pemilu 2009

Pemilu Presiden

Pendidikan Moral Pancasila

Peraturan Organisasi Nomor: PO-01/DPP/GOLKAR/III/1999

Peraturan Pemerintah No. 6/1970

Peristiwa Tanjung Priok

Permendagri No. 12 Tahun 1969

Persatuan Umat Islam

Perti

Pesan

petahana

Petisi 50

PGRI
Piagam Madinah
Pilkada
PITI
PKI
PKI
PNI
PNS
PORBISI
Poros Tengah
PPP
PPP Reformasi
PPTI
Prabowo Subianto
Pramono Anung
PRD
Priyo Budi Santosa
Propaganda
PSII
public enemy

R

Rachmat Witoelar
Rahman Tolleng
Rakernas
Rapimnas
Rapimnassus
Reform Institute
Resolusi PBB
Revolusi Mei 1998
rezim militer
RH Sugandhi
RI
Ricklef
Robert W. Hefner
Roem
Rully Chairul Azwar
RUU Perkawinan
RUU Politik
Ryamizard Ryacudu

S

S. Sukowati
Saifullah Yusuf

Saluran
santri modernis
santri tradisional
SARA
SATMINKAL
Saudi Arabia
SBY
SDK
Sekber Golkar
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Shalahuddin
Sholihin GP
SI MPR
Sidang Istimewa
Sidang Istimewa
Sidang Umum
sistem database kader
Slamet Effendy Yusuf
SNII
Soedharmono
Soeharto
 Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila
 Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab)
Soekarno
Soemarsono
Soepomo
Soeprapto Sokowati
Soetomo Honggowongso
SOKSI.
Solahuddin Wahid
Sri Rejeki
Sri Sultan Hamengku Buwono X
SU
Suara Karya
Sudjono Humardhani
Suhardiman
Sulasikin Moerpratomo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Survey
Surya Paloh
Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
Sutradara Ginting
Syafii Ma'arif
Syafuruddin Prawiranegara

Syamsul Mu'arif

T

TAP MPRS
Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968
The Golkar Way
the real president
tiga program utama
Trisukses
Timor Timur
TNI
TNI AD
TNI/Polri
Training of Trainers

U

UKM
UMNO
Universitas Brawijaya
Universitas Gadjah Mada
Universitas Indonesia
UU Nomor 10 tahun 2008
UU Nomor 15 Tahun 1968
UU Pemilu
UU Peradilan Agama
UU Politik
UUD 1945

W

Wahhabi
Wanita ABRI
Wawasan Kebangsaan
Wawasan Nusantara
Weber
William Liddle
Wiranto
Wiranto-Solahuddin Wahid

Y

Yorris TH Raweyai
Yuddy Chrisnandi
Yudhoyono

Yunus Yosfiah
Yusuf Abdullah Puar

Z

Zarkasi Effendi